Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan **ISSN 1411 - 0393**
Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

DETERMINAN STRUKTUR MODAL DAN NILAI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PASCA UU NOMOR 4 TAHUN 2009

Sumani
sumanisumani69@gmail.com
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

ABSTRACT

The aim of research is to know the effect of profitability, company size, growth, business risks, managerial ownership and institutional ownership on the capital structure as well as the influence of capital structure to value mining companies after the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineral and coal's Mining. The research carried out to test the hypothesis based on theoretical and empirical studies. The study population is a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange, with a population of 36 company members. The sampling method was using purposive sampling techniques and acquired 11 companies in the study period of six years, from 2009 to 2014. Multiple and simple regression analysis techniques were used according to the research objectives to be achieved. Regression models of this study were not violation classic assumption which includes multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity. Hypothesis testing results showed the variables of profitability, business risk, managerial ownership and institutional ownership have negative effect on the mining company's capital structure. However, company size, growth and asset structure not significant on the capital structure. On the other side, Capital structure significantly negative influence to the value of mining companies after the implementation of Law No. 4 of 2009.

Key words: Capital Structure, Value of the Firms, Mining Companies

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap struktur modal serta pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pertambangan pasca penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian merupakan penelitian hypothesis testing, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesis berdasarkan kajian teoritis dan empiris. Populasi penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan anggota populasi berjumlah 36 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 11 perusahaan dengan periode penelitian selama 6 (enam) tahun, mulai 2009 sampai 2014. Teknik analisis dengan regresi berganda dan sederhana sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Uji asumsi klasik semua terbebas dari multikolinearitas, otokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, risiko bisnis, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional, masing-masing sebagai berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan pertambangan. Namun variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan dan struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan pasca penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009.

Kata kunci: Struktur Modal, Nilai Perusahaan, Perusahaan pertambangan.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan pemegang saham dipengaruhi oleh keputusan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Manajer keuangan sebagai pihak yang bertanggung jawab, memiliki peran penting dalam menentukan keputusan keuangan. Salah satu keputusan penting yang dihadapi

manajer keuangan yaitu keputusan pendanaan atau penentuan struktur modal. Besar kecilnya dana yang dibutuhkan setiap perusahaan tidaklah sama, disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Brealey *et al.* (2007: 355) mengungkapkan struktur modal merupakan bauran (proporsi) pendanaan utang jangka panjang dan pendanaan ekuitas.

Perusahaan yang menggunakan utang tanpa memahami kondisi finansialnya akan menimbulkan kewajiban yang dapat meningkatkan beban perusahaan tersebut. Kemungkinan yang paling buruk dari kesalahan pengambilan keputusan dalam pendanaan dengan utang yaitu terjadinya kebangkrutan, sedangkan jika manajer menggunakan ekuitas (menerbitkan saham), dana yang diperoleh dari saham sangatlah besar sehingga memungkinkan perusahaan melakukan investasi dengan nilai yang besar juga. Gitman dan Zutter (2012:535), struktur modal optimum tercapai apabila mengandung biaya modal (*cost of capital*) yang minimum. Brigham dan Houston (2007:450) juga mengungkapkan struktur modal yang optimal ialah struktur modal yang mampu memaksimumkan harga saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Titman dan Wessels (1988) terhadap 469 perusahaan manufaktur di Amerika pada tahun 1974-1982. Titman dan Wessels menyimpulkan risiko bisnis, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi rasio utang perusahaan. Hasil penelitian Krishnan dan Moyers (1997), Deesomsak (2004), Eriotis (2007), serta Hossain dan Ali (2012) juga menyimpulkan profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan risiko bisnis tidak memengaruhi keputusan pendanaan. Namun hasil penelitian Wald (1999) menyimpulkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaaan memengaruhi rasio utang perusahaan. Penelitian Michaelas *et al*. (1999), Huang dan Song (2006) serta Fauzi (2013) juga menyimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aset, risiko bisnis, dan kepemilikan manajerial mempengaruhi struktur modal.

Penelitian mengenai struktur modal di negara berkembang dilakukan oleh Booth *et al.* (2001) yaitu di negara India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Turki, Zimbabwe, Meksiko, Brazil, Yordania, dan Korea. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa struktur aset, risiko bisnis, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memengaruhi pengambilan keputusan pendanaan di beberapa perusahaan yang ada di negara berkembang. Hasil penelitian Chen (2004), Thippayana (2014), dan Memon *et al.* (2015) juga menyimpulkan profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan risiko bisnis memengaruhi keputusan pendanaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Saleem *et al.* (2013) pada perusahaan minyak dan gas di *Karachi Stock Exchange* pada tahun 2005-2009 menyimpulkan bahwa struktur aset, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas tidak memengaruhi struktur modal. Hasil penelitian Ruslim (2009), Yeniatie dan Destriana (2010), serta Savitri *et al.* (2012) juga menyimpulkan bahwa profitabilitas, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis tidak memengaruhi struktur modal.

Penelitian ini dilakukan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2014. Karakteristik sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi menyebabkan sektor ini dapat memberikan *return* yang tinggi. Selain itu peluang pertumbuhan yang masih terbuka membuat ekspektasi meningkat, karena investasi yang dilakukan diharapkan mendapat *return* yang lebih tinggi di masa depan. Namun sifat dan karakteristik industri pertambangan yang memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan berisiko, menjadikan masalah pendanaan sebagai isu utama dalam pengembangan perusahaan, (Hadiyanto dan Tayana, 2010).

Keputusan pendanaan khususnya pada sektor pertambangan, pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang di Indonesia membangun pabrik pengolahan dan

pemurnian hasil tambang (*smelter*) yang pastinya memerlukan modal yang tinggi. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjelaskan pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi dan pemegang kontrak karya wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. Artinya tahun 2014 merupakan batas waktu maksimal pembangunan *smelter* oleh perusahaan pertambangan. Menindak-lanjuti amanat UU No.4 Tahun 2009, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014. Adanya proses pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri akan memberikan nilai tambah yang lebih untuk setiap jenis mineral. Pemerintah mengungkapkan untuk membangun *smelter* dibutuhkan dana minimal US$ 1,2-2 miliar. Untuk itu pemerintah menyarankan pengusaha pertambangan dapat mengajukan pinjaman dari perbankan asing dan nasional untuk membangun *smelter*, (Iwan, http://www.kemenperin.go.id).

Pembangunan *smelter* ini dilatar belakangi oleh produksi bijih mentah (*raw material*) hasil pertambangan Indonesia yang selalu diekspor keluar negeri, sedangkan pabrik pemurnian dan pengolahannya ada di negara tujuan ekspor. Hal ini tentunya merugikan Indonesia karena nilai *raw material* lebih rendah dibandingkan material yang sudah diolah dengan kualitas yang lebih tinggi. Kondisi inilah yang membuat pemerintah merancang adanya tahap lanjutan terhadap hasil pertambangan sebelum diekspor ke luar negeri. Pembangunan *smelter*, perusahaan tambang memerlukan modal yang dapat bersumber dari dana internal atau eksternal. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan sumber dana yang digunakan dalam menentukan struktur modal yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan, sehingga diharapkan keputusan struktur modal yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, risiko bisnis, strukur asset, kepemilikan manajerial dan keputusan institusional berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009, (2) apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan pasca UU Nomor 4 Tahun 2009?. Tujuan penelitian meliputi: (1) mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, risiko bisnis, strukur asset, kepemilikan manajerial dan keputusan institusional terhadap struktur modal perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009, (2) mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009.

TINJAUAN TEORETIS

Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan ialah memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (Van Horne, 2002:3). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan, karena dengan memaksimalkann nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Menurut Brigham dan Houston (2007: 430), nilai perusahaan merupakan *present value* dari *free cash flow* yang diharapkan dimasa depan. *Present value* merupakan nilai sekarang dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham di masa depan. Brigham dan Houston (2007: 30) juga mengungkapkan tujuan utama manajemen yaitu memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham yang tercermin pada pemaksimuman harga sahamnya. Harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli diartikan

sebagai harga pasar atas perusahaan itu sendiri sehingga harga pasar berarti harga yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap lembar saham perusahaan.

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik saham karena nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi juga akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun pada prospek perusahaan di masa depan sehingga nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga saham. Anshori dan Denica (2010) serta Wijaya dan Wibawa (2010) mengungkapkan nilai perusahaan dipengaruhi oleh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen.

Teori Struktur Modal

Menurut Brigham dan Houston (2007: 331), struktur modal merupakan kumpulan dari utang, saham preferen dan saham biasa, sedangkan menurut Gitman dan Zutter (2012:508), struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara utang jangka panjang dan ekuitas. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan bauran pendanaan yang berasal dari utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan untuk operasional perusahaan.

Teori Miller dan Modigliani (Model MM Tanpa Pajak)

Teori Miller dan Modigliani atau yang dikenal dengan teori MM merupakan dasar dari teori keuangan modern. Modigliani dan Miller (1958) menjelaskan bagaimana hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan.

Trade Off Theory

Teori *trade off* menentukan struktur modal optimal menggunakan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (*agency costs*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*), tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan *symmetric information* sebagai penyeimbang dan manfaat penggunaan utang. Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak (*tax shields*) mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan (*costs of financial distress*). Teori *trade off* memiliki implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka *trade off* antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. (Brigham dan Houston, 2007).

Teori Biaya Keagenan (*Agency Cost Theory)*

Teori yang memperhitungkan biaya keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut menegaskan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh insentif dan perilaku dari pembuat keputusan (pihak manajemen). Jensen dan Meckling mengemukakan adanya dua potensi konflik, yaitu konflik antara pemegang saham dengan kreditur, dan konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen. (Harris dan Raviv, 1999)

Teori *Signalling*

Ross (1977) menyatakan ketika perusahaan menerbitkan utang baru, menjadi tanda atau sinyal bagi pemegang saham dan investor tentang prospek perusahaan di masa depan. Teori *signalling* ini muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi, karena kondisi asimetris informasi ada dari waktu ke waktu, perusahaan harus menjaga kapasitas cadangan pinjaman dengan menjaga tingkat pinjaman yang rendah. Adanya cadangan ini memungkinkan manajer untuk mengambil keuntungan dari kesempatan investasi, tanpa harus menjual saham pada harga rendah sehingga akan mengirimkan sinyal yang sangat mempengaruhi harga saham.

Myers dan Majluf (1984) juga membuat model *signalling* yang merupakan kombinasi dari keputusan investasi dan keputus-

an pendanaan. Manajer diasumsikan mengetahui nilai "sebenarnya" perusahaan di masa depan. Disamping itu, manajer juga diasumsikan bertindak sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham lama, yaitu orang yang memiliki saham diperusahaan dan berhak atas hak pengambilan suaran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Teori *Pecking Order*

Myers (1984) menyatakan terdapat semacam tata urutan (*pecking order*) bagi perusahaan dalam menggunakan modal. Berdasarkan teori *pecking order* perusahaan akan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Struktur Modal

Brigham dan Houston (2007:463) mengungkapkan penentuan keputusan struktur modal dipengaruhi oleh 12 faktor yaitu penjualan, struktur aset, *leverage* operasi, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, pajak, kontrol, perilaku manajemen, kreditur dan peringkat nilainya, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, serta fleksibilitas finansial. Namun pada penelitian ini, variabel yang digunakan dalam menganalisis struktur modal dan nilai perusahaan ialah profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, struktur aset, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan terus dikaji oleh peneliti di beberapa negara. Penelitian terbaru dilakukan oleh Memon *et al.* (2015) pada 143 perusahaan publik di Pakistan tahun 2001-2012. Hasil penelitiannya mengungkapkan profitabilitas, struktur aset, dan ukuran perusahaan memengaruhi utang perusahaan. Namun kekurangan penelitian ini terletak pada alat analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan regresi *pooling* dengan dua metode yaitu *common constant method* dan *fixed effect method*. Selain tidak ada uji model terhadap penggunaan kedua metode tersebut, pada regresi *pooling* hanya disarankan menggunakan satu metode saja.

Yuliani *et al.* (2014) pada sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2011. Alat analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur aset dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selain itu struktur modal juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, hal ini dikarenakan ketersediaan dana internal tidak mampu memprediksi besarnya kebutuhan pendanaan perusahaan.

Utomo dan Djumahir (2011) meneliti struktur modal pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2005-2012. Alat analisis yang digunakan ialah *two stage least square* (2SLS). Hasil penelitiannya menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Struktur aset dan risiko bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Namun struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan selama periode pengamatan, perusahaan masih dalam tahap restrukturisasi sehingga memerlukan banyak dana.

Yeniatie dan Destriana (2010) meneliti kebijakan utang pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. Hasil penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional, struktur aset, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang, sedangkan kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis tidak memengaruhi kebijakan utang.

Suteja dan Manihuruk (2009) meneliti struktur modal pada perusahaan publik di Indonesia tahun 1994-2005. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi *pooling* dengan metode *fixed effect*. Hasil penelitiannya menyimpulkan risiko bisnis, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memengaruhi struktur modal. Selain itu kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, dan struktur modal memengaruhi nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak memengaruhi nilai perusahaan.

De Jong *et al.* (2008) meneliti struktur modal pada perusahaan yang ada di 42 negara selama tahun 1997-2001. Alat analisis yang digunakan ialah regresi berganda. Hasil penelitiannya menyimpulkan struktur aset, ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap teori struktur modal konvensional. Kekurangan dari penelitian ini ialah belum dapat menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh lebih dominan bagi keputusan struktur modal di setiap negara.

Huang dan Song (2006) meneliti struktur modal pada perusahaan publik di Cina selama tahun 2000. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi berganda. Hasil penelitiannya menyimpulkan ukuran perusahaan, struktur aset, risiko bisnis, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap struktur modal. Selain itu profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan publik di Cina.

Hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini, meliputi: (1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, (2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, (3) Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, (4) Risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal, (5) Struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal, (6) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap struktur modal, (7) Kepemilikan intitusional berpengaruh negatif terhadap struktur modal, (8) Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Rerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris yang telah diuraikan sebelumnya maka rerangka konseptual penelitian ini terdapat dalam gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa: kesejahteraan pemegang saham (nilai perusahaan) salah satunya dipengaruhi oleh keputusan pendanaan atau penentuan struktur modal. Struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, struktur aset, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. (Brigham dan Houston, 2007).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *hypothesis testing*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesis berdasarkan kajian teoritis dan empiris, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Gambaran Populasi

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dengan anggota populasi berjumlah 36 perusahaan. Sub sektor industri pertambangan, meliputi: Batu Bara, Minyak dan Gas Bumi, Logam dan Mineral, dan Batu-Batuan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel perusahaan ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel penelitian sebanyak 11 perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bersumber dari laporan tahunan serta laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan di BEI selama tahun 2009-2014. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode dokumentasi.

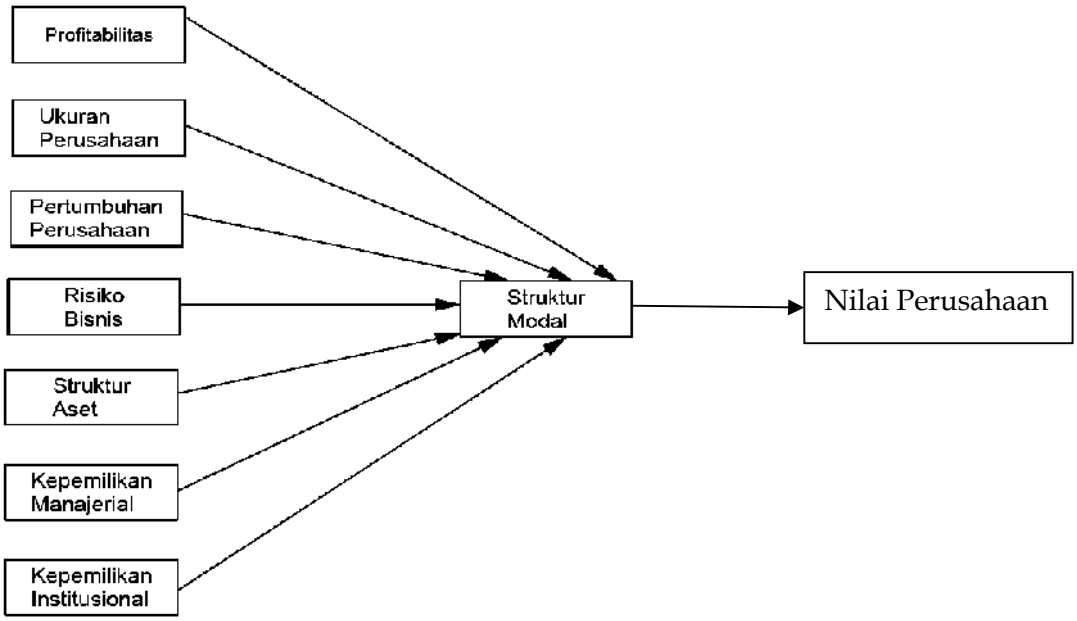

Gambar 1
Rerangka Konseptual Penelitian

Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: struktur modal dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, struktur asset, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.

Struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara utang jangka panjang dan ekuitas. Proksi yang digunakan untuk mengukur struktur modal yaitu *debt to asset ratio* (DAR) Wald (1999). Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham, dimana harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Skala yang digunakan adalah skala rasio.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan dari operasional perusahaan selama periode tertentu (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Ukuran perusahaan merupakan skala dalam menilai besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar (Ferry dan Jones, 1979).

Pertumbuhan perusahaan merupakan kenaikkan jumlah penjualan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tiap periode tertentu (Kesuma, 2009). Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Risiko bisnis merupakan risiko yang berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian aktiva dari suatu perusahaan di masa depan (Brigham dan Houston, 2007: 439). Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Struktur aset merupakan perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva (Weston dan Brigham, 2005: 175). Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Kepemilikan manajerial ialah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan yakni direktur dan komisaris (Wahidahwati, 2002). Mahadwarta dan Hartono (2002) menemukan bahwa kecenderungan data di Indonesia bersifat binomial (ada atau tidak ada) sehingga hal

ini mendukung digunakannya variabel *dummy*. D = 1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, sedangkan D=0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial.

Kepemilikan institutional merupakan persentase kepemilikan saham pihak eksternal (non manajemen) atas saham perusahaan seperti pihak bank, asuransi, atau institusi lain (Wahidahwati, 2002). Agrawal dan Knouber (1996) menggunakan kepemilikan *blockholder* untuk mengukur kepemilikan institusional. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Teknik Analisis Data

Uji Normalitas Data

Sebelum melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan pengujian normalitas data. Ghozali (2011: 29-32) menjelaskan uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model penelitian yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Deteksi normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov.*

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan adanya hubungan linier diantara beberapa atau semua variabel independen pada model penelitian. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada model dilakukan pendeteksian terlebih dahulu, kemudian jika multikolinearitas terjadi, barulah dilakukan tindakan untuk menghilangkan efek dari multikolinearitas. (Gujarati, 2004: 342-363)

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang diurutkan menurut deret waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Uji ini bertujuan untuk menguji model penelitian terdapat korelasi antara *disturbance term* suatu observasi dengan observasi lainnya. (Gujarati, 2004: 442-469)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual tiap observasi.

Analisis Regresi Berganda

$DEBT_{it} = b_0 - b_1\ PROFT_{it} + b_2\ SIZE_{it} + b_3\ GROWTH_{it} - b_4\ BRISK_{it} + b_5\ ASSET_{it} - b_6\ MOWN_{it} - b_7\ INST_{it} + e_{it}$

$VALUE_{it} = b_0 + b_1\ DEBT_{it} + e_{it}$

Formulasi variabel penelitian, yaitu:

a. Profitabilitas menggunakan proksi *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva.
b. Ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma natural dari total aset.
c. Pertumbuhan perusahaan menggunakan proksi pertumbuhan penjualan, yaitu rasio antara penjualan periode t dikurangi penjualan t-1 dengan penjualan t-1
d. Risiko laba menggunakan proksi volatilitas pendapatan, yaitu: *standart deviation of* ROA
e. Strukur asset, yaitu rasio antara aktiva tetap dengan total aktiva
f. Kepemilikan manajerial menggunakan variabel *dummy*, yaitu: D = 1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dan D = 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial
g. Kepemilikan institusional, diukur dengan rasio antara *institutional shares* dan *blockholder shares* dengan *number of share outstanding*.
h. Struktur modal menggunakan proksi *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio antara hutang jangka panjang dengan total aset
i. Nilai Perusahaan menggunakan proksi *Price Earning Ratio* (PER), yaitu rasio antara harga pasar per lembar saham biasa dengan laba per lembar saham.

Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan uji asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktualnya, yang dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai signifikansi parsial (t) dan koefisien determinasinya (R^2) (Ghozali, 2011).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas setelah dilakukan transformasi data. *P-value* variabel nilai perusahaan (LnVALUE) sebesar 0,496 lebih tinggi dari taraf signifikansi 5% (0,496 > 0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan H_0 ditolak yang berarti residual variabel LnVALUE berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen lebih dari 0,10, sedangkan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan H_0 ditolak yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen pada Model 1.

Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson sebesar 1,443, artinya nilai tersebut lebih tinggi dari nilai batas bawah (dL) sebesar 1,438, namun lebih rendah dari nilai batas atas (dU) sebesar 1,832 sehingga dapat disimpulkan tidak ada keputusan pada model penelitian. Dengan demikian, dapat diasumsikan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan *p-value* semua variabel lebih tinggi dari tingkat signifikansi 5% (0,065 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak yang berarti tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda dan Sederhana

Tujuan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan strukturalnya sebagai berikut. (tabel 1).

Keterangan: PROFT = Profitabilitas, SIZE = Ukuran Perusahaan, GROWTH = Pertumbuhan Perusahaan, BRISK = Risiko Bisnis, LnASSET = Struktur Aset, INST= Kepemilikan Institusional, LnDEBT = Struktur Modal, LnVALUE = Nilai Perusahaan.

Model 1:

$LnDEBT_{it}$ = 4,791 – 1,189 $PROFT_{it}$ + 0,038 $SIZE_{it}$ + 0,113 $GROWTH_{it}$ – 1,351 $BRISK_{it}$ – 0,112 $LnASSET_{it}$ – 0,882 $MOWN_{it}$ – 7,095 $INST_{it}$ + e_{it}

Model 2:

$LnVALUE_{it}$ = -1,930 - 0,110 $LnDEBT_{it}$ + e_{it}

Tabel 1
Koefisien Regresi Berganda dan Regresi Sederhana

Variabel Independen	Model 1 (Y=LnDEBT)	Model 2 (Y=LnVALUE)
Konstanta	4,791	-1,930
PROFT	-1,189	
SIZE	0,038	
GROWTH	0,113	
BRISK	-1,351	
LnASSET	-0,112	
MOWN	-0,882	
INST	-7,095	
LnDEBT	-	-0,110

Sumber : Data diolah, 2014

Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Taraf signifikansi (α) yang digunakan yaitu 5% dan 10%. Kriteria pengambilan keputusan ialah:

a) Bila *p-value* ≥ α, H_0 diterima.
b) Bila *p-value*< α, H_0 ditolak.

Uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 2 dan 3 sebagai berikut.

Hasil analisis regresi pada tabel 2, menunjukan bahwa variabel Profitabilitas (PROFT), Risiko Bisnis (BRISK), Kepemilikan Manajerial (MOWN), dan Kepemilikan Institusional (INST) berpengaruh negative signifikan terhadap Struktur Modal (LnDEBT). Namun, Ukuran Perusahaan (SIZE), Pertumbuhan (GROWTH), dan Struktur Aktiva (LnASSET) tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal (LnDEBT) perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009, sebab *p-value*> *sig.* Tabel 3 menunjukkan bahwa Struktur Modal (LnDEBT) berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Ln VALUE) pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009, dengan koefisien regresi - 1,152 dan *p-value* 0,043 < sig. 5%.

Koefisien determinasi (*Adj.*R^2) Model 1pada tabel 2 sebesar 0,568 yang berarti variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, struktur aset, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional mampu menjelaskan atau memprediksikan struktur modal sebesar 56,8% sedangkan variabel diluar model mampu menjelaskan struktur modal Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009 sebesar 43,2%.

Koefisien determinasi (*Adj.*R^2) Model 2 pada Tabel 3 sebesar 0,215, berarti variabel struktur modal hanya mampu menjelaskan nilai perusahaan sebesar 21,5% sedangkan variabel lain di luar model mampu menjelaskan nilai perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009 sebesar 78,5%.

Tabel 2
Uji Hipotesis Model 1

Model 1 (Y = LnDEBT)					
Variabel	Prediksi	Koefisien	*p-value*	Sig.	Kesimpulan
PROFT	-	-1,189	0,037	5%	Signifikan
SIZE	+	0,038	0,296	10%	Tidak Signifikan
GROWTH	+	0,113	0,256	10%	Tidak Signifikan
BRISK	-	-1,351	0,057	10%	Signifikan
LnASSET	+	-0,112	0,256	10%	Tidak Signifikan
MOWN	-	-0,882	0,000	5%	Signifikan
INST	-	-7,095	0,000	5%	Signifikan
R^2 = 0,608	Adj. R^2 =	0,568			

Sumber : Data diolah, 2014

Tabel 3
Uji Hipotesis Model 2

Model 2 (Y = LnVALUE)					
Variabel	Prediksi	Koefisien	*p-value*	Sig.	Kesimpulan
LnDEBT	-	-1,152	0,043	5%	Signifikan
R^2 = 0,241	Adj. R^2 =	0,215			

Sumber : Data diolah, 2014

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Arah negatif mengindikasikan peningkatan laba perusahaan akan membuat penggunaan utang menurun atau penurunan laba perusahaan akan menyebabkan penggunaan utang meningkat. Kondisi ini sesuai dengan teori *pecking order theory* yang menyatakan perusahaan memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya yaitu menggunakan dana internal atau dana eksternal yang memiliki risiko lebih rendah (utang).

Apabila profitabilitas (laba) pada perusahaan pertambangan mengalami peningkatan, tentunya pada saat yang bersamaan akan diikuti dengan penurunan jumlah hutang. Artinya perusahaan akan cenderung menggunakan sumber pendanaan internal untuk mendanai investasi yang akan mereka lakukan. Apalagi pembangun an *smelter* merupakan proyek jangka panjang dan modal yang diinvestasikan juga tidak sedikit, sehingga perusahaan pertambangan akan lebih cocok/aman dengan menggunakan laba yang seharusnya dibagi kan kepada para pemegang saham (mendorong *reinvestment* dan membagikan deviden dalam bentuk stock dividend) termasuk laba ditahan. Kondisi ini tentunya memiliki beberapa alasan, yaitu: (1) risiko rendah, (2) biaya murah, dan (3) jangka waktu lebih panjang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari *et al*. (2013), Sujoko dan Soebiantoro (2007), Widjaja dan Kasenda (2008), Amirya dan Atmini (2008), serta Suteja dan Manihuruk (2008) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Kartini dan Arianto (2008), Suripto (2008), Ruslim (2009), serta Elim dan Yusfarita (2010) yang menyimpulkan profitabilitas tidak memengaruhi penggunaan utang.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi struktur modal. *Trade off theory* menyatakan perusahaan besar berpeluang lebih mudah memperoleh pinjaman karena memiliki akses yang lebih luas ke pasar modal. Perusahaan besar juga memiliki banyak proyek sehingga memiliki kecenderungan mendanai investasinya menggunakan utang. Ukuran perusahaan bergerak searah dengan struktur modal. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan ukuran perusahaan tidak memengaruhi perubahan struktur modal. Artinya, kenaikan ukuran perusahaan tidak memengaruhi kenaikan struktur modal.

Kusus perusahaan pertambangan memang berbeda dengan industri lainnya, selain modal investasi yang dibutuhkan besar, juga asset tetap yang dimiliki sebagian berasal dari leasing (*operating lease*). Dengan demikian, walaupun perusahaan pertambangan tersebut ukurannya besar tetapi apabila sebagian besar asset berasal dari leasing, bukan berarti perusahaan tersebut lebih mudah untuk mengakses sumber pendanaan eksternal (hutang), tetapi justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan pihak kreditur memiliki risiko yang besar apabila terjadi ketidakmampuan perusahaan pertambangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik pokok maupun bunganya. Selain itu pembangunan *smelter* dilihat dari aspek ekonomis (perusahaan pertambangan) juga dianggap tidak terlalu efisien dan secara langsung juga tidak berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan (aspek keuangan). Dengan kata lain walaupun adanya peningkatan ukuran perusahaan (penambahan asset/pembangunan smelter) tidak berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan pertambangan untuk mengakses sumber pembiayaan dari kreditur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suripto (2008), Utami (2009), Yeniatie dan Destriana (2010),

serta Liem *et al.* (2013) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak memengaruhi struktur modal. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007), Widjaja dan Kasenda (2008), Kartini dan Arianto (2008), serta Mas'ud (2008) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi struktur modal. Teori *trade off* menyatakan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi memiliki lebih banyak pilihan berinvestasi daripada perusahaan dengan pertumbuhan rendah sehingga kecenderungan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasionalnya juga semakin tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi perubahan struktur modal. Artinya, penurunan pertumbuhan perusahaan tidak memengaruhi naiknya struktur modal.

Pertumbuhan penjualan bukan selalu diartikan pertumbuhan atas arus kas masuk (*cash inflow*), sebab kemungkinan pertumbuhan penjualan hanya diikuti dengan pertumbuhan piutang perusahaan. Penjualan untuk perusahaan pertambangan pada umumnya dilakukan secara non tunai dengan berjangka waktu yang relatif lama. Dengan demikian pertumbuhan perusahaan pertambangan yang tinggi tidak berarti akan berimplikasi pada penambahan penggunaan hutang, sebab akses pada lembaga keuangan juga tidak mudah karena terkendala besarnya peluang piutang yang tidak tertagih.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2006), Nanok (2008), Utami (2009), Yeniatie dan Destriana (2010), serta Sari *et al.* (2013), yang menyatakan pertumbuhan perusahaan tidak memengaruhi struktur modal. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Rodoni dan Shalihah (2006), Sujoko dan Soebiantoro (2007), serta Kartini dan Arianto (2008) yang menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Pengaruh Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Arah negatif mengindikasikan semakin tinggi risiko bisnis perusahaan pertambangan maka penggunaan utang akan menurun atau semakin rendah risiko bisnis maka penggunaan utang akan meningkat. *Trade off theory* menyatakan semakin tinggi penggunaan utang maka semakin tinggi beban atau risiko yang ditanggung perusahaan seperti *agencycost,* biaya kebangkrutan, dan keengganan kreditur untuk memberi pinjaman dalam jumlah besar. Sebagai implikasinya, perusahaan dengan risiko bisnis besar menggunakan utang lebih rendah, karena penggunaan utang yang besar akan mempersulit perusahaan mengembalikan kewajiban mereka.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bradley *et al.* (1984), Kester (1986), Wald (1990), Pandey (2001), Booth *et al.* (2001), Chen (2004), dan Lim (2012) yang menyimpulkan risiko bisnis menurunkan penggunaan utang suatu perusahaan. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Homaifar *et al.* (1994), Krishnan dan Moyers (1997), Michaelas *et al.* (1999), dan Deesomsak *et al.* (2004) yang menyatakan risiko bisnis tidak mempengaruhi keputusan struktur modal.

Pengaruh Struktur Aset terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Struktur aset tidak memengaruhi struktur modal. Teori *pecking orde*r menyatakan perusahaan akan memilih sumber pendanaan eksternal yang memiliki risiko rendah, yaitu utang. Dengan demikian,

keberadaan aset tetap dapat meningkatkan penggunaan utang perusahaan karena perusahaan memiliki jaminan yang dapat mengurangi *financial distress* dari penggunaan utang. Namun pada perusahaan pertambangan ternyata penambahan aktiva tetap tidak secara otomatis dapat meningkatkan atas penggunaan hutang, sebab penambahan asset tetap atas pembangunan smelter relatif sulit untuk dikonversi menjadi uang tunai yang akan dipakai untuk menutup kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan pertambangan mengalami kesulitan pendanaan. Dengan demikian jaminan aktiva tetap tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pihak kreditor. Selain itu keberadaan aktiva tetap berupa smelter tersebut bersifat khusus sehingga sulit untuk mencari pembeli atas aktiva tetap tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Murdayanti (2007), Suripto (2008), Savitri *et al.* (2012), dan Sari *et al.* (2013) yang menyatakan struktur aset tidak memengaruhi struktur modal. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Mayangsari (2001), Rodoni dan Shalihah (2006), Rojikin (2008), serta Mas'ud (2008) yang menyatakan struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Kondisi ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan jika manajemen memiliki kepemilikan saham yang tinggi maka pihak manajemen akan mengurangi tingkat utang sehingga akan mengurangi biaya keagenan utang. Manajemen sekaligus pemegang saham akan semakin berhati-hati dalam menggunakan utang dan menghindari perilaku menyimpang karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya. Dengan kata lain apabila manajemen perusahaan pertambangan memiliki jumlah saham yang tinggi, maka secara otomatis penggunaan sumber pembiayaan eksternal (hutang) semakin turun. Kondisi ini menyiratkan bahwa pihak manajemen perusahaan pertmbangan lebih merasa aman untuk membiayai penambahan aktiva tetap melalui penambahan kepemilikan saham manajerial dibandingkan berasal dari penambahan hutang. Hal ini disebabkan penambahan hutang akan meningkatkan resiko atas ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian apabila perusahaan tersebut ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan pada akhirnya asset yang dimiliki harus dilikuidasi maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemegang saham.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Moh'd *et al.* (1998), Jensen *et al.* (1992), Bathala *et al.* (1994) serta Wahidahwati (2002) yang menyatakan kepemilikan saham pihak manajemen menurunkan penggunaan utang. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007), serta Yeniatie dan Des triana (2010) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak memengaruhi keputusan struktur modal perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Struktur Modal Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Arah negatif mengindikasikan semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak institusi maka penggunaan utang oleh perusahaan akan menurun. Kondisi ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Moh'd *et al.* (1998) yaitu tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih ketat sehingga mengambil alih peranan utang sebagai alat kontrol manajeman.

Kepemilikan institutional atas saham perusahaan pertambangan merupakan persentase kepemilikan saham pihak

eksternal (non manajemen) atas saham perusahaan seperti pihak bank, asuransi, atau institusi lain. Pihak eskternal melihat bahwa penambahan hutang itu resiko, sehingga mereka akan membeli saham perusahaan yang memiliki hutang yang sedikit. Apalagi hutang yang dimiliki perusahaan sudah melampaui batas resiko yang ditoleler bagi investor.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Moh'd *et al.* (1998), Wahidahwati (2002), serta Sujoko dan Soebiantoro (2011) yang menyimpulkan kepemilikan institusional menurunkan penggunaan utang perusahaan.

Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009. Artinya, meningkat atau menurunnya penggunaan utang, hal itu akan menjadi penentu meningkat atau menurunnya nilai perusahaan dengan arah yang berlawanan. Menindaklanjuti amanat UU No.4 Tahun 2009, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014.

Adanya proses pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri akan memberikan nilai tambah yang lebih untuk setiap jenis mineral. Dengan diwajibkannya pembangunan *smelter* tersebut tentunya dibutuhkan modal yang tidak sedikit, sumber pembiayaan tersebut salah satunya melalui penambahan hutang. Kondisi ini dibuktikan hutang industri pertambangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan peningkatannya lebih besar dibandingkan penggalian sumber dana yang berasal dari modal sendiri. Dengan demikian pembangunan *smelter* yang salah satu sumber pendanaan melalui penambahan hutang tampaknya berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Walaupun penambahan hutang tersebut telah dilakukan secara bertahap dan terencana selama 6 (enam) tahun, mulai 2009 sampai dengan 2014 dan sudah menjadi bagian dari ekspansi/pengembangan perusahaan, namun penambahan hutang tetap direspon negatif oleh pasar. Dengan kata lain fenomena tersebut memberikan informasi bahwa para pelaku pasar cukup mempermasalahkan dengan penambahan atau pengurangan hutang, walaupun pada akhirnya penambahan hutang itu kemungkinan mampu meleverage nilai perusahaan pertambangan. Dengan demikian penambahan hutang tidak selalu dianggap peningkatan risiko tetapi lebih condong pada *return/value* dari penambahan hutang tersebut. Selain itu kemungkinan manfaat perlindungan pajak atas penambahan hutang masih dianggap cukup dan penambahan hutang belum di level struktur modal optimal, khusus pada industri pertambangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chandra (2007), Mas'ud (2008), dan Hermuningsih (2013) yang menyatakan struktur modal dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun tidak mendukung penelitian Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) yang menyatakan struktur modal tidak memengaruhi nilai perusahaan, serta Savitri *et al.* (2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh simpulan, meliputi: (1) variabel profitabilitas, risiko bisnis, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional, masing-masing berpengaruh negative signifikan terhadap struktur modal, (2) ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aset, masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, (3) struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan, maka peneliti memberikan beberapa saran: pertama, bagi peneliti selanjutnya variabel ukuran perusahaan bisa dijadikan variabel dummy, karena perusahaan pertambangan ada yang ukurannya besar, tetapi juga ada beberapa yang ukurannya kecil.

Kedua, pihak manajemen pertambangan harus memperhatikan struktur modal optimal, sebab struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Terakhir, bagi pemerintah (regulator) dengan diwajiban perusahaan pertambangan untuk membangun *smelter* sedangkan dana investasi yang dibutuhkan cukup besar, sebaiknya pemerintah memberikan pinjaman lunak dan berjangka panjang.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain hanya menggunakan tujuh variabel independen dalam hubungannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan, selain itu juga seharusnya dianalisis secara terpisah antara perusahaan pertambangan yang memiliki ukuran besar dan kecil dan selanjutnya dbandingkan. Hanya menggunakan satu proksi untuk setiap pengukuran variabel, kemungkinan dengan proksi lain, variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan dan struktur asset akan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal, A., dan C. R., Knouber. 1996. Firm Performance And Mechanism To Control Agency Problems Between Managers And Shareholders. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 31(3): 377-397.

Anshori, M. dan H. N., Denica. 2010. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index Studi Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Analisis Manajemen* 4(2): 153-175.

Bathala, C. T., K. P. Moon, dan R. P. Rao. 1994. Managerial Ownership, Debt Policy, and The Impact Of Institutional Holding: An Agency Perspektif. *Journal of Financial Management* 23(3): 38-50.

Bradley, M., G. A. Jarrell, dan E. Han Kim. 1984. On The Existence of An Optimal Capital Structure: Theory and Evidence. *The Journal of Finance* 3 (3): 857-880.

Brigham, E. F., dan J. F., Houston. 2007. *Fundamentals of Financial Management.* 10nd ed. Thomson South Western. USA.

Booth, L., V. Aivazian, A. D. Kunt, dan V., Maksimovic. 2001. Capital Structure in Developing Countries. *The Journal of Finance* 56(1): 87-130.

Chandra, T. 2007. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Produktivitas Aktiva, Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Artavidya* 8(2): 201-208.

Chen, J. J. 2004. Determinants of Capital Structure of Chinese-Listed Companies. *Journal of Business Research* 57(3): 1341–1351.

Deesomsak, R., K. Paudyal, dan G. Pescetto. 2004. The Determinants of Capital Structure: Evidence from the Asia Pacific Region. *Journal of Multinational Financial Management* 4(4-5): 387-405

De Jong, A., R. Kabir, dan T. T. Nguyen. 2008. Capital Structure Around The World: The Roles of Firm and Country-Specific Determinants. *Journal of Banking and Finance* 32(2): 1954-1969.

Elim, M. A., dan Yusfarita. 2010. Pengaruh Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan Penjualan, ROA Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di BEJ. *EFEKTIF Jurnal Bisnis Dan Ekonom* 1(1): 88-103.

Eriotis, N. 2007. How Firm Characteristic Affect Capital Structure: An Empirical Study. *Managerial Finance* 33(5): 321-331.

Fauzi, F. 2013. The Determinants Of Capital Structure: An Empirical Study of New Zealand Listed Firms. *Asian Journal of Finance and Accounting* 5(2): 1-21.

Ferry, M. G., dan Jones, W. H. 1979. Determinants of Financial Structure: A New Methodological Approach. *The Journal of Finance* 34(3): 631-644.

Frank, M. Z, dan G. Vidhan K. 2003. Testing The Pecking Order Theory of Capital Structure. *Journal of Financial Economic* 67(6): 217-248.

Gitman, L. J., dan C. J. Zutter. 2012. *Principles of Managerial Finance 13th ed*. Prentice Hall. USA.

Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19.* Badan Penerbit Universitas Dipenegoro. Semarang.

Gujarati, D. 2004. *Basic Econometrics.* 3nd ed. Mc-GrawHill. New York.

Hadiyanto, B. dan C. Tayana. 2010. Pengaruh Risiko Sistematik, Struktur Aktiva, Profitabilitas, dan Jenis Perusahaan Terhadap Struktur Modal Emiten Sektor Pertambangan: Pengujian Hipotesis Static-Trade Off. *Jurnal Akuntansi* 2(1): 15-39.

Hassan, M. A. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ). *Jurnal Tepak Manajerial* 6(6): 1-20.

Harris, M., dan A. Raviv. 1991. The Theory Of Capital Structure. *The Journal of Finance* 46(1): 297-335.

Hermuningsih, S. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2013*. 128-148.

Hossain, F., dan A. Ali. 2012. Impact of Firm Specific Factors On Capital Structure Decision: An Empirical Study Of Bangladeshi Companies. *International Journal of Business Research and Management* 3(4): 163-182.

Huang, S. G. H. dan F. M. Song. 2006. The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. *China Economic Review* 17(3): 14-35.

Iwan. 2015. Belum Bangun Pabrik Smelter Perusahaan Tambang Dilarang Ekspor. *http://www.kemenperin.go.id/artikel/7247/Belum-Bangun-Pabrik-Smelter, Perusahaan-Tambang-Dilarang-Ekspor*. Diakses Tanggal 15 Januari 2015.

Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.

Jensen, R. G., P. D., Solberg, dan T. S. Zorn. 1992. Simultaneous Determi- nation Of Insider Ownership, Debt, And Dividend Policies. *Journal of Financial And Quantitative Analysis* 27(2): 247-263.

Kartini dan T. Arianto. 2008. Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Pertumbuhan Aktiva Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 12(1): 11-21

Kesuma, A. 2009. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 11(1): 38-45.

Kester, C. W. 1986. Capital and Ownership Structure: A Comparison Of United States And Japanese Manufacturing Corporations. *Journal of Financial Management* 15(2): 5-16.

Krishnan, V. S., dan R. C. Moyers. 1997. Performance, Capital Structure and Home Country: An Analysis Of Asian Corporations. *Global Finance Journal* 8(1): 129-143.

Liem, J. H., W. R. Murhadi. dan B. S. Sutedjo. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Industri Consumer Goods Yang Terdaftar di BEI 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2(1): 1-11.

Lim, T. C. 2012. Determinants Of Capital Structure Empirical Evidents From Financial Services Listed Firms In

China. *International Journal of Economics and Finance* 4(3): 191-203.

Mahadwarta, P. A., dan J. Hartono. 2002. Uji Teori Keagenan dalam Hubungan Interdependensi Antara Kebijakan Utang Dengan Kebijakan Deviden. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang*: 1-29.

Mas'ud, M. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal dan Hubungannya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7(2): 82-99

Mayangsari, S. 2001. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pendanaan Perusahaan: Pengujian Pecking Order Hipotesis. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* 1(13): 1-26.

Memon, P. A, B. M. Rohani, dan Z. B. Ghazali. 2015. Firm and Macroeconomic Determinants of Debt: Pakistan Evidence. *Procedia-Social and Behavioral Science* 172(3): 200-207.

Michaelas, N., F. Chittenden dan P. Poutziouris. 1999. *Financial Policy and Capital Structure Choice in UK SME's*: Empirical Evidence from Company Panel Data. *Small Business Economics* 12(2): 113-130.

Moh'd, M. A., G. P. Larry. dan J. N. Rimbey. 1998. The Impact Of Ownership Structure On Corporate Debt Policy : A Time Series Cross Sectional Analysis. *TheFinancial Review* 33(3): 85-99.

Modigliani, F. dan M. H. Miller. 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment. *American Economic Review* 48(3): 261-297.

Murdayanti, Y. 2007. Pengujian Pecking Order Theory Menggunakan Regresi Data Panel Pada Industri Makanan dan Minuman. *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi* 7(1): 39-56.

Myers, S. C., dan N. Majluf. 1984. Corporate Financing And Investment Decisions When Firms Have Information Investors Do Not Have. *Journal of Financial Economics* 13(3): 187-221.

Nanok, Y. 2008. Capital Structure Determinan Di Indonesia. *Akuntabilitas* 7(2): 122-127.

Pandey, I.M. 2001. Capital Structure and The Firm Characteristics: Evidence From An Emerging Market. *Indian Institute of Management Ahmedabad Working Paper* 10(4): 1-17.

Rojikin, K. 2008. Determinan Determinan Struktur Modal. *KOMPAK* 1(2): 13-21.

Rodoni, A. dan M. Shalihah. 2006. Pengujian Empiris Balance Theory, Pecking Order Theory dan Signalling Theory Pada Struktur Modal Perusahaan Indonesia. *Etikonomi* 5(1): 17-30.

Ross, S. A. 1977. The Determination Of Financial Structure: The Incentive Signalling Approach. *TheBell Journal of Economics* 8(1): 23-40.

Ross, S. A., W. Randolph, dan J. Jaffe. 2010. *Corporate Finance*. McGraw Hill. New York.

Ruslim, H. 2009. Pengujian Struktur Modal (Teori Packing Order): Analisis Empiris Terhadap Saham di LQ 45. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 11(3): 209-221.

Saleem, F., B. Rafique, Q. Mehmood, M. Irfan, R. Saleem, dan G. Akram. 2013. The Determination of Capital Structure of Oil And Gas Firms Listed On Karachi Stock Exchange Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business* 4(9): 225-235.

Sari, D. H., A. Dzajuli, dan S. Aisjah. 2013. Determinan Struktur Modal Dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11(1): 77-84.

Savitri, E., U. Salim, Armanu dan Djumahir. 2012. Variabel Antaseden Dari Struktur Modal: Dampaknya Pada Nilai Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10(1): 85-96

Sujoko dan Soebiantoro. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern

Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 9(1): 41-48

Suripto. 2008. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Struktur Modal: Pengujian Pecking Order Theory (Studi Empiris Pada Perusahanaan SWA 100 Creator). *Jurnal Ilmiah* 2(3): 154-165.

Suteja, J. dan Manihuruk, Wiston. 2009. Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan, dan Faktor Eksternal pada Penentuan Nilai Perusahaan. *Trikonomika* 8(2): 78-89.

Thippayana, P. 2014. Determinants of Capital Structture In Thailand. *Precedia-Social And Behavioral Sciences* 43(2): 1074-1077.

Titman, S. dan R. Wessels. 1988. The Determinants of Capital Strcture Choice. *The Journal of Finance* 43(1): 1-19.

Utami, E. S. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Manufaktur. *FENOMENA* 7 1): 39-47.

Utomo, P. dan Djumahir. 2011. Pengaruh Variabel Fundamental terhadap Struktur Modal dan Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Tekstil *Go Public* di Indonesia). *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11(3): 374-383.

Van Horne, J. C. 2002. *Financial Management Policy*. Prentice Hall International. New Jersey.

Wahidahwati. 2002. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Teori Agency. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 5(2): 1-16.

Wald, J. K. 1990. How Firm Characteristics Affect Capital Structure An International Company. *The Journal of Financial Research* 21(2): 161-187.

Widjaja, I. dan Kasenda, Faris 2008. Pengaruh Kepemilikan Institutional, Aktiva Berwujud, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Dalam Industri Barang Di BEI. *Jurnal Manajemen* 12(2): 139-150.

Wijaya, L. R. P. dan B. A., Wibawa. 2010. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Purwokerto*: 1-21.

Yeniatie dan N. Destriana. 2010. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 2(1): 1-16.

Yuliani., H., M. A. R. Umrie, dan M. D. Yuliansyah. 2014. Determinan Struktur Modal dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan pada Pasar Yang Sedang Berkembang (Studi pada Sektor Real Estate and Property). *Manajemen Usahawan Indonesia* 43(1): 1-22.

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan **ISSN 1411 - 0393**
Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

PENGARUH SUPERVISI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP TINDAKAN YANG MENURUNKAN KUALITAS AUDIT

Kurnia
kurnia_stiesia@yahoo.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Ernie Tisnawati Sule
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung

ABSTRACT

This study examines the effect of supervision and job satisfaction on reduced audit quality. Based on the literature review, this study hypothesize that supervision and job satisfaction have an effect on reduced audit quality. This study uses data from auditors of audit firms listing in Bapepam-Lembaga Keuangan (LK). Data was collected through questionnaires. The respondents of this research are junior auditors, senior, supervisor, and manager. Data were analyzed using multiple regression analysis for testing hypothesis. The results show that supervision and job satisfaction have a negatively effect on reduced audit quality. Spesifically, this study indicates that auditors who have perceived that supervision isn't effective are more likely to commit reduced audit quality. The results also indicate that auditors who their job satisfaction is lower tend to engage in reduced audit quality. Based on these results, to improve the quality of audit, quality control system in KAP should ensure that the supervision procedures have been implemented as appropriate, as well as ensuring that all work has been supervised by his superior auditor. Based on the results of this study also suggested that KAP improve conditions that can cause job dissatisfaction.

Key words: Supervision, Job Satisfaction and Reduced Audit Quality.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh supervisi dan kepuasan kerja terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan tinjauan literatur, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa supervisi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data hasil survey dari auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bapepem-Lembaga Keuangan (LK). Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dari responden yang terdiri atas auditor junior, auditor senior, supervisor, dan manajer. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi dan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa auditor yang merasa bahwa supervisi tidak dilaksanakan secara efektif lebih cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa auditor yang merasakan kepuasan kerja lebih rendah cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk meningkatkan kualitas audit, sistem pengendalian kualitas di KAP harus dapat menjamin bahwa prosedur supervisi telah dijalankan sebagaimana mestinya, serta memastikan bahwa semua pekerjaan auditor telah disupervisi oleh atasannya. Berdasarkan hasil penelitian ini juga, disarankan agar KAP memperbaiki kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya ketidak-puasan kerja.

Kata-kata kunci: Supervisi, Kepuasan Kerja dan Penurunan Kualitas Audit.

PENDAHULUAN

Auditor merupakan suatu profesi yang dipercaya untuk menentukan kewajaran atas informasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Pemegang saham, kreditur, ataupun pihak lainnya memberikan kepercayaan kepada auditor untuk membuktikan kelayakan informasi dalam laporan keuangan yang disediakan manajemen. Hasil penilaian, analisa serta pendapat dari auditor terhadap suatu laporan keuangan sebuah perusahaan akan sangat menentukan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak ataupun publik yang menggunakannya. Misalnya, para investor dalam mempertimbangkan dan memutuskan kebijakan investasinya, para penasihat keuangan dan penasihat investasi dalam memberikan arahan pada para investor terhadap keadaan dan prospek perusahaan tersebut, para pemberi pinjaman dalam mempertimbangkan serta memutuskan langkah pemberian ataupun penghentian pinjaman bagi perusahaan. Namun, dapat dibayangkan bagaimana banyak pihak akan dirugikan apabila ternyata laporan keuangan yang telah memperoleh penilaian "wajar tanpa pengecualian" dari akuntan publik ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang laporan keuangan tersebut. Misalnya, sebuah bank yang berdasarkan laporan audit yang dihasilkan oleh akuntan publik, memutuskan untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman kepada debiturnya. Pada akhirnya diketahui bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang direkayasa untuk menunjukkan bahwa debitur tersebut tetap dalam keadaan membukukan laba, dan auditor gagal untuk menemukan rekayasa yang dilakukan oleh perusahaan.

Pertanggung-jawaban auditor terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepadanya, menjadi dasar akan hadirnya kualitas dari setiap hasil audit ataupun hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukannya. Keharusan dalam memenuhi kualitas, akan sangat berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang professional yang mandiri. Berbagai cara telah dilakukan baik oleh organisasi profesi yang dalam hal ini adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ataupun Departemen Keuangan RI selaku pembina dan pengawas praktik akuntan publik di Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit dari setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Begitu ketatnya persyaratan yang harus dilalui untuk mendapatkan izin dan kewenangan untuk melaksanakan profesi akuntan publik menggambarkan sudah seharusnya hasil kerja dari auditor akan memberikan perlindungan pada setiap anggota masyarakat yang menggunakan ataupun meletakkan kepercayaan kepadanya dalam proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan independensi auditor, Menteri Keuangan dan IAPI telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan rangkaian pendidikan profesional lanjutan seharusnya sudah memberikan jaminan akan pencapaian kualitas audit seperti yang diharapkan.

Namun, dalam masyarakat masih saja terus terjadi tudingan terhadap ketidak-profesionalan auditor. Begitu seringnya Menteri Keuangan RI menjatuhkan sanksi peringatan hingga sanksi pembekuan izin dari akuntan publik menunjukkan kualitas audit yang dihasilkan profesi akuntan publik masih dipertanyakan. Pelanggaran-pelanggaran profesi yang telah banyak d-i lakukan dalam praktik menunjukkan bukti bahwa auditor telah gagal atau tidak mampu untuk melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan SPAP sebagai suatu panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh auditor dalam memberikan jasa-jasanya. Salah satu pelanggaran terhadap SAK dan SPAP yang cukup menjadi perhatian publik adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terhadap auditor-auditor yang mengaudit bank-bank bermasalah.

Diawali oleh Pembentukan Tim Evaluasi terhadap auditor yang mengaudit bank-bank bermasalah berdasarkan SK. Menteri Keuangan No.472/KMK.01.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999, Departemen Keuangan meminta BPKP untuk melakukan *peer review* terhadap kertas kerja auditor untuk tahun buku 1995, 1996, dan 1997 (Fatchurrohman, 2001). Pembentukan tim itu sendiri sebenarnya didasari oleh kecurigaan masyarakat berkaitan dengan kualitas pekerjaan auditor bank-bank tersebut. Dalam auditnya terhadap bank-bank tersebut, auditor telah memberikan penilaian "wajar tanpa pengecualian" kepada bank-bank yang sebulan kemudian ternyata *collapse*, sehingga terpaksa dibekukan. *Peer review* oleh BPKP dilakukan dengan memeriksa kertas kerja yang dibuat oleh auditor dalam mengaudit bank-bank tersebut. Dengan melihat kertas kerja maka BPKP dapat melihat kualitas pekerjaan auditor, karena tujuan pembuatan kertas kerja audit adalah untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya, serta untuk menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP terhadap kertas kerja auditor bank-bank bermasalah (yang selanjutnya ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha/ BBKU) menunjukkan bahwa banyak auditor yang melanggar SPAP. Pemeriksaan yang dilakukan atas kertas kerja 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit 37 bank bermasalah memperlihatkan bahwa; Pertama, hampir semua KAP tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu akun. Kedua, pada umumnya dokumentasi audit yang kurang memadai. Ketiga, terdapat auditor yang tidak memahami peraturan perbankan tetapi menerima penugasan audit terhadap bank. Keempat, pengungkapan yang tidak memadai terhadap laporan audit. Kelima, terdapat auditor yang tidak mengetahui laporan dan opini audit yang sesuai standar. Adapun rekapitulasi hasil *peer review* terhadap kertas kerja auditor 37 bank bermasalah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi hasil *peer review* terhadap kertas kerja auditor

No.	Uraian pelanggaran	Jumlah KAP/ (%)
1.	Tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu akun	9 KAP (90%)
2.	Dokumentasi tidak memadai	7 KAP (70%)
3.	Tidak melakukan kontrol hubungan	5 KAP (50%)
4.	Tidak melakukan uji ketaatan terhadap peraturan	4 KAP (40%)
5.	Tidak membuat kesimpulan audit	4 KAP (40%)
6.	Tidak melakukan perencanaan sampel audit	3 KAP (30%)
7.	Tidak melakukan pengujian fisik	2 KAP (20%)
8.	Tidak melakukan pengkajian terhadap risiko audit dan materialitas	2 KAP (20%)
9.	Tidak memahami dan mempelajari peraturan perbankan	1 KAP (10%)
10.	Program audit yang tidak sesuai dengan karakteristik bisnis klien	1 KAP (10%)
	Standar pelaporan pengungkapan yang tidak memadai	
11.	Opini audit yang tidak sesuai dengan standar	8 KAP (80%)
12.	Kesalahan pengklasifikasian suatu transaksi	1 KAP (10%)
13.	Laporan audit yang tidak sesuai dengan standar	1 KAP (10%)
14.		1 KAP (10%)

Sumber: Fatchurrohman (2001)

Dari keseluruhan KAP (10 KAP) yang direview, hanya 1 KAP, yaitu KAP H.S. (Fatchurrohman, 2001) yang menurut hasil penilaian BPKP tidak terdapat temuan penyimpangan dari standar auditing. Adapun akibat ketika audit melanggar standar audit seperti yang terdapat dalam hasil pemeriksaan BPKP adalah kemungkinan terbesarnya auditor tidak dapat menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta akhirnya memberikan pendapat yang menyesatkan tentang laporan keuangan yang diauditnya.

Pelanggaran terhadap SPAP ataupun SAK tersebut menunjukkan bahwa sebagian Kantor Akuntan Publik belum melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang seharusnya dipatuhi. Hal tersebut juga dapat menunjukkan bahwa kinerja dari para staf auditor sebagai anggota tim audit belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi para staf auditor agar mereka selalu melaksanakan pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian, dan berusaha untuk menjaga atau mempertahankan kualitas hasil auditnya. Kualitas audit merupakan suatu faktor penentu yang dapat menunjukkan apakah pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Hasil penelitian oleh Behn *et al*., (Samelson *et al*., 2006) yang meneliti tentang atribut penentu kualitas audit menunjukkan bahwa staf audit sebagai anggota tim audit sangat menentukan faktor-faktor keberhasilan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan pengauditan yang berkualitas. Terdapat berbagai atribut yang menentukan kualitas audit. Pelaksanaan atau penerapan atribut-atribut tersebut oleh KAP dalam proses pengauditan sangat ditentukan oleh staf auditor sebagai anggota team audit KAP.

Supervisi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas audit dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit (Georgiades, 2006). Supervisi adalah unsur sangat penting dalam audit karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh auditor level bawah (Arens *et al*., 2008). Hampir sebagian besar pekerjaan lapangan dilakukan oleh auditor ditingkat yang lebih rendah, oleh karena itu untuk menjaga agar audit yang dilaksanakan memenuhi standar yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan program supervisi (Arens *et al*., 2008). Huda (2000) menyatakan bahwa tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan, selain untuk menjamin bahwa perencanaan akan dilaksanakan sebagimana nyatanya. Dalam pelaksanaan audit, auditor level lebih rendah diberi tugas untuk melaksanakan berbagai prosedur audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar pelaksanaan prosedur audit tersebut sesuai dengan yang direncanakan maka harus ada pihak (atasan) yang mengawasi pelaksanan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor tersebut (Messier *et al*., 2006). Kualitas audit sangat ditentukan oleh kinerja profesional anggota tim audit (Herbach, 2001). Dengan adanya supervisi diharapkan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh para staf audit dapat ditingkatkan, dengan demikian kualitas audit yang dilaksanakan oleh kantor akuntan publik juga dapat dipertahankan.

Pentingnya pelaksanaan supervisi dalam mencapai mutu pelaksanaan audit yang berkualitas juga telah dinyatakan oleh badan profesi (Institut Akuntan Publik Indonesia). Standar pekerjaan lapangan pertama menyatakan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya (SPAP, 2001: 310). Selanjutnya, SA Seksi 311 juga menyatakan bahwa supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dengan pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai (SPAP, 2001). Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus direview oleh atasan untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai (Payne dan Ramsay, 2008).

Hasil pemeriksaan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (DPAJP) Departemen Keuangan Republik Indonesia terhadap beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik telah menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi di KAP-KAP masih lemah (Fatchurrohman, 2001). Hal yang sama juga terjadi pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai (PPAJP) Departemen Keuangan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2009 terhadap 94 KAP (Tabel 2), menunjukkan bahwa 30% (tahun 2008) dan 25% (tahun 2009) supervisi yang dilakukan tidak memadai (Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, 2010).

Tabel 2
Kelemahan supervisi dan independensi selama tahun 2008 dan 2009

Kelemahan:	Tahun 2008	Tahun 2009
Supervisi	29%	23%
Independensi	30%	25%

Sumber: Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, Depkeu (2010)

Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa kepuasan kerja mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas (Robbins, 2003) atau kinerja (Luthans, 2006; Kreitner dan Kinicki, 2005). Sebaliknya, ketidak-puasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang merugikan bagi organisasi (Robbins, 2003). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kepuasan atau ketidak-puasan dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku disfungsional (Herbach, 2001; Duffy *et al*., 2002; Anton, 2009). Duffy *et al*. (2002) memberikan contoh beberapa perilaku disfungsional yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan, seperti; melaksanakan pekerjaan secara lambat, tidak teliti, kualitas dan kuantitas rendah, keterlambatan, atau produk-produk yang rusak. Dalam konteks auditing, perilaku-perilaku disfungsional tersebut dapat berbentuk tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit (Donelly *at al*., 2003).

Sementara itu, Herbach (2001) menyatakan bahwa pengauditan selain merupakan hubungan agensi antara pengguna laporan dan KAP, juga merupakan hubungan agensi antara pemilik KAP (partner) dengan para staf auditnya (pegawai). KAP merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai anggota yang mempunyai peran penting dalam penyelesaian pekerjaan audit. Pengumpulan bukti audit di lapangan dilakukan oleh staf auditor yang tidak berhubungan langsung dengan opini audit yang merupakan tanggung jawab partner. Dalam situasi seperti itu, partner (*principal*) mengeluarkan opininya berdasarkan file audit yang telah disiapkan oleh staf auditor (*agent*) tanpa melihat langsung bagaimana file-file tersebut disiapkan.

Walaupun opini yang dikeluarkan partner tergantung pada kinerja profesional staf auditor, namun kepentingan staf auditor dan partnernya kadang-kadang berlainan. Hasil penelitian Rebele dan Michaels (Huda, 2000) telah membuktikan rendahnya kepuasan kerja yang dialami oleh staf auditor pada level organisasi yang lebih rendah. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Nurahma dan Indriantoro (2000) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dipengaruhi oleh fungsi dan kedudukan karyawan dalam organisasi. Menurutnya, karyawan pada level yang lebih bawah cenderung mengalami ketidak-puasan dan kebosanan karena pekerjaan yang kurang menantang dan tanggung-jawab yang lebih kecil. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun KAP diharapkan dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas, namun harapan untuk dapat menghasilkan jasa audit yang berkualitas pada akhirnya sangat ditentukan oleh para staf auditnya. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat beberapa perilaku staf audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit (Herbach, 2001). Soobaroyen dan Chengabroyan (2005)

telah memberikan contoh beberapa perilaku staf auditor yang dapat mengurangi kualitas audit, diantaranya; mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan, menghentikan beberapa prosedur audit penting yang belum selesai dikerjakan secara lengkap, atau mengabaikan/tidak melaksanakan beberapa prosedur audit penting lainnya.

Dengan semakin pentingnya peranan staf audit dalam mewujudkan hasil audit yang berkualitas, maka kepuasan kerja staf audit merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas audit. Teori ataupun hasil penelitian tentang kepuasan telah menunjukkan bagaimana kepuasan kerja karyawan dapat mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Kreitner dan Kinicki (2005) menyatakan bahwa kepuasan dapat mengarahkan pada prestasi yang lebih tinggi. Sementara itu, Luthans (2006) menyatakan bahwa seseorang yang merasa puas dapat menghasilkan kinerja yang lebih besar. Menurutnya, kepuasan mungkin tidak perlu menghasilkan perkembangan kinerja individu, tetapi dapat menyebabkan perkembangan level departemen dan organisasi. Berdasarkan teori kepuasan yang telah dinyatakan oleh para pakar, kualitas audit dapat ditingkatkan dengan berupaya untuk meningkatkan kepuasan staf auditor. Peningkatan kepuasan staf auditor dapat menimbulkan berbagai perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku-perilaku yang dapat menguntungkan organisasi/Kantor Akuntan Publik tempat mereka bekerja. Begitu juga sebaliknya, ketidakpuasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak menguntungkan bagi organisasi tempat mereka bekerja. Robins (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi produktivitas karyawan, kemangkiran, atau mempengaruhi tingkat keluar masuknya karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh supervisi dan kepuasan kerja terhadap terjadinya tindakan yang menurunkan kualitas audit.

TINJAUAN TEORETIS

Supervisi

Dalam profesi akuntan publik, supervisi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebutkan dalam SA Seksi 311 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya (SPAP, 2001:311). Selanjutnya, SA Seksi 311 menyatakan bahwa supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai (SPAP, 2001:311). Georgiades (2006) menyatakan bahwa supervisi merupakan penelaahan terhadap usaha-usaha audit dan pertimbangan-pertimbangan audit terkait yang dibuat oleh asisten/bawahan untuk menentukan apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan keaadaan yang terjadi. Georgiades juga menyatakan bahwa penunjukkan dan pengarahan usaha asisten ini penting dilakukan agar audit dapat dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum dan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit.

SA Seksi 311 menyatakan bahwa luasnya supervisi yang memadai bagi suatu keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit (SPAP, 2001:311). Pernyataan yang sama juga disebutkan oleh Gupta *et al*. (2000) bahwa supervisi harus disesuaikan dengan situasi audit agar pekerjaan audit dapat dilaksanakan secara efektif. Agar supervisi dapat dilaksanakan secara efektif, Gupta *et al*., (2000) juga telah menyebutkan beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan praktik-praktik supervisi di dalam organisasi KAP. Pertama, supervisi harus dilaksanakan secara hierarkis (misalnya, supervisor/ atasan yang mengarahkan dan menelaah hasil kerja bawahannya). Kedua, supervisi

juga harus mempertimbangkan aspek-aspek birokratis, yaitu atasan/supervisor harus menilai kesesuaian program-program audit.

Menurut SA Seksi 311, pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus direview untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan didokumentasikan secara memadai, dan menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan audit (SPAP, 2001:311). Standar tersebut pada dasarnya hanya menyediakan petunjuk umum tentang pelaksanaan review. Pelaksanaannya secara rinci dalam organisasi KAP tergantung ukuran KAP dan kompleksitas pekerjaan audit. Sebagai dasar untuk menerapkan praktik review di KAP, Georgiades (2006) telah menyebutkan beberapa tujuan utama dari review pekerjaan yang dilakukan dalam setiap pekerjaan audit, yaitu untuk menentukan bahwa: pekerjaan audit telah direncanakan sebaik-baiknya; luasnya pekerjaan audit dianggap cukup memadai untuk mendukung opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan; pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar perusahaan dan standar profesional; permasalahan akuntansi dan auditing telah dievaluasi secara layak dan laporan keuangan telah sesuai dengan SAK; dan laporan audit yang dikeluarkan telah tepat.

Malone dan Roberts (2004) menyatakan bahwa dimensi supervisi terdiri dari; efektivitas supervisi dalam menemukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit dan jenis hukuman yang akan dikenakan. Dimensi tersebut juga sesuai dengan Farger *et al*. (2005) yang menyebutkan bahwa probabilitas perilaku diketahui dan jenis hukuman yang akan dikenakan merupakan faktor utama yang akan dipertimbangkan oleh orang ketika sedang memikirkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Menurut Otley dan Pierce (1996), risiko kemungkinan ditemukan merupakan pertimbangan yang relevan dalam memutuskan untuk melakukan *premature sign-off* atau melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit lainnya. Laporan yang dikemukakan oleh *The Commission on Auditors Responsibilities* (Otley dan Pierce, 1996) juga menyatakan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi auditor yang melakukan tindakan premature *sign-off* adalah risiko diketahui oleh supervisor.

Kepuasan Kerja

Luthans (2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerja an mereka memberikan hal yang dinilai penting. Menurut Luthans (2006), terdapat tiga dimensi yang diterima secara umum dalam kepuasan kerja. Pertama, kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja dapat dilihat dan diduga. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan. Misal nya jika anggota organisasi merasa bahwa mereka bekerja terlalu keras daripada yang lain dalam departemen, tetapi menerima penghargaan lebih sedikit, maka mereka mungkin akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan, pimpinan, dan atau rekan kerja mereka. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka mereka mungkin akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan.

Menurut Robbins (2003), pekerjaan seseorang lebih daripada sekadar kegiatan yang jelas seperti mengocok kertas, menunggu pelanggan, atau mengemudi sebuah truk. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang dari yang ideal. Hal ini berarti penilaian seorang karyawan terhadap seberapa puas atau tidak puasnya dia dengan pekerjaannya merupakan penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur

pekerjaan yang terbedakan dan terpisahkan satu sama lain. Robbins (2003) menyebutkan sejumlah faktor yang merupakan unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, yatu; sifat dasar pekerjaan, penyeliaan, upah langsung, kesempatan promosi dan hubungan dengan rekan kerja.

Sementara itu, Luthans (2006) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yang diringkas kedalam lima dimensi berikut; Pertama, pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umpan balik dari pekerjaan itu sendiri dan otonomi merupakan dua faktor motivasi utama yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu, karakteristik pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja, dan jika persyaratan kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka cenderung menjadi puas. Pekerjaan yang menarik dan menantang, serta perkembangan karier juga merupakan hal penting untuk para karyawan. Kedua, gaji. Uang dan gaji merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. Uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. Ketiga, promosi. Kesempatan promosi memiliki pegaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki berbagai penghargaan. Misalnya, individu yang dipromosikan atas dasar senioritas sering mengalami kepuasan kerja, tetapi tidak sebanyak orang yang dipromosikan atas dasar kinerja. Begitu juga halnya dengan promosi eksekutif yang mungkin lebih memuaskan daripada promosi yang terjadi pada level bawah organisasi. Keempat, pengawasan (supervisi). Terdapat dua dimensi gaya pengawasan yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama, yang berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Hal itu secara umum dimanifestasikan dalam cara-cara seperti meneliti seberapa baik kerja karyawan, memberikan nasihat dan bantuan pada individu, dan berkomunikasi dengan rekan kerja secara personal maupun dalam konteks pekerjaan. Dimensi kedua adalah partisipasi atau pengaruh, seperti diilustrasikan oleh manajer yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Partisipasi memiliki efek positif pada kepuasan kerja. Iklim partisipasi yang diciptakan penyelia memiliki efek yang lebih penting pada kepuasan kerja daripada partisipasi pada keputusan tertentu. Kelima, kelompok kerja. Pada umumnya, rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja yang baik atau tim yang efektif membuat pekerjaan menjadi menyenagkan. Akan tetapi, faktor tersebut bukan hal penting bagi kepuasan kerja. Sebaliknya, jika kondisi sebaliknya yang terjadi (orang sulit untuk bekerja sama), faktor itu mungkin memiliki efek negatif pada kepuasan kerja. Keenam, kondisi kerja. Jika kondisi kerja bagus (misalnya bersih, lingkungan menarik), individu akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika kondisi kerja buruk (misalnya udara panas, lingkungan bising), individu akan lebih sulit menyelesaikan pekerjaan. Efek lingkungan kerja pada kepuasan kerja sama halnya dengan efek kelompok kerja. Jika segalanya baik, tidak ada masalah kepuasan kerja, tetapi jika segalanya berjalan buruk, masalah ketidak puasan kerja akan muncul.

Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

DeAngelo (Samelson *et al*., 2006) mendefinisikan kualitas audit sebagai proba-

bilitas bahwa auditor; (a) akan dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. DeAngelo menyatakan bahwa kualitas audit merupakan konsep yang sulit diukur karena karakteristik audit yang sulit diamati. Beberapa peneliti telah berusaha untuk meneliti kualitas audit dengan menggunakan proksi yang berbeda, misalnya ukuran KAP (Francis dan Yu, 2009), opini *going concern* (Carey dan Simnett, 2006; Geiger dan Raghunandan, 2002), manajemen laba (Ghosh dan Moon, 2005; Myers *et al*., 2003; Johnson *et al*., 2002), atau harga jasa audit (Francis dan Yu, 2009).

Geiger dan Dasaratha (2006) meneliti perbedaan kualitas audit KAP big 4 dan KAP non big 4 berdasarkan tingkat ketepatan laporan audit. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa tingkat ketepatan laporan audit dari KAP big 4 lebih tinggi dari pada KAP non big 4, yang menunjukkan bahwa kualitas audit KAP big 4 lebih tinggi dari pada KAP non big 4. Sementara itu, Carey dan Simnett (2006) dan Geiger dan Raghunandan (2002) menguji kualitas audit berdasarkan kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan di AS. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa *auditor tenure* (lamanya auditor menangani klien) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going concern*.

Ghosh dan Moon (2005), Myers *et al*. (2003), dan Johnson *et al*. (2002) menguji kualitas audit berdasarkan manajemen laba. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa *auditor tenure* berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba. Sementara itu, Francis dan Yu (2009) melaporkan temuan bahwa KAP big membebankan premium atas jasa auditnya, dan hal tersebut diinterpretasikan karena KAP big memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dari pada KAP non big.

Pendekatan lain dalam meneliti kualitas audit adalah dengan menilai kualitas pekerjaan audit berdasarkan bagaimana auditor melaksanakan langkah-langkah dalam program audit. Coram *et al*. (2003) menyebut pendekatan ini sebagai tindakan yang menurunkan kualitas audit (*reduced audit quality*). *Reduced audit quality* (RAQ) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor selama pelaksanaan audit yang dapat mengurangi efektivitas dalam pengumpulan bukti audit (Malone dan Roberts, 2004). Tindakan yang menurunkan kualitas audit tidak berarti bahwa KAP akan mengeluarkan opini audit yang tidak tepat, namun hal tersebut menunjukkan bahwa auditor tidak melaksanakan audit sesuai dengan standar audit. Coram *et al*. (2003) menyatakan bahwa jika pekerjaan lapangan tidak dilaksanakan secara tepat, maka kemungkinan opini audit tidak tepat juga akan meningkat.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Herbach (2001) bahwa tindakan yang menurunkan kualitas audit merupakan kegagalan auditor dalam melaksanakan prosedur-prosedur audit yang mengurangi efektivitas dalam pengumpulan bahan bukti. Dengan demikian tindakan tersebut dapat menyebabkan bahan bukti menjadi tidak dapat diandalkan, tidak benar, atau tidak layak baik secara kuantitatif atau kualitatif. Soobaroyen dan Chengabroyan (2006) telah memberikan contoh beberapa tindakan yang sering dilakukan auditor yang dapat mengurangi kualitas audit, diantaranya; mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan, menghentikan beberapa prosedur audit penting yang belum selesai dikerjakan secara lengkap, atau mengabaikan/tidak melaksanakan beberapa prosedur audit penting lainnya.

Hasil penelitian Malone dan Roberts (2004) menyebutkan bahwa lebih dari 75% responden auditor yang disurvey menyatakan pernah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kualitas audit. Adapun tindakan yang paling sering

dilakukan oleh staf auditor adalah terlalu tergesa-gesa dalam melaksanakan beberapa prosedur audit. Sementara itu, Suryanita *et al*. (2007) menyatakan bahwa salah satu tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit adalah penghentian *premature* atas prosedur audit. Praktik ini terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan/ tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi ia dapat memberikan simpulan.

Alderman dan Deitrick (2001) melakukan penelitian tentang penghentian *premature* atas prosedur audit tersebut dengan menggunakan sampel auditor yang bekerja pada KAP Big 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 31% responden berpendapat bahwa praktik ini telah terjadi dan merupakan akibat dari supervisi yang tidak mencukupi, hambatan waktu, dan tidak menanyakan representasi klien. Sementara itu, hasil penelitian Hadi (2007) menyebutkan bahwa lebih dari 50% respondennya telah melakukan penghentian *premature* atas prosedur audit. Prosedur yang paling sering dihentikan adalah mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan, sedangkan yang paling jarang diitinggalkan/dihentikan secara *premature* adalah konfirmasi ke pihak ketiga.

Beberapa penelitian juga telah menguji faktor-faktor yang dapat menyebabkan auditor melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Coram *et al*. (2004) misalnya, telah meneliti pengaruh tekanan anggaran waktu dan risiko salah saji terhadap kecenderungan auditor untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Penelitian ini dilakukan terhadap 103 staf auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang ada di Australia. Hasil penelitian menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu dapat menyebabkan auditor melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit tersebut akan berkurang ketika risiko salah saji yang dihadapi lebih tinggi.

Hasil penelitian Coram dan Juliana (2004) sesuai dengan pernyataan bahwa risiko salah saji merupakan salah satu pertimbangan paling penting yang dapat mempengaruhi keputusan auditor. Standar auditing No. 400, *Risk Assessments and Internal Control* (*International Federation of Accountants*, 2000, dalam Coram dan Juliana, 2004) menyatakan bahwa ketika penilaian terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian lebih besar, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor harus lebih besar. Sementara itu, Robertson (2007) menyatakan bahwa tekanan waktu penyelesaian (*time deadline pressure*) dapat mempengaruhi kualitas audit. Staf auditor akan cenderung untuk tidak melaporkan informasi penting yang perlu ditindaklanjuti dengan beberapa prosedur audit, ketika terdapat tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat. Lebih lanjut Robertson menyatakan bahwa ketika supervisor/atasan staf auditor lebih menekankan pada pencapaian waktu audit, maka kualitas audit bukan menjadi pertimbangan utama, sehingga akan diabaikan oleh staf auditor.

Malone dan Roberts (2004) menyatakan bahwa kegagalan auditor untuk melaksanakan prosedur-prosedur audit seperti yang sudah direncanakan dapat disebabkan oleh karakteristik personal, prosedur *review* (supervisi) dan pengendalian kualitas KAP, struktur audit KAP, dan persepsi auditor terhadap tekanan anggaran waktu. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Suryanita *et al*. (2007), bahwa prosedur *review* yang tersusun dengan baik dan pengendalian kualitas yang terus menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kesalahan yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan hasil penelitiannya yang menguji pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit, Francis dan Yu (2009) menyatakan bahwa pengalaman

merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan KAP-KAP besar dengan jumlah penugasan yang lebih banyak dapat memberikan kesempatan bagi auditornya untuk mengembangkan keahliannya dalam mendeteksi masalah-masalah keuangan yang material. Auditor di KAP-KAP besar juga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan supervisi atas konsultasi, karena lebih banyak mempunyai atasan dan kolega mereka yang mempunyai berbagai macam keahlian.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya, Pierce dan Sweeney (2006) menyatakan bahwa tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit terdiri atas 3 jenis, yaitu; *premature sign-off*, *under-reporting of time*, dan perilaku yang menurunkan kualitas audit lainnya. Sementara itu, Soobaroyen dan Chengabroyan (2006) menyebutkan bahwa *premature sign-off* merupakan tindakan yang paling mengancam kualitas audit. Pierce dan Sweeney (2006) mengartikan *premature sign-off* sebagai tindakan yang dilakukan oleh auditor yang seolah-olah telah menyelesaikan prosedur audit tanpa benar-benar melakukannya. *Under-reporting of time* terjadi ketika auditor tidak membebankan/mencatatkan waktu kerjanya ke dalam jumlah jam kerja yang telah dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan audit tertentu (Pierce dan Sweeney, 2006). Tindakan ini dilakukan agar jumlah jam kerja yang dibebankan pada pekerjaan audit menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya. Walaupun tindakan ini tidak mempengaruhi kualitas audit secara langsung, namun tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya tekanan anggaran waktu audit pada periode audit tahun berikutnya (Donelly *et al*., 2003).

Sementara itu, perilaku yang menurunkan kualitas audit lainnya adalah tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit lainnya selain *premature sign-off* (Pierce dan Sweeney, 2006). Malone dan Roberts (2004) telah mengidentifikasi beberapa tindakan yang menurunkan kualitas audit selain *premature sign-off*, yaitu; menerima penjelasan klien yang tidak beralasan, melakukan *review* dangkal (tidak rinci) terhadap dokumen pendukung yang berasal dari klien, gagal untuk menyelidiki secara tuntas masalah teknis akuntansi dan auditing, mengurangi jumlah pekerjaan pada bagian audit tertentu yang seharusnya dilakukan secara lengkap, dan tidak dapat menyelesaikan prosedur yang diminta oleh program audit dengan menggunakan cara-cara lain.

Pengaruh Supervisi terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Standar pekerjaan lapangan (SPAP, 2001) yang pertama menyatakan "pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya". Selanjutnya, standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan "bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (SPAP, 2001). Pada dasarnya, kedua standar pekerjaan lapangan tersebut meminta auditor untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dan penuh kehati-hatian. Supervisi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk mempertahankan kualitas pekerjaannya (Arens *et al*., 2008).

Beberapa penelitian juga telah menguji peranan supervisi dalam mencegah atau mengurangi beberapa tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit (Suryanita *et al*., 2007; Alderman dan Deitrick, 2001; Malone dan Roberts, 2004; Otley dan Pierce, 1996; dan Pierce dan Sweeney, 2006). Suryanita *et al*. (2007) telah meneliti faktor-faktor yang dapat menyebabkan auditor melakukan penghentian prematur terhadap prosedur-prosedur audit yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil survey terhadap 79 auditor yang bekerja pada KAP-KAP di Jawa-Tengah dan Jogjakarta, Suryanita *et al*. (2007) menyimpulkan bahwa tindakan auditor untuk melakukan

penghentian prematur terhadap prosedur-prosedur audit yang telah ditetapkan dapat dipengaruhi oleh supervisi dan pengendalian kualitas.

Penelitian yang menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit juga telah dilakukan oleh Malone dan Roberts (2004). Berdasarkan hasil survey terhadap 257 auditor yang bekerja pada 16 KAP, hasil penelitian Malone dan Roberts menyimpulkan bahwa supervisi berhubungan secara negatif dengan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Sementara itu, Otley dan Pierce (1996) meneliti pelaksanaan sistem pengendalian yang diterapkan di KAP-KAP Big-6. Hasil penelitian Otley dan Pierce menyebutkan bahwa persepsi auditor tentang efektivitas prosedur *review* (supervisi) yang diterapkan di KAP berhubungan signifikan dengan tindakan-tindakan penghentian prematur atas prosedur audit dan perilaku-perilaku yang dapat menurunkan kualitas audit lainnya.

Selanjutnya, Alderman dan Deitrick (2001) juga telah menguji tekanan anggaran waktu yang dipersepsikan oleh auditor dan terjadinya tindakan penghentian prematur. Penelitian Wayne dan Deitrick dilakukan dengan menguji sampel staf auditor yang berasal dari 19 kantor cabang KAP. Berdasarkan hasil analisis terhadap 274 jawaban kuesioner dari responden penelitian, Wayne dan Deitrick menyatakan bahwa tindakan penghentian prematur atas beberapa prosedur audit disebabkan oleh; a) supervisi yang masih lemah, b) tekanan anggaran waktu, dan c) penilaian auditor yang menyatakan bahwa prosedur-prosedur audit tersebut tidak perlu atau tidak material. Penelitian lainnya dilakuka oleh Pierce dan Sweeney (2006) yang meneliti persepsi auditor tentang akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya perilaku-perilaku yang dapat mengancam kualitas audit. Hasil penelitian Pierce dan Sweeney menyebutkan bahwa rendahnya risiko yang akan dihadapi auditor ketika mereka terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kualitas audit dapat mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut;

H_1 : Supervisi berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Luthans (2006) dan Robbins (2003) me nyebutkan beberapa akibat yang dapat di timbulkan oleh kepuasan atau ketidak puasan kerja, diantaranya; meningkatnya produktivitas atau kinerja, meningkatnya tingkat perputaran kerja atau meningkatnya tingkat absensi kerja. Sementara itu, Kreitner dan Kinicki (2005) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi beberapa variabel penting, yaitu; motivasi, keterlibatan dalam pekerjaan, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, komitmen organisasi, ketidak-hadiran, berhentinya karyawan, stres yang dirasakan, atau prestasi kerja.

Luthans (2006), Robbins (2003), dan Kreitner dan Kinicki (2005) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku-perilaku yang dapat menguntungkan organisasi. Sebaliknya, ketidak-puasan kerja dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku disfungsional. Pierce dan Sweeney (2006) menyatakan bahwa perilaku disfungsional merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi, yang dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks auditing, perilaku disfungsional tersebut dapat berbentuk tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit (Donnelly *et al.*, 2003). Soobaroyen dan Chengabroyan (2005) telah memberikan contoh beberapa tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit, diantara-

nya; mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan, atau menghentikan beberapa prosedur audit penting yang belum selesai dikerjakan secara lengkap.

Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku disfungsional (Herbach, 2001; Ghosh, 2000; Mangione dan Quinn, 1995; Duffy *et al*., 2002; Anton, 2009). Hasil penelitin Duff *et al*. (2002) dan Mangione dan Quinn (1995) menyatakan bahwa kepuasan kerja berhubungan secara negatif dengan perilaku-perilaku yang dapat menurunkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian tersebut, Duff *et al*., (2002) memberikan contoh beberapa perilaku disfungsional yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja, seperti; melaksanakan pekerjaan secara lamban, tidak teliti, atau melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan di tempat kerja. Contoh lainnya yang merupakan perilaku disfungsional dicerminkan dalam hal-hal seperti; kualitas dan kuantitas yang rendah, keterlambatan, ketidak-hadiran, atau produk-produk yang rusak (Mangione dan Quinn, 1995).

Sementara itu, Ghosh (2000) menyatakan bahwa ketidak-adilan yang dirasakan oleh seseorang akan memotivasi orang tersebut untuk berusaha mengurangi rasa ketidak-adilan tersebut. Berbagai cara sering dilakukan untuk mengurangi rasa ketidak-adilan tersebut, termasuk melakukan perilaku-perilaku disfungsional (bertentangan dengan tujuan organisasi). Hasil penelitian Ghosh (2000) menunjukkan bahwa ketidakpuasan pekerja terhadap sistem kompensasi yang diterapkan di perusahaan dapat memotivasi pekerja untuk melakukan tindakan manipulatif. Dalam pelaksanaan audit, tindakan manipulatif dapat berbentuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Pendapat yang sama juga didukung oleh Herbach (2001) yang meneliti pengaruh elemen-elemen kontrak psikologis terhadap tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian Herbach (2001) menyebutkan bahwa beberapa unsur dari kepuasan kerja (supervisi, gaji, pelatihan, otonomi, lingkungan kerja, atau rekan kerja) berhubungan secara signifikan dengan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut;

H_2 : Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK. Berdasarkan JSX *Fact Book* 2011, jumlah KAP yang terdaftar di Bapepem-LK adalah 158 KAP. Dalam melakukan pekerjaannya, auditor bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari partner, manajer, supervisor, senior, dan junior auditor. Sementara itu, sebagaimana telah dinyatakan oleh Malone dan Roberts (2004), tindakan yang menurunkan kualitas audit merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditor selama pelaksanaan audit yang dapat mengurangi efektivitas pengumpulan bahan bukti audit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka auditor yang akan digunakan untuk menjadi responden adalah auditor yang menempati posisi junior, senior, supervisor, dan manajer. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa auditor-auditor tersebut merupakan auditor yang bertanggungjawab secara langsung untuk melaksanakan pengumpulan bahan bukti audit dan pengawasannya terhadap proses pengumpulan bahan bukti tersebut. Berdasarkan data terakhir yang dilaporkan ke Departemen Keuangan, jumlah auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK berjumlah sekitar 7.290 auditor (Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai Departemen Keuangan, 2010).

Penentuan jumlah sampel didasarkan pada langkah-langkah penentuan ukuran sampel menurut Sitepu (1995). Adapun langkah-langkah tersebut adalah: Pertama, tentukan diagram jalur yang akan digunakan dalam analisis. Kedua, tentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil antara variabel penyebab yang ada dalam jalur dengan variabel akibat. Penelitian ini menentukan ukuran sampel dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut; tarif nyata yang diinginkan sebesar 5%, kuasa uji dari pengujian sebesar 95%, nilai koefisien korelasi (ρ) terkecil sebesar 0,25, yang ditentukan berdasarkan hasil pilot test. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka perhitungan ukuran sampel dilakukan sebagai berikut:

(1) Pada iterasi pertama:

$$n = \frac{(1{,}645 + 1{,}645)^2}{(0{,}2554)^2} + 3 = 168{,}923$$

Sedangkan

$$U_p = 1/2 \text{ Ln} \frac{(1 + 0{,}25)}{(1 - 0{,}25)} = 0{,}2554$$

(2) Pada iterasi kedua:

$$n = \frac{(1{,}645 + 1{,}645)^2}{(0{,}2562)^2} + 3 = 167{,}96$$

Sedangkan

$$U_p = 1/2 \text{ Ln} \frac{(1 + 0{,}25)}{(1 + 0{,}25)} + \frac{0{,}25}{2(168{,}923 - 1)}$$

(3) Pada iterasi ketiga:

$$n = \frac{(1{,}645 + 1{,}645)^2}{(0{,}2562)^2} + 3 = 167{,}95$$

Pada iterasi ketiga diperoleh jumlah sampel sebesar 168, yang nilainya sama dengan perhitungan sampel pada iterasi kedua. Oleh karena jumlah sampel yang dihitung pada iterasi ketiga sama dengan iterasi kedua, maka perhitungan jumlah sampel berhenti sampai dengan perhitungan pada iterasi ketiga dengan jumlah sampel sebesar 168 (jumlah sampel minimal).

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan tabel angka random yang akan memilih secara acak auditor yang bekerja di KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK. Tabel angka random dibuat dengan menggunakan fasilitas komputer melalui program *Excel*. Sebelum dipilih secara random, anggota populasi diberi identitas dengan menggunakan angka nomor 1 sampai dengan nomor 7.290. Penentuan nomor dilakukan berdasarkan KAP-KAP yang sebelumnya diurutkan berdasarkan urutan abjad nama KAP. Nomor masing-masing anggota populasi ditentukan berdasarkan angka kumulatif jumlah auditor. Contoh penentuan nomor anggota populasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Nomor anggota populasi ditentukan berdasarkan angka di kolom jumlah kumulatif. Misalnya anggota dengan angka nomor 23 sampai dengan nomor 32 adalah auditor yang bekerja pada KAP Abdi Ichjar dan Rekan. Selanjutnya, berdasarkan tabel angka random akan dipilih anggota sampel dengan jumlah 168 auditor (jumlah sampel minimal) yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepem-LK.

Tabel 3
Contoh Penentuan Nomor Anggota Populasi

No.	Nama KAP	Jumlah Auditor	Jumlah Kumulatif
1.	A. Krisnawan & Rekan	11	11
2.	A. Salam Rauf & Rekan	11	22
3.	Abdi Ichjar & Rekan	10	32
4.	Dst.		

Sumber: data penelitian

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel
Supervisi

Supervisi (S) merupakan penelaahan terhadap usaha-usaha audit dan pertimbangan-pertimbangan audit terkait yang dibuat oleh asisten/bawahan untuk menentukan apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan keaadaan yang terjadi (Georgiades, 2006). Variabel supervisi diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan dari dua dimensi, yaitu efektivitas supervisi dan hukuman yang mungkin akan diterima auditor jika terbukti melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit (Malone dan Roberts, 2004).

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja (KK) adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting (Luthans, 2006). Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan 12 pertanyaan dari beberapa dimensi yaitu; pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, rekan kerja, dan kondisi kerja (Luthans, 2006).

Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Malone dan Roberts (2004) mendefinisikan tindakan yang menurunkan kualitas audit *(reduced audit quality/*KA*)* sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor selama pelaksanaan audit yang dapat mengurangi efektivitas dalam pengumpulan bukti audit. Variabel ini diukur berdasarkan menggunakan 6 pertanyaan dari dua dimensi menurut Otley dan Pierce (1996), yaitu *premature sign-off* dan *reduced audit quality* (RAQ) lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey, dengan mengirim kuesioner kepada subjek penelitian, yaitu responden auditor yang bekerja pada KAP. Dengan terlebih dahulu meminta izin dan bantuan kepada pimpinan KAP, kuesioner dikirim kepada staf auditor melalui pimpinan KAP. Kuesioner yang telah diisi kemudian dikirim melalui pos ke alamat peneliti atau diserahkan langsung kepada peneliti/pihak-pihak yang telah dimintai bantuan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau menerima kuesioner yang telah diisi tersebut. Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mendatangi KAP-KAP, pengiriman melalui pos, atau melalui bantuan pihak-pihak lain.

Teknik Pengujian Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$KA = a + b_1S + b_2KK + e$ ……

Keterangan:

KA = Tindakan yang menurunkan kualitas audit
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
S = Supervisi
KK = Kepuasan kerja
e = Error (faktor kesalahan)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) = 0,05 atau 5%. Untuk menguji pengaruh supervisi dan kepuasan kerja terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit dilakukan dengan menguji nilai t pada tingkat signifikansi (α) = 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka disimpulkan hipotesis tidak dapat ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Gambaran Unit Observasi

Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK tahun 2011. Dari sekitar 700 eksemplar kuesioner yang dikirim, sebanyak 213 kuesioner dapat kembali (*response rate* sebesar 30%). Dari 213 kuesioner yang kembali, ada 6 kuesioner yang tidak layak untuk diuji karena diisi oleh auditor yang baru bekerja di KAP kurang dari 1 tahun, atau belum pernah

melaksanakan penugasan audit. Dengan demikian jumlah kuesioner yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sebanyak 207.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, berikut disajikan profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, lama masa kerja, jumlah penugasan dalam 1 tahun terakhir, dan jabatan.

Berdasarkan jenis kelamin, sekitar 60% responden dalam penelitian ini adalah laki-laki, sedangkan sekitar 40% responden berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, para responden dalam penelitian ini mempunyai usia rata-rata sekitar 29 tahun, dengan usia maksimum 66 tahun dan usia minimum responden 21 tahun.

Berdasarkan pendidikan, sebagian besar (89,8%) responden dalam penelitian ini berpendidikan S-1, sekitar 9% responden berpendidikan S-2, dan sisanya sekitar 1% responden berpendidikan D-3. Responden dalam penelitian ini sebagian besar terdiri dari junior auditor (50,2%) dan senior auditor (38,6%), sedangkan yang mempunyai

Tabel 4
Profil Responden

Profil Responden	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	124	59,9
	Perempuan	83	40,1
	Total	**207**	**100**
Usia	Maksimum	66 tahun	
	Minimum	21 tahun	
	Rata-rata	29,22 tahun	
Pendidikan	D3	2	1,1
	S1	186	89,8
	S2	19	9,1
	S3	-	-
	Total	**207**	**100**
Masa Kerja	≤ 2 tahun	82	39,6
	> 2 – 5 tahun	68	32,8
	> 5 – 10 tahun	42	20,2
	> 10 – 15 tahun	13	6,3
	> 15 tahun	2	1,1
	Total	**207**	**100**
Jumlah Penugasan Audit dalam 1 Tahun Terakhir	≤ 3 kali	55	25,6
	> 3-5 kali	65	31,4
	> 5-10 kali	53	26,6
	> 10-15 kali	27	13,1
	> 15 kali	7	3,3
	Total	**207**	**100**
Jabatan	Junior	104	50,2
	Senior	80	38,6
	Supervisor	17	21,3
	Manajer	6	2,9
	Total	**207**	**100**

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

jabatan supervisor dan manajer sekitar 8,2% dan 3%.

Berdasarkan lamanya bekerja di KAP, sekitar 40% responden memiliki masa kerja antara 1-2 tahun, sekitar 33% responden memiliki masa kerja antara lebih dari 2 – 5 tahun, sekitar 20% memiliki masa kerja antara lebih dari 5-10 tahun, sekitar 6% memiliki masa kerja lebih dari 10-15 tahun, dan hanya sekitar 1% responden yang memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun.

Berdasarkan jumlah penugasan dalam 1 tahun terakhir, sekitar 26% responden dalam penelitian ini telah melaksanakan audit sebanyak antara 1-3 kali selama 1 tahun terakhir, sekitar 31% telah melaksanakan audit selama 1 tahun sebanyak antara lebih dari 3-5 kali, sekitar 27% rata-rata melaksanakan audit sebanyak antara lebih dari 5-10 kali dalam 1 tahun, sekitar 13% memiliki jumlah penugasan antara lebih dari 10-15 kali dalam 1 tahun, dan sekitar 3,5% telah melaksanakan audit dalam 1 tahun terakhir lebih dari 15 kali penugasan.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur variabel yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Metode yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *product moment*. Teknik untuk menguji validitas instrumen tiap-tiap variabel dilakukan dengan cara mengkorelasikan tiap skor item instrumen dengan total skor dari jumlah item instrumen tersebut. Dari hasil uji korelasi ini selanjutnya akan dicari nilai t masing-masing item pernyataan. Indikatornya adalah dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel. Apabila nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (1,684) maka korelasi tersebut adalah signifikan, sehingga item pernyataan tersebut dinyatakan valid dan akan dipakai untuk pengumpulan data penelitian. Namun sebaliknya, apabila nilai t-hitung lebih kecil dari pada nilai t-tabel maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari item pernyataan yang akan digunakan dalam kuesioner untuk pengumpulan data penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan korelasi *product moment* (r), diperoleh hasil uji validitas untuk masing-masing variabel yang disajikan pada tabel 5, 6, 7.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung untuk seluruh item pernyataan lebih besar dari pada nilai t-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan yang akan digunakan untuk mengukur variabel supervisi adalah valid, sehingga seluruh item pernyataan yang ada pada variabel supervisi dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Supervisi

Butir Pernyataan	r	t_{hitung}	Keterangan
Item_1	0.523	3,881	Valid
Item_2	0.634	5,185	Valid
Item_3	0.477	3,432	Valid
Item_4	0.614	4,920	Valid
Item_5	0.653	5,453	Valid
Item_6	0.653	5,453	Valid
Item_7	0.450	3,187	Valid
Item_8	0.420	2,927	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja

Butir Pernyataan	r	t_{hitung}	Keterangan
Item_1	0.608	4,843	Valid
Item_2	0.853	10,337	Valid
Item_3	0.758	7,350	Valid
Item_4	0.771	7,657	Valid
Item_5	0.817	8,961	Valid
Item_6	0.760	7,396	Valid
Item_7	0.670	5,708	Valid
Item_8	0.479	3,451	Valid
Item_9	0.555	4,220	Valid
Item_10	0.626	5,077	Valid
Item_11	0.520	3,850	Valid
Item_12	0.566	4,342	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung untuk seluruh item pernyataan lebih besar dari pada nilai t-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan yang akan digunakan untuk mengukur variabel kepuasan kerja adalah valid, sehingga seluruh item pernyataan yang ada pada variabel kepuasan kerja dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Pada tabel 7 berikut disajikan hasil uji validitas untuk variabel tindakan yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung untuk seluruh item pernyataan lebih besar dari pada nilai t-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan yang akan digunakan untuk mengukur variabel tindakan yang menurunkan kualitas audit adalah valid, sehingga seluruh item pernyataan yang ada pada variabel kualitas audit dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Setelah selesai dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis Cronbach-Alpha. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2005:42), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable apabila

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit

Butir Pernyataan	r	t_{hitung}	Keterangan
Item_1	0.818	8,994	Valid
Item_2	0.874	11,376	Valid
Item_3	0.900	13,059	Valid
Item_4	0.901	13,135	Valid
Item_5	0.623	5,037	Valid
Item_6	0.940	17,425	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

memberikan nilai Cronbach-Alpha > 0,06.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha, diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut pada tabel 8. Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki koefisien reliabilitas di atas 0,60. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini telah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil perngujian regresi berganda dengan menggunakan software SPSS dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Pengaruh Supervisi Terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Pengaruh supervisi terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit diuji dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS menunjukkan nilai t = -3,163 dengan tingkat signifikansi (α) = 0,02. Oleh karena nilai tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa supervisi berpengaruh terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien (b) = -0,206 yang dapat diartikan bahwa semakin ketat supervisi yang diterapkan, maka tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit akan semakin berkurang.

Menurut hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas supervisi dan besarnya ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap auditor yang melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit dapat mengurangi/menghindari tindakan auditor yang menurunkan kualitas audit. Jika efektivitas supervisi dan ancaman hukuman meningkat, maka perilaku-perilaku auditor yang menurunkan kualitas audit akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Arens *et al*. (2008) yang menyatakan bahwa supervisi merupakan salah cara yang dapat digunakan

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah Pernyataan	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Supervisi	8	0,642	Reliabel
Kepuasan Kerja	12	0,886	Reliabel
Kualitas Audit	6	0,918	Reliabel

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 9
Hasil Pengujian Persamaan Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	26,897	2,05		13,079	,000
	SUP	-,271	,086	-,206	-3,163	,002
	PUAS	-,208	,037	-,361	-5,546	,000

a. Dependent Variable: KUALITAS

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

oleh KAP untuk mempertahankan kualitas auditnya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Otley dan Pierce (1996) yang menyebutkan bahwa efektivitas supervisi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign-off*) dan perilaku-perilaku yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebagian besar auditor yang menjadi responden penelitian menyatakan setuju bahwa supervisi yang dilakukan di KAP akan dapat menemukan tindakan-tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit. Diantaranya; akan dapat menemukan tindakan auditor yang melakukan penghentian prematur, atau menemukan tindakan auditor yang memberikan tanda *tickmark* sebagai tanda prosedur audit telah dikerjakan padahal auditor tersebut hanya memeriksa beberapa dokumen klien yang tidak lengkap.

Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Pierce dan Sweeney (2006) yang menemukan bahwa rendahnya risiko yang akan dihadapi auditor ketika mereka terbukti melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi kualitas audit dapat mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besarnya ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap auditor yang terbukti melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku auditor yang menurunkan kualitas audit. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui tindakan auditor yang akan mendapatkan hukuman paling berat menurut responden adalah jika mereka terbukti melakukan tindakan penghentian prematur atau memberi tanda *tickmark* sebagai tanda auditor telah melaksanakan prosedur audit padahal hanya memeriksa beberapa dokumen klien yang tidak lengkap. Adapun ancaman hukuman yang paling ringan jika terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit adalah ketika auditor gagal memeriksa masalah akuntansi yang belum meyakinkan, atau menerima saja penjelasan klien tanpa melakukan prosedur audit tambahan untuk meyakinkan masalah tersebut.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Pengaruh kepuasan kerja terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit diuji dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS menunjukkan nilai t = -5,546 dengan tingkat signifikansi (α) = 0,00. Oleh karena nilai tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien (b) = -0,361 yang dapat diartikan bahwa semakian tinggi tingkat kepuasan kerja auditor, maka tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit akan semakin berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Luthans (2006) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku-perilaku yang dapat menguntungkan organisasi. Sebaliknya, ketidak-puasan kerja dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku disfungsional. Dalam konteks auditing, perilaku disfungsional tersebut dapat berbentuk tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kepuasan kerja auditor yang menjadi responden penelitian dapat mempengaruhi terjadinya tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan beberapa contoh tindakan yang menurunkan kualitas audit, yang dapat dikurangi dengan cara meningkatkan kepuasan kerja auditor, diantaranya; 1) menerima penjelasan klien tentang masalah akuntansi tertentu yang tidak beralasan, tetapi auditor menerima begitu saja penjelasan tersebut, 2) me-

ngurangi jumlah pekerjaan dalam bagian audit tertentu yang seharusnya dilakukan secara lengkap, 3) melakukan *premature sign-off* (tidak dapat menyelesaikan prosedur audit yang telah ditetapkan, tetapi melaporkan telah menyelesaikan prosedur tersebut), atau 4) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen klien yang tidak lengkap, tetapi dalam kertas kerja memberi tanda tickmark sebagai tanda prosedur audit telah dikerjakan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Herbach (2001) yang menemukan bahwa beberapa dimensi kepuasan kerja (supervisi, gaji, pelatihan, otonomi, lingkungan kerja, atau rekan kerja) dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan analisis deskriptif juga dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan cukup puas dengan pekerjaannya. Hal ini dapat diketahui dari sebagian besar auditor yang menyatakan cukup puas dengan dimensi-dimensi yang membentuk kepuasan kerja (pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisi, rekan kerja dan kondisi kerja). Namun, untuk meningkatkan kepuasan kerja ke tingkat yang lebih optimal, KAP juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan sebagian auditor terhadap beberapa dimensi kepuasan kerja yang oleh sebagian auditor dianggap belum memuaskan. Adapun beberapa dimensi kepuasan kerja yang oleh sebagian auditor masih dianggap belum memuaskan, diantaranya; kepuasan terhadap gaji, pelatihan/promosi, supervisi oleh atasan, atau kepuasan terhadap jam kerja yang diterapkan di KAP tempat mereka bekerja. Agar tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit menjadi berkurang, maka beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kepuasan kerja menjadi rendah harus diperbaiki agar kondisi tersebut tidak terus terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa; Pertama, Supervisi berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa supervisi yang efektif dapat mengurangi/menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Jika efektivitas supervisi dan ancaman hukuman meningkat, maka perilaku-perilaku yang dapat menurunkan kualitas audit akan menurun. Kedua, Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Rendahnya kepuasan kerja (tingginya ketidak-puasan kerja) dapat menyebabkan auditor untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Agar tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit tidak terjadi/berkurang maka KAP harus mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja.

Dengan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan bahwa; Pertama, untuk meningkatkan kualitas audit, KAP diharapkan memperbaiki sistem supervisinya sesuai dengan yang diharuskan oleh profesi. KAP perlu menerapkan prosedur supervisi yang harus dilakukan oleh semua atasan kepada bawahannya. Sistem pengendalian kualitas di KAP harus dapat menjamin bahwa prosedur supervisi yang telah di tetapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya, serta memastikan bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan oleh auditor telah disupervisi oleh atasanya. Kedua, KAP juga disarankan untuk memperbaiki kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya ketidakpuasan kerja. KAP perlu mempertimbangkan gaji, pelatihan, atau promosi sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk memotivasi auditor agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

Alderman, W. dan J. Deitrick. 2001. Auditors' perceptions of time budget pressures and premature sign-offs: a

replication and extension. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 20(1): 54-68.

Anton, C. 2009. The impact of role stress on workers' behavior through job satisfaction and organizational commitment. *International Journal of Psychology* 44(3): 187-194.

Arens, A., R. J. Elder, M. S. Beasley. 2008. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Eleventh Edition. Pearson Prentice Hall.

Carey, P. dan R. Simnett. 2006. Auditor Partner Tenure and Audit Quality. *The Accounting Review* 81(3): 653-676.

Coram, P., Juliana dan D. Woodliff. 2003. A Survey of Time Budget Pressure And Reduced Audit Quality Among Australian Auditors. *Autralian Accounting Review* 13(29): 38-44.

Coram, P., Juliana dan D. Woodliff. 2004. The effect of risk misstatement on the propensity to commit reduced audit quality act under time budget pressure. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23(2): 159-167.

Donelly, D. P., J. J. Quirin dan D. O'Bryan. 2003. Auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: An explanatory model using auditors' personal characteristics. *Behavioral Research In Accounting* (15): 87-110.

Duffy, M., J. Shaw, dan D. Ganster. 2002. Positive affectivity and negative outcomes: the role of tenure and job satisfaction. *Journal of Applied Psychology* 83(6): 950-959.

Farger, N., D. Mayorga dan K. Trotman. 2005. A field-based analysis of audit workpaper review. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 24(2): 85-110.

Fatchurrohman, A. 2 Mei 2001. *Majalah Media Akuntasi*.

Francis, J. dan M. Yu. 2009. Big 4 Office Size and Audit Quality. *The Accounting Review* 84(5): 1.521-1.552.

Geiger, M. A. dan K. Raghunandan. 2002. Auditor tenure and audit reporting failures. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 21(1): 67-78.

Georgiades. 2006. GAAS Update Service. *A Wolters Kluwer Business*.

Ghosh, A. dan D. Moon. 2005. Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality. *The Accounting Review* 80(2): 585-612.

Ghosh, D. 2000. Organizational design and manipulative behavior. *Behavioral Research In Accounting* 12(1): 1-30.

Ghozali, I. 2005. *Structural equation modelling: teori, konsep, dan aplikasi*. BP Undip. Semarang.

Gupta, P., N. Umanath dan M. Dirsmith. 2000. Supervision practices and audit effectiveness: an empirical analysis of GAO audit. *Behavioral Research in Accounting* 12(2): 119-138.

Hadi, S. 2007. Pengaruh tindakan supervisi terhadap kepuasan akuntan pemula. *JAAI* 11(2): 187-198.

Herbach, O. 2001. Audit Quality, Auditor Behavior and The Psychological Contract. *The European Accounting Review* 10(4): 787-802.

Huda, M. 2000. Hubungan antara tindakan supervisi dengan kepuasan kerja: sebuah analisis perbedaan antara KAP besar dan kecil. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 2(1): 33-44.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Johnson, V., I. Khurana dan J. K. Reynolds. 2002. Audit firm tenure and the quality of accounting earnings. *Contemporary Accounting Research* 19(1): 637-660.

Kreitner, R. dan A. Kinicki. 2005. *Organizational Behavior*. 5th Edition. McGraw-Hill. USA.

Luthans, F. 2006. *Organizational Behavior*, 10th Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. USA.

Malone, C. F. dan R. W. Roberts. 2004. Factors Associated with the Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23(2): 49-64.

Mangione, T. dan R. Quinn. 1995. Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. *Journal of Applied Psychology* 80(1): 114-116.

Messier, W., S. Glover dan D. Prawitt. 2006. *Auditing & assurance service: a system approach*. 4th edition. McGraw-Hill. USA.

Myers, J., L. A. Myers dan T. C. Omer. 2003. Exploring the term of auditor-client relationship and the quality of earnings: a case for mandatory auditor rotation. *The Accounting Review* 78(3): 779-799.

Nurahma dan N. Indriantoro. 2000. Tindakan supervisi dan kepuasan kerja akuntan pemula di Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 3(1): 45-63

Otley, D. dan B. J. Pierce. 1996. The operation of control systems in large audit firms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 15(2): 65-84.

Payne, E. dan R. J. Ramsay. 2008. Audit documentation methods: a path model of cognitive processing, memory, and performance. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 27(1): 151-168.

Pierce, B. dan B. Sweeney. 2006. Perceived adverse consequences of quality threating behavior in audit firms. *International Journal of Auditing* 10(1): 19-39.

Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan RI. 2010. Hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2008 – 2009.

Robbins, S.P. 2003. *Organizational behavior*. 12th edition. Pearson Education, Inc. New Jersey.

Robertson, J. C. 2007. Staff Auditor Reporting Decisions Under Time Deadline Pressure. *Managerial Auditing Journal* 22(4): 340-353.

Samelson, D., S. Lowensohn dan L. E. Johnson. 2006. The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 18(2): 139-166.

Sitepu, N. 1995. *Analisis Jalur*. Penerbit FMIPA Unpad. Bandung.

Soobaroyen, T. dan C. Chengabroyan. 2006. Auditors' Perceptions of Time Budget Pressure, Premature Sign Offs and Under-Reporting of Chargeabel Time: Evidence from a Developing Country. *International Journal of Auditing* 10(3): 201-218.

Suryanita, W., D. Setiawan dan H. Triatmoko. 2007. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 10(1): 1-19.

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan **ISSN 1411 - 0393**
Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

PENGARUH SUPERVISI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP TINDAKAN YANG MENURUNKAN KUALITAS AUDIT

Kurnia
kurnia_stiesia@yahoo.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Ernie Tisnawati Sule
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung

ABSTRACT

This study examines the effect of supervision and job satisfaction on reduced audit quality. Based on the literature review, this study hypothesize that supervision and job satisfaction have an effect on reduced audit quality. This study uses data from auditors of audit firms listing in Bapepam-Lembaga Keuangan (LK). Data was collected through questionnaires. The respondents of this research are junior auditors, senior, supervisor, and manager. Data were analyzed using multiple regression analysis for testing hypothesis. The results show that supervision and job satisfaction have a negatively effect on reduced audit quality. Spesifically, this study indicates that auditors who have perceived that supervision isn't effective are more likely to commit reduced audit quality. The results also indicate that auditors who their job satisfaction is lower tend to engage in reduced audit quality. Based on these results, to improve the quality of audit, quality control system in KAP should ensure that the supervision procedures have been implemented as appropriate, as well as ensuring that all work has been supervised by his superior auditor. Based on the results of this study also suggested that KAP improve conditions that can cause job dissatisfaction.

Key words: Supervision, Job Satisfaction and Reduced Audit Quality.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh supervisi dan kepuasan kerja terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan tinjauan literatur, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa supervisi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data hasil survey dari auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bapepem-Lembaga Keuangan (LK). Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dari responden yang terdiri atas auditor junior, auditor senior, supervisor, dan manajer. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi dan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa auditor yang merasa bahwa supervisi tidak dilaksanakan secara efektif lebih cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa auditor yang merasakan kepuasan kerja lebih rendah cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk meningkatkan kualitas audit, sistem pengendalian kualitas di KAP harus dapat menjamin bahwa prosedur supervisi telah dijalankan sebagaimana mestinya, serta memastikan bahwa semua pekerjaan auditor telah disupervisi oleh atasannya. Berdasarkan hasil penelitian ini juga, disarankan agar KAP memperbaiki kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya ketidak-puasan kerja.

Kata-kata kunci: Supervisi, Kepuasan Kerja dan Penurunan Kualitas Audit.

PENDAHULUAN

Auditor merupakan suatu profesi yang dipercaya untuk menentukan kewajaran atas informasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Pemegang saham, kreditur, ataupun pihak lainnya memberikan kepercayaan kepada auditor untuk membuktikan kelayakan informasi dalam laporan keuangan yang disediakan manajemen. Hasil penilaian, analisa serta pendapat dari auditor terhadap suatu laporan keuangan sebuah perusahaan akan sangat menentukan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak ataupun publik yang menggunakannya. Misalnya, para investor dalam mempertimbangkan dan memutuskan kebijakan investasinya, para penasihat keuangan dan penasihat investasi dalam memberikan arahan pada para investor terhadap keadaan dan prospek perusahaan tersebut, para pemberi pinjaman dalam mempertimbangkan serta memutuskan langkah pemberian ataupun penghentian pinjaman bagi perusahaan. Namun, dapat dibayangkan bagaimana banyak pihak akan dirugikan apabila ternyata laporan keuangan yang telah memperoleh penilaian "wajar tanpa pengecualian" dari akuntan publik ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang laporan keuangan tersebut. Misalnya, sebuah bank yang berdasarkan laporan audit yang dihasilkan oleh akuntan publik, memutuskan untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman kepada debiturnya. Pada akhirnya diketahui bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang direkayasa untuk menunjukkan bahwa debitur tersebut tetap dalam keadaan membukukan laba, dan auditor gagal untuk menemukan rekayasa yang dilakukan oleh perusahaan.

Pertanggung-jawaban auditor terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepadanya, menjadi dasar akan hadirnya kualitas dari setiap hasil audit ataupun hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukannya. Keharusan dalam memenuhi kualitas, akan sangat berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang professional yang mandiri. Berbagai cara telah dilakukan baik oleh organisasi profesi yang dalam hal ini adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ataupun Departemen Keuangan RI selaku pembina dan pengawas praktik akuntan publik di Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit dari setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Begitu ketatnya persyaratan yang harus dilalui untuk mendapatkan izin dan kewenangan untuk melaksanakan profesi akuntan publik menggambarkan sudah seharusnya hasil kerja dari auditor akan memberikan perlindungan pada setiap anggota masyarakat yang menggunakan ataupun meletakkan kepercayaan kepadanya dalam proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan independensi auditor, Menteri Keuangan dan IAPI telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan rangkaian pendidikan profesional lanjutan seharusnya sudah memberikan jaminan akan pencapaian kualitas audit seperti yang diharapkan.

Namun, dalam masyarakat masih saja terus terjadi tudingan terhadap ketidak-profesionalan auditor. Begitu seringnya Menteri Keuangan RI menjatuhkan sanksi peringatan hingga sanksi pembekuan izin dari akuntan publik menunjukkan kualitas audit yang dihasilkan profesi akuntan publik masih dipertanyakan. Pelanggaran-pelanggaran profesi yang telah banyak d-i lakukan dalam praktik menunjukkan bukti bahwa auditor telah gagal atau tidak mampu untuk melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan SPAP sebagai suatu panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh auditor dalam memberikan jasa-jasanya. Salah satu pelanggaran terhadap SAK dan SPAP yang cukup menjadi perhatian publik adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terhadap auditor-auditor yang mengaudit bank-bank bermasalah.

Diawali oleh Pembentukan Tim Evaluasi terhadap auditor yang mengaudit bank-bank bermasalah berdasarkan SK. Menteri Keuangan No.472/KMK.01.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999, Departemen Keuangan meminta BPKP untuk melakukan *peer review* terhadap kertas kerja auditor untuk tahun buku 1995, 1996, dan 1997 (Fatchurrohman, 2001). Pembentukan tim itu sendiri sebenarnya didasari oleh kecurigaan masyarakat berkaitan dengan kualitas pekerjaan auditor bank-bank tersebut. Dalam auditnya terhadap bank-bank tersebut, auditor telah memberikan penilaian "wajar tanpa pengecualian" kepada bank-bank yang sebulan kemudian ternyata *collapse*, sehingga terpaksa dibekukan. *Peer review* oleh BPKP dilakukan dengan memeriksa kertas kerja yang dibuat oleh auditor dalam mengaudit bank-bank tersebut. Dengan melihat kertas kerja maka BPKP dapat melihat kualitas pekerjaan auditor, karena tujuan pembuatan kertas kerja audit adalah untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya, serta untuk menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP terhadap kertas kerja auditor bank-bank bermasalah (yang selanjutnya ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha/ BBKU) menunjukkan bahwa banyak auditor yang melanggar SPAP. Pemeriksaan yang dilakukan atas kertas kerja 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit 37 bank bermasalah memperlihatkan bahwa; Pertama, hampir semua KAP tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu akun. Kedua, pada umumnya dokumentasi audit yang kurang memadai. Ketiga, terdapat auditor yang tidak memahami peraturan perbankan tetapi menerima penugasan audit terhadap bank. Keempat, pengungkapan yang tidak memadai terhadap laporan audit. Kelima, terdapat auditor yang tidak mengetahui laporan dan opini audit yang sesuai standar. Adapun rekapitulasi hasil *peer review* terhadap kertas kerja auditor 37 bank bermasalah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi hasil *peer review* terhadap kertas kerja auditor

No.	Uraian pelanggaran	Jumlah KAP/ (%)
1.	Tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu akun	9 KAP (90%)
2.	Dokumentasi tidak memadai	7 KAP (70%)
3.	Tidak melakukan kontrol hubungan	5 KAP (50%)
4.	Tidak melakukan uji ketaatan terhadap peraturan	4 KAP (40%)
5.	Tidak membuat kesimpulan audit	4 KAP (40%)
6.	Tidak melakukan perencanaan sampel audit	3 KAP (30%)
7.	Tidak melakukan pengujian fisik	2 KAP (20%)
8.	Tidak melakukan pengkajian terhadap risiko audit dan materialitas	2 KAP (20%)
9.	Tidak memahami dan mempelajari peraturan perbankan	1 KAP (10%)
10.	Program audit yang tidak sesuai dengan karakteristik bisnis klien	1 KAP (10%)
	Standar pelaporan pengungkapan yang tidak memadai	
11.	Opini audit yang tidak sesuai dengan standar	8 KAP (80%)
12.	Kesalahan pengklasifikasian suatu transaksi	1 KAP (10%)
13.	Laporan audit yang tidak sesuai dengan standar	1 KAP (10%)
14.		1 KAP (10%)

Sumber: Fatchurrohman (2001)

Dari keseluruhan KAP (10 KAP) yang direview, hanya 1 KAP, yaitu KAP H.S. (Fatchurrohman, 2001) yang menurut hasil penilaian BPKP tidak terdapat temuan penyimpangan dari standar auditing. Adapun akibat ketika audit melanggar standar audit seperti yang terdapat dalam hasil pemeriksaan BPKP adalah kemungkinan terbesarnya auditor tidak dapat menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta akhirnya memberikan pendapat yang menyesatkan tentang laporan keuangan yang diauditnya.

Pelanggaran terhadap SPAP ataupun SAK tersebut menunjukkan bahwa sebagian Kantor Akuntan Publik belum melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang seharusnya dipatuhi. Hal tersebut juga dapat menunjukkan bahwa kinerja dari para staf auditor sebagai anggota tim audit belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi para staf auditor agar mereka selalu melaksanakan pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian, dan berusaha untuk menjaga atau mempertahankan kualitas hasil auditnya. Kualitas audit merupakan suatu faktor penentu yang dapat menunjukkan apakah pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Hasil penelitian oleh Behn *et al*., (Samelson *et al*., 2006) yang meneliti tentang atribut penentu kualitas audit menunjukkan bahwa staf audit sebagai anggota tim audit sangat menentukan faktor-faktor keberhasilan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan pengauditan yang berkualitas. Terdapat berbagai atribut yang menentukan kualitas audit. Pelaksanaan atau penerapan atribut-atribut tersebut oleh KAP dalam proses pengauditan sangat ditentukan oleh staf auditor sebagai anggota team audit KAP.

Supervisi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas audit dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit (Georgiades, 2006). Supervisi adalah unsur sangat penting dalam audit karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh auditor level bawah (Arens *et al*., 2008). Hampir sebagian besar pekerjaan lapangan dilakukan oleh auditor ditingkat yang lebih rendah, oleh karena itu untuk menjaga agar audit yang dilaksanakan memenuhi standar yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan program supervisi (Arens *et al*., 2008). Huda (2000) menyatakan bahwa tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan, selain untuk menjamin bahwa perencanaan akan dilaksanakan sebagimana nyatanya. Dalam pelaksanaan audit, auditor level lebih rendah diberi tugas untuk melaksanakan berbagai prosedur audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar pelaksanaan prosedur audit tersebut sesuai dengan yang direncanakan maka harus ada pihak (atasan) yang mengawasi pelaksanan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor tersebut (Messier *et al*., 2006). Kualitas audit sangat ditentukan oleh kinerja profesional anggota tim audit (Herbach, 2001). Dengan adanya supervisi diharapkan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh para staf audit dapat ditingkatkan, dengan demikian kualitas audit yang dilaksanakan oleh kantor akuntan publik juga dapat dipertahankan.

Pentingnya pelaksanaan supervisi dalam mencapai mutu pelaksanaan audit yang berkualitas juga telah dinyatakan oleh badan profesi (Institut Akuntan Publik Indonesia). Standar pekerjaan lapangan pertama menyatakan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya (SPAP, 2001: 310). Selanjutnya, SA Seksi 311 juga menyatakan bahwa supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dengan pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai (SPAP, 2001). Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus direview oleh atasan untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai (Payne dan Ramsay, 2008).

Hasil pemeriksaan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (DPAJP) Departemen Keuangan Republik Indonesia terhadap beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik telah menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi di KAP-KAP masih lemah (Fatchurrohman, 2001). Hal yang sama juga terjadi pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai (PPAJP) Departemen Keuangan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2009 terhadap 94 KAP (Tabel 2), menunjukkan bahwa 30% (tahun 2008) dan 25% (tahun 2009) supervisi yang dilakukan tidak memadai (Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, 2010).

Tabel 2
Kelemahan supervisi dan independensi selama tahun 2008 dan 2009

Kelemahan:	Tahun 2008	Tahun 2009
Supervisi	29%	23%
Independensi	30%	25%

Sumber: Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, Depkeu (2010)

Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa kepuasan kerja mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas (Robbins, 2003) atau kinerja (Luthans, 2006; Kreitner dan Kinicki, 2005). Sebaliknya, ketidak-puasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang merugikan bagi organisasi (Robbins, 2003). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kepuasan atau ketidak-puasan dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku disfungsional (Herbach, 2001; Duffy *et al*., 2002; Anton, 2009). Duffy *et al*. (2002) memberikan contoh beberapa perilaku disfungsional yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan, seperti; melaksanakan pekerjaan secara lambat, tidak teliti, kualitas dan kuantitas rendah, keterlambatan, atau produk-produk yang rusak. Dalam konteks auditing, perilaku-perilaku disfungsional tersebut dapat berbentuk tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit (Donelly *at al*., 2003).

Sementara itu, Herbach (2001) menyatakan bahwa pengauditan selain merupakan hubungan agensi antara pengguna laporan dan KAP, juga merupakan hubungan agensi antara pemilik KAP (partner) dengan para staf auditnya (pegawai). KAP merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai anggota yang mempunyai peran penting dalam penyelesaian pekerjaan audit. Pengumpulan bukti audit di lapangan dilakukan oleh staf auditor yang tidak berhubungan langsung dengan opini audit yang merupakan tanggung jawab partner. Dalam situasi seperti itu, partner (*principal*) mengeluarkan opininya berdasarkan file audit yang telah disiapkan oleh staf auditor (*agent*) tanpa melihat langsung bagaimana file-file tersebut disiapkan.

Walaupun opini yang dikeluarkan partner tergantung pada kinerja profesional staf auditor, namun kepentingan staf auditor dan partnernya kadang-kadang berlainan. Hasil penelitian Rebele dan Michaels (Huda, 2000) telah membuktikan rendahnya kepuasan kerja yang dialami oleh staf auditor pada level organisasi yang lebih rendah. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Nurahma dan Indriantoro (2000) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dipengaruhi oleh fungsi dan kedudukan karyawan dalam organisasi. Menurutnya, karyawan pada level yang lebih bawah cenderung mengalami ketidak-puasan dan kebosanan karena pekerjaan yang kurang menantang dan tanggung-jawab yang lebih kecil. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun KAP diharapkan dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas, namun harapan untuk dapat menghasilkan jasa audit yang berkualitas pada akhirnya sangat ditentukan oleh para staf auditnya. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat beberapa perilaku staf audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit (Herbach, 2001). Soobaroyen dan Chengabroyan (2005)

telah memberikan contoh beberapa perilaku staf auditor yang dapat mengurangi kualitas audit, diantaranya; mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan, menghentikan beberapa prosedur audit penting yang belum selesai dikerjakan secara lengkap, atau mengabaikan/tidak melaksanakan beberapa prosedur audit penting lainnya.

Dengan semakin pentingnya peranan staf audit dalam mewujudkan hasil audit yang berkualitas, maka kepuasan kerja staf audit merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas audit. Teori ataupun hasil penelitian tentang kepuasan telah menunjukkan bagaimana kepuasan kerja karyawan dapat mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Kreitner dan Kinicki (2005) menyatakan bahwa kepuasan dapat mengarahkan pada prestasi yang lebih tinggi. Sementara itu, Luthans (2006) menyatakan bahwa seseorang yang merasa puas dapat menghasilkan kinerja yang lebih besar. Menurutnya, kepuasan mungkin tidak perlu menghasilkan perkembangan kinerja individu, tetapi dapat menyebabkan perkembangan level departemen dan organisasi. Berdasarkan teori kepuasan yang telah dinyatakan oleh para pakar, kualitas audit dapat ditingkatkan dengan berupaya untuk meningkatkan kepuasan staf auditor. Peningkatan kepuasan staf auditor dapat menimbulkan berbagai perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku-perilaku yang dapat menguntungkan organisasi/Kantor Akuntan Publik tempat mereka bekerja. Begitu juga sebaliknya, ketidakpuasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak menguntungkan bagi organisasi tempat mereka bekerja. Robins (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi produktivitas karyawan, kemangkiran, atau mempengaruhi tingkat keluar masuknya karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh supervisi dan kepuasan kerja terhadap terjadinya tindakan yang menurunkan kualitas audit.

TINJAUAN TEORETIS

Supervisi

Dalam profesi akuntan publik, supervisi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebutkan dalam SA Seksi 311 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya (SPAP, 2001:311). Selanjutnya, SA Seksi 311 menyatakan bahwa supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai (SPAP, 2001:311). Georgiades (2006) menyatakan bahwa supervisi merupakan penelaahan terhadap usaha-usaha audit dan pertimbangan-pertimbangan audit terkait yang dibuat oleh asisten/bawahan untuk menentukan apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan keaadaan yang terjadi. Georgiades juga menyatakan bahwa penunjukkan dan pengarahan usaha asisten ini penting dilakukan agar audit dapat dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum dan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit.

SA Seksi 311 menyatakan bahwa luasnya supervisi yang memadai bagi suatu keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit (SPAP, 2001:311). Pernyataan yang sama juga disebutkan oleh Gupta *et al*. (2000) bahwa supervisi harus disesuaikan dengan situasi audit agar pekerjaan audit dapat dilaksanakan secara efektif. Agar supervisi dapat dilaksanakan secara efektif, Gupta *et al*., (2000) juga telah menyebutkan beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan praktik-praktik supervisi di dalam organisasi KAP. Pertama, supervisi harus dilaksanakan secara hierarkis (misalnya, supervisor/ atasan yang mengarahkan dan menelaah hasil kerja bawahannya). Kedua, supervisi

juga harus mempertimbangkan aspek-aspek birokratis, yaitu atasan/supervisor harus menilai kesesuaian program-program audit.

Menurut SA Seksi 311, pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus direview untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan didokumentasikan secara memadai, dan menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan audit (SPAP, 2001:311). Standar tersebut pada dasarnya hanya menyediakan petunjuk umum tentang pelaksanaan review. Pelaksanaannya secara rinci dalam organisasi KAP tergantung ukuran KAP dan kompleksitas pekerjaan audit. Sebagai dasar untuk menerapkan praktik review di KAP, Georgiades (2006) telah menyebutkan beberapa tujuan utama dari review pekerjaan yang dilakukan dalam setiap pekerjaan audit, yaitu untuk menentukan bahwa: pekerjaan audit telah direncanakan sebaik-baiknya; luasnya pekerjaan audit dianggap cukup memadai untuk mendukung opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan; pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar perusahaan dan standar profesional; permasalahan akuntansi dan auditing telah dievaluasi secara layak dan laporan keuangan telah sesuai dengan SAK; dan laporan audit yang dikeluarkan telah tepat.

Malone dan Roberts (2004) menyatakan bahwa dimensi supervisi terdiri dari; efektivitas supervisi dalam menemukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit dan jenis hukuman yang akan dikenakan. Dimensi tersebut juga sesuai dengan Farger *et al*. (2005) yang menyebutkan bahwa probabilitas perilaku diketahui dan jenis hukuman yang akan dikenakan merupakan faktor utama yang akan dipertimbangkan oleh orang ketika sedang memikirkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Menurut Otley dan Pierce (1996), risiko kemungkinan ditemukan merupakan pertimbangan yang relevan dalam memutuskan untuk melakukan *premature sign-off* atau melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit lainnya. Laporan yang dikemukakan oleh *The Commission on Auditors Responsibilities* (Otley dan Pierce, 1996) juga menyatakan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi auditor yang melakukan tindakan premature *sign-off* adalah risiko diketahui oleh supervisor.

Kepuasan Kerja

Luthans (2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerja an mereka memberikan hal yang dinilai penting. Menurut Luthans (2006), terdapat tiga dimensi yang diterima secara umum dalam kepuasan kerja. Pertama, kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja dapat dilihat dan diduga. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan. Misal nya jika anggota organisasi merasa bahwa mereka bekerja terlalu keras daripada yang lain dalam departemen, tetapi menerima penghargaan lebih sedikit, maka mereka mungkin akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan, pimpinan, dan atau rekan kerja mereka. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka mereka mungkin akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan.

Menurut Robbins (2003), pekerjaan seseorang lebih daripada sekadar kegiatan yang jelas seperti mengocok kertas, menunggu pelanggan, atau mengemudi sebuah truk. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang dari yang ideal. Hal ini berarti penilaian seorang karyawan terhadap seberapa puas atau tidak puasnya dia dengan pekerjaannya merupakan penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur

pekerjaan yang terbedakan dan terpisahkan satu sama lain. Robbins (2003) menyebutkan sejumlah faktor yang merupakan unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, yatu; sifat dasar pekerjaan, penyeliaan, upah langsung, kesempatan promosi dan hubungan dengan rekan kerja.

Sementara itu, Luthans (2006) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yang diringkas kedalam lima dimensi berikut; Pertama, pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umpan balik dari pekerjaan itu sendiri dan otonomi merupakan dua faktor motivasi utama yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu, karakteristik pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja, dan jika persyaratan kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka cenderung menjadi puas. Pekerjaan yang menarik dan menantang, serta perkembangan karier juga merupakan hal penting untuk para karyawan. Kedua, gaji. Uang dan gaji merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. Uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. Ketiga, promosi. Kesempatan promosi memiliki pegaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki berbagai penghargaan. Misalnya, individu yang dipromosikan atas dasar senioritas sering mengalami kepuasan kerja, tetapi tidak sebanyak orang yang dipromosikan atas dasar kinerja. Begitu juga halnya dengan promosi eksekutif yang mungkin lebih memuaskan daripada promosi yang terjadi pada level bawah organisasi. Keempat, pengawasan (supervisi). Terdapat dua dimensi gaya pengawasan yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama, yang berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Hal itu secara umum dimanifestasikan dalam cara-cara seperti meneliti seberapa baik kerja karyawan, memberikan nasihat dan bantuan pada individu, dan berkomunikasi dengan rekan kerja secara personal maupun dalam konteks pekerjaan. Dimensi kedua adalah partisipasi atau pengaruh, seperti diilustrasikan oleh manajer yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Partisipasi memiliki efek positif pada kepuasan kerja. Iklim partisipasi yang diciptakan penyelia memiliki efek yang lebih penting pada kepuasan kerja daripada partisipasi pada keputusan tertentu. Kelima, kelompok kerja. Pada umumnya, rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja yang baik atau tim yang efektif membuat pekerjaan menjadi menyenagkan. Akan tetapi, faktor tersebut bukan hal penting bagi kepuasan kerja. Sebaliknya, jika kondisi sebaliknya yang terjadi (orang sulit untuk bekerja sama), faktor itu mungkin memiliki efek negatif pada kepuasan kerja. Keenam, kondisi kerja. Jika kondisi kerja bagus (misalnya bersih, lingkungan menarik), individu akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika kondisi kerja buruk (misalnya udara panas, lingkungan bising), individu akan lebih sulit menyelesaikan pekerjaan. Efek lingkungan kerja pada kepuasan kerja sama halnya dengan efek kelompok kerja. Jika segalanya baik, tidak ada masalah kepuasan kerja, tetapi jika segalanya berjalan buruk, masalah ketidak puasan kerja akan muncul.

Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

DeAngelo (Samelson *et al*., 2006) mendefinisikan kualitas audit sebagai proba-

bilitas bahwa auditor; (a) akan dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. DeAngelo menyatakan bahwa kualitas audit merupakan konsep yang sulit diukur karena karakteristik audit yang sulit diamati. Beberapa peneliti telah berusaha untuk meneliti kualitas audit dengan menggunakan proksi yang berbeda, misalnya ukuran KAP (Francis dan Yu, 2009), opini *going concern* (Carey dan Simnett, 2006; Geiger dan Raghunandan, 2002), manajemen laba (Ghosh dan Moon, 2005; Myers *et al*., 2003; Johnson *et al*., 2002), atau harga jasa audit (Francis dan Yu, 2009).

Geiger dan Dasaratha (2006) meneliti perbedaan kualitas audit KAP big 4 dan KAP non big 4 berdasarkan tingkat ketepatan laporan audit. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa tingkat ketepatan laporan audit dari KAP big 4 lebih tinggi dari pada KAP non big 4, yang menunjukkan bahwa kualitas audit KAP big 4 lebih tinggi dari pada KAP non big 4. Sementara itu, Carey dan Simnett (2006) dan Geiger dan Raghunandan (2002) menguji kualitas audit berdasarkan kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan di AS. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa *auditor tenure* (lamanya auditor menangani klien) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going concern*.

Ghosh dan Moon (2005), Myers *et al*. (2003), dan Johnson *et al*. (2002) menguji kualitas audit berdasarkan manajemen laba. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa *auditor tenure* berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba. Sementara itu, Francis dan Yu (2009) melaporkan temuan bahwa KAP big membebankan premium atas jasa auditnya, dan hal tersebut diinterpretasikan karena KAP big memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dari pada KAP non big.

Pendekatan lain dalam meneliti kualitas audit adalah dengan menilai kualitas pekerjaan audit berdasarkan bagaimana auditor melaksanakan langkah-langkah dalam program audit. Coram *et al*. (2003) menyebut pendekatan ini sebagai tindakan yang menurunkan kualitas audit (*reduced audit quality*). *Reduced audit quality* (RAQ) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor selama pelaksanaan audit yang dapat mengurangi efektivitas dalam pengumpulan bukti audit (Malone dan Roberts, 2004). Tindakan yang menurunkan kualitas audit tidak berarti bahwa KAP akan mengeluarkan opini audit yang tidak tepat, namun hal tersebut menunjukkan bahwa auditor tidak melaksanakan audit sesuai dengan standar audit. Coram *et al*. (2003) menyatakan bahwa jika pekerjaan lapangan tidak dilaksanakan secara tepat, maka kemungkinan opini audit tidak tepat juga akan meningkat.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Herbach (2001) bahwa tindakan yang menurunkan kualitas audit merupakan kegagalan auditor dalam melaksanakan prosedur-prosedur audit yang mengurangi efektivitas dalam pengumpulan bahan bukti. Dengan demikian tindakan tersebut dapat menyebabkan bahan bukti menjadi tidak dapat diandalkan, tidak benar, atau tidak layak baik secara kuantitatif atau kualitatif. Soobaroyen dan Chengabroyan (2006) telah memberikan contoh beberapa tindakan yang sering dilakukan auditor yang dapat mengurangi kualitas audit, diantaranya; mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan, menghentikan beberapa prosedur audit penting yang belum selesai dikerjakan secara lengkap, atau mengabaikan/tidak melaksanakan beberapa prosedur audit penting lainnya.

Hasil penelitian Malone dan Roberts (2004) menyebutkan bahwa lebih dari 75% responden auditor yang disurvey menyatakan pernah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kualitas audit. Adapun tindakan yang paling sering

dilakukan oleh staf auditor adalah terlalu tergesa-gesa dalam melaksanakan beberapa prosedur audit. Sementara itu, Suryanita *et al*. (2007) menyatakan bahwa salah satu tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit adalah penghentian *premature* atas prosedur audit. Praktik ini terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan/ tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi ia dapat memberikan simpulan.

Alderman dan Deitrick (2001) melakukan penelitian tentang penghentian *premature* atas prosedur audit tersebut dengan menggunakan sampel auditor yang bekerja pada KAP Big 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 31% responden berpendapat bahwa praktik ini telah terjadi dan merupakan akibat dari supervisi yang tidak mencukupi, hambatan waktu, dan tidak menanyakan representasi klien. Sementara itu, hasil penelitian Hadi (2007) menyebutkan bahwa lebih dari 50% respondennya telah melakukan penghentian *premature* atas prosedur audit. Prosedur yang paling sering dihentikan adalah mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan, sedangkan yang paling jarang diitinggalkan/dihentikan secara *premature* adalah konfirmasi ke pihak ketiga.

Beberapa penelitian juga telah menguji faktor-faktor yang dapat menyebabkan auditor melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Coram *et al*. (2004) misalnya, telah meneliti pengaruh tekanan anggaran waktu dan risiko salah saji terhadap kecenderungan auditor untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Penelitian ini dilakukan terhadap 103 staf auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang ada di Australia. Hasil penelitian menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu dapat menyebabkan auditor melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit tersebut akan berkurang ketika risiko salah saji yang dihadapi lebih tinggi.

Hasil penelitian Coram dan Juliana (2004) sesuai dengan pernyataan bahwa risiko salah saji merupakan salah satu pertimbangan paling penting yang dapat mempengaruhi keputusan auditor. Standar auditing No. 400, *Risk Assessments and Internal Control* (*International Federation of Accountants*, 2000, dalam Coram dan Juliana, 2004) menyatakan bahwa ketika penilaian terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian lebih besar, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor harus lebih besar. Sementara itu, Robertson (2007) menyatakan bahwa tekanan waktu penyelesaian (*time deadline pressure*) dapat mempengaruhi kualitas audit. Staf auditor akan cenderung untuk tidak melaporkan informasi penting yang perlu ditindaklanjuti dengan beberapa prosedur audit, ketika terdapat tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat. Lebih lanjut Robertson menyatakan bahwa ketika supervisor/atasan staf auditor lebih menekankan pada pencapaian waktu audit, maka kualitas audit bukan menjadi pertimbangan utama, sehingga akan diabaikan oleh staf auditor.

Malone dan Roberts (2004) menyatakan bahwa kegagalan auditor untuk melaksanakan prosedur-prosedur audit seperti yang sudah direncanakan dapat disebabkan oleh karakteristik personal, prosedur *review* (supervisi) dan pengendalian kualitas KAP, struktur audit KAP, dan persepsi auditor terhadap tekanan anggaran waktu. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Suryanita *et al*. (2007), bahwa prosedur *review* yang tersusun dengan baik dan pengendalian kualitas yang terus menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kesalahan yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan hasil penelitiannya yang menguji pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit, Francis dan Yu (2009) menyatakan bahwa pengalaman

merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan KAP-KAP besar dengan jumlah penugasan yang lebih banyak dapat memberikan kesempatan bagi auditornya untuk mengembangkan keahliannya dalam mendeteksi masalah-masalah keuangan yang material. Auditor di KAP-KAP besar juga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan supervisi atas konsultasi, karena lebih banyak mempunyai atasan dan kolega mereka yang mempunyai berbagai macam keahlian.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya, Pierce dan Sweeney (2006) menyatakan bahwa tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit terdiri atas 3 jenis, yaitu; *premature sign-off*, *under-reporting of time*, dan perilaku yang menurunkan kualitas audit lainnya. Sementara itu, Soobaroyen dan Chengabroyan (2006) menyebutkan bahwa *premature sign-off* merupakan tindakan yang paling mengancam kualitas audit. Pierce dan Sweeney (2006) mengartikan *premature sign-off* sebagai tindakan yang dilakukan oleh auditor yang seolah-olah telah menyelesaikan prosedur audit tanpa benar-benar melakukannya. *Under-reporting of time* terjadi ketika auditor tidak membebankan/mencatatkan waktu kerjanya ke dalam jumlah jam kerja yang telah dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan audit tertentu (Pierce dan Sweeney, 2006). Tindakan ini dilakukan agar jumlah jam kerja yang dibebankan pada pekerjaan audit menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya. Walaupun tindakan ini tidak mempengaruhi kualitas audit secara langsung, namun tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya tekanan anggaran waktu audit pada periode audit tahun berikutnya (Donelly *et al*., 2003).

Sementara itu, perilaku yang menurunkan kualitas audit lainnya adalah tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit lainnya selain *premature sign-off* (Pierce dan Sweeney, 2006). Malone dan Roberts (2004) telah mengidentifikasi beberapa tindakan yang menurunkan kualitas audit selain *premature sign-off*, yaitu; menerima penjelasan klien yang tidak beralasan, melakukan *review* dangkal (tidak rinci) terhadap dokumen pendukung yang berasal dari klien, gagal untuk menyelidiki secara tuntas masalah teknis akuntansi dan auditing, mengurangi jumlah pekerjaan pada bagian audit tertentu yang seharusnya dilakukan secara lengkap, dan tidak dapat menyelesaikan prosedur yang diminta oleh program audit dengan menggunakan cara-cara lain.

Pengaruh Supervisi terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Standar pekerjaan lapangan (SPAP, 2001) yang pertama menyatakan "pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya". Selanjutnya, standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan "bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (SPAP, 2001). Pada dasarnya, kedua standar pekerjaan lapangan tersebut meminta auditor untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dan penuh kehati-hatian. Supervisi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk mempertahankan kualitas pekerjaannya (Arens *et al*., 2008).

Beberapa penelitian juga telah menguji peranan supervisi dalam mencegah atau mengurangi beberapa tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit (Suryanita *et al*., 2007; Alderman dan Deitrick, 2001; Malone dan Roberts, 2004; Otley dan Pierce, 1996; dan Pierce dan Sweeney, 2006). Suryanita *et al*. (2007) telah meneliti faktor-faktor yang dapat menyebabkan auditor melakukan penghentian prematur terhadap prosedur-prosedur audit yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil survey terhadap 79 auditor yang bekerja pada KAP-KAP di Jawa-Tengah dan Jogjakarta, Suryanita *et al*. (2007) menyimpulkan bahwa tindakan auditor untuk melakukan

penghentian prematur terhadap prosedur-prosedur audit yang telah ditetapkan dapat dipengaruhi oleh supervisi dan pengendalian kualitas.

Penelitian yang menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit juga telah dilakukan oleh Malone dan Roberts (2004). Berdasarkan hasil survey terhadap 257 auditor yang bekerja pada 16 KAP, hasil penelitian Malone dan Roberts menyimpulkan bahwa supervisi berhubungan secara negatif dengan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Sementara itu, Otley dan Pierce (1996) meneliti pelaksanaan sistem pengendalian yang diterapkan di KAP-KAP Big-6. Hasil penelitian Otley dan Pierce menyebutkan bahwa persepsi auditor tentang efektivitas prosedur *review* (supervisi) yang diterapkan di KAP berhubungan signifikan dengan tindakan-tindakan penghentian prematur atas prosedur audit dan perilaku-perilaku yang dapat menurunkan kualitas audit lainnya.

Selanjutnya, Alderman dan Deitrick (2001) juga telah menguji tekanan anggaran waktu yang dipersepsikan oleh auditor dan terjadinya tindakan penghentian prematur. Penelitian Wayne dan Deitrick dilakukan dengan menguji sampel staf auditor yang berasal dari 19 kantor cabang KAP. Berdasarkan hasil analisis terhadap 274 jawaban kuesioner dari responden penelitian, Wayne dan Deitrick menyatakan bahwa tindakan penghentian prematur atas beberapa prosedur audit disebabkan oleh; a) supervisi yang masih lemah, b) tekanan anggaran waktu, dan c) penilaian auditor yang menyatakan bahwa prosedur-prosedur audit tersebut tidak perlu atau tidak material. Penelitian lainnya dilakuka oleh Pierce dan Sweeney (2006) yang meneliti persepsi auditor tentang akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya perilaku-perilaku yang dapat mengancam kualitas audit. Hasil penelitian Pierce dan Sweeney menyebutkan bahwa rendahnya risiko yang akan dihadapi auditor ketika mereka terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kualitas audit dapat mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut;

H_1 : Supervisi berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Luthans (2006) dan Robbins (2003) me nyebutkan beberapa akibat yang dapat di timbulkan oleh kepuasan atau ketidak puasan kerja, diantaranya; meningkatnya produktivitas atau kinerja, meningkatnya tingkat perputaran kerja atau meningkatnya tingkat absensi kerja. Sementara itu, Kreitner dan Kinicki (2005) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi beberapa variabel penting, yaitu; motivasi, keterlibatan dalam pekerjaan, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, komitmen organisasi, ketidak-hadiran, berhentinya karyawan, stres yang dirasakan, atau prestasi kerja.

Luthans (2006), Robbins (2003), dan Kreitner dan Kinicki (2005) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku-perilaku yang dapat menguntungkan organisasi. Sebaliknya, ketidak-puasan kerja dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku disfungsional. Pierce dan Sweeney (2006) menyatakan bahwa perilaku disfungsional merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi, yang dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks auditing, perilaku disfungsional tersebut dapat berbentuk tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit (Donnelly *et al.*, 2003). Soobaroyen dan Chengabroyan (2005) telah memberikan contoh beberapa tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit, diantara-

nya; mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan, atau menghentikan beberapa prosedur audit penting yang belum selesai dikerjakan secara lengkap.

Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku disfungsional (Herbach, 2001; Ghosh, 2000; Mangione dan Quinn, 1995; Duffy *et al*., 2002; Anton, 2009). Hasil penelitin Duff *et al*. (2002) dan Mangione dan Quinn (1995) menyatakan bahwa kepuasan kerja berhubungan secara negatif dengan perilaku-perilaku yang dapat menurunkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian tersebut, Duff *et al*., (2002) memberikan contoh beberapa perilaku disfungsional yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja, seperti; melaksanakan pekerjaan secara lamban, tidak teliti, atau melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan di tempat kerja. Contoh lainnya yang merupakan perilaku disfungsional dicerminkan dalam hal-hal seperti; kualitas dan kuantitas yang rendah, keterlambatan, ketidak-hadiran, atau produk-produk yang rusak (Mangione dan Quinn, 1995).

Sementara itu, Ghosh (2000) menyatakan bahwa ketidak-adilan yang dirasakan oleh seseorang akan memotivasi orang tersebut untuk berusaha mengurangi rasa ketidak-adilan tersebut. Berbagai cara sering dilakukan untuk mengurangi rasa ketidak-adilan tersebut, termasuk melakukan perilaku-perilaku disfungsional (bertentangan dengan tujuan organisasi). Hasil penelitian Ghosh (2000) menunjukkan bahwa ketidakpuasan pekerja terhadap sistem kompensasi yang diterapkan di perusahaan dapat memotivasi pekerja untuk melakukan tindakan manipulatif. Dalam pelaksanaan audit, tindakan manipulatif dapat berbentuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Pendapat yang sama juga didukung oleh Herbach (2001) yang meneliti pengaruh elemen-elemen kontrak psikologis terhadap tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian Herbach (2001) menyebutkan bahwa beberapa unsur dari kepuasan kerja (supervisi, gaji, pelatihan, otonomi, lingkungan kerja, atau rekan kerja) berhubungan secara signifikan dengan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut;

H_2 : Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK. Berdasarkan JSX *Fact Book* 2011, jumlah KAP yang terdaftar di Bapepem-LK adalah 158 KAP. Dalam melakukan pekerjaannya, auditor bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari partner, manajer, supervisor, senior, dan junior auditor. Sementara itu, sebagaimana telah dinyatakan oleh Malone dan Roberts (2004), tindakan yang menurunkan kualitas audit merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditor selama pelaksanaan audit yang dapat mengurangi efektivitas pengumpulan bahan bukti audit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka auditor yang akan digunakan untuk menjadi responden adalah auditor yang menempati posisi junior, senior, supervisor, dan manajer. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa auditor-auditor tersebut merupakan auditor yang bertanggungjawab secara langsung untuk melaksanakan pengumpulan bahan bukti audit dan pengawasannya terhadap proses pengumpulan bahan bukti tersebut. Berdasarkan data terakhir yang dilaporkan ke Departemen Keuangan, jumlah auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK berjumlah sekitar 7.290 auditor (Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai Departemen Keuangan, 2010).

Penentuan jumlah sampel didasarkan pada langkah-langkah penentuan ukuran sampel menurut Sitepu (1995). Adapun langkah-langkah tersebut adalah: Pertama, tentukan diagram jalur yang akan digunakan dalam analisis. Kedua, tentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil antara variabel penyebab yang ada dalam jalur dengan variabel akibat. Penelitian ini menentukan ukuran sampel dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut; tarif nyata yang diinginkan sebesar 5%, kuasa uji dari pengujian sebesar 95%, nilai koefisien korelasi (ρ) terkecil sebesar 0,25, yang ditentukan berdasarkan hasil pilot test. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka perhitungan ukuran sampel dilakukan sebagai berikut:

(1) Pada iterasi pertama:

$$n = \frac{(1{,}645 + 1{,}645)^2}{(0{,}2554)^2} + 3 = 168{,}923$$

Sedangkan

$$U_p = 1/2 \text{ Ln} \frac{(1 + 0{,}25)}{(1 - 0{,}25)} = 0{,}2554$$

(2) Pada iterasi kedua:

$$n = \frac{(1{,}645 + 1{,}645)^2}{(0{,}2562)^2} + 3 = 167{,}96$$

Sedangkan

$$U_p = 1/2 \text{ Ln} \frac{(1 + 0{,}25)}{(1 + 0{,}25)} + \frac{0{,}25}{2(168{,}923 - 1)}$$

(3) Pada iterasi ketiga:

$$n = \frac{(1{,}645 + 1{,}645)^2}{(0{,}2562)^2} + 3 = 167{,}95$$

Pada iterasi ketiga diperoleh jumlah sampel sebesar 168, yang nilainya sama dengan perhitungan sampel pada iterasi kedua. Oleh karena jumlah sampel yang dihitung pada iterasi ketiga sama dengan iterasi kedua, maka perhitungan jumlah sampel berhenti sampai dengan perhitungan pada iterasi ketiga dengan jumlah sampel sebesar 168 (jumlah sampel minimal).

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan tabel angka random yang akan memilih secara acak auditor yang bekerja di KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK. Tabel angka random dibuat dengan menggunakan fasilitas komputer melalui program *Excel*. Sebelum dipilih secara random, anggota populasi diberi identitas dengan menggunakan angka nomor 1 sampai dengan nomor 7.290. Penentuan nomor dilakukan berdasarkan KAP-KAP yang sebelumnya diurutkan berdasarkan urutan abjad nama KAP. Nomor masing-masing anggota populasi ditentukan berdasarkan angka kumulatif jumlah auditor. Contoh penentuan nomor anggota populasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Nomor anggota populasi ditentukan berdasarkan angka di kolom jumlah kumulatif. Misalnya anggota dengan angka nomor 23 sampai dengan nomor 32 adalah auditor yang bekerja pada KAP Abdi Ichjar dan Rekan. Selanjutnya, berdasarkan tabel angka random akan dipilih anggota sampel dengan jumlah 168 auditor (jumlah sampel minimal) yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepem-LK.

Tabel 3
Contoh Penentuan Nomor Anggota Populasi

No.	Nama KAP	Jumlah Auditor	Jumlah Kumulatif
1.	A. Krisnawan & Rekan	11	11
2.	A. Salam Rauf & Rekan	11	22
3.	Abdi Ichjar & Rekan	10	32
4.	Dst.		

Sumber: data penelitian

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel
Supervisi

Supervisi (S) merupakan penelaahan terhadap usaha-usaha audit dan pertimbangan-pertimbangan audit terkait yang dibuat oleh asisten/bawahan untuk menentukan apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan keaadaan yang terjadi (Georgiades, 2006). Variabel supervisi diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan dari dua dimensi, yaitu efektivitas supervisi dan hukuman yang mungkin akan diterima auditor jika terbukti melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit (Malone dan Roberts, 2004).

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja (KK) adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting (Luthans, 2006). Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan 12 pertanyaan dari beberapa dimensi yaitu; pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, rekan kerja, dan kondisi kerja (Luthans, 2006).

Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Malone dan Roberts (2004) mendefinisikan tindakan yang menurunkan kualitas audit *(reduced audit quality/*KA*)* sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor selama pelaksanaan audit yang dapat mengurangi efektivitas dalam pengumpulan bukti audit. Variabel ini diukur berdasarkan menggunakan 6 pertanyaan dari dua dimensi menurut Otley dan Pierce (1996), yaitu *premature sign-off* dan *reduced audit quality* (RAQ) lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey, dengan mengirim kuesioner kepada subjek penelitian, yaitu responden auditor yang bekerja pada KAP. Dengan terlebih dahulu meminta izin dan bantuan kepada pimpinan KAP, kuesioner dikirim kepada staf auditor melalui pimpinan KAP. Kuesioner yang telah diisi kemudian dikirim melalui pos ke alamat peneliti atau diserahkan langsung kepada peneliti/pihak-pihak yang telah dimintai bantuan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau menerima kuesioner yang telah diisi tersebut. Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mendatangi KAP-KAP, pengiriman melalui pos, atau melalui bantuan pihak-pihak lain.

Teknik Pengujian Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$KA = a + b_1S + b_2KK + e$ ……

Keterangan:

KA = Tindakan yang menurunkan kualitas audit
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
S = Supervisi
KK = Kepuasan kerja
e = Error (faktor kesalahan)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) = 0,05 atau 5%. Untuk menguji pengaruh supervisi dan kepuasan kerja terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit dilakukan dengan menguji nilai t pada tingkat signifikansi (α) = 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka disimpulkan hipotesis tidak dapat ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Gambaran Unit Observasi

Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP-KAP yang terdaftar di Bapepam-LK tahun 2011. Dari sekitar 700 eksemplar kuesioner yang dikirim, sebanyak 213 kuesioner dapat kembali (*response rate* sebesar 30%). Dari 213 kuesioner yang kembali, ada 6 kuesioner yang tidak layak untuk diuji karena diisi oleh auditor yang baru bekerja di KAP kurang dari 1 tahun, atau belum pernah

melaksanakan penugasan audit. Dengan demikian jumlah kuesioner yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sebanyak 207.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, berikut disajikan profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, lama masa kerja, jumlah penugasan dalam 1 tahun terakhir, dan jabatan.

Berdasarkan jenis kelamin, sekitar 60% responden dalam penelitian ini adalah laki-laki, sedangkan sekitar 40% responden berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, para responden dalam penelitian ini mempunyai usia rata-rata sekitar 29 tahun, dengan usia maksimum 66 tahun dan usia minimum responden 21 tahun.

Berdasarkan pendidikan, sebagian besar (89,8%) responden dalam penelitian ini berpendidikan S-1, sekitar 9% responden berpendidikan S-2, dan sisanya sekitar 1% responden berpendidikan D-3. Responden dalam penelitian ini sebagian besar terdiri dari junior auditor (50,2%) dan senior auditor (38,6%), sedangkan yang mempunyai

Tabel 4
Profil Responden

Profil Responden	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	124	59,9
	Perempuan	83	40,1
	Total	**207**	**100**
Usia	Maksimum	66 tahun	
	Minimum	21 tahun	
	Rata-rata	29,22 tahun	
Pendidikan	D3	2	1,1
	S1	186	89,8
	S2	19	9,1
	S3	-	-
	Total	**207**	**100**
Masa Kerja	≤ 2 tahun	82	39,6
	> 2 – 5 tahun	68	32,8
	> 5 – 10 tahun	42	20,2
	> 10 – 15 tahun	13	6,3
	> 15 tahun	2	1,1
	Total	**207**	**100**
Jumlah Penugasan Audit dalam 1 Tahun Terakhir	≤ 3 kali	55	25,6
	> 3-5 kali	65	31,4
	> 5-10 kali	53	26,6
	> 10-15 kali	27	13,1
	> 15 kali	7	3,3
	Total	**207**	**100**
Jabatan	Junior	104	50,2
	Senior	80	38,6
	Supervisor	17	21,3
	Manajer	6	2,9
	Total	**207**	**100**

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

jabatan supervisor dan manajer sekitar 8,2% dan 3%.

Berdasarkan lamanya bekerja di KAP, sekitar 40% responden memiliki masa kerja antara 1-2 tahun, sekitar 33% responden memiliki masa kerja antara lebih dari 2 – 5 tahun, sekitar 20% memiliki masa kerja antara lebih dari 5-10 tahun, sekitar 6% memiliki masa kerja lebih dari 10-15 tahun, dan hanya sekitar 1% responden yang memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun.

Berdasarkan jumlah penugasan dalam 1 tahun terakhir, sekitar 26% responden dalam penelitian ini telah melaksanakan audit sebanyak antara 1-3 kali selama 1 tahun terakhir, sekitar 31% telah melaksanakan audit selama 1 tahun sebanyak antara lebih dari 3-5 kali, sekitar 27% rata-rata melaksanakan audit sebanyak antara lebih dari 5-10 kali dalam 1 tahun, sekitar 13% memiliki jumlah penugasan antara lebih dari 10-15 kali dalam 1 tahun, dan sekitar 3,5% telah melaksanakan audit dalam 1 tahun terakhir lebih dari 15 kali penugasan.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur variabel yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Metode yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *product moment*. Teknik untuk menguji validitas instrumen tiap-tiap variabel dilakukan dengan cara mengkorelasikan tiap skor item instrumen dengan total skor dari jumlah item instrumen tersebut. Dari hasil uji korelasi ini selanjutnya akan dicari nilai t masing-masing item pernyataan. Indikatornya adalah dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel. Apabila nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (1,684) maka korelasi tersebut adalah signifikan, sehingga item pernyataan tersebut dinyatakan valid dan akan dipakai untuk pengumpulan data penelitian. Namun sebaliknya, apabila nilai t-hitung lebih kecil dari pada nilai t-tabel maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari item pernyataan yang akan digunakan dalam kuesioner untuk pengumpulan data penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan korelasi *product moment* (r), diperoleh hasil uji validitas untuk masing-masing variabel yang disajikan pada tabel 5, 6, 7.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung untuk seluruh item pernyataan lebih besar dari pada nilai t-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan yang akan digunakan untuk mengukur variabel supervisi adalah valid, sehingga seluruh item pernyataan yang ada pada variabel supervisi dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Supervisi

Butir Pernyataan	r	t_{hitung}	Keterangan
Item_1	0.523	3,881	Valid
Item_2	0.634	5,185	Valid
Item_3	0.477	3,432	Valid
Item_4	0.614	4,920	Valid
Item_5	0.653	5,453	Valid
Item_6	0.653	5,453	Valid
Item_7	0.450	3,187	Valid
Item_8	0.420	2,927	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja

Butir Pernyataan	r	t_{hitung}	Keterangan
Item_1	0.608	4,843	Valid
Item_2	0.853	10,337	Valid
Item_3	0.758	7,350	Valid
Item_4	0.771	7,657	Valid
Item_5	0.817	8,961	Valid
Item_6	0.760	7,396	Valid
Item_7	0.670	5,708	Valid
Item_8	0.479	3,451	Valid
Item_9	0.555	4,220	Valid
Item_10	0.626	5,077	Valid
Item_11	0.520	3,850	Valid
Item_12	0.566	4,342	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung untuk seluruh item pernyataan lebih besar dari pada nilai t-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan yang akan digunakan untuk mengukur variabel kepuasan kerja adalah valid, sehingga seluruh item pernyataan yang ada pada variabel kepuasan kerja dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Pada tabel 7 berikut disajikan hasil uji validitas untuk variabel tindakan yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung untuk seluruh item pernyataan lebih besar dari pada nilai t-tabel. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan yang akan digunakan untuk mengukur variabel tindakan yang menurunkan kualitas audit adalah valid, sehingga seluruh item pernyataan yang ada pada variabel kualitas audit dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Setelah selesai dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis Cronbach-Alpha. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2005:42), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable apabila

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit

Butir Pernyataan	r	t_{hitung}	Keterangan
Item_1	0.818	8,994	Valid
Item_2	0.874	11,376	Valid
Item_3	0.900	13,059	Valid
Item_4	0.901	13,135	Valid
Item_5	0.623	5,037	Valid
Item_6	0.940	17,425	Valid

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

memberikan nilai Cronbach-Alpha > 0,06.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha, diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut pada tabel 8. Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki koefisien reliabilitas di atas 0,60. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini telah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil perngujian regresi berganda dengan menggunakan software SPSS dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Pengaruh Supervisi Terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Pengaruh supervisi terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit diuji dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS menunjukkan nilai t = -3,163 dengan tingkat signifikansi (α) = 0,02. Oleh karena nilai tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa supervisi berpengaruh terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien (b) = -0,206 yang dapat diartikan bahwa semakin ketat supervisi yang diterapkan, maka tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit akan semakin berkurang.

Menurut hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas supervisi dan besarnya ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap auditor yang melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit dapat mengurangi/menghindari tindakan auditor yang menurunkan kualitas audit. Jika efektivitas supervisi dan ancaman hukuman meningkat, maka perilaku-perilaku auditor yang menurunkan kualitas audit akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Arens *et al*. (2008) yang menyatakan bahwa supervisi merupakan salah cara yang dapat digunakan

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah Pernyataan	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Supervisi	8	0,642	Reliabel
Kepuasan Kerja	12	0,886	Reliabel
Kualitas Audit	6	0,918	Reliabel

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

Tabel 9
Hasil Pengujian Persamaan Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	26,897	2,05		13,079	,000
	SUP	-,271	,086	-,206	-3,163	,002
	PUAS	-,208	,037	-,361	-5,546	,000

a. Dependent Variable: KUALITAS

Sumber: data hasil penelitian (diolah)

oleh KAP untuk mempertahankan kualitas auditnya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Otley dan Pierce (1996) yang menyebutkan bahwa efektivitas supervisi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign-off*) dan perilaku-perilaku yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebagian besar auditor yang menjadi responden penelitian menyatakan setuju bahwa supervisi yang dilakukan di KAP akan dapat menemukan tindakan-tindakan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit. Diantaranya; akan dapat menemukan tindakan auditor yang melakukan penghentian prematur, atau menemukan tindakan auditor yang memberikan tanda *tickmark* sebagai tanda prosedur audit telah dikerjakan padahal auditor tersebut hanya memeriksa beberapa dokumen klien yang tidak lengkap.

Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Pierce dan Sweeney (2006) yang menemukan bahwa rendahnya risiko yang akan dihadapi auditor ketika mereka terbukti melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi kualitas audit dapat mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besarnya ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap auditor yang terbukti melakukan tindakan yang menurunkan kualitas audit dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku auditor yang menurunkan kualitas audit. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui tindakan auditor yang akan mendapatkan hukuman paling berat menurut responden adalah jika mereka terbukti melakukan tindakan penghentian prematur atau memberi tanda *tickmark* sebagai tanda auditor telah melaksanakan prosedur audit padahal hanya memeriksa beberapa dokumen klien yang tidak lengkap. Adapun ancaman hukuman yang paling ringan jika terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit adalah ketika auditor gagal memeriksa masalah akuntansi yang belum meyakinkan, atau menerima saja penjelasan klien tanpa melakukan prosedur audit tambahan untuk meyakinkan masalah tersebut.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan yang Menurunkan Kualitas Audit

Pengaruh kepuasan kerja terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit diuji dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS menunjukkan nilai t = -5,546 dengan tingkat signifikansi (α) = 0,00. Oleh karena nilai tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien (b) = -0,361 yang dapat diartikan bahwa semakian tinggi tingkat kepuasan kerja auditor, maka tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit akan semakin berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Luthans (2006) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku-perilaku yang dapat menguntungkan organisasi. Sebaliknya, ketidak-puasan kerja dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku yang pada umumnya merupakan perilaku disfungsional. Dalam konteks auditing, perilaku disfungsional tersebut dapat berbentuk tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kepuasan kerja auditor yang menjadi responden penelitian dapat mempengaruhi terjadinya tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan beberapa contoh tindakan yang menurunkan kualitas audit, yang dapat dikurangi dengan cara meningkatkan kepuasan kerja auditor, diantaranya; 1) menerima penjelasan klien tentang masalah akuntansi tertentu yang tidak beralasan, tetapi auditor menerima begitu saja penjelasan tersebut, 2) me-

ngurangi jumlah pekerjaan dalam bagian audit tertentu yang seharusnya dilakukan secara lengkap, 3) melakukan *premature sign-off* (tidak dapat menyelesaikan prosedur audit yang telah ditetapkan, tetapi melaporkan telah menyelesaikan prosedur tersebut), atau 4) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen klien yang tidak lengkap, tetapi dalam kertas kerja memberi tanda tickmark sebagai tanda prosedur audit telah dikerjakan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Herbach (2001) yang menemukan bahwa beberapa dimensi kepuasan kerja (supervisi, gaji, pelatihan, otonomi, lingkungan kerja, atau rekan kerja) dapat mempengaruhi terjadinya perilaku-perilaku yang menurunkan kualitas audit. Berdasarkan analisis deskriptif juga dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan cukup puas dengan pekerjaannya. Hal ini dapat diketahui dari sebagian besar auditor yang menyatakan cukup puas dengan dimensi-dimensi yang membentuk kepuasan kerja (pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisi, rekan kerja dan kondisi kerja). Namun, untuk meningkatkan kepuasan kerja ke tingkat yang lebih optimal, KAP juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan sebagian auditor terhadap beberapa dimensi kepuasan kerja yang oleh sebagian auditor dianggap belum memuaskan. Adapun beberapa dimensi kepuasan kerja yang oleh sebagian auditor masih dianggap belum memuaskan, diantaranya; kepuasan terhadap gaji, pelatihan/promosi, supervisi oleh atasan, atau kepuasan terhadap jam kerja yang diterapkan di KAP tempat mereka bekerja. Agar tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit menjadi berkurang, maka beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kepuasan kerja menjadi rendah harus diperbaiki agar kondisi tersebut tidak terus terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa; Pertama, Supervisi berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa supervisi yang efektif dapat mengurangi/menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Jika efektivitas supervisi dan ancaman hukuman meningkat, maka perilaku-perilaku yang dapat menurunkan kualitas audit akan menurun. Kedua, Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit. Rendahnya kepuasan kerja (tingginya ketidak-puasan kerja) dapat menyebabkan auditor untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Agar tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit tidak terjadi/berkurang maka KAP harus mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja.

Dengan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan bahwa; Pertama, untuk meningkatkan kualitas audit, KAP diharapkan memperbaiki sistem supervisinya sesuai dengan yang diharuskan oleh profesi. KAP perlu menerapkan prosedur supervisi yang harus dilakukan oleh semua atasan kepada bawahannya. Sistem pengendalian kualitas di KAP harus dapat menjamin bahwa prosedur supervisi yang telah di tetapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya, serta memastikan bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan oleh auditor telah disupervisi oleh atasanya. Kedua, KAP juga disarankan untuk memperbaiki kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya ketidakpuasan kerja. KAP perlu mempertimbangkan gaji, pelatihan, atau promosi sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk memotivasi auditor agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

Alderman, W. dan J. Deitrick. 2001. Auditors' perceptions of time budget pressures and premature sign-offs: a

replication and extension. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 20(1): 54-68.

Anton, C. 2009. The impact of role stress on workers' behavior through job satisfaction and organizational commitment. *International Journal of Psychology* 44(3): 187-194.

Arens, A., R. J. Elder, M. S. Beasley. 2008. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Eleventh Edition. Pearson Prentice Hall.

Carey, P. dan R. Simnett. 2006. Auditor Partner Tenure and Audit Quality. *The Accounting Review* 81(3): 653-676.

Coram, P., Juliana dan D. Woodliff. 2003. A Survey of Time Budget Pressure And Reduced Audit Quality Among Australian Auditors. *Autralian Accounting Review* 13(29): 38-44.

Coram, P., Juliana dan D. Woodliff. 2004. The effect of risk misstatement on the propensity to commit reduced audit quality act under time budget pressure. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23(2): 159-167.

Donelly, D. P., J. J. Quirin dan D. O'Bryan. 2003. Auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: An explanatory model using auditors' personal characteristics. *Behavioral Research In Accounting* (15): 87-110.

Duffy, M., J. Shaw, dan D. Ganster. 2002. Positive affectivity and negative outcomes: the role of tenure and job satisfaction. *Journal of Applied Psychology* 83(6): 950-959.

Farger, N., D. Mayorga dan K. Trotman. 2005. A field-based analysis of audit workpaper review. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 24(2): 85-110.

Fatchurrohman, A. 2 Mei 2001. *Majalah Media Akuntasi*.

Francis, J. dan M. Yu. 2009. Big 4 Office Size and Audit Quality. *The Accounting Review* 84(5): 1.521-1.552.

Geiger, M. A. dan K. Raghunandan. 2002. Auditor tenure and audit reporting failures. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 21(1): 67-78.

Georgiades. 2006. GAAS Update Service. *A Wolters Kluwer Business*.

Ghosh, A. dan D. Moon. 2005. Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality. *The Accounting Review* 80(2): 585-612.

Ghosh, D. 2000. Organizational design and manipulative behavior. *Behavioral Research In Accounting* 12(1): 1-30.

Ghozali, I. 2005. *Structural equation modelling: teori, konsep, dan aplikasi*. BP Undip. Semarang.

Gupta, P., N. Umanath dan M. Dirsmith. 2000. Supervision practices and audit effectiveness: an empirical analysis of GAO audit. *Behavioral Research in Accounting* 12(2): 119-138.

Hadi, S. 2007. Pengaruh tindakan supervisi terhadap kepuasan akuntan pemula. *JAAI* 11(2): 187-198.

Herbach, O. 2001. Audit Quality, Auditor Behavior and The Psychological Contract. *The European Accounting Review* 10(4): 787-802.

Huda, M. 2000. Hubungan antara tindakan supervisi dengan kepuasan kerja: sebuah analisis perbedaan antara KAP besar dan kecil. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 2(1): 33-44.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Johnson, V., I. Khurana dan J. K. Reynolds. 2002. Audit firm tenure and the quality of accounting earnings. *Contemporary Accounting Research* 19(1): 637-660.

Kreitner, R. dan A. Kinicki. 2005. *Organizational Behavior*. 5th Edition. McGraw-Hill. USA.

Luthans, F. 2006. *Organizational Behavior*, 10th Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. USA.

Malone, C. F. dan R. W. Roberts. 2004. Factors Associated with the Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23(2): 49-64.

Mangione, T. dan R. Quinn. 1995. Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. *Journal of Applied Psychology* 80(1): 114-116.

Messier, W., S. Glover dan D. Prawitt. 2006. *Auditing & assurance service: a system approach*. 4th edition. McGraw-Hill. USA.

Myers, J., L. A. Myers dan T. C. Omer. 2003. Exploring the term of auditor-client relationship and the quality of earnings: a case for mandatory auditor rotation. *The Accounting Review* 78(3): 779-799.

Nurahma dan N. Indriantoro. 2000. Tindakan supervisi dan kepuasan kerja akuntan pemula di Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 3(1): 45-63

Otley, D. dan B. J. Pierce. 1996. The operation of control systems in large audit firms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 15(2): 65-84.

Payne, E. dan R. J. Ramsay. 2008. Audit documentation methods: a path model of cognitive processing, memory, and performance. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 27(1): 151-168.

Pierce, B. dan B. Sweeney. 2006. Perceived adverse consequences of quality threating behavior in audit firms. *International Journal of Auditing* 10(1): 19-39.

Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan RI. 2010. Hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2008 – 2009.

Robbins, S.P. 2003. *Organizational behavior*. 12th edition. Pearson Education, Inc. New Jersey.

Robertson, J. C. 2007. Staff Auditor Reporting Decisions Under Time Deadline Pressure. *Managerial Auditing Journal* 22(4): 340-353.

Samelson, D., S. Lowensohn dan L. E. Johnson. 2006. The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 18(2): 139-166.

Sitepu, N. 1995. *Analisis Jalur*. Penerbit FMIPA Unpad. Bandung.

Soobaroyen, T. dan C. Chengabroyan. 2006. Auditors' Perceptions of Time Budget Pressure, Premature Sign Offs and Under-Reporting of Chargeabel Time: Evidence from a Developing Country. *International Journal of Auditing* 10(3): 201-218.

Suryanita, W., D. Setiawan dan H. Triatmoko. 2007. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 10(1): 1-19.

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan **ISSN 1411 - 0393**
Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

MENDETEKSI KEBANGKRUTAN SECARA DINI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ika Yunia Fauzia
ika.yunia@perbanas.ac.id
STIE Perbanas, Surabaya

ABSTRACT

Early bankruptcy detection can be carried out well when an entrepreneur implements integrity and competence in managerial systems, accounting reporting systems, capital structure usage system and business security system from fraud. Related to bankruptcy, Islamic economics recognized iflas (bankruptcy) and muflis (bankrupt entity). A law subject to a muflis is known as al-Hajr. This is a qualitative research with linear snowball method used as data collection technique. 10 of entrepreneurs who went bankrupt were interviewed. The interview rolled like a snowball for one by one informant was interviewed persuasively to gain important information on their causes of bankruptcy. Results of this study explained that the majority of the bankruptcy was caused by the use of capital structure that did not conform qualifications, followed by the lack of proper accounting reporting, poor management systems, lack of professionalism and fraudulence from internal and external aspects. The short coming of this research is the absence of the informant in the small and medium entreprises which has not been tried-out in the larger industry. Hope this research to provide the benefits for business, because a business must have a system of early prevention against bankruptcy .

Key words: bankruptcy, business, Islamic economics

ABSTRAK

Pendekteksian kebangkrutan secara dini bisa dilakukan dengan baik, ketika seorang pengusaha meng-implementasikan integritas dan kompetensi dalam sistem manajerial, sistem pelaporan akuntansi, sistem penggunaan struktur modal dan sistem ketahanan bisnis dari adanya kecurangan. Ketika telah terjadi kebangkrutan, dalam ekonomi Islam ada istilah yang disebut iflas (pailit) dan orang yang bangkrut dikenali dengan sebutan (muflis). Terkait dengan hukum yang akan dikenakan kepada seorang muflis dikenali dengan sebutan al-hajr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan linier snowball method, di mana peneliti menggali informasi tentang 10 orang pengusaha yang bangkrut dari beberapa responden. Wawancara menggelinding seperti bola salju karena harus mewawancarai satu persatu informan dengan cara persuasif demi menggali informasi penting tentang beberapa penyebab kebangkrutan yang mereka alami. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas kebangrutan disebabkan oleh penggunaan struktur modal yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, kemudian disusul dengan pelaporan akuntansi yang kurang tepat, selanjutnya buruknya sistem manajemen, kurangnya profesionalitas dan terakhir adanya kecurangan baik dari aspek internal maupun eksternal. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, pada informan yang bergerak pada bidang usaha kecil menengah saja, dan belum diuji cobakan kepada industri besar. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pebisnis, karena sebuah bisnis haruslah mempunyai sistem pencegahan secara dini terhadap kebangkrutan.

Kata kunci: kebangkrutan, bisnis, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kebangrutan merupakan satu hal yang menarik untuk dibahas, dikarenakan bangkrut selalu menyisakan cerita tragis yang berujung pada adanya PHK sepihak karyawan, penjualan aset dan lain sebagainya. Ketika salah satu usaha bangkrut, maka yang selalu terbersit di benak banyak pihak adalah apakah penyebab dari kebangkrutan tersebut. Berdasarkan fenomena yang ada,

banyak kalangan yang mengkaji tentang kebangrutan, agar hasil kajian tersebut bisa dijadikan pembelajaran bagi siapapun yang akan menjalankan sebuah bisnis pun mereka yang sudah menjalankan bisnisnya bertahun-tahun. Beberapa faktor penyebab kebangkrutan bisa disebabkan dari aspek internal dan eksternal. Penyebab internal terkait dengan ketidakcakapan manajemen dalam menggunakan modal yang ada, juga ketidakcakapan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Adapun faktor eksternal bisa disebabkan oleh regulasi yang berubah-ubah pun sistem perekonomian yang tidak menentu.

Beberapa penelitian yang berkenaan dengan bahasan tentang pendeteksian kebangkrutan telah dilakukan oleh beberapa kalangan. Penelitian dengan mempergunakan model Altman telah dilakukan oleh Kusmah (2008). Ia meneliti bahwa model Altman dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan, di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Gilrita¸ *et al.* (2015) juga memakai analisis Altman *(Z-Score)* untuk mengukur potensi kebangkrutan perusahaan manufaktur yang listing di BEI dan perusahaan manufaktur yang delisting di BEI dari periode 2012-2014. Ariesco (2015) juga meneliti Analisis Model Altman *Z-Score* untuk memprediksi *Financial Distress* pada Bank yang Listing di BEI tahun 2010-2013. Sagho dan Merkusiwati (2015) juga menggunakan metode Altman Z-Score modifikasi untuk memprediksi kebangkrutan bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Total ada 11 bank yang diteliti di kesempatan kali ini.

Adapun penelitian dengan mempergunakan model Altman, Zmijewski dan Springate dilakukan oleh Prabowo dan Wibowo (2015) dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan delisting di BEI periode 2008-2013. Nurcahyanti (2015) juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan studi komparatif model Z-Score, Altman, Springate dan Zmijewski dalam mengindikasikan kebangkrutan perusahaan yang terdaftar di BEI.

Penggunaan algoritma *Backpropagation* sebagai model prediksi kepailitan bank umum di Indonesia pernah diteliti oleh Malaka dan Hartojo (2014). Dasar pemikiran algoritma *backpropagation* ini adalah motode penurunan gradient, dengan propagasi sinyal kesalahan pembelajaran yang diumpan balik ke simpul-simpul tersembunyi secara berantai. Dengan kata lain, propagasi sinyal dilakukan dengan arah keluaran tiap simpul. Itulah mengapa aturan ini dinamakan propagasi balik atau *backpropagation*. Algoritma *backpropagation* di desain untuk mereduksi *error* antara keluaran aktual (*current output*) dan keluaran target (*desired output*). Sepasang pola input dan output dipilih untuk *training*. Bobot penghubungnya disesuaikan dengan masing-masing pola input. Semua pola diulangi sampai *error* berkurang dan jaringan sudah mempelajari pola input (Atmini, 2008) dalam Malaka dan Hartojo (2014). Penelitian dengan menggunakan prediktor *binary logit* pernah dilakukan oleh Azwar (2015). Azwar meneliti model prediksi finansial distress dengan binary logit dengan studi kasus emiten Jakarta Islamic Index. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan yang terpilih sebagai prediktor dalam memprediksi *financial distress* dan juga untuk menganalisis tingkat akurasi model prediksi *financial distress* yang terbentuk dari analisis.

Penelitian tentang kebangkrutan yang juga menggunakan *multiple discriminant analysis (MDA)* dan *logit modle dominates* juga dilakukan oleh Aziz dan Dar (2006), tepatnya penelitian tentang prediksi kebangrutan sebuah korporasi. Budiwati dan Jariah (2014) pernah meneliti tentang prediksi kepailitan di BPR Indonesia. Penelitian ini membahas tentang penggunaan rasio keuangan camel untuk memprediksi kepailitan dengan *discriminant analysis models Z-Score,* dengan obyek penelitian di Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Ihsan dan Kartika (2015) menjelaskan dalam penelitiannya tentang Potensi Kebangkrutan pada Sektor Perbankan Syariah untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis

bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah menggunakan metode RGEC masuk ke dalam kategori yang sehat selama tahun 2010-2014. Model Altman z-score juga menunjukkan bahwa bank umum syariah berada pada keadaan yang safe zone (tidak bangkrut) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Beberapa penelitian di atas memiliki banyak persamaan, karena mayoritas memakai tiga model prediktor (*Model Zmijewski, Model Altman, dan Model Springate*) ataupun salah satu dari tiga model di atas. Dan ada sebagian kecil yang memakai model lainnya, misalnya algoritma *backpropagation*. Penelitian yang membahas tentang gejala *financial distress* dilakukan oleh Hosen dan Nada (2013) dengan judul pengukuran tingkat kesehatan dan gejala *financial distress* bank umum syariah. Temuan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan antara hasil analisis CAMEL dengan *multiple discriminant analysis* (MDA), karena berdasarkan CAMEL ditemukan bahwa tiga bank syariah yang diteliti tergolong sehat, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan temuan hasil MDA yang menyatakan bahwa ketiga bank tersebut dalam keadaan bangkrut. Lebih lanjut lagi Hosen dan Nada menyebutkan bahwa temuan yang bertentangan ini menunjukkan bahwa metode MDA ternyata tidak tepat untuk diterapkan pada perbankan karena karakteristik perbankan sebagai *financial intermediary* yang jauh berbeda dengan karakteristik perusahaan.

Penelitian lainnya tentang kebangkrutan dilakukan oleh Jan dan Marimuthu (2016), tentang profil kebangrutan bank syariah lokal (Malaysia) dan Non Lokal (dari luar Malaysia). Penelitian ini menemukan bahwa bank Islam dari luar Malaysia mengalami proporsi zona kebangkrutan 40%, zona yang masih abu-abu 40% dan zona aman meliputi 20%. Adapun untuk bank Islam dari lokal Malaysia mengalami proporsi zona kebangkrutan 75%, zona abu2 00%, dan zona aman meliputi 24%.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh banyak akademisi, rata-rata sebagaian besar penelitian tentang mendeteksi kebangkrutan dilakukan dengan menggunakan alat model Altman, Zmijewski dan Springate. Di antara beberapa penelitian tersebut juga selalu dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan obyek penelitian mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI. Adapun penelitian tentang pendeteksian kebangkrutan perspektif syariah dengan metode kualitatif sangat jarang sekali dilakukan, dengan menggunakan beberapa informan penelitian dari para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami kebangkrutan oleh sebab beberapa hal. Kebangkrutan dalam Islam masuk dalam kategori *iflas* (pailit), seorang yang bangkrut *(muflis)* adalah seseorang yang hutang-hutangnya melebihi harta yang dia punyai, sehingga untuk orang yang bangkrut bisa dilakukan suatu penahanan untuk menggunakan harta yang ia punya, atau biasa disebut dengan *hajr*. Pemberlakuan *hajr* dimaksudnya agar hak-hak para kreditur terjaga dengan baik, sehingga seorang yang *muflis* tidak diperkenankan untuk membelanjakan hartanya kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja. Menurut Laela dan Meikhati (2009) Kepailitan perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan berdasarkan hukum kepailitan, ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau mencapai kesepakatan dengan kreditur. Kreditur dapat mengajukan gugatan ketika perusahaan memenuhi kriteria kepailitan.

Sebenarnya dalam Ekonomi Islam ada suatu istilah yang biasa dikenal dengan *qard hasan* (meminjamkan harta kepada Allah), yang merupakan suatu pembebasan hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang diniatkan oleh *kreditur* bahwa ia meminjamkan hartanya kepada Allah. Dalam hal ini, seorang debitur yang pailit bisa saja dibebaskan hutangnya oleh kreditur dengan akad *qard hasan*, atau seorang yang

menanggung hutang diberikan masa tangguh untuk pembayaran hutang-hutangnya seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Seorang yang pailit masuk dalam kategori salah satu dari delapan penerima zakat, dan berhak dilindungi, agar bisa berdaya lagi dan bisnis yang sedang jatuh bisa bangun kembali. Terlepas dari adanya *qard hasan* dalam pembayaran hutang, sebelumnya Islam sangat mengecam keras debitur yang mampu dalam pembayaran hutang, akan tetapi berniat untuk tidak membayar hutangnya. Jadi *qard hasan* bisa dilakukan jika situasinya benar-benar terjepit dan debitur yang mempunyai hutang benar-benar dalam keadaan *muflis.*

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mendeteksi kebangkrutan secara dini menurut ekonomi Islam, dengan cara mendeteksi di lapangan beberapa penyebab kebangkrutan tersebut. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menggunakan beberapa responden yang telah diwawancari dengan seksama, untuk mendapatkan suatu informasi terkait penyebab kebangkrutan yang mereka alami. Kemudian dianalisis dan digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan secara dini.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Kebangkrutan

Menurut Harnanto (1991: 485) kebangkrutan dapat diartikan sebagai situasi dimana perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Kadang-kadang bangkrut juga diartikan sebagai keadaan atau situasi di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada kreditur. Menurut Endri (2009) kebangkrutan adalah sebuah kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya, untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga seringkali disebut dengan likuidasi perusahaan, penutupan perusahaan dan *insolvabilitas.* Lebih lanjut menurut Adnan dan Kurniasih (2000) menyebut kebangkrutan adalah *economic failure* (kegagalan ekonomi) dan *financial failure* (kegagalan financial).

Kebangkrutan identik dengan beberapa kata, yaitu *insolvency, failure* dan *bankruptcy.* Altman (1984) menyatakan bahwa, *insolvency* terjadi jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo atau dapat dikatakan aktiva perusahaan kurang liquid. *Insolvency* yang terkait dengan kebangkrutan terjadi pada saat kewajiban total melebihi penilaian wajar dari total aktiva dan modal kerja bersih perusahaan bernilai negative. Setiap perusahaan dengan modal kerja bersih yang negative sudah bisa dikategorikan bangkrut, hal ini akan semakin jelas pada saat perusahaan secara resmi dinyatakan bangkrut melalui pengadilan. *Fauilure* (kegagalan) dalam ekonomi terjadi di mana tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan terus menurun atau lebih rendah dari tingkat pengembalian yang berlaku umum atas investasi yang sama. Bentuk lainnya yang biasa digunakan dalam mengartikan kegagalan dalam bisnis adalah jika pendapatan dalam sebuah perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh biaya dan jika tingkat pengembalian rata-rata atas investasi berada di bawah biaya modal perusahaan.

Secara umum, kebangkrutan telah dipahami dengan baik oleh khayalak masyarakat, karena secara kasat mata sangat terlihat sekali banyaknya akibat yang terlihat dari adanya kebangkrutan. Dimulai dari penyitaan aset, banyaknya hutang yang belum terbayar dan taraf hidup yang meluncur jatuh ke bawah. Menurut Sadarachmat (1995: 12) Kebangkrutan adalah keadaan di mana jika semua hutang perusahaan melebihi penilaian wajar dari harta totalnya (nilai perusahaan negative, atau perusahaan berada di dalam keadaaan *actual insolvensy).* Keadaan lainnya adalah *technical insolvensy,* di mana perusahaan dianggap gagal karena tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Higar dan Djazuli (2010) berpendapat, sebenarnya kegagalan usaha adalah sesuatu

yang bisa diprediksi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan teori ilmu keuangan. Ada beberapa cara dalam melakukan prediksi tersebut, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik dan lain sebagainya, sedangkan kendala dari internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lainnya. Gejala awal menurut kebangkrutan ditandai dengan adanya *financial distress*, yang diartikan dalam tahap yang dekat dengan kebangkrutan. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketidak pastian profitabilitas perusahaan pada masa yang akan datang.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan pasal 22 dinyatakan bahwa kebangkrutan adalah jika suatu perusahaan menderita kerugian sebesar 50% dari modalnya dan hal ini harus diumumkan di pengadilan negeri serta berita acara negara. Apalagi jika kerugian yang didera mencapai 75% dari modalnya, maka persekutuan tersebut akan bubar karena hukum, sehingga hukum kebangkrutan tidak memandang apakah perusahaan tersebut likuid atau tidak. Lebih jauh lagi, suatu usaha dinyatakan bangkrut jikalau hutang perusahaan lebih besar dari aktiva perusahaannya. Dan perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor saat jatuh tempo.

Beberapa Penyebab Kebangkrutan

Beberapa usaha yang ada di lapangan seringkali menemui kondisi di mana perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi, ditutup, diikuti dengan beberapa tuntutan dari karyawannya karena tidak bisa menggaji mereka, bermasalah dengan bank dan pihak lainnya karena tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya dan lain sebagainya.

Jika ditelaah secara teliti dan seksama, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kebangrutan, baik faktor internal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Ketika beberapa penyebab kebangkrutan tersebut tidak dideteksi sejak dini, maka bisa dipastikan sebuah usaha tidak akan bisa keluar dari situasi di mana usaha yang ada haruslah ditutup dengan segera. Menurut (Harnanto, 1991: 485) beberapa penyebab kebangkrutan adalah:

Pertama, karakteristik sistem ekonomi. Sistem perekonomian dalam suatu masyarakat ataupun negara dapat memberikan pengaruh bagi kebangkrutan suatu bisnis. Hal ini merupakan faktor eksternal karena tidak disebabkan dari tindakan manajemen sebuah perusahaan. Adanya perubahan struktur perekonomian mengharuskan sebuah manajemen perusahaan untuk berfikir keras menghasilkan suatu kebijakan agar sistem perusahaan bisa berjalan dengan baik dan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dengan semaksimal mungkin;

Kedua, faktor internal dari perusahaan, dikarenakan perusahaan mengambil suatu kebijakan yang tidak tepat dan tidak popular di masa lalu, sehingga berpengaruh terhadap kebangkrutan di masa kini. Dan pihak manajemen gagal mengambil tindakan yang tepat pada saat dibutuhkan. Beberapa faktor internal tersebut di antaranya adalah:

1. Kredit yang diberikan kepada pelanggan terlalu besar, dengan syarat longgar dan jangka waktu yang terlalu panjang;
2. Ketidak cakapan manajer dan juga manajemen, yang ditunjukkan dengan cara hasil penjualan yang tidak sesuai target, penentuan harga yang kurang tepat, *overinvestment* dalam aktiva tetap dan persediaan, kekurangan modal kerja dan juga hasil usaha yang tidak mencukupi untuk menutup harga pokok penjualan dan biaya operasional, Struktur modal

yang tidak seimbang karena jumlah hutang atau kewajiban yang dimiliki relative tinggi, tidak ada asuransi yang memadai, metode akuntasi yang tidak tepat, kekurangan modal dan penyalahguna an wewenang dan juga ada beberapa kecurangan-kecurangan.

Ketiga, adanya faktor eksternal yang menjadi penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan, yang mana hal ini berada di luar jangkauan manajemen. Misalnya adanya bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa sebuah perusahaan. Faktor ini datang secara tiba-tiba dan seringkali menyebabkan sebuah perusahaan secara tiba-tiba menutup dan menghentikan usahanya secara permanen.

Beberapa indikator yang bisa dijadikan alat untuk mendeteksi tanda-tanda kebangkrutan menurut Sadarachmat (1995: 12) adalah pihak eksternal yang mencakup: (a) penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham selama beberapa periode secara berturut-turut, (b) penurunan laba secara terus menerus bahkan sampai perusahaan mengalami kerugian, (c) ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha, (d) pemecatan pegawai secara besar-besaran, (e) pengunduran diri eksekutif puncak, (f) harga saham di pasar modal turun secara terus menerus. Kemudian tanda-tanda kebangkrutan dari pihak internal adalah: (a) turunnya volume penjualan yang disebabkan ketidakmampuan pihak manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi, (b) turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan, karena salahnya penetapan strategi pemasaran, (c) ketergantungan terhadap hutang yang sangat besar sehingga biaya modalnya juga membengkak.

Adapun beberapa tahapan kegagalan keuangan dan kebangkrutan menurut Newton (1975: 36) dimulai dengan adanya kesulitan keuangan, yang dapat dianalisis dan diidentifikasi melalui empat tahapan, yaitu: (a) periode inkubasi, dengan munculnya satu atau beberapa kondisi operasi dan financial perusahaan yang tidak menguntungkan dan tidak segera terdeteksi oleh pihak manajemen maupun eksternal, misalnya penurunan volume penjualan, kenaikan biaya operasi, inefisiensi produksi, ketidakmampuan manajemen memegang posisi kunci, kegagalan dalam melaksanakan ekspansi, tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengumpulan piutang, kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit), (b) kesulitan likuiditas atau *cash shortage.* Pada tahap ini untuk pertama kalinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya setelah jatuh tempo, meskipun aktiva fisiknya melebihi kewajibannya dan perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup bagus, atau bisa dikatakan bahwa aktiva perusahaan tidak likuid, (c) *financial* atau *commercial insolvency,* pada tahap ini perusahaan tidak mampu memperoleh dana dari sumber-sumber regular untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan bahkan sudah menunggak, (d) *total insolvency,* di mana dalam tahap ini gejala yang paling menonjol adalah jumlah hutang lebih besar dari aktiva perusahaan. Pada titik ini perusahaan sudah tidak mampu lagi menghindarkan diri dari pengakuan kebangkrutan dan usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memperoleh dana tambahan guna penyelamatan perusahaan tidak lagi berhasil.

Kebangkrutan Perspektif Ekonomi Islam

Kebangkrutan menurut terminology fikih biasa dikenali dengan sebutan *iflas* (pailit) yang menurut Ulama fikih berarti keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. *Al-taflis* adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

Kebangkrutan bisa memiliki dua makna, pertama, yaitu kebangkrutan di akhirat dan kedua, kebangkrutan di dunia. Kebangkrutan di akhirat dikarenakan sese-

orang tidak membawa pahala karena tidak melakukan segala kewajiban dan kebaikan di masa hidupnya di dunia. Hal ini seperti yang telah ditulis di sebuah hadith di bawah ini, yang maknanya: Rasulullah saw. bersabda: *"Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?" Para sahabat menjawab, "Muflis (orang yang pailit) itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda." Tetapi Nabi saw. bersabda: "muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka."* (HR. Muslim)

Dan kebangkrutan di dunia yang berkaitan dengan bahasan kali ini adalah tentang kebangkrutan dalam suatu usaha. Para ahli fikih menyebutkan bahwa bangkrut menurut Islam adalah orang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang dimilikinya. Ibn Rushd dalam *Bidayah al-Nihayah* menjelaskan bahwa *iflas* (pailit) dalam ekonomi Islam adalah (a) jika jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa menutupi hutang-hutangnya tersebut, dan (b) pailit jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali. Para Ulama sepakat, seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Apabila ada sisa hartanya, maka secara hukum syariah sisa harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya.

Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempumyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberikan hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi pemberlakuan hajr ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.

Dalam terminology ekonomi Islam, ketika seseorang mengalami pailit (kebangkrutan) maka boleh diberlakukan *hajr* yang bisa diberlakukan oleh Hakim. *Hajr* dilakukan karena permintaan orang yang memberikan hutang dikarenakan takut hak mereka terancam tidak akan kembali. *Hajr* juga dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya. Pemberlakuan *hajr* meliputi: (a) keterkaitan dengan orang yang memberikan hutang, (b) larangan membelanjakan hartanya ketika terkena *hajr* (kecuali kebutuhan pokok), (c) seorang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkannya kepada orang-orang yang mempunyai hutang. Pembayaran dimulai dari orang-orang yang mempunyai gadai padanya, (d) kreditur yang mendapati asetnya (tertentu) masih untuh dan belum terpakai, maka ia lebih berhak atas harta itu dibandingkan kreditur yang lainnya. Hal ini seperti yang diterangkan dalam hadith, Rasulullah bersabda: *"barangsiapa menemukan barangnya di orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya."* (HR. Muttafaq Alaih), (e) orang yang jatuh pailit berhak mendapatkan nafkah dari hartanya untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Dan ia juga berhak menempati rumahnya. (Ibn Qudamah, Jilid 4, 537 dan Ibn Rushd, Jilid 2, 84)

Hukum *al-taflis* (kepailitan) adalah: (a) dikenakan *hajr* jika kreditur menghendaki; (b) Seluruh asetnya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, kecuali tempat tinggal, pakaian dan makanan; (c) jika terbukti mengalami keuangan terlebih lagi oleh suatu sebab yang di luar kesengajaan, maka kreditur bisa saja memberi tangguh atau membebaskan hutang tersebut *(qard hasan);* (d) jika seluruh harta sudah dibagi dan datang kreditur lain yang belum mendapat bagian, maka kreditur tersebut mendatangi beberapa kreditur yang sudah mendapatkan bagian, dan bisa meminta bagian yang sama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prihatmaka *et al.* (2014), perubahan terhadap undang-undang tentang kepailitan dewasa ini masih cenderung melindungi kepentingan kreditur, karena itu harus ada ketentuan yang harus menyaratkan bahwa debitur harus bangkrut. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi kebangkrutan secara umum.

Beberapa Solusi Atas Kebangkrutan Menurut Islam

Dalam Islam, ketika ada seseorang yang pailit dan memiliki hutang yang sangat besar sekali sehingga hartanya tidak mencukupi untuk membayarkan hutang-hutangnya. Maka bentuk muamalah ini termasuk dalam kategori akad *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ketika dilihat beberapa golongan yang wajib untuk menerima zakat, orang yang dalam keadaan berhutang (akibat pailit) termasuk dalam kategori mereka yang wajib mendapatkan uang zakat.

Di beberapa referensi klasik, *baitul mal* (rumah pusat pengumpulan harta benda) mengeluarkan beberapa pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat wajib terkait dengan pemeliharaan fakir miskin, operasional pemerintahan, pinjaman komersil tanpa bunga (berprinsip *mudharabah),* penggajian petugas pemerintah, dan masih banyak lagi lainnya, dan salah satu dari pos pengeluaran *baitul mal* adalah untuk membayarkan hutang orang-orang yang pailit (dengan klasifikasi tertentu).

Kaitannya dengan hutang piutang dalam ekonomi Islam, semangat Islam untuk memberdayakan ekonomi adalah semangat bergotong royong. Hal ini bisa dilihat ajaran tentang *mudharabah* yang berbentuk *profit and loss sharing.* Artinya jika sebuah usaha dihukumi pailit atau bangkrut, misalnya oleh karena sebab eksternal, maka bisa dipertimbangkan implementasi *loss sharing.* Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa piutang dilakukan untuk menolong atau untuk meringankan orang lain yang membutuhkan. Piutang tersebut disebut *"menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik"*. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11 yang makna- nya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk- nya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

Qard hasan atau pinjaman kepada Allah adalah terminology untuk kreditur yang menghapus beban hutang seorang debitur yang tidak bisa melunasi hutangnya karena pailit. Jadi posisi kreditur menghapus hutang debitur adalah kreditur memberikan pinjaman kepada Allah. Dan ini masuk dalam kategori *qard hasan.* Akan tetapi pelaksanaan *qard hasan* mempunyai beberapa tahapan, karena dalam Islam pembayaran hutang adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sehingga Rasulullah pernah tidak mau menshalatkan jenazah, dikarenakan jenazah tersebut mempunyai hutang sampai ada seseorang yang mau menanggung hutangnya *(kafalah).* Beberapa tahapan dalam penanggulangan hutang adalah:

Tahapan pertama, seseorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya, apalagi ketika ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Orang yang mampu membayar hutang dan menundanya adalah orang yang sangat dicela di mata Allah. Dalam sebuah hadith disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Siapa saja yang berhutang suatu hutang, sedangkan ia bertekad untuk tidak membayarnya, maka ia akan menemui Allah sebagai pencuri."* (HR. Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal). Di hadist yang lainnya disebutkan juga, bahwa Rasulullah bersabda: *"Orang yang terbaik sesungguhnya adalah orang yang terbaik dalam pembayaran hutang."* (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah). Rasulullah juga menandaskan dalam hadith lainnya, yang maknanya adalah: *"Barang siapa yang mengambil harta orang (berhutang), karena ingin membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Dan barangsiapa yang mengambil harta orang (berhutang) karena ingin*

menghabiskannya, maka Allah akan menghabiskan darinya." (HR. Bukhari)

Tahapan kedua, ketiga debitur mengalami kesusahan dalam membayar hutangnya, maka pemberi hutang harus memberikan tangguhan kepada orang yang kesulitan dalam pelunasan hutang. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280, yang maknanya adalah: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* Dalam Undang-Undang tentang kepailitan disebutkan bahwa seorang debitur berhak memiliki Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPN), seperti yang dijelaskan dalam pasal 222, ayat 2, disebutkan bahwa seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaian atau seluruh uang kepada debitur, sedangkan apabila pihak yang berhutang enggan melunasi hutang-hutangnya padahal dia sudah mampu, maka dia boleh dipenjarakan (Hartini, 2007: 191). Menurut sebuah penelitian, jika sebuah perusahaan diberikan kesempatan yang baik berupa penundaan hutang-hutangnya, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut akan terbebas dari jerat kebangkrutan yang disebabkan oleh hutang-hutangnya Panggo *et al.* 2014). Menurut (Setiarso, 2013) Kepailitan perspektif undang-undang bisa juga digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam undang-undang kepailitan di Indonesia.

Tahapan ketiga, ketika debitur benar-benar bangkrut dan pailit sehingga tidak bisa membayar seluruh kewajiban-kewajibannya, maka ketika kreditur lebih baik membebaskan hutang tersebut, dan hal ini termasuk dalam kategori *qard hasan.* Dan di dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *"Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia meringankan beban orang yang kesukaran uang (untuk membayar hutang) atau membebaskannya."* Dalam hadith lainnya juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *"Rasulullah saw. memerintahkan agar membebaskan pembayaran dari sesuatu yang terkena musibah."*

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative method),* yaitu sebuah metode yang menurut Creswell (2012: 20-28.) sebagai usaha untuk membangun makna suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Lebih lanjut lagi Strauss dan Corbin (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bungin (2011: 24) menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.

Obyek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara *snowball* atau yang lebih dikenal dengan metode bola salju atau prosedur rantai rujukan atau *networking.* Mulai dari pertemuan peneliti dengan informan pertama yang berinisial IL di Jombang dan

AS di Sidoarjo, yang dikontak dan kemudian menemukan beberapa informan lainnya yang berkaitan dengan bahasan informan yang pertama. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan *linier snowball modle* untuk memungkinkan peneliti bergerak linier dalam menemukan informasi baru, dari satu informan ke informan yang lainnya dan membentuk bola salju yang besar secara linier (Bungin, 2011). Dari beberapa informasi yang digali oleh peneliti, pada akhirnya peneliti berhasil mewawancarai 10 informan yang merupakan pengusaha kecil dan menengah yang telah mengalami kebangkrutan. Untuk lebih jelas lagi lihat Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Informan Penelitian

Nama Informan	Usaha Yang Pernah Digeluti dan Beberapa Keterangan Terkait	Lokasi	Keterangan
Hj. Pujiati	Pernah memiliki usaha di bidang garmen, memiliki beberapa tempat display produk tersebut.	Sidoarjo	Informan (Hj. Pujiati) ditemukan dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai Andira Susana, kemudian anak dari Andira Susana yang bernama Kurniasari dan teman dari Kurniasari yang merupakan anak dari Hj. Pujiati.
H. Imam Lasidin	Pernah memiliki beberapa usaha, yaitu memiliki beberapa armada bis untuk pariwisata, beberapa unit rumah untuk disewakan, aktif di jual beli kendaraan bermotor dan memiliki beberapa sawah yang ditanami tebu untuk di supply ke pabrik gula.	Jombang	Informan (H. Imam Lasidin) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancari anak dari Imam Lasidin yang bernama Rozalinda, Dewinta dan Razinda.
H. Yasin	Pernah memiliki beberapa usaha jual beli mobil dan memiliki beberapa usaha di bidang pertanian	Malang	Informan (H.Yasin) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancari saudara H. Yasin yang bernama H. Imam Lasidin.
Maduratna	Pernah memiliki usaha travel haji dan umroh, beberapa kali sukses dalam berbagai macam usaha dan gagal	Sidoarjo	Informan (Maduratna) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai beberapa customernya yang merasa ditipu karena telah menjadi agen usaha travel tersebut. Ada sekitar 14 informan yang telah diwawancari oleh peneliti.
Andira Susana	Pernah memiliki usaha penyewaan kendaraan dan merupakan salah satu vendor penyewaan mobil di beberapa perusahaan asing.	Sidoarjo	Informan (Andira Susana) adalah orang pertama yang diwawancari oleh peneliti, kemudian berkembangan dengan cara snowball untuk mewawancari kolega-koleganya.
Ananda Mandasari	Pernah memiliki usaha, menjadi supplier bahan semen dan disalurkan kepada PT. SGD.	Rembang	Informan (Ananda Mandasari) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai beberapa kolega yang merasa dirugikan olehnya.

Tabel 1 lanjutan

Nama Informan	Usaha Yang Pernah Digeluti dan Beberapa Keterangan Terkait	Lokasi	Keterangan
Salim	Pernah memiliki usaha besi tua	Jombang	Informan (Salim) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancari koleganya (H. Imam Lasidin), dan juga mewawancari pegawai di salah satu Bank RIB yang mana Salim merupakan nasabah bagi Bank tersebut.
Yuniarti	Pernah memiliki usaha garmen baju muslim, memiliki pelanggan loyal di luar jawa	Jombang	Informan (Yuniarti) pertama kalinya diwawancari oleh peneliti, kemudian dengan cara snowball peneliti mewawancarai beberapa eks karyawannya dan juga beberapa koleganya.
Amin Sumari	Pernah memiliki usaha catering	Malang	Informan (Amin Sumari) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai rekan-rekan yang memiliki piutang dengannya.
Rindasari	Pernah memiliki beberapa gerai yang bergerak di bidang makanan kecil di Bali	Semarang	Informan (Rindasari) pertama kalinya diwawancarai oleh peneliti, kemudian dengan cara snowball peneliti mewawancarai beberapa kolega dan eks customernya.

Catatan: Nama-nama informan bukanlah nama yang sebenarnya. Akronim organisasi juga tidak merefleksikan akronim yang sebenarnya.

Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (a) Pengamatan *(observasi):* dengan melakukan pengamatan yang mendalam dan pencatatan yang sistematik terhadap gejala-gejala yang berkaitan dengan kebangkrutan yang terjadi di beberapa usahawan, (b) Wawancara mendalam *(Indept interviewing):* yaitu dengan mewawancarai para pengusaha, kolega-koleganya, beberapa mantan karyawan mereka, beberapa pegawai bank yang memberikan kredit, dan lain sebagainya, (c) Dokumentasi *(documentation):* mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik berupa dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.

Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data pada penelitian kali ini akan menggunakan studi kasus, yang merupakan salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada obyek analisis. Dalam penelitian ini, tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus observasi, yang menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Bungin (2011) adalah penekanannya lebih pada penggunaan observasi dalam penelitian untuk menjaring informasi-informasi empiris yang detail dan actual dari unit analisis penelitian, apakah ini menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masya rakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi karakteristik responden yang akan didiskusikan dan dianalisis dalam penelitian kali ini adalah para usahawan Muslim yang telah mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Beberapa responden di antaranya bahkan telah habis asetnya,

karena terjual untuk membayar beberapa kewajiban-kewajiban perusahaannya.

Wawancara dilakukan dengan sangat hati-hati dikarenakan menguak beberapa hal yang bersifat pribadi. Dengan menggunakan metode *linier snowball modle,* maka penelitian ini bisa menemukan beberapa informan kunci yang memiliki informasi penting untuk penelitian ini. Wawancara secara langsung dilakukan dalam rangka menggali beberapa informasi secara persuasive, sehingga data yang terkumpul merupakan data primer.

Mengenali Beberapa Penyebab Kebangkrutan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan, diketahui beberapa di antara mereka telah benar-benar ada di tahapan *muflis* (orang yang sedang pailit) ataupun jatuh miskin. Dalam hukum fikih disebutkan bahwa pailit *(iflas)* adalah seseorang yang tidak memiliki harta/*fulus.* Karena hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya untuk menbayar hutang-hutangnya. Untuk kasus Hj. Pujiati pemilik usaha garmen dan memiliki beberapa lokasi untuk mendisplay produk garmennya di wilayah Sidoarjo dan Surabaya, dari informan yang ditemukan oleh peneliti menyatakan bahwa:

> "Kasihan Beliau, karena beberapa saat yang lalu beberapa truk dengan dikawal beberapa polisi berjejer untuk mengeksekusi paksa salah satu usaha nya. Semua barang-barang yang didisplay di tempat usahanya dikeluar kan dengan paksa. Tempat usaha ditutup dengan paksa. Dan beberapa karyawan yang berada di dalamnya berhamburan. Hal itu dikarenakan beliau tidak memenuhi kewajibannya di salah satu bank. Dan setelah adanya eksekusi itu, beliau (Hj. Pujiati) langsung terkena serangan struk."

Di kasus Hj. Pujiati ditelaah secara langsung oleh peneliti, bahwa yang menjadi penyebab utama kebangkrutan pengusaha garmen itu adalah aspek pemasaran yang kurang berjalan dengan baik. Walaupun *owner* usaha garmen tersebut memiliki lebih dari 10 tempat untuk mendisplay barang-barang produksinya, akan tetapi pemasaran dengan gaya-gaya konvensional tersebut tidak bisa menyelamatkan usahanya. Beberapa kali peneliti mendatangi tempat untuk display barang beliau yang dijaga oleh puluhan karyawan selama kurang lebih 6 tahun terakhir terlihat sangat sepi. Usaha semacam ini akan membuang modal dengan percuma. Karena modal telah habis untuk biaya operasional. Beberapa kebangkrutan yang juga disebabkan oleh tindakan manajemen yang kurang kreatif juga dialami oleh Yuniarti yang merupakan pengusaha garmen. Di dalam wawancara ekslusif dengan Yuniarti, Ia menerangkan:

> "Saya dulu pegawai di salah satu Bank. Setelah menikah saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Melihat passion saya di bidang garmen, pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pinjaman di sebuah bank dan memulai usaha ini. Pada awalnya usaha saya berjalan lancar, saya mempunyai banyak karyawan, hasil produksi saya pasarkan ke luar jawa. Akan tetapi akhirnya saya mengalami kesulitan dalam pemasaran, karena laba yang tidak sebanding untuk bisa mengejar trend mode busana yang berubah-ubah. Jadi ketika ada barang yang tersisa sudah tertinggal mode. Akhirnya kerugian yang hanya puluh an juta menjadi ratusan juga. Dan di titik yang kebingungan saya memutuskan untuk mem-PHK karyawan saya. Beruntung saya punya tabungan beberapa sawah untuk bisa membayar tangungan-tanggungan di bank. Dan beruntung juga suami saya juga memiliki pendapatan lain yang bisa diandalkan. Akhirnya saya putuskan untuk memulai hidup dari awal menjadi pendidik di sebuah lembaga pendidikan."

Tindakan manajemen yang kurang kreatif dikarenakan kurang cakapnya manajer, dan kurangnya kemampuan, pengalaman, ketrampilan dan lain sebagainya. Beberapa tindakan yang kurang kreatif di-

karenakan kurangnya upaya-upaya pemasaran dengan cara kreatif, agresif dan persuasif. Pun juga aspek lainnya yang berkenaan dengan tanggung jawab seorang pengusaha menurut fikih muamalat. Di beberapa kasus, data yang diperoleh dari beberapa informan terkait dengan H. Imam Lasidin dan H. Yasin, kedua pengusaha ini memiliki kesamaan karena tidak mengoperasikan manajemen yang baik dan juga menggunakan metode akuntasi yang tidak tepat. Dari wawancara dengan kolega H. Imam Lasidin disebutkan:

> "Manajemen pada awalnya berjalan dengan baik, sampai owner terkena permasalahan pribadi dan menyerahkan semua kebijakan-kebijakan manajemen dan termasuk di dalamnya-menyerahkan tanggung jawab keuangan kepada orang yang dipercayanya. Kemudian orang kepercayaannya ternyata menjadi pagar makan tanaman."

Hasil wawancara yang serupa dihasilkan dari H. Yasin. Adanya permasalahan pribadi dan kurang kuatnya sistem di dalam perusahaan, membuatnya mengalami kegagalan dalam memanaj usahanya. Ia mengalami kebangrutan karena aset-asetnya telah habis untuk membayar segala kewajiban-kewajibannya kepada sebuah bank.

Ada juga pelaku usaha yang baik dalam manajerial, akuntansi, penggunaan struktur modal yang baik dan tepat, juga memiliki produk/jasa yang bagus akan tetapi juga tidak luput dari kebangkrutan. Salah informan yang berhasil ditemui oleh peneliti bernama Andira Susana, dengan wajah yang memendam amarah dan kesedihan, Ia menyatakan:

> "Saya berusaha ikhlas, menerima semua ini. Akan tetapi saya bingung ketika melihat banyaknya supir dan karyawan saya yang menganggur karena tidak ada orderan. Saya mengawali menjadi vendor penyewaan mobil bertahun-tahun yang lalu, untuk perusahaan-perusahaan asing. Untuk penyebab kebangkrutan saya, singkat cerita saya memperkerjakan fresh graduate lulusan S1 di sebuah Univ. Negri di Jawa Timur, untuk menjadi salah satu karyawan saya. Motifnya adalah kasihan karena dia anak teman baik saya. Ternyata ini merupakan awal yang tidak baik untuk usaha saya. Usaha yang saya rintis bertahun-tahun mendadak dirusak oleh karyawan baru saya yang merupakan teman anak saya. Dia ingin menyabotase usaha saya untuk mendapatkan tambahan uang."

Di kasus lainnya, ada juga pelaku usaha yang sangat berbakat dalam usahanya, akan tetapi hanya bertahan beberapa tahun dan selalu diakhiri dengan drama penipuan. Sebut saja Maduratna, seorang perempuan yang sangat gesit karena berkali-kali sukses membangun usahanya, akan tetapi selalu ada korban karena usahanya selalu diakhiri dengan kebangkrutan disebabkan oleh wanprestasi dan juga buruknya manajemen keuangan. Peneliti telah berhasil mewawancarai 14 informan yang merupakan korban dari Maduratna yang bergerak di bidang usaha Travel Umroh dan Haji, ada satu informan yang merupakan janda dan berasal dari Pacitan telah menyetorkan dana 200 juta kepada Manajemen PT PTS yang dipimpin oleh Maduratna. Akan tetapi setelah beberapa lama kantornya tutup. Ada juga seorang informan yang telah menyerahkan uang sebesar 1,5 Miliar milik customernya yang telah mendaftar umroh. Informan tersebut sangat kebingungan karena ia merupakan orang yang sangat berpengaruh di sebuah komunitas dan semua anggotanya telah menyetorkan uang kepadanya. Ia begitu kebingungan bagaimana cara mengembalikan uang yang telah raib. Ada juga beberapa informan lainnya, yang ketika ditotal oleh peneliti uang yang raib dibawa Maduratna ada sekitar 6,5 Milyar, yang diambilnya dari beberapa agen-agen Haji dan Umroh. Ketika peneliti mewawancari ketua RT setempat yang mengetahui sepak terjang Maduratna, maka Beliau menyatakan:

> "Beberapa korban yang ditipu oleh Maduratna rata-rata adalah orang

> yang tidak mampu dan dalam keadaan yang susah. Mereka datang kepada saya untuk mencari tahu keberadaan Maduratna yang menghilang entah kemana. Polisi juga sudah mencarinya. Ada seseorang yang merupakan istri pemilik pesantren kecil di Surabaya kebingungan bagaimana ia bisa mengembalikan uang customernya. Ada yang Janda di Jember dan Pacitan. Ada Juga satu orang yang menjadi korban 1,5 Milyar. Dengan menangis dia menyatakan bahwa rumah satu-satu nya sudah terjual untuk mengganti uang customernya, tapi dia kebingungan kemana mencari uang untuk mengganti semuanya. Beberapa kisah lainnya semuanya dramatis, karena merekalah –para agen umroh tersebut- yang menghadapi customernya masing-masing atas uang yang telah raib, karena merekalah yang ada di lapangan."

Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini

Wahyu (2010) meneliti bahwa penghambat kemajuan bisnis yang dijalankan -terutama oleh UMKM- adalah pertama, lemahnya sumber daya manusia (SDM); kedua, keterbatasan modal; ketiga, manajemen tata kelola yang tradisional dan nyaris tidak mengenal teknologi modern dalam berproduksi; keempat, kendala pemasaran yakni, rendahnya akses pasar; kelima, kesulitan dan hambatan dalam penyediaan bahan baku; *keenam*, belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Dari beberapa hasil wawancara di atas, bisa dideteksi secara baik bahwa ada beberapa penyebab adanya kebangkrutan. Ketika sebab-sebab tersebut dideteksi secara dini, maka kebangkrutan akan bisa dihindarkan. Beberapa penyebabnya sangat beragam sekali, dan tahapan yang paling mudah untuk menghindarkan kebangkrutan adalah memperbaiki dan menjaga aspek manajemen, akuntasi, profesionalitas, dan penggunaan struktur modal yang tepat. Ada satu hal yang agaknya susah untuk dideteksi dengan dini, ketika timbul suatu kecurangan *(ghisy)* –apalagi- ketika dilakukan oleh orang terdekat. Kecurangan tersebut biasanya menyebabkan kebangkrutan secara tiba-tiba dan permanen, dikarenakan minimnya gejala-gejala yang bisa diidentifikasi sejak awal.

Dari keterangan beberapa informan, bisa disimpulkan bahwa kebangkrutan yang mereka alami disebabkan oleh lima hal, yang seharusnya beberapa sebab tersebut bisa diidentifikasi sejak awal, sehingga kebangrutan bisa dihindarkan. Kelima hal tersebut sesuai sekali dengan dasar-dasar pencegahan kebangkrutan secara syariah. Pertama, aspek manajemen (produk/jasa) haruslah selalu dijaga dengan baik; kedua, sistem akuntansi yang juga harus diperhatikan akuntabilitasnya; ketiga, integritas yang tinggi dengan menjaga *amanah, maslahah, an taradhin;* keempat, penggunaan/ struktur modal yang tidak tepat; kelima, timbulnya kecurangan *(ghisy)* dalam suatu bisnis, bisa jadi satu bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Kelima pencegahan kebangrutan secara syariah ini bisa dilacak di dalam al-Qur'an dan al-hadith yang berkaitan dengan ajaran-ajaran tentang manajerial, akuntansi (pencatatan), integritas, pemanfaatan modal, dan juga penipuan dan kecurangan. Kelima hal tersebut merupakan variabel yang harus ada di setiap pelaku bisnis syariah.

Variabel pertama aspek manajemen produk/jasa. Bahasan terkait manajemen produk/jasa tidak hanya berkitas pada aspek pemasaran saja. Akan tetapi hal lainnya yang juga mendukung aspek pemasaran bisa dikembangkan pada peningkatan inovasi, memperbaharui produk dan menerapkan modal sosial berupa jaringan dalam bisnis (Setyanto, Samodra dan Pratama, 2015). Menurut Ardina, Brahmayanti dan Subaedi (2010), semakin tinggi pengetahuan, ketrampilan, kemampuan sumber daya manusia dalam sebuah usaha bisnis, maka akan semakin tinggi kinerja mereka. Dan ini juga sangat berpengaruh pada implementasi manajemen produk/jasa dalam sebuah bisnis. Hermanto (2013) dalam penelitiannya juga

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik akan berpengaruh terhadap kepuasan para pelanggannya. Hal ini sangat beralasan, karena aspek manajerial yang baik akan selalu dijalankan oleh SDM yang berkualitas. Jadi dua hal ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Kaitannya dengan variabel kedua, Kurniawati, Nugroho dan Arifin (2012) pernah meneliti bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Hasil penelitian di Salatiga ini menyatakan bahwa UMKM sudah melakukan pencatatan atas penjualan, pembelian, persediaan, biaya gaji dan biaya lainnya, dan juga pelaporan yang mencakup laporan penjualan, pembelian, persediaan dan penggajian. Kendala dalam penerapan akuntansi meliputi latar belakang pendidikan yang ada, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi dan belum ada kebutuhan terhadap penerapan akuntansi.

Inayanti, Suryani dan Setiawan (2012) juga menyatakan dalam penelitiannya, bahwa kelemahan UMKM adalah masalah ketertiban pencatatan usaha dan laporan keuangan. Pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi dan ini menyebabkan ketidakcocokan antara hasil laporan dengan kenyataan.

Adapun variabel ketiga dalam pencegahan kebangkrutan secara dini adalah, integritas yang tinggi dengan menjaga *amanah* (kepercayaan), *maslahah* (kemaslahatan), *an taradhin* (kerelaan dari semua pelanggan dan mitra bisnisnya). Bahasan tentang integritas akan selalu diikuti oleh kompetensi. Variabel ini meliputi kemampuan seorang pebisnis dalam mengendalikan dirinya untuk selalu menjaga kepercayaan para pelanggannya, dengan menjunjung tinggi kepercayaan, kemaslahatan dan juga kerelaan dari masing-masing pelaku bisnis. Bahasan dalam variabel kita termasuk *intellectual capital* yang harus dimiliki oleh masing-masing pebisnis. Hartati (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *intellectual capital* akan memiliki profit yang lebih tinggi, serta kinerja keuangan dan nilai perusahaan akan lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya.

Variabel keempat, penggunaan/struktur modal yang tidak tepat. Kurangnya modal adalah alasan yang klise karena sering dikeluhkan oleh para pengusaha di manapun mereka berada. Solusi atas kekurangan modal yang ada adalah banyaknya tawaran kredit yang berorientasi pada usaha rakyat. Akan tetapi banyak di antara pengusaha yang tidak menggunakan modal yang didapat dengan baik dan efisien. Mayuni dan Rustariyuni (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terjadi sebuah peningkatan dari variabel produksi, tenaga kerja, pendapatan dan biaya setelah UMKM di Jembarana, Bali mendapatkan suntikan dana dari sebuah Bank untuk usaha mereka. Hal ini dikarenakan penggunaan modal dikelola dengan baik dan tepat guna.

Dan variabel kelima, timbulnya kecurangan *(ghisy)* dalam suatu bisnis bisa diantisipasi dengan penerapan teknologi informasi. Kecurangan merupakan satu sikap wanprestasi karena hilangnya kejujuran, kebaikan dan perampasan hal orang lain. Kecurangan bisa terjadi karena salah penulisan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja, dan ini bisa menyebabkan kebangkrutan. Penerapan teknologi informasi bisa memudahkan suatu usaha dalam menangani sebuah transaksi dalam skala besar dengan sangat efisien. Dan lebih utama lagi, penerapan teknologi informasi bisa mengurangi kecurangan dalam sebuah bisnis.

Pendeteksian kebangrutan secara dini bisa dilakukan dengan melihat secara cermat kelima variabel di atas, jikalau sebuah usaha mengimplementasikan kelima variabel tersebut, maka kebangkrutan akan bisa dicegah sedini mungkin. Sebaliknya, jikalau sebuah usaha hanya mengimplementasikan beberapa variabel saja, maka hal tersebut akan menjadi pemicu bagi buruknya struktur usaha sehingga kebangkutan akan sa-

ngat berpotensi menghampiri pelaku usaha tersebut.

Di antara beberapa informan, hanya usaha milik Andira Susana yang memiliki aspek manajerial yang bagus, sistem akuntasi yang akuntabel, professional dan penggunaan struktur modal yang bagus. Akan tetapi beberapa sistem yang baik tersebut tetap saja mempunyai kekurangan, karena intuisi dari Andira Susana yang kurang berjalan dengan baik. Kebangrutan Andira sebenarnya bisa dihindari, ketika Ia pertama kali menyadari telah memasukkan karyawan yang kurang professional. Hal ini terbukti karena Andira sebelumnya telah beberapa kali memergoki salah satu karyawannya tersebut wanprestasi, dikarenakan telah berbohong dan menyalahgunakan aset perusahaannya. Seharusnya ia memberlakukan *punishment* agar usahanya tidak digerogoti dari dalam. Akan tetapi Ia merasa kasihan kepada karyawan tersebut yang merupakan anak dari koleganya, dan kemudian karyawan tersebutlah yang pada akhirnya menyabotase bisnisnya dengan secara tiba-tiba. Bisnis di bidang transportasi yang dibangunnya bertahun-tahun bangkrut secara permanen.

Dalam spirit Islam, kinerja seseorang memilki tolak ukur pada dua hal, yaitu integritas dan kompetensi. Surat Yusuf ayat 55 menyebutkan bahwa ketika Yusuf akan dipilih untuk menjadi bendahara negara, Ia menyatakan bahwa ia adalah seseorang yang pandai 'menjaga' *(hafidz)* dan berpengetahuan *(alim). Hafidz* merupakan inti dari intergritas dan *alim* merupakan pusat dari kompetensi. Jadi ketika seseorang berbisnis, menjadi pemimpin atau berada di sebuah kondisi di mana ia harus memimpin dirinya sendiri dan bawahannya, ia haruslah cakap dalam integritas dan kompetensi. Agar terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Begitupula dalam pemilihan karyawan, kedua tolak ukur inilah yang harus dijadikan standar dalam rekrutmen sumber daya manusia yang akan bisa membesarkan sebuah usaha. Apabila salah satu dari keduanya hilang, maka sebuah usaha akan bergerak jalan di tempat dan bahkan bisa berjalan mundur ke belakang.

Integritas sangat dibutuhkan dalam bisnis, ketika menilik etika bisnis dalam Islam, beberapa hal yang terkait dengan integritas adalah kepercayaan *(al-amanah)*, menjadi debitur yang baik *(mudharib),* menyelesaikan sesuatu dengan cara yang adil *(al-adalah),* transaksi yang saling ridha *(an-taradhin),* larangan menipu *(al-khuda'),* menghindari penipuan *(adam ghisy),* menjaga komposisi barang/jasa dengan tepat *(ifa' al-kayl wa al-mizan),* larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik *(akl amwal an-nas bil bathil),* mencari rizki yang halal *(halal),* bersyukur *(al-shukr)* seimbang *(al-tawazun),* memaafkan dan berbelas kasih *(al-afw wa al-ghufran)* dan motivasi berbisnis adalah untuk akhirat, perlindungan terhadap alam, pemberdayaan masyarakat miskin dengan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan beberapa akad-akad sosial lainnya. (Fauzia, 2014: 69-98)

Kompetensi terkait erat dengan beberapa hal yang membahas tentang sesuatu yang tehnis. Misalnya bekerja dengan kesungguhan *(kasb),* menjunjung tinggi profesionalisme *(itqan/muhtaraf)* yang di dalamnya berkaitan erat dengan pemberlakuan kerapian aspek manajerial yang bisa menyebabkan pembagian dividen tinggi kepada para *shahibul mal,* karena volume penjualan yang bagus. Akad *mudharabah* berjalan dengan baik, karena pihak manajerial bisa menciptakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen juga merasakan adanya kemaslahatan atas barang/jasa yang dibelinya. Pihak manajemen berhasil mencetak laba yang tinggi karena volume penjualan. Jadi semua pihak merasakan *falah* karena adanya *maslahah* (kemaslahatan) dalam bisnis yang dijalankan. Profesionalisme juga erat kaitannya dengan sistem akuntansi yang baik dan tepat. Dari beberapa informan, terlihat banyaknya sistem akuntansi yang tidak tepat. Beberapa di antara mereka yang mempunyai program pencatatan tertentu, akan tetapi tidak tepat secara pengauditan.

Dalam al-Qur'an disebutkan kewajiban untuk menggunakan laporan akuntasi dalam sebuah bisnis, seperti yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 282. Disebutkan oleh Muhammad (2013:7) bahwa prinsip akuntasi yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 282 adalah: (a) prinsip pertanggung jawaban *(accountability),* yang selalu identic dengan konsep amanah. Implikasinya dalam bisnis yaitu selalu melakukan pertanggung jawaban kepada beberapa pihak terkait, dan wujud pertanggung jawaban tersebut dalam bentuk laporan akuntansi, (b) prinsip keadilan *(justice),* berarti setiap transaksi yang dicatat oleh perusahaan hendaknya dicatat dengan benar, (c) prinsip kebenaran *(trust),* kebenaran dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam suatu bisnis.

Penggunaan struktur modal yang tepat merupakan satu hal yang sangat signifikan dalam berbisnis. Ketika pun integritas diterapkan dalam suatu bisnis, modal dijaga dengan baik, akan tetapi penggunaan modal tidak professional, maka sebuah bisnis bisa jadi akan tetap mengalami kebangrutan. Di dalam penggunaan struktur modal, harus ada aspek kompetensi yang baik dan tentunya intergritas.

Dari beberapa data yang digali dari beberapa informan, berikut ini dipaparkan tabel penyebab kebangkrutan yang merupakan penyebab umum yang sebenarnya bisa dideteksi sejak dini seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 menyatakan bahwa beberapa pencegahan dini terhadap kebangrutan secara syariah sebenarnya bisa dideteksi secara dini. Jikalau masing-masing pelaku bisnis mengimplementasikan semua aspek dari kelima hal di atas. Ketika aspek managerial, akuntansi, integrasi, struktur modal, pengendalian kecurangan bisa dijaga dengan baik, maka hal tersebut merupakan suatu upaya menjalankan konsep bisnis syariah dengan baik. Sesuai dengan ajaran yang tetera dalam al-Qur'an dan al-Hadith.

Tabel 2
Penyebab Kebangkrutan

No	Informan yang Bangkrut	Penyebab Kebangkrutan				
		Aspek Manajemen (Produk/Jasa Tidak mengikuti *demand*)	**Sistem Akuntansi Tidak Tepat**	**Minus Integritas (*Amanah, Maslahah, An Taradhin,* dan lain-lain)**	**Pengguna-an/Struktur Modal yang Tidak Tepat**	**Timbul Kecurangan (*Ghisy*)**
1.	Hj. Pujiati	√			√	
2.	H. Imam Lasidin	√	√	√	√	√
3.	H. Yasin	√	√		√	
4.	Maduratna		√	√	√	√
5.	Andira Susana					√
6.	Ananda Mandasari	√	√	√	√	
7.	Salim		√		√	
8.	Yuniarti	√				
9.	Amin Sumari		√	√	√	
10.	Rindasari				√	

Catatan: Nama-nama informan bukanlah nama yang sebenarnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah beberapa cara untuk mendeteksi kebangkrutan secara dini, yaitu: pertama, di dalam ekonomi Islam, sebuah usaha haruslah dikuatkan dengan cara mengimplementasikan lima hal (aspek manajerial, akuntansi, integritas, struktur modal dan memproteksi diri dari perilaku curang); kedua, ketika kelima variabel tersebut telah hilang, atau salah satunya saja hilang, maka akan muncul permasalahan yang bisa menyebabkan kebangkrutan.

Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan obyek penelitian, terbatas pada beberapa informan yang bergerak di bidang usaha kecil menengah saja, dan belum diuji cobakan kepada industri besar. Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan obyek kajian yang berbeda, agar bisa menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang ingin berbisnis. Bisnis yang baik adalah yang mempunyai sistem pencegahan dini terhadap kebangrutan. Dengan membangun sistem yang kuat meliputi sistem manajerial, akuntansi, pemanfaatan modal, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Adnan, M. A. dan E. Kurniasih. 2000. Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Untuk Memprediksi Kebangkrutan dengan Pendekatan Altman. *Jurnal Auditing dan Akuntansi* 4(2): 131-151.

Ardiana, I. D. K. R., I. A. Brahmayanti, Subaedi. 2010. Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 12(1): 42-55.

Ariesco, A. R. 2015. Analisis Model Altman Z-Score Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Bank yang Listing di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 15(2): 211-216.

Altman, E., I. 1984. *Corporate Financial Distress A Complete Guide To Predicting, Avoiding and Dealing With Bankruptcy.* John Willey & Sons Inc,. USA.

____. 1968. Financial Ratios: Discriminan Analysis and The Prediction of Coporate Bankruptey. *Journal of Finance* 123(9): 6-7.

Azis, M. A. dan A. D. Humayon. 2006. Predicting Corporate Bankruptcy: Where We Stand? *Journal emerald Group Publishing Limited* 6(1): 18-33

Azwar. 2015. Model Prediksi Financial Distress dengan Binary Logit (Studi Kasus Emiten Jakarta Islamic Index). *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (BPPK)* 8(1): 21-40.

Budiwati, H. dan A. Jariah. 2014. Penggunaan Rasio Keuangan Camel Untuk Memprediksi Kepailitan dengan Discriminant Analysis Models Z-Score (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia). *Jurnal WIGA* 4(2): 17-27.

Bungin. B. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Kencana Prenada Media. Jakarta.

Corbin, J. dan Anselm S. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Tehnik-Tehnik Teoritisasi Data,* terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin, dari judul aslinya "Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques". Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Creswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid dari judul aslinya "Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach." Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Endri. 2009. Prediksi Kebangkrutan Bank Untuk Menghadapi dan Mengelola Perubahan Lingkungan Bisnis: Analisis Metode Altman's Z-Score. *Perbanas Quarterly Review* 2(1): 34-50

Fauzia, I.Y. 2014. *Etika Bisnis dalam Islam.* Kencana Prenada Media. Jakarta.

Gilrita, M., Dzulkirom, M. G. Wi dan Endang. 2015. Analisis Altman (Z-Score) Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mengukur Potensi Kebangkrutan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI dan Perusahaan Manufaktur yang Delisting dari BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 25(1): 1-9.

Harnanto. 1991. *Analisis Laporan Keuangan.* Unit Penerbitan dan Percetakan AMP-YKPN. Yogyakarta.

Hartati., N. 2014. Intellectual Capital Dalam Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur. *Jurnal Etikonomi* 13(1): 51-68.

Hermanto. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan SDB Bank Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah: Studi Kasus Pada BPRS Berkah Ramadhan. *Jurnal Etikonomi* 12(1): 77-92.

Hartini, R. 2007. *Hukum Kepailitan.* UMM Press. Malang.

Higar, A. S. dan A. Djazuli,. 2010. Analisis Respon Auditor Terhadap Asumsi Going Concern Akibat Krisis Moneter Dan Financial Distres Model (Study Kasus Pada Perusahaan Di BEI Yang Mengalami Kerugian). *Jurnal Islamic Finance & Business Review, Tazkia* 5(1): 8.

Hosen. M. N. dan S. Nada. 2013. Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala Financial Distress Bank Umum Syariah. *Jurnal Economia* 9(2): 215-226.

Ihsan, D. N. dan S. P. Kartika. 2015. Potensi Kebangkrutan pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis. *Jurnal Etikonomi* 14(2): 113-146.

Inayanti, A. F., E. Suryani, dan B. Setiawan. 2012. Penerapan Altman Z-Score Untuk Analisis Kesehatan Keuangan UKM. *Jurnal Teknik Pomits* 1(1): 1-5

Jan, A. dan M. Marimuthu. 2016. Bankruptcy Profile of Foreign Versus Domestic Islamic Bank of Malaysia: A Post Crisis Period Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues* 6(1): 332-346

Kurniawati, P., K., P. I. Nugroho, dan C. Arifin. 2012. Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JMK* 10(2): 1-10.

Kusmah, I., M., dan E., I., Marpaung. 2008. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Dalam Memprediksi Kecenderungan Terjadinya Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Model Altman (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Penelitian Internal Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha Bandung.*

Laela, S. F. dan D. L. Meikhati. 2009. Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan: Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. *Jurnal Islamic Finance & Business Riview, Tazkia* 4(1): 70

Malaka, A. S. dan Hartojo. 2014. Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia Menggunakan Algoritma Backpropagation. *Jurnal Ilmu Manajemen* 2(4): 1714-1724.

Mayuni, M. A. dan S. D. Rustiyarini. 2015. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4(12): 1489-1506.

Nurcahyanti, W. 2015. Studi Komparatif Model Z-Score Altman, Springate dan Zmijewski dalam Mengindikasikan Kebangkrutan Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi* dalam http://ejournal.unp.ac.id/ 3(1): 1-24.

Newton, G., W. 1975. *Bankruptcy and Insolvency Accounting.* The Ronald Press Company. USA.

Panggo, Y. Y., Purwanto, N. Arifudin. 2014. Kajian Hukum Tentang Upaya Pencegahan Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Hutang. *Jurnal Beraja Niti* 3(7): 1-17

Prabowo, R. dan Wibowo. 2015. Analisis Perbandingan Model Altman Z-Score, Zmijewski dan Springate Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Delisting di BEI Periode 2008-2013. *Jurnal Account, Jurusan Akuntasi Politeknik Negeri Jakarta* 1(3): 195-203.

Prihatmaka, H. W., Sunarmi, dan R. Hendra, Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8(2): 326-342.

Rushd (al), Ibn. 2004. *Bidayah al-Mujtahid.* Maktabah al-Shuruq al-Dauliyah. Kairo.

Sagho, M., F., dan N., K., L., A., Merkusiwati. 2015. Penggunaan Metode Altman Z-Score Modifikasi Untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 11(3): 730-742.

Setyanto, A. R., R. S. Bhimo, dan Y. P. Pratama. 2015. Kajian Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Kawasan Asean (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *Jurnal Etikonomi* 14(2): 205-220.

Setiarso, A. N., Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). *Jurnal Hukum* dalam hukum.studentjournal.ub.ac.id, 1-27.

Wahyu, Eddy. 2010. Model Transfer Inovasi Usaha Kecil Konveksi di Tulungagung. *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa* 11(1): 27-40.

Zuhaily (al), Wahbah. 2010. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh.* Volume 5. Dar al-Fikr. Damaskus.

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan **ISSN 1411 - 0393**
Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

PENGARUH KREDIBILITAS PROGRAM BERITA TERHADAP EKUITAS MEREKSEPUTAR INDONESIA RCTI

Irma Yuanita
yuanita02irma@gmail.com
Rita Nurmalina
Budi Setiawan
Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

The competition in the television news programs put Seputar Indonesia's market share below Liputan 6.The influence of rating and share system is began to change the character of hardnews programs into sensational news. The decrease of quality will reduce the audience, social influence and the business itself. Therefore, branding management and credibility management are of the most appropriate strategy to reinforce brand equity and win the competition.This study aimed to analyze: (1) the appraisal level of Seputar Indonesia's credibility and brand equity. 2) the influence of media credibility on program credibility, and (3) the influence of program credibility on brand equity. This study used convinience sampling and involved 158 respondents. Data processing in this study used PLS. The test results concluded that: (1) evaluation level Seputar Indonesia in three variable not good enaugh. (2) there was an effect of media credibility on programs credibility, (3) programs credibility contributed a great effect on brand equity (86%). R-square of the news program credibility can be explained by the media credibility of 84% and the variation of brand equity can be explained by news program credibility of 73%.

Key Words:news program, television, media credibility, brand equity, partial least square

ABSTRAK

Kondisi persaingan program berita di televisi yang semakin ketat, menempatkan *market share* Seputar Indonesia dibawah Liputan 6. Pengaruh *rating* dan *share* membuat karakter berita *hardnews* televisi bergeser ke arah tabloidisasi, yang fokus pada berita sensasional. Menurunnya kualitas akan berpengaruh pada penurunan penonton, pengaruh sosial dan bisnis yang sedang dijalankan. Salah satu strategi bersaing yang paling sesuai dilakukan media untuk memperkuat ekuitas merek programnya adalah memadukan *branding management* dan *credibility management*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat evaluasi terhadap kredibilitas media, kredibilitas program, ekuitas merek dan menganalisis pengaruh kredibilitas media terhadap kredibilitas program, serta menganalisis pengaruh kredibilitas program terhadap pembentukan ekuitas merek Seputar Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *convinience sampling* dan melibatkan 158 responden. Pengolahan data menggunakan analisis PLS. Hasil pengujian data menunjukkan: (1) kredibilitas media, kredibilitas program dan ekuitas merek yang dimiliki Seputar Indonesia belum memuaskan. (2) faktor kredibilitas media yang terdiri dari kredibilitas sumber, kredibilitas stasiun televisi dan kredibilitas isi berita mempengaruhi kredibilitas program berita televisi, dan kredibilitas isi berita memberikan nilai pengaruh terbesar. (3) kredibilitas program berita mempengaruhi ekuitas merek Seputar Indonesia sebesar 86%.Nilai *R-square* (R^2) kredibilitas program berita sebesar 84% dan ekuitas merek program berita sebesar 73%.

Kata kunci: program berita, televisi, kredibilitas media , ekuitas merek, *partial least square*

PENDAHULUAN

Televisi diasumsikan sebagai media yang paling efektif untuk mempengaruhi sikap khalayak karena dianggap lebih "hidup" dibanding media lain karena menayangkan visual, audio dan teknik *editing*. Dumdum dan Garcia (2011) menyatakan bahwa visual yang dihadirkan televisi mampu meningkatkan persepsi kepercayaan khalayak jika dibandingkan dengan surat kabar. Kehadiran televisi swasta di Indonesia dimulai tahun 1988 dengan hadirnya RCTI dan dilanjutkan SCTV setahun berikutnya. Perubahan yang terjadi pada struktur pasar industri televisi Indonesia dari monopoli menjadi oligopoli membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menonton siaran televisi sehingga pembuat program berusaha untuk mengikuti kebutuhan penonton. Kebutuhan penonton tersebut diukur secara kuantitatif melalui *rating* dan *share. Market driven journalism* tersebut mulai merubah karakter berita *hardnews* televisi ke arah tabloidisasi yang fokus pada berita sensasional, bahwa jurnalisme televisi telah berubah menjadi karya non fiksi dan sulit membedakan mana tayangan sebenarnya dengan tayangan yang penuh dramatisasi. Konten berita sensasional pada kenyataannya lebih mudah menarik penonton (Meyer dan Muthaly, 2008), hal ini dikarenakan masyarakat lebih termotivasi untuk menyaksikan informasi/berita yang kontroversial (Wang dan Cohen, 2009). Wonneberger, Schoenbach dan Meurs (2011) mengungkapkan bahwa selain kualitas konten, faktor situasional, motivasional dan karakter individu juga merupakan faktor utama yang menjadi alasan khalayak untuk menyaksikan program berita televisi. Di sisi lain, penurunan kredibilitas program berita di televisi dapat dimungkinkan oleh berkembangnya teknologi. Nielsen (2014) mengungkapkan bahwa televisi menguasai sekitar 60% belanja iklan media, sedangkan sisanya terbagi untuk media lain seperti surat kabar dan majalah. Hal tersebut membuktikan bahwa televisi masih memiliki daya tarik yang kuat dan menjadi media yang paling efektif bagi para produsen/pengiklan untuk memperkenalkan produk bagi konsumen.

Branding sebagai salah satu strategi pemasaran bertujuan untuk membedakan organisasi, pelayanan atau produk dari pesaingnya terlebih di era Sosial TV dimana televisi saling terkait dengan media-media lainnya yang bersifat pribadi dan sosial. Kepercayaan pada media merupakan variabel yang sangat penting karena hal tersebut terhubung pada penggunaan media, "*people will expose themselves to news information they trust*" (Jackob 2010). Program yang lebih sering dibicarakan akan mudah diterima dan digemari khalayak, serta akan mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan. Program yang mempunyai kredibilitas akan lebih mudah membangun interaksi positif sampai mendapatkan loyalitas yang kuat. Konsep *brand equity* ini diaplikasikan pada media sejak dekade 1990. Perusahaan media telah mempertimbangkan untuk membangun *competitive advantage*-nya melalui *brand equity* (Ots dan Wolff, 2007), sedangkan dari perspektif *media buyer (advertising)*, *brand equity* media yang kuat mencerminkan target *audiens* yang loyal dan keunikan profil penonton yang dimiliki, hal ini akan memudahkan pemasang iklan untuk menentukan dimana iklan produknya akan dipasang. Menurut Olmsted and Cha (2008), *brand management* diterapkan pada program perlu untuk dibedakan dari program sejenis dalam pasar yang sangat kompetitif. *Brand equity* membuat perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing yang akan sulit ditiru oleh pesaing dan saat menghadapi pasar yang kompetitif, *brand equity* akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan.

Credibility management merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh organisasi bisnis seperti media karena media memiliki dampak, fungsi, dan peranan dalam perubahan masyarakat, apa yang dibutuhkan dan yang menjadi perhatian *public* dalam hal ini penonton tentu akan menjadi tugas media untuk menyampaikannya. Kredibilitas media akan mempengaruhi

apakah pesan yang disampaikan menjadi pertimbangan khalayak media, sehingga dapat merubah pemikiran dan sikap khalayak (Oyedeji, 2010). Menurut Bakshi dan Mishra (2011), dan Oyedeji (2007, 2010), kredibilitas media mempengaruhi persepsi audiens terhadap ekuitas merek dan merupakan variabel yang dapat diatur oleh perusahaan, sehingga memungkinkan pemasar untuk meningkatkan ekuitas melalui perbaikan kredibilitas. Sampai saat ini terdapat pandangan kritis di dunia jurnalisme bahwa terjadi perbedaan pandangan antara jurnalis dan manajer di perusahaan media Bakshi dan Mishra (2011).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada indikator dan variabel yang digunakan, yaitu dengan menjabarkan variabel beserta indikator kredibilitas yang mempengaruhi ekuitas merek dan alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel. Hal tersebut lebih mempermudah manajemen dalam melakukan perbaikan. Pada penelitian Sabigan (2007), Dumdum dan Garcia (2010), mereka hanya membahas tentang kredibilitas tanpa menghubungkan dengan ekuitas, sedangkan Oyedeji (2007), Bakshi dan Mishra (2011) hanya menyebutkan bahwa kredibilitas mempunyai hubungan dengan ekuitas merek, tetapi tidak menjabarkan secara detil indikator atau variabel kredibilitas apa saja yang berhubungan dengan ekuitas merek.

Beberapa studi yang mendukung hubungan antara kredibilitas media dan konsep yang serupa dengan ekuitas merek. Seperti model yang dikembangkan oleh Meyer (2004), Manero *et al*. (2013) yang meneliti tentang kualitas konten program berita televisi menurut konsumen dari perspektif pemasaran. Penelitian ini dapat membantu para manager untuk meningkatkan nilai dari program berita yang mempengaruhi efektivitas *marketing* dan *programming*. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa audiens/konsumen masih mementingkan nilai kualitas, sehingga manajer media harus memperhatikan hal itu agar mempertahankan hubungan dan loyalitas audiens terhadap program/produk.

Bahasan utama dalam penelitian ini adalah *media credibility* dan *brand equity* dalam program berita televisi generalis. Studi ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertelevisian di Indonesia dan difokuskan pada pangsa pasar program berita televisi yang terus mengalami penurunan (Nielsen, 2014). Pangsa pasar merupakan salah satu cermin pengukuran ekuitas merek yang baik. Jika ekuitas merek suatu produk tidak kuat, pangsa pasarnya akan menurun tajam sebagai dampak aktivitas pesaing yang mam pu mengikis ekuitas merek tersebut. Walaupun perusahaan media tidak dapat langsung mengendalikan respons dari audiens sewaktu memproses komunikasi persuasif, mereka dapat berusaha mempengaruhi persepsi audiens melalui unsur-unsur dalam komunikasi seperti sumber, media/saluran dan pesan yang disampaikan (Rangkuti, 2008). Keunggulan sebuah perusahaan media massa dapat dicapai melalui kualitas dan kredibilitas produk yang dihasilkan.

Banyaknya program berita televisi swasta yang hadir di Indonesia membuat persaingan makin ketat karena khalayak mempunyai banyak alternatif untuk dapat memuaskan kebutuhan mereka akan informasi. Hal tersebut juga dialami Seputar Indonesia di RCTI. Sejak tahun 2011 performa Seputar Indonesia mulai mengalami penurunan dan di tahun 2014 merupakan performa terendah selama 6 tahun terakhir yaitu sebesar 11,5% (Nielsen, 2014). Bagi manajemen RCTI, keadaan seperti ini akan berdampak negatif pada bisnis di pasar yang lain yaitu pasar iklan. Walaupun tidak secara langsung, dampak dari menurunnya kualitas cukup terlihat pada berkurangnya jumlah penonton yang menyaksikan program Seputar Indonesia. Penyerapan iklan akan menurun ketika khalayak tidak lagi loyal kepada Seputar Indonesia. Program berita Seputar Indonesia RCTI, telah menjadi salah satu program yang mempunyai nilai jual dari sisi iklan. Bahkan untuk program sejenis, pengiklan harus membayar lebih

besar jika membeli spot iklan di Seputar Indonesia, harga spot iklan program Seputar Indonesia yang mencapai 30 juta rupiah dan senilai dengan harga spot di beberapa program hiburan seperti FTV, *infotainment* dan acara musik (Nielsen, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Tingkat evaluasi kredibilitas media, kredibilitas program dan ekuitas merek program berita Seputar Indonesia RCTI Seputar Indonesia, (2) Pengaruh kredibilitas sumber, kredibilitas stasiun televisi dan kredibilitas isi berita terhadap kredibilitas program Seputar Indonesia RCTI, dan (3) Pengaruh pengaruh kredibilitas program berita, kesan kualitas, loyalitas, asosiasi dan kesadaran merek terhadap pembentukan ekuitas merek program Seputar Indonesia RCTI.

TINJAUAN TEORETIS

Program berita dapat diartikan sebagai acara yang menyajikan informasi aktual atau rangkuman informasi dari suatu periode tertentu (kilas balik) dari peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar negeri, dan menambah wawasan pemirsanya, selain itu acara tersebut ditayangkan secara berulangkali pada slot tetap (Nielsen, 2014).

Teori *uses and gratification* dalam literatur komunikasi massa, memandang individu sebagai makhluk yang aktif dan selektif. Khalayak akan menyaring informasi yang berguna dan hanya mempertahankan apa yang berguna dan dipercaya. Kredibilitas didefinisikan Sabigan (2007) sebagai *believability, trust, perceived reliability* terhadap media. Konsep tersebut sudah sesuai dengan konsep komunikasi media, yang mendefinisikan kepercayaan berdasarkan pada karakter presenter, *channel station* dan pesan yang yang disampaikan (Porral *et al.*, 2014). Kredibilitas adalah salah satu kriteria yang digunakan untuk menyaring informasi.

Konsep dari penelitian mengenai *source credibility* yaitu mengevaluasi sikap atau persepsi khalayak terhadap sumber informasi yang menyampaikan pesan. Sumber informasi yang memiliki kredibilitas tinggi akan lebih mudah mempengaruhi sikap individu. S*ource credibility* mengacu pada *judgemen*t yang dibuat khalayak media terhadap keahlian (*expertise*) dan kepercayaan (*trustworthiness*) terhadap komunikator (Oyedeji, 2010). *Expertise* mengacu pada kemampuan/kompetensi sumber untuk memiliki informasi yang akurat tentang suatu subjek informasi, sementara *trustworthiness* mengacu pada persepsi khalayak terhadap motivasi dan niat sumber untuk menyajikan sebuah representasi yang akurat dari subjek informasi atau peristiwa. Pengertian dari *media channel credibility* adalah persepsi kepercayaan khalayak terhadap channel/ stasiun televisi tersebut, terlepas dari jurnalis ataupun pesan yang disampaikan (Bucy, 2003). Kredibilitas sebuah organisasi atau perusahaan, telah banyak ditelaah dalam berbagai riset dan manajemen pemasaran. Pada organisasi non media, beberapa studi menemukan bahwa *corporate credibility* meningkatkan kecenderungan konsumen untuk membeli produk mereka (Hanzaee dan Taghiporian, 2012). Hal ini tentunya juga dapat berlaku dalam organisasi yang bergerak di industri media, dimana berita dan informasi sebagai produk yang dihasilkan oleh organisasi media, juga dituntut kredibilitasnya oleh konsumen.

Evaluasi kredibilitas tidak hanya fokus pada komunikator dan media/saluran, tetapi juga pesan, serta informasi atau *news it self*. Kedekatan pesan yang disampaikan dengan audiens dapat mempengaruhi persepsi kredibilitas, pesan yang familiar dipersepsikan lebih kredibel (Oyedeji 2007). Unsur lain yang juga penting adalah pemilihan narasumber. Narasumber dan presenter (*source*/sumber) berbeda dalam peran yang mereka lakukan. Narasumber merupakan sosok yang menentukan kualitas isi berita dilihat dari isi pesan yang mereka ungkapkan mengenai suatu topik. Menurut Bailey *et al.* (2013) kualitas *content* berita, apakah memuat pesan/topik yang sensasional atau formal berhubungan dengan lamanya durasi penonton untuk tetap bertahan di program tersebut. Pengulangan sebuah pesan, kelancaran dalam penuturan berita,

dan kualitas pesan telah menunjukkan dapat meningkatkan kredibilitas pesan dalam sebuah media (Oyedeji, 2010). Kualitas pesan yang disampaikan sangat berpengaruh pada persepsi kredibilitas media karena pada akhirnya, pembaca berita diharapkan akan bersikap objektif (Roberts, 2010). Elareshi dan Gunter (2012) melakukan survey untuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi kredibilitas media dengan banyaknya waktu yang diluangkan untuk menyaksikan program berita televisi (*television viewing*). Hal serupa juga dinyatakan oleh Mehrabbi *et al.* (2009), bahwa terdapat hubungan antara persepsi kredibilitas dengan frekuensi menyaksikan *channel* berita tersebut.

Ada 2 konsep skala pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur kredibilitas media: skala Gaziano dan McGarth (1986) dan Meyer (1988). Studi Gaziano dan McGarth (1986) menggunakan 875 sampel untuk merangking 16 item bipolar semantik diferensial dan analisis faktor menghasilkan 3 faktor yaitu: kepedulian terhadap lingkungan sosial, patriotisme dan 12 item faktor kredibilitas. Meyer (1988) menguji skala kredibilitas yang dihasilkan Gaziano dan McGarth, hasilnya teridentifikasi dua faktor yaitu: afiliasi terhadap komunitas dan 5 item faktor kredibilitas/skala kepercayaan yang memiliki nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,80. Konsep skala pengukuran kredibilitas Meyer (1988) akan digunakan dalam penelitian ini karena validitas dan reliabilitasnya sudah diuji (Bakshi dan Mishra, 2011). Lima item pengukuran kredibilitas tersebut adalah*: fairnes, bias, trustworthiness, accuracy and completeness.*

Merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan (misalnya cap, kemasan, atau logo) dengan tujuan untuk membedakan barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Sebuah merek menunjukkan kepada pelanggan asal/sumber produk dan melindungi keduanya (produsen dan konsumen) dari para pesaingnya yang memproduksi produk yang terlihat mirip (Aaker, 1996).

Aaker (1991), menjelaskan pengertian *brand equity* sebagai serangkaian aset dan liabilities merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya; yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan/pelanggan. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa *brand equity* bisa bernilai bagi perusahaan (*company based-brand equity*) dan bagi konsumen (*customer based-brand equity*). Aaker (1991) menjabarkan aset merek yang berkontribusi pada penciptaan *brand equity* ke dalam lima dimensi, yaitu: (1) *Brand awareness*, yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori tertentu, (2) *Perceived quality* merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan, (3) *Brand association*, yakni segala sesuatu yang terkait dengan memori terhadap suatu merek. Assosiasi merek memiliki tingkatan tertentu dan akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya pengalaman konsumsi atau eksposur dengan merek tertentu, (4) *Brand loyalty*, yaitu "*the heart of the customer relationship to the brand*", (5) *Other propriettart brand asset* (hak patent, logo, dan lain-lain). Konsep Aaker (1991) digunakan dalam penelitian ini namun mengalami penyesuaian dimana *other propriettart brand asset* tidak dikutsertakan. Model ini diformulasikan dari sudut pandang manajerial dan strategi korporat (serangkaian asset dan liabilitas), meskipun landasan utamanya adalah perilaku konsumen. *Branding* dan *brand equity* merupakan konsep baru dalam ranah *mass communications* (Olmsted dan Cha, 2008). Organisasi media ingin mengembangkan berbagai cara untuk mengurangi ancaman dari kompetitor yang semakin meningkat dan fragmentasi dari khalayak media itu sendiri (Oyedeji, 2010), agar khalayak dapat membedakan produk mereka di tengah produk media yang sejenis, organisasi media tersebut harus melakukan kegiatan membangun merek.

Identitas program yang terlekat pada merek program berita tersebut memainkan peranan penting untuk memikat pengiklan dan audiens.

Penelitian ini menggabungkan beberapa konsep penelitian sebelumnya, untuk membangun model kredibilitas, konsep dari Sabigan (2007), Dumdum dan Garcia (2011) dijadikan bahan rujukan. Penelitian Sabigan mengekplorasi hubungan antara 3 unsur kredibilitas media, yaitu *source credibility, medium credibility* dan *news (content) credibility* terhadap kredibilitas program. Studi ini membandingkan kredibilitas berita yang disampaikan melalui televisi dan website (*online*). Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas program berita juga dilakukan oleh Dumdum dan Garcia (2011) di Philipina. Penelitian ini melihat pengaruh dari *newscasters'physical appearance*, *news content quality* dan *channel preference* terhadap kredibilitas program berita televisi (*competence, trustworthiness* dan *goodwill*). Konsep dari Oyedeji (2007) dan Bakshi dan Mishra (2011) digunakan untuk menjelaskan pengaruh kredibilitas terhadap ekuitas merek. Dalam penelitiannya, Oyedeji menggabungkan konsep kredibilitas Gaziano dan McGarth (1986) yang dimodifikasi oleh Meyer (1988) dan konsep *brand equity* yang mengadaptasi konsep Aaker (1991). Penelitian ini membuktikanbahwa *channel credibility* mempengaruhi ekuitas merek secara positif, terutama pada variabel *perceived quality, brand loyalty*, dan *brand association*. Penelitian sejenis yang di Asia dilakukan oleh Bakshi dan Mishra (2011) dengan menghubungkan konsep kredibilitas pada media cetak dan elektronik di India, dan ditemukan hubungan yang kuat antara *brand equity* (*quality, recognition* dan *loyalty*) dan kredibilitas media.

Beberapa penyesuaian dilakukan agar lebih relevan untuk kasus penelitian ini yaitu dengan memodifikasi dimensi kredibilitas sumber dari Sabigan dan Ohanian (1990) sehingga menghasilkan tiga dimensi yaitu *attractiveness, trustwothiness dan expertise*, sedangkan untuk ekuitas merek, penelitian ini menggunakan konsep Aaker (1991). Berdasarkan hal tersebut dapat dibentuk rerangka pemikiran teoritis pada Gambar 1.

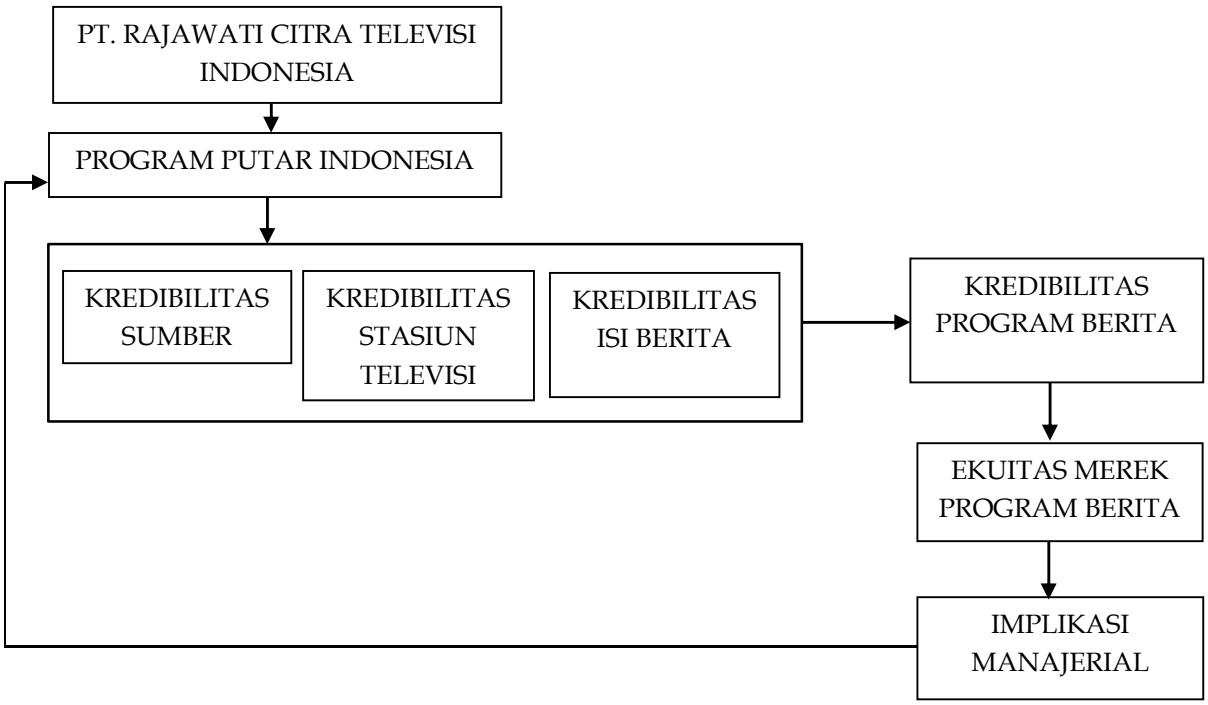

Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Mengacu pada rerangka pemikiran, maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diberikan pada Gambar 2.

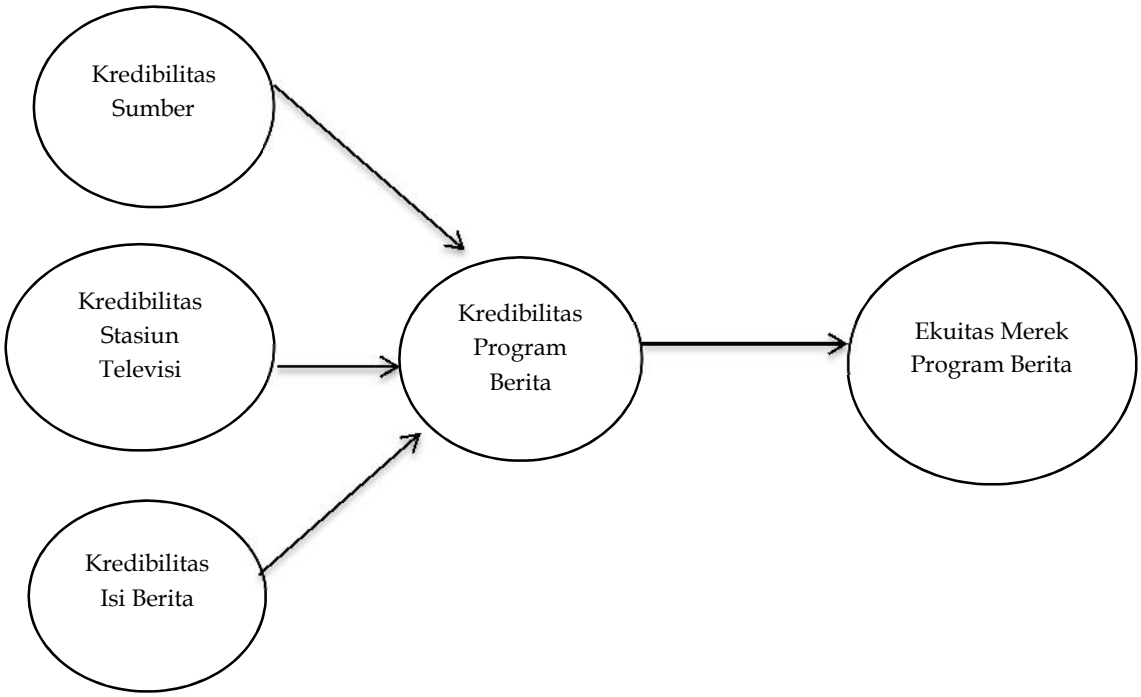

Gambar 2
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain riset analisis deskriptif dan kuantitatif, melalui pendekatan wawancara dengan menggunakan instrumen kuisioner dan dilaksanakan pada bulan November 2014-Januari 2015 yang berlokasi di Jakarta. Agar data yang dikumpulkan dapat mewakili karakteristik populasi pemirsa dan lebih bervariasi, pengambilan contoh dilakukan di berbagai lokasi. Pemilihan responden berdasarkan pada pekerjaan dengan menggunakan data populasi penonton dan rata-rata jumlah penonton Seputar Indonesia yang dirilis AGB Nielsen (2014) sebanyak 158 responden.

Data primer difokuskan untuk menggali: (1) kredibilitas media dan program, yaitu: *Trustworthiness*, *Accuracy, Comprehensive, Currency, Fair*,yang meliputi isi berita/pesan, kualitas presenter/reporter dan citra stasiun televisi, (2) ekuitas merek program Seputar Indonesia, dan (3) Profil responden. Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari kajian penelitian terdahulu, artikel ilmiah, internet dan media informasi lainnya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling melalui pendekatan *convinience sampling* karena responden yang dipilih memiliki kriteria tertentu, seperti: (1) usia 17 tahun ke atas, (2) tidak bekerja di bagian produksi program berita Seputar Indonesia, (3) pernah menyaksikan program berita di RCTI minimal 3 kali dalam 1 bulan terakhir. Kriteria tersebut dipilih karena responden berusia 17 tahun keatas dianggap sudah bisa mengambil keputusan, non karyawan diharapkan agar sampel bisa memberikan pendapat secara netral, sedangkan pernah menyaksikan minimal 3 kali agar responden menyadari adanya program dan memiliki pengetahuan tentang program berita tersebut. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah *closed ended*

questions. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel dijelaskan pada Tabel 1.

Konsep kredibilitas media dalam penelitian ini adalah evaluasi khalayak terhadap 3 hal yaitu (1) kredibilitas sumber berita yang menyangkut penampilan fisik presenter berita, kemampuan presenter dalam menyampaikan berita dan tingkat kecerdasan presenter berita. Indikator yang dipilih merupakan modifikasi dari konsep Ohanian (1990) dan Sabigan (2007), (2) kredibilitas stasiun yang menayangkan program berita yang meliputi kepercayaan khalayak, kesesuaian fakta, kedalaman, aktualitas dan keberimbangan program berita yang tayang pada stasiun televisi tersebut. Variabel yang dipilih merupakan modifikasi dari konsep Sabigan (2007) dan Oyedeji (2007), dan (3) kredibilitas isi berita mengeksplor penilaian khalayak terhadap pemilihan narasumber berita, akurasi data, kedalaman berita, kebaruan berita dan kenetralan berita yang disampaikan. Variabel yang dipilih merupakan modifikasi dari Sabigan (2007), Oyedeji (2007), Bakshi dan Mishra (2011) serta Elareshi dan Gunter (2012) yang menggunakan konsep kredibilitas Meyer (1988).

Model yang dibangun juga menggunakan variabel laten endogen sebagai hasil bentukan dari variabel laten eksogen. Variabel laten endogen yang digunakan dalam model adalah kredibilitas program berita dan ekuitas merek dengan indikator yang dijelaskan pada Tabel 2.

Kredibilitas program berita televisi didefinisikan sebagai tingkat evaluasi kepercayaan khalayak terhadap program berita televisi secara keseluruhan. Indikator variabel ini bersumber pada penelitian Sabigan (2007) dan Dumdum serta Garcia (2011) yang meliputi *Believability/trustworthiness*, *Competence* dan *Goodwill,* sedangkan ekuitas merek bersumber pada Aaker (1991) yang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai evaluasi/penilaian responden terhadap kualitas tayangan di layar, informasi yang disampaikan, keinginan untuk menyaksikan kembali, menyarankan program terhadap orang lain,

Tabel 1
Indikator kredibilitas media

Kredibilitas	Simbol	Indikator
SUMBER	X_1	Tampilan fisik presenter Seputar Indonesia
	X_2	Kelengkapan presenter Seputar Indonesia dalam menyampaikan berita
	X_3	Tingkat kecerdasan dan akurasi presenter Seputar Indonesia
STASIUN TELEVISI	X_4	RCTI menayangkan program berita yang terpercaya
	X_5	RCTI menayangkan program berita yang sesuai fakta
	X_6	RCTI menayangkan program berita yang mendalam
	X_7	RCTI menayangkan program berita yang aktual
	X_8	RCTI menayangkan program berita yang berimbang
ISI BERITA	X_9	Pilihan narasumber Seputar Indonesia terpercaya
	X_{10}	Ketepatan isi berita yang disajikan Seputar Indonesia
	X_{11}	Kedalaman isi berita yang disajikan Seputar Indonesia
	X_{12}	Aktualitas isi berita/informasi yang disajikan Seputar Indonesia
	X_{13}	Netralitas isi berita/informasi politik yang disampaikan Seputar Indonesia

Sumber: Ohanian (1990), Oyedeji (2006), Sabigan (2007), Bakshi dan Mishra (2011), Dumdum dan Garcia (2011) serta Elareshi dan Gunter (2012)

Tabel 2
Indikator kredibilitas program dan ekuitas merek

	Simbol	Indikator
KREDIBILITAS PROGRAM	Y_1	Program Seputar Indonesia terpercaya
	Y_2	Program Seputar Indonesia mempunyai kompetensi
	Y_3	Program Seputar Indonesia peduli pada *public*
	Y_4	Tampilan layar program Seputar Indonesia berkualitas
	Y_5	Seputar Indonesia program yang informatif
EKUITAS	Y_6	Keinginan menyaksikan Seputar Indonesia
	Y_7	Keinginan menyarankan Seputar Indonesia
	Y_8	Pengetahuan tentang logo program Seputar Indonesia
	Y_9	Pengetahuan tentang karakter presenter program Seputar Indonesia
	Y_{10}	Pengetahuan tentang keberadaan program Seputar Indonesia
	Y_{11}	Kemampuan membedakan tayangan Seputar Indonesia dengan program berita lain

Sumber: Aaker (1991), Sabigan (2007), Dumdum dan Garcia (2011)

mengetahui logo, karakter presenter, mengetahui keberadaan program berita Seputar Indonesia serta mengetahui perbedaan dengan program berita lain.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yang merupakan teknik analisa data *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan metode alternatif berbasis *variance* atau *component based* SEM yang secara simultan dapat melakukan pengujian model sekaligus pengujian model struktural (Latan dan Ghozali, 2012). Model struktural atau uji hipotesis dievaluasi dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai t-stastistik serta signifikansi koefisien parameter tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data demografi penelitian ini, menunjukkan bahwa 57,6% pemirsa utama program Seputar Indonesia adalah dari usia muda hingga usia produktif (sekitar 17-34 tahun) dan 55,1% berjenis kelamin wanita, sehingga berita-berita yang diangkat/ditayangkan perlu untuk memperhatikan kebutuhan wanita. Isu-isu yang dekat dengan keseharian khalayak bisa dijadikan pilihan. Dominasi responden yang merupakan karyawan (43%) dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA (36,1%) serta 53,8% berasal dari SES A dan B (memiliki jumlah pengeluaran per bulan >Rp2.500.000) dapat mengindikasikan responden mempunyai pengetahuan yang cukup baik. Selain itu, semakin mudahnya responden mengakses berita mengharuskan pemangku program Seputar Indonesia untuk membuat berita yang berbobot dan mampu menampilkan kedalaman berita; memberikan informasi yang benar dan belum diketahui oleh khalayak.

Berdasarkan perhitungan nilai *mean* menggunakan SPSS 17.0 yang dilakukan pada dimensi kredibilitas sumber (*source credibility*), responden menganggap bahwa penampilan presenter Seputar Indonesia RCTI sudah baik. Namun pada indikator lainnya seperti kelengkapan presenter dalam menyampaikan berita dan indikator kecerdasan serta akurasi presenter dalam menyampaikan berita, responden beranggapan bahwa presenter Seputar Indonesia belum istimewa. Pemirsa lebih tertarik pada tingkat aktualitas dan akurasi berita yang disampaikan presenter dibandingkan dengan penampilan fisik di layar (Mitra *et al.*, 2014). Hasil penilaian lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.

Responden menilai bahwa RCTI sebagai stasiun televisi yang menayangkan program berita belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari penilaian responden mengenai ke-

mampuan RCTI. Hanya 31,6% responden yang menganggap RCTI menghadirkan berita yang dapat dipercaya; 27,8% respon den menilai program berita yang tayang di RCTI memiliki akurasi, sedangkan pada sisi aktualitas/kebaruan berita; 36,1% responden menilai RCTI menayangkan program berita yang aktual. Pada indikator keberimbangan RCTI dianggap kurang berimbang dalam menyampaikan berita oleh 46,2% responden. RCTI hanya dinilai baik dari sisi kedalaman dalam menayangkan berita (mengandung unsur 5W 1H) oleh 34,2% responden. Pada atribut kredibilitas isi berita, sebanyak 39.9% responden menganggap bahwa pilihan narasumber Seputar Indonesia kurang terpercaya. Hanya 28,5% responden yang menilai bahwa isi berita Seputar Indonesia akurat/tepat. Sebanyak 38% responden merasa isi berita yang diangkat oleh Seputar Indonesia kurang mendalam dan sesuai kaidah jurnalistik. Isi berita Seputar Indonesia hanya dianggap *up to date* oleh 17,7% responden. Dalam menayangkan berita bertema politik; 42,4% responden menganggap bahwa Seputar Indonesia memiliki ketertarikan pada partai politik tertentu, netralitas menjadi penting karena menurut Hoffman (2013), khalayak sering menggunakan fakta tersebut untuk menilai kredibilitas suatu media.

Pada atribut kredibilitas program berita, hanya 22,2% responden yang beranggapan bahwa Seputar Indonesia ada lah program berita yang terpercaya. Sebanyak 34,8% responden menganggap bahwa Seputar Indonesia kurang kompeten dalam menyajikan berita televisi. Melihat sisi kepedulian program terhadap kepentingan publik/ khalayak, sebanyak 31% responden merasa bahwa Seputar Indonesia kurang memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik. Hasil penilaian lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3
Evaluasi Responden terhadap Kredibilitas Media (sumber, stasiun televisi dan isi berita)

Indikator	Jumlah pilihan jawaban (%)					Mean
	1	2	3	4	5	
Tampilan fisik presenter Seputar Indonesia	7,6	4,4	41,1	34,8	12,0	3.39
Kelengkapan presenter Seputar Indonesia dalam menyampaikan berita	15,2	13,9	39,9	20,9	10,1	2.97
Tingkat kecerdasan dan akurasi presenter Seputar Indonesia	12,7	15,8	44,9	16,5	10,1	2.96
Rataan skor keseluruhan kredibilitas sumber						**3.10**
RCTI menayangkan program berita yang terpercaya	19,0	25,9	23,4	25,9	5,7	2.73
RCTI menayangkan program berita yang sesuai fakta	13,9	20,3	38,0	21,5	6,3	2.86
RCTI menayangkan program berita yang mendalam	13,9	18,4	33,5	19,0	15,2	3.03
RCTI menayangkan program berita yang aktual	17,7	18,4	38,6	16,5	8,9	2.80
RCTI menayangkan program berita yang berimbang	24,7	21,5	34,2	19,0	0,6	2.49
Rataan skor keseluruhan kredibilitas stasiun televisi						**2.78**
Pilihan narasumber Seputar Indonesia terpercaya	20,3	19,6	40,5	17,7	1,9	2.61
Ketepatan isi berita yang disajikan Seputar Indonesia	13,9	23,4	34,2	24,7	3,8	2.81
Kedalaman isi berita yang disajikan Seputar Indonesia	14,6	23,4	31,0	25,9	5,1	2.84
Aktualitas isi berita/informasi yang disajikan Seputar Indonesia	15,8	20,3	46,2	15,8	1,9	2.68
Netralitas isi berita/informasi politik yang disampaikan Seputar Indonesia	15,8	19,6	42,4	13,9	8,2	2.79
Rataan skor keseluruhan kredibilitas isi berita						**2.76**

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SPSS

Menurut responden, secara keseluruhan ekuitas merek yang dimiliki Seputar Indonesia masih belum kuat. Hal ini tercermin penilaian responden bahwa secara keseluruhan kualitas tampilan layar program Seputar Indonesia hanya dianggap baik oleh 31% responden. Seputar Indonesia dianggap kurang informatif oleh 39,9% responden, namun 19% mengganggap sebaliknya. Sebanyak 38,6% responden yang lebih memilih untuk menyaksikan program lain dan hanya 24,7% responden yang akan tetap menyaksikan Seputar Indonesia sebagai pilihan utama tayangan berita. Keinginan untuk menyarankan Seputar Indonesia kepada orang lain hanya dimiliki 33% responden, sedangkan 37,3% responden memilih untuk menyarankan program berita televisi lain jika ada orang yang ingin menyaksikan program berita di televisi.

Responden menyatakan bahwa secara keseluruhan mereka kurang mengenali atribut-atribut yang terkait dengan program Seputar Indonesia dan sebanyak 31,7% responden tidak dapat membedakan logo Seputar Indonesia dengan program berita televisi lain. Nama-nama presenter Seputar Indonesia seperti Ine Sudjono, Michael Chandra, Ariyo Adi dan Dian Mirza dapat dikenali oleh 57,6% responden. Salah satu presenter berita RCTI yang paling dikenal dan difavoritkan pemirsa berdasarkan survey Panasonic Award adalah Michael Chandra, sedangkan presenter wanita RCTI kurang kuat *awareness*-nya. Hal ini cukup sesuai dengan penelitian Irvin (2013) yang menyatakan bahwa presenter pria lebih kredibel sebagai presenter berita hardnews.

Kesadaran responden akan program tersebut dapat diketahui dari kemampuan

Tabel 4
Evaluasi Responden terhadap Kredibilitas Program dan Ekuitas Merek

Indikator	Jumlah Jawaban					Mean
	1	2	3	4	5	
Program Seputar Indonesia terpercaya	16	49	58	27	8	2.76
Program Seputar Indonesia mempunyai kompetensi	15	40	64	30	9	2.86
Program Seputar Indonesia peduli pada *public*	18	31	70	37	2	2.84
Rataan skor keseluruhan kredibilitas program berita						**2.82**
Tampilan layar program Seputar Indonesia berkualitas	14	55	40	43	6	2,82
Seputar Indonesia program yang informatif	28	31	46	42	11	2,76
Keinginan menyaksikan Seputar Indonesia	25	36	58	32	7	2,75
Keinginan menyarankan Seputar Indonesia	31	26	66	23	12	2,85
Pengetahuan tentang logo program Seputar Indonesia	31	12	24	62	29	2,74
Pengetahuan tentang karakter presenter program Seputar Indonesia	23	21	37	71	6	3,29
Pengetahuan tentang keberadaan program Seputar Indonesia	8	26	74	26	24	3,10
Kemampuan membedakan tayangan Seputar Indonesia dengan program berita lain	7	36	58	32	25	2,80
Rataan skor keseluruhan ekuitas merek						**2.87**

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SPS

48,7% responden untuk mengenali keberadaan program Seputar Indonesia namun hanya 21,6% yang membedakan antara Seputar Indonesia dengan program lain. Semakin banyak jumlah stasiun televisi di kota Jakarta, baik televisi nasional maupun televisi lokal menyebabkan ekspektasi khalayak terhadap standar program berita yang baik semakin tinggi. Kemajuan teknologi yang memudahkan responden untuk mengakses berita/informasi mengenai berbagai hal, membuat mereka mengharapkan agar berita/informasi yang dihadirkan oleh televisi sebagai media yang dianggap paling kredibel jauh lebih baik, lengkap dan mampu menggambarkan kondisi yang paling sesuai dengan fakta yang terjadi serta lebih menarik karena didukung oleh audio dan visual. Selain itu membangun kembali citra merek yang selama ini dimiliki Seputar Indonesia sebagai program berita favorit perlu dilakukan. Menurut Oba (2011), "*content is a king and brand is a queen*". Banyaknya pesaing dan sifat produk/konten berita yang merupakan *immaterial good* membuat diferensiasi merupakan kunci utama menarik audiens dan advertising.

Analisis pengaruh antar variabel laten dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat analisis *partial least square* (PLS). Alat bantu penelitian ini dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan ideal terkait dengan pengaruh pada setiap konstruk yang dibangun melalui *path analysis.* Model analisis jalur yang dibangun dalam penelitian ini merupakan bentuk struktural yang menggambarkan hubungan antara indikator dengan variabel konstruk, serta antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen. Kriteria kesesuaian model yang digunakan *(goodness of fit)* dibagi men jadi dua, yaitu model pengukuran *(outer model)* dan model struktural *(inner model)*.

Pengujian model struktural menggunakan PLS menghasilkan tiga set hubungan yatu: (1) *outer loading* yang menspesifikan hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*), (2) *weight relation* adalah nilai estimasi dari variabel-vaiabel manifest (indikator) yang membentuk variabel laten, dalam model adalah nilai outer weight atau koefisien regresi, (3) *inner model* atau *inner weight* yang merupakan nilai estimasi atau koefisien regresi hubungan antar variabel laten. Adapun jalur persamaan struktural penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. Semakin tinggi nilai faktor muatan yang ditetapkan, maka semakin penting peranan *loading* dalam menginterpretasikan matrik faktor. Penelitian ini menggunakan standar minimal *loading factor* sebesar 0,7.

Gambar 3. memperlihatkan ada tiga indikator yang memiliki nilai *loading factor* kurang dari 0,7 yaitu indikator X_5 (stasiun televisi yang akurat), X_6 (stasiun televisi yang lengkap) dan Y_9 (pengetahuan akan logo program).

Oleh karena itu, ketiga indikator tersebut harus didrop dan dilakukan pengolahan data tahap kedua. Nilai *loading factor* dari diagram jalur persamaan struktural pada PLS setelah model dimodifikasi dapat dilihat pada Gambar 4. Semua *loading factor* menunjukkan nilai diatas 0,7, sampai dengan tahapan ini indikator model dikatakan valid sehingga bisa dilanjutkan pada penilaian selanjutnya.

Nilai t-statistik hasil penelitian ini lebih besar dari 1,96 dan dapat dilihat pada Gambar 5. Nilai t-statistik yang lebih besar dari 1,96 dapat diartikan bahwa konstruk tersebut signifikan mempengaruhi konstruk lainnya. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi outer model adalah dengan menilai discriminant validity, yang dilakukan dengan melihat nilai akar kuadrat AVE. Pengujian validitas diskriminan dinilai dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstrak dengan nilai korelasi antar konstrak laten dalam model.

Model mempunyai validitas diskriminan yang baik jika akar kuadrat AVE untuk setiap konstrak lebih besar daripada korelasi antara konstrak dengan konstrak lainnya dalam model (Latan dan Ghozali, 2012).

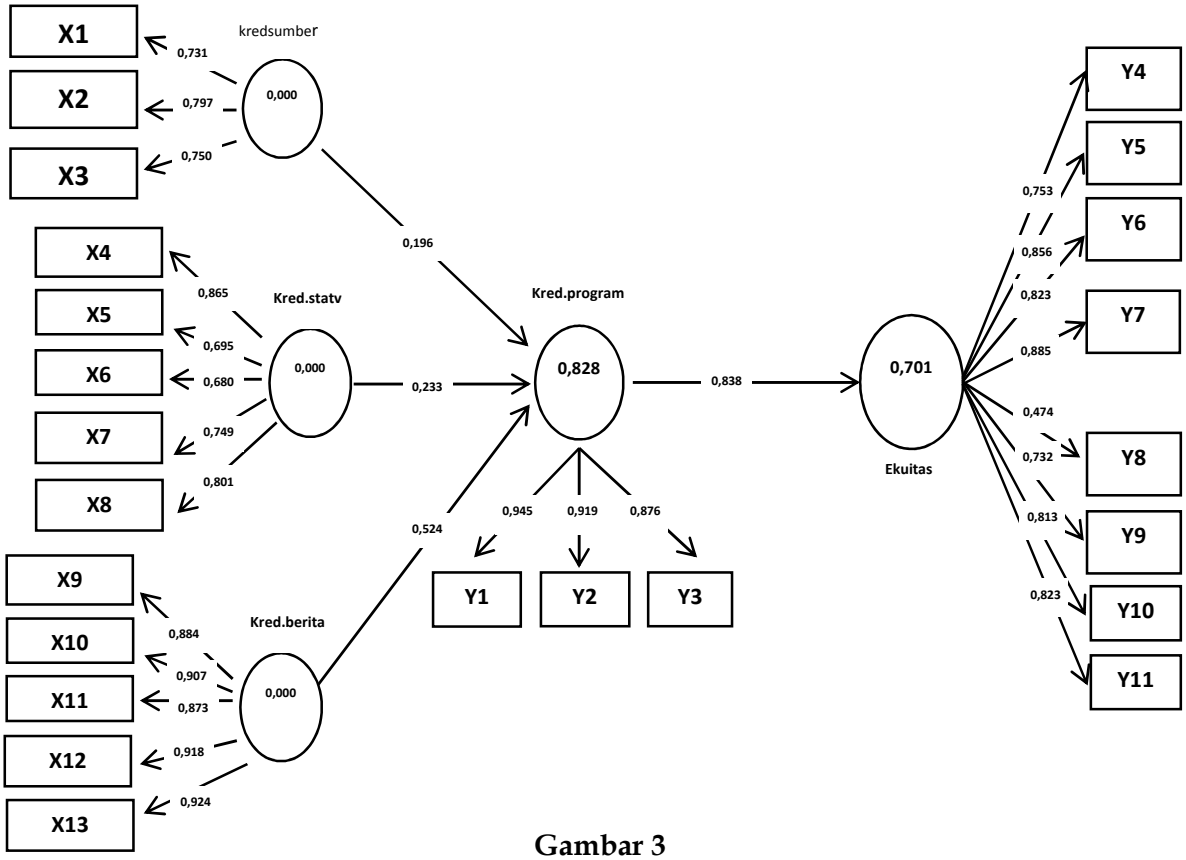

Gambar 3
Diagram jalur persamaan struktural penelitian tahap 1
Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS

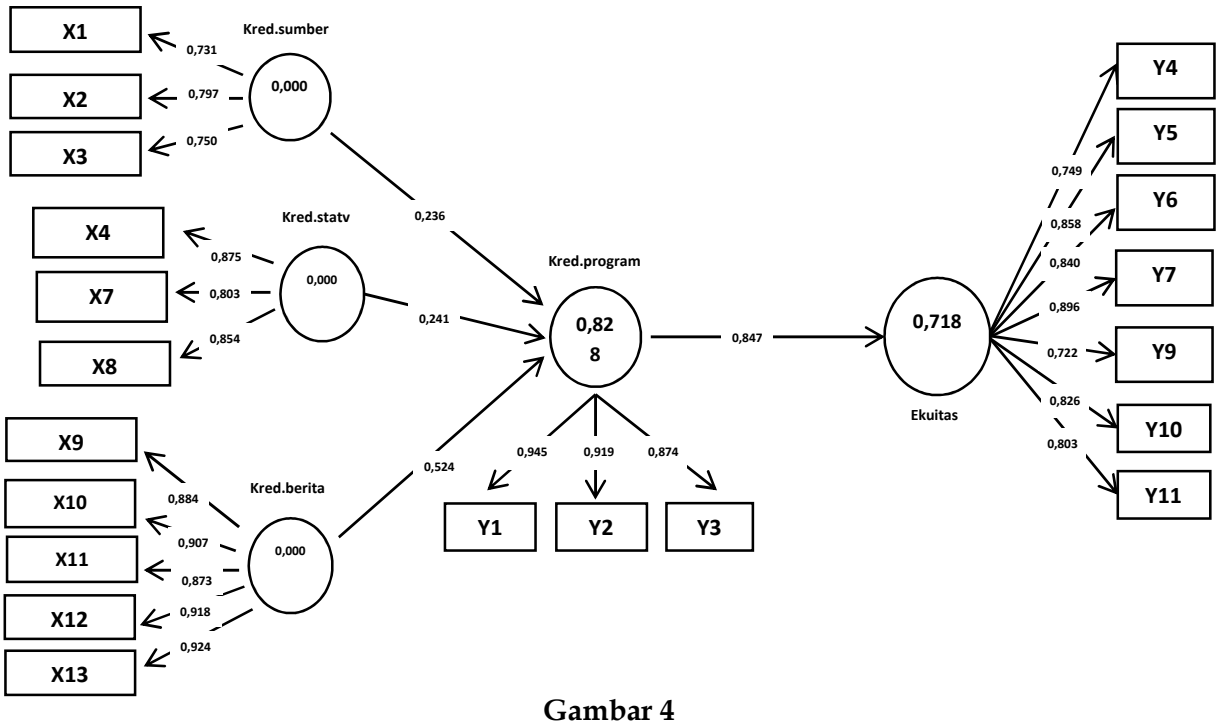

Gambar 4
Diagram jalur persamaan struktural penelitian tahap 2
Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS

Nilai validitas diskriminan pengolahan tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 5 belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya sehingga perlu dilakukan pengolahan tahap 3. Pada pengolahan tahap 3, beberapa indikator dihilangkan dari model, diantaranya X_1, X_6 dan 2 indikator variabel ekuitas dengan loading factor terkecil.

Nilai loading factor dari diagram jalur persamaan struktural pada PLS setelah model dimodifikasi dapat dilihat pada Gambar 6.

Tahapan dalam evaluasi outer model ini yaitu akan dilakukannya pengujian validitas dan reliabilitas pada masing-masing variabel laten dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 2.0. Hulland (1999) dalam Kwong dan Wong (2013) menjelaskan bahwa *rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari faktor muatan adalah ≥ 0,4 dianggap cukup baik untuk *exploratory research* dan untuk faktor muatan ≥ 0,7 dianggap signifikan.

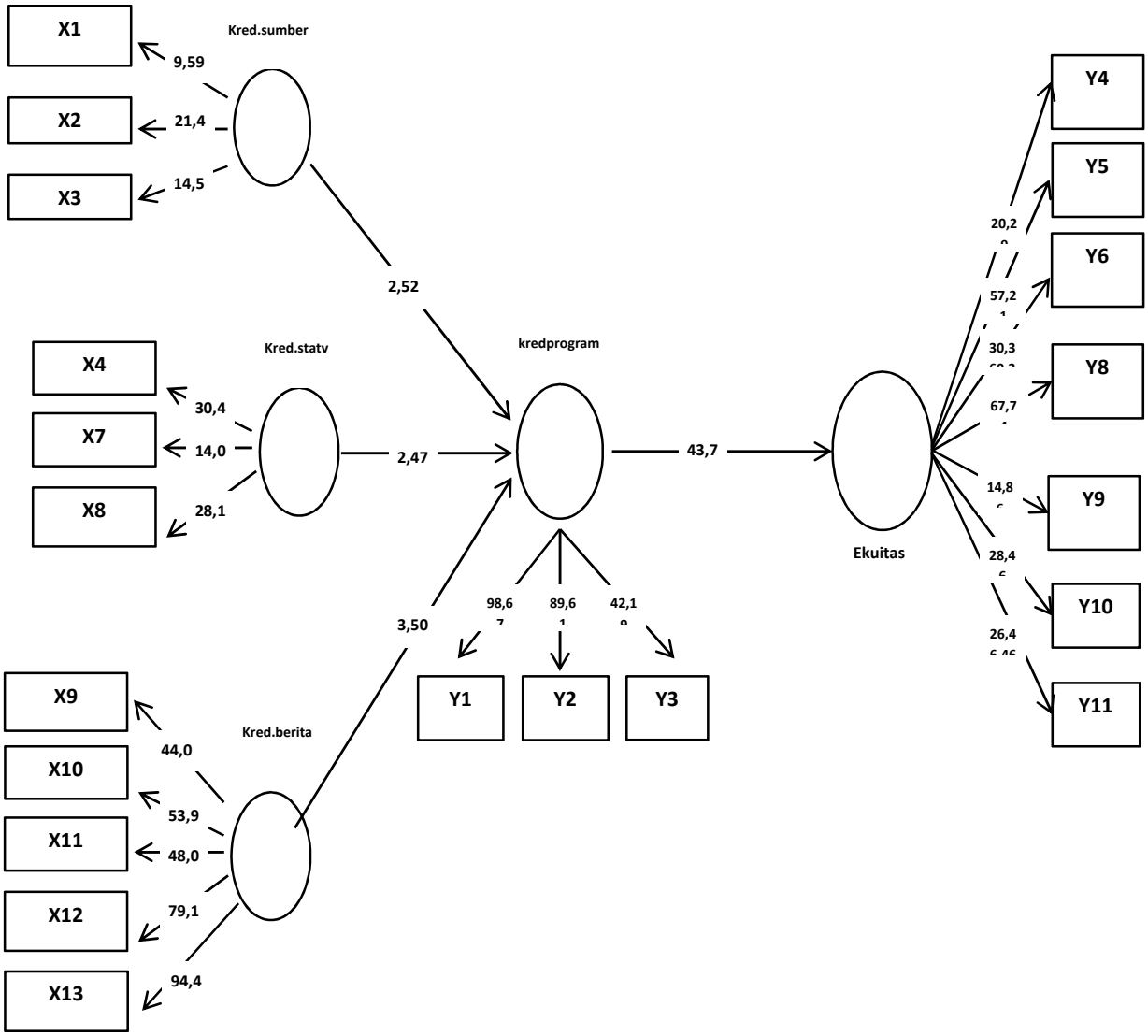

Gambar 5
Uji signifikansi (uji-t) model penelitian tahap 2
Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS

Tabel 5
Nilai validitas diskriminan model tahap 2

	Ekuitas	Kredibilitas program	Kredibilitas stasiun televisi	Kredibilitas sumber	Kredibilitas isi berita
Ekuitas	0,82*				
Kredibilitas program	0,85	0,91*			
Kredibilitas stasiun televisi	0,86	0,87	0,84*		
Kredibilitas sumber	0,76	0,82	0,81	0,76*	
Kredibilitas isi berita	0,86	0,89	0,92	0,81	0,90*

Keterangan: *) Nilai dari akar kuadrat AVE

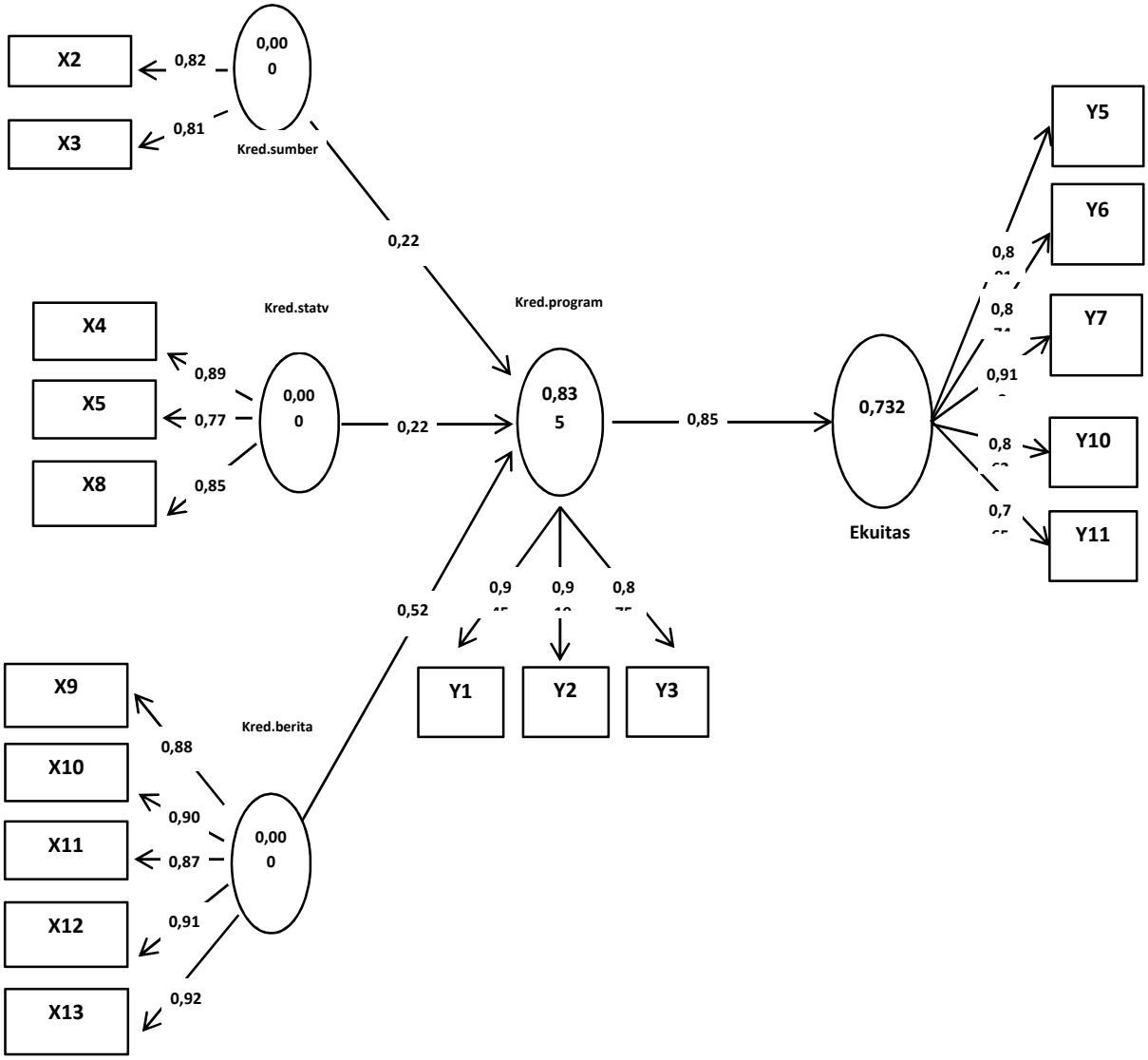

Gambar 6
Diagram jalur persamaan struktural penelitian tahap 3
Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS

Nilai AVE yang memenuhi kriteria, harus melebihi 0,5. Bagozzi dan Yi (1988) dalam Kwong dan Wong (2013) menyebutkan bahwa *rule of thumb* yang digunakan dalam uji validitas konvergen adalah nilai faktor muatan ≥ 0,7; dan *average variance extracted* (AVE) ≥ 0,5. Semua variabel dalam penelitian sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 7 telah memiliki nilai AVE di atas 0,5. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa *convergent validity* dari model yang dibangun telah valid. Tahapan evaluasi model pengukuran yang terakhir adalah uji reliabilitas melalui nilai *composite reliability.* Uji reliabilitas menggunakan *composite reliability* digunakan karena merupakan *closer approximation* dengan asumsi estimasi adalah akurat (Latan dan Ghozali, 2012). Nilai *composite reliability* setiap konstruk dalam penelitian ini lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliabel dan memenuhi uji reliabilitas.

Indikator yang valid adalah indikator yang memiliki tingkat *measurement* kesalahan (erorr) yang kecil serta memenuhi syarat nilai faktor muatan ≥ 0,7 (Latan dan Ghozali, 2012). Tabel 6 menunjukkan rangkuman hasil estimasi dan nilai t-statistik pada tiap indikator. Dari hasil *outer loading* diketahui bahwa semua indikator konstruk adalah valid dengan nilai T-statistik yang dihasilkan > 1,96.

Validity disriminant dihitung dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstrak dengan nilai korelasi antar konstrak dalam model. Jika akar kuadrat AVE konstrak lebih besar daripada varians bersama dengan kontrak lain, maka validitas diskriminan dapat didukung. Nilai validitas diskriminan dapat dilihat pada Tabel 7.

Besarnya pengaruh langsung di antar konstruk dapat dilihat dari nilai *path coefficient* tersebut. Hasil pengolahan tersebut ditampilkan dalam Tabel 9. Nilai koefisien/ faktor muatan tersebut, memperlihatkan bahwa atribut kredibilitas isi berita memiliki koefisien konstrak tertinggi yaitu 0,52 yang menunjukkan bahwa atribut tersebut memiliki pengaruh relatif yang lebih besar terhadap peubah kredibilitas program berita. Koefisien konstrak kredibilitas stasiun televisi 23%, hal ini berarti kepercayaan terhadap stasiun televisi mempengaruhi opini khalayak terhadap program berita (Rahman, 2014), sedangkan kredibilitas sumber hanya berkontribusi sebesar 22% dalam membentuk kredibilitas program berita. Hal ini menunjukkan bahwa atribut kredibilitas sumber memiliki pengaruh relatif terkecil terhadap peubah kredibilitas program berita.

Kredibilitas sumber menjadi indikator yang paling kecil dalam mempengaruhi kredibilitas program, yang dapat mengartikan bahwa presenter tidak cukup hanya memiliki wajah atau penampilan fisik yang baik. Menurut Dumdum dan Garcia (2011), penampilan reporter yang biasa saja justru membuat pemirsa percaya. Khalayak lebih tertarik menyaksikan program berita, ketika presenter menyampaikan berita dengan lengkap dan mudah dimengerti serta sesuai fakta. Kaidah jurnalistik menjadi nilai penting dalam menghasilkan in-depth reporting dan analisis.

Tabel 6
Nilai AVE dan *composite reliability*

	AVE	*Composite Reliability*
Ekuitas merek	0,75	0,94
Kredibilitas isi berita	0,83	0,94
Kredibilitas program berita	0,71	0,88
Kredibilitas stasiun tv	0,67	0,80
Kredibilitas sumber	0,81	0,96

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS

Tabel 7
Validitas Diskriminan model tahap 3

	Ekuitas	Kredibilitas program	Kredibilitas stasiun televisi	Kredibilitas sumber	Kredibilitas isi berita
Ekuitas	0,864*				
Kredibilitas program	0,856	0,913*			
Kredibilitas stasiun televisi	0,731	0,831	0,841*		
Kredibilitas sumber	0,698	0,811	0,752	0,819*	
Kredibilitas isi berita	0,845	0,891	0,833	0,799	0,901*

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS
Keterangan: *) Nilai dari akar kuadrat AVE

Tabel 8
Nilai *Path coefficients (original sample, t-values)*

	Original Sample	T Statistics
Kredibilitas sumber-> kredibilitas program berita	0,22	2,01
Kredibilitas stasiun televisi -> kredibilitas program berita	0,23	2,85
Kredibilitas isi berita -> kredibilitas program berita	0,52	3,36
Kredibilitas program berita televisi -> ekuitas merek	0,86	44,89

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS

Oleh karena itu dengan kualitas jurnalis yang baik dan penentuan konsep/*angle* yang tepat akan menciptakan kredibilitas di mata khalayak (Sjøvaag, 2013). Praktisi media setuju bahwa kredibilitas media dibentuk oleh presenter yang kompeten dan kedalaman berita terutama dari analisis yang dihasilkan dari suatu berita (Semary dan Khaja, 2013).

Berdasarkan Tabel 9, kredibilitas program berita mempengaruhi ekuitas merek program berita. Hal ini ditunjukkan degan nilai t-stastistik yang lebih besar dari 1,96 pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Oyedeji (2007), Bakshi dan Mishra (2011) bahwa kredibilitas berpengaruh positif pada ekuitas merek. Oyedeji (2010) juga menjelaskan bahwa dua konsep tentang kualitas informasi dan berita yang disampaikan oleh media (*credibility*) dan strategi manajemen yang membangun *brand equity* saling berkaitan. Hal tersebut berarti peningkatan pada kredibilitas akan meningkatkan ekuitas merek. Nilai koefisien jalur kredibilitas program berita sebesar 0,86 berarti ketika kredibilitas program berita meningkat 1% maka akan meningkatkan kredibilitas program berita sebanyak 86%.

Pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-*square* yang merupakan uji *goodness-fit* model. Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai *R-square* (R^2) untuk konstrak kredibilitas program berita sebesar 0,84 yang mengindikasikan bahwa variasi kredibilitas program berita dapat dijelaskan oleh variabel konstrak kredibilitas sumber, kredibilitas stasiun televisi dan kredibilitas isi berita sebesar 84,0%; sedangkan sisanya yaitu 16,0% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak terdapat dalam model penelitian. Menurut Dumdum dan Garcia (2011), kebiasaan pemirsa dalam hal ini *channel preference* dan usia turut serta dalam mempengaruhi kredibilitas program berita televisi. Khalayak yang tidak menjadikan Seputar Indonesia sebagai program berita favoritnya akan memberikan standar kualitas yang tinggi dan lebih kritis. Pemirsa yang berusia muda lebih mudah percaya bahwa suatu program berita tertentu lebih kredibel dibanding pemirsa dewasa. Hal tersebut juga didukung oleh Wonneberger, Schoenbach dan Meurs (2011) yang menjelaskan bahwa faktor motivasional seperti preferensi mempengaruhi penilaian khalayak terhadap kualitas program berita. Hamdy (2013) turut menyebutkan bahwa selain faktor demografi, ketergantungan pada media tertentu untuk mencari berita dan sikap politik seseorang mempengaruhi penilaian terhadap kredibilitas program berita. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel konstrak kredibilitas sumber, kredibilitas stasiun televisi dan kredibilitas isi berita hanya mampu menjelaskan sebesar 84,0% sebagai faktor kredibilitas program, sedangkan 16,0% kemungkinan dijelaskan oleh variabel preferensi, *media reliance*, dan sikap politik khalayak/penonton.

Tabel 9
Nilai *R-square* (R^2)

Konstrak dependen	*R-square*
Kredibilitas sumber	
Kredibilitas stasiun televisi	
Kredibilitas isi berita	
Kredibilitas program berita televisi	0,84
Ekuitas merek program berita	0,73

Sumber: Hasil pengolahan data oleh SmartPLS

Nilai *R-square* (R^2) untuk konstrak ekuitas merek program berita adalah sebesar 0,73 yang berarti nilai tersebut mengindikasikan bahwa variasi ekuitas merek program berita dapat dijelaskan oleh variabel konstrak kredibilitas program berita sebesar 73,0%, sedangkan sisanya yaitu 27,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Oyedeji (2007), Bakshi dan Mishra (2011) bahwa kredibilitas berpengaruh positif pada ekuitas merek. Hal tersebut berarti peningkatan pada kredibilitas akan meningkatkan ekuitas merek. Secara umum, nilai *R-square* (R^2) diatas menunjukkan bahwa model penelitian ini cukup kuat karena nilai *R-square* (R^2) ≥ 0,75 menunjukkan bahwa model penelitian kuat (Kwong dan Wong, 2013).

Evaluasi model PLS juga dilakukan dengan menguji nilai Q^2 *predictive relevance* atau sering disebut *predictive sample reuse* (Latan dan Ghozali, 2012) yang bermanfaat untuk uji kebaikan model struktural. Perhitungan Q^2 adalah sebagai berikut:

Q^2*predictive relevance* $= 1-(1-R_1^2)\ (1-R_2^2)$
$= 1-\ (1-0{,}73)\ (1-0{,}84)$
$= 1-0{,}04$
$= 0{,}96$

Besaran Q^2 memiliki rentang $0 < Q^2 < 1$, dan nilai 0,96 mendekati nilai 1 sehingga dapat dinyatakan model struktural fit dengan data dan mampu mencerminkan realitas dan fenomena yang ada di lapangan, sehingga hasil penelitian ini dapat dinyatakan valid dan reliabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: responden menilai bahwa pada tiga

variabel kredibilitas media, Seputar Indonesia hanya dinilai baik oleh pemirsa pada variabel kredibilitas sumber berita, sedangkan untuk variabel kredibilitas stasiun televisi dan isi berita, responden menilai bahwa isi berita Seputar Indonesia kurang akurat/tepat. Responden menilai isi berita yang diangkat oleh Seputar Indonesia kurang mendalam dan sesuai kaidah jurnalistik. Dalam menayangkan berita bertema politik, pemirsa menganggap bahwa program tersebut memiliki ketertarikan pada partai politik tertentu, dan kurang berimbang. Pemirsa menilai bahwa berita yang ditayangkan Seputar Indonesia kurang dapat dipercaya dan kompeten. Ekuitas merek Seputar Indonesia dinilai oleh responden belum terlalu kuat. Karakter presenter Seputar Indonesia dianggap baik, namun kurang pada sisi kualitas tayangan dan loyalitas.

Faktor kredibilitas media yang terdiri dari kredibilitas sumber, kredibilitas stasiun televisi dan kredibilitas isi berita mempengaruhi kredibilitas program berita televisi. Kredibilitas isi berita memberikan nilai pengaruh terbesar; diikuti kredibilitas stasiun televisi dan kontribusi terkecil diberikan faktor kredibilitas sumber. Indikator yang memberikan kontribusi terbesar pada kredibilitas isi berita adalah kebaruan berita dan netralitas isi berita yang ditayangkan dari kelompok tertentu. Hal ini berarti peningkatan pada kualitas tayangan akan meningkatkan kredibilitas program berita.

Kredibilitas program berita mempengaruhi ekuitas merek secara positif. artinya ketika kredibilitas program berita meningkat, maka ekuitas merek program Seputar Indonesia juga akan semakin baik. Kontribusi yang besar diberikan indikator program terpercaya dan program kompeten dalam membentuk variabel kredibilitas program berita. Pihak manajemen Seputar Indonesia diharapkan memperhatikan aspek kredibilitas media seperti kredibilitas sumber yang menyampaikan berita yakni reporter/presenter. Seputar Indonesia memiliki keunggulan dari sisi penampilan fisik reporter/presenter yang sudah dianggap sesuai dengan standar *broadcasting*, namun pada sisi kelengkapan informasi dan akurasi yang disampaikan oleh reporter/presenter masih perlu diperbaiki agar penampilan fisik yang sudah baik bisa diimbangi dengan kesan cerdas yang dimiliki reporter/presenter. Sehingga sangat penting untuk memberikan pelatihan secara berkala bagi reporter/presenter agar dapat memperkuat konten berita.

RCTI sebagai stasiun televisi yang memproduksi program berita televisi masih dianggap kurang kredibel, terutama dari keberimbangan dalam menyampaikan informasi dalam program berita. Oleh karena itu, perlu lebih selektif lagi dalam menentukan *angle* berita dengan mengangkat narasumber yang berkompeten dan *cover both side*. Tim produksi program Seputar Indonesia perlu untuk bersikap lebih netral dalam menayangkan isi berita yang bermuatan politik. Suatu program dapat dikatakan kredibel jika media pemberitaannya tidak menjadi "juru bicara" bagi partai politik maupun komunitas tertentu. Perbaikan ekuitas merek Seputar Indonesia merupakan indikasi yang kuat untuk memperbesar pangsa pasar. Hal tersebut dapat ditingkatkan melalui dimensi ekuitas merek seperti kesan kualitas, loyalitas, asosiasi dan kesadaran merek serta kredibilitas program. Kredibilitas program dapat ditingkatkan melalui perbaikan dari unsur-unsur kredibilitas media yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, perlu dikuatkan kembali *branding* program Seputar Indonesia, baik melalui perbaikan kualitas tayangan, *promo off-air* dan *on-air* serta meningkatkan pemberitaan yang berhubungan dengan kepentingan *public* agar program ini kembali dipercaya oleh khalayak.

Saran

Ekuitas merek Seputar Indonesia merupakan indikasi yang kuat untuk memperbesar pangsa pasar, namun penilaian pemirsa/responden mengenai kredibilitas media dari Seputar Indonesia belum terlalu istimewa. Kualitas dalam produksi berita adalah penciptaan legitimasi yang akan me-

narik pengiklan dan audiens dan pada akhirnya akan menguatkan citra stasiun televisi (Sjøvaag, 2013). Oleh karena itu, manajemen maupun pemangku program perlu untuk menerapkan *standard operating procedure* (SOP) bagi presenter/reporter sebelum melaporkan suatu peristiwa karena seorang presenter/reporter seringkali juga disebut sebagai filter akhir dari siaran berita. RCTI sebagai media yang pemilik program perlu melakukan perbaikan tayangan dan kembali memposisikan dirinya sebagai stasiun televisi yang menayangkan program berita yang kredibel. Identitas/posisi tersebut akan menunjukkan RCTI yang baru, karena identitas merek dapat merangkum apa dan mengapa suatu perusahaan itu ada (Siegert *et al.*, 2011). Manajemen melalui divisi produksi berita perlu: (1) menetapkan agenda setting dalam *newsroom*-nya, terutama dalam pemilihan narasumber, akurasi berita, konsekuensi/akibat atas suatu peristiwa sehingga hasil berita yang diperoleh lengkap dan berimbang, (2) melakukan training untuk karyawannya terutama reporter dan presenter agar mereka lebih dipercaya oleh pemirsa, (3) Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah melakukan differensiasi format program yang dilakukan berdasarkan profil penonton yang tersedia di pasar, misalnya dengan melakukan penyesuaian content (*what to offer*), konteks/kemasan (*how to offer*) dan infrastruktur (*enabler*).

Secara umum, penelitian yang dilakukan ini hanya melakukan kajian pada responden yang menyaksikan program berita Seputar Indonesia RCTI Jakarta. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukan variabel lain seperti: preferensi khalayak, penggunaan media terutama media online, psikografi, ataupun arah politik responden agar hasil penelitian lebih tajam dan aplikatif. Para peneliti telah menemukan bahwa karakteristik psikografis khalayak mempengaruhi persepsi mereka terhadap kredibilitas saluran media, pesan, dan sumber. Selain itu, jika ingin menggunakan sistem kuisioner *online* hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan membuatnya di alamat http://docs.google.com dengan menyertakan link tayangan program Seputar Indonesia atau program lainnya. Pada situs tersebut dapat dilihat banyaknya respon yang masuk dan output yang dihasilkan dapat langsung ditabulasikan. Penggunaan kuisioner *online* dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga diharapkan respon yang masuk akan lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Aaker, D. 1991. *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. The Free Press. New York.

Aaker D. 1996. Measuring Brand Equity Across Products and Market. *California Management Review* 38(3): 102-120.

AGB Nielsen. 2014. Media and Television Update 2014 tentang Performa Program Berita Televisi Swasta Indonesia 2009-2014. Jakarta (ID): AGB Nielsen

Bailey, R., Fox, J., dan Grabe, M. 2013. The Influence of Message and Audience Characteristics on TV News Grazing Behavior. *Journal of Broadcasting and Media Electronic Media* 57(3): 318-337.

Bakshi, M. dan Mishra, P. 2011. Content Credibility and Brand Equity of Media Channels-A Comparative Study of Print, Online and AV. *Proceeding WAPOR 64th Annual Conference* Amsterdam: 1-30.

Bucy E. 2003. Media Credibility Reconsidered: Synergy Effects Between On-Air and Online News. *Journalism & Mass Communication Quarterly* 80(2): 247 – 265.

Dumdum, O. dan Garcia, C. 2011. Casting Credibility: Patterns of Audience Assessment of TV News Program. *Plaridel Journal* 8(1): 51-70.

Elareshi, M. dan Gunter, B. 2012. Credibilty of Televised News in Libya: Are International News Services Trusted More than Local News Services? *Journal of Middle East Media* 8(1): 1-24.

Gaziano, C. dan McGarth, K. 1986. Measuring the Concept Credibility. *Journalism Quartely* 63(3): 451-462.

Hamdy, N. 2013. Prediction of Media Credibility in Egypt's Post-Revolution

Transitional Phase. *Global Media Journal Spring* 8(1): 1-28.

Hanzaee, K., Taghipourian, M. 2012. The Effect of Brand Credibility and Prestige on Consumer Purchase Intention in Low and High Product Involvement. *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 2(2): 1281-1291.

Hoffman, L. 2013. Political Interviews: Examining Perceived Media Bias and Effects Across TV Entertainment Formats. *International Journal of Communication* 7(2): 471–488.

Irvin, M. 2013. Woman in the TV Broadcast: Reporters and Sources in Hard News Stories. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communication* 4(1): 39-47

Jackob, N. 2010. No Alternatives? The Relationship Between Perceived Media Dependency, Use of Alternative Information Sources, and General Trust in Mass Media. *International Journal of Communication* 4(1): 589–606.

Kwong, K. dan Wong, K. 2013. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS. *Marketing Bulletin* 24(1): 1-32

Latan, H. dan Ghozali, I. 2012. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Badan Penerbit Universits Diponegoro. Semarang.

Manero, C., Uceda, E., dan Seranno, V. 2013. Understanding the Consumption of Television of Television Programming: Development and Validation of Structural Model for Quality, Satisfication and Audience Behaviour. *International Journal of Marketing Studies* 5(1): 142-156.

Mehrabbi, D., Abu, Hasan., M, Musa., dan Ali M. 2009. News Media Credibility of the Internet and Television. *European Journal of Social Sciences* 11(1):136-148.

Meyer, D. dan Muthaly, S. 2008. New Measures and a New Model for Television Network Loyalty (MOTNL). *Marketing Bulletin* 19(1): 1-19

Meyer, P. 1988. Defining and Measuring Credibility of Newspaper: Developing an Index. *Journalism Quartel* 6(5): 567-574.

Meyer P. 2004. The Influence Model and Newspaper Business. *Newspaper Research Journal* 25(1): 66-83.

Mitra, B., Webb, M., dan Wolfe, C. 2014. Audience Responses To The Physical Appearance of Television Newsreaders. *Participations Journal of Audience & Reception Studies* 11(2): 45-57.

Oba, G. 2011. The Brand Building of Foreign-Owned Television Channels in The Japanese Market. *Keio Communication* 33(2): 133-153.

Ohanian R. 1990. Construction of Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorser's Perceived Expertise, Trustworthiness, and Atrractiveness. *Journal of Advertising* 19(3): 39-52.

Olmsted, C. dan Cha, J. 2008. Exploring the Antecendents and Effect of Brand Image for Television News: An Appliction of Brand Personality Construct in a Multichannel News Environment. *The International Journal on Media Management* 9(4): 135-150.

Ots, M. dan Wolff, P. 2007. Consumer Brand Equity of the Media: The Value Perceptions of Professional Media Buyers. *Working Paper the Donald McGannon Communication Research Center:* 1-22.

Oyedeji, T. 2007. The Relationship Between the Media Channel Credibility and Brand Equity of Media Outlets. *The International Journal on Media Management* 9(3): 116-125.

Oyedeji, T. 2010. The Credible Brand Model: the Effects of Ideological Congruency and Customer-Based Brand Equity on Media and Message Credibility. *American Behavioral Scientist* 54(2): 83-99.

Porral, C., Fernandez, V., dan Boga, O. 2014. Mass Communication Media Credibility: an Approach from the Credible Brand. *Intercom-RBCC* 37(2): 21-4.

Rahman, B. 2014. Conditional Inluence of Media: Media Credibility and Opinion Formation. *Journal of Political Studies* 21(1): 299-344.

Rangkuti, F. 2008. *The Power of Brands Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Roberts, C. 2010. Correlations Among Variables in Message and Messenger Credibility Scales. *American Behavioral Scientist.* 54(I): 43-56.

Sabigan, C. 2007. Credibility Perceiptions of Television and Online News. *Thesis*. University of South Florida. South Florida.

Semary, H., Khaja, M. 2013. The Credibility of Citizen Journalism and Traditional TV Journalism Among Emirati Youth: Comparative Study. *American International Journal of Contemporary Research* 3(11): 53-62.

Siegert, G., Gerth, M., dan Rademacher, P. 2011. Brand Identity –Driven Making Journalists and Media Managers-The MBAC Model as a Theoritical Framework. *International Journal on Media Management* 13(1): 53-70.

Sjøvaag, H. 2013. Revenue and Branding Strategy in the Norwegian News Market *The Case of TV 2 News Channel. Nordicom Review* 33(2): 53-66

Wang, T. dan Cohen, A. 2009. Factors Affecting Viewer's Perceptions of Sensationalism in Television News: A Survey Study in Taiwan. *Issues and Studies* 45(2): 125-157.

Wonneberger, A., Schoenbach, K., dan Meurs, L. 2011. Interest in News dan Politics-or Situasional Determinant? Why People Watch the News. *Journal of Broadcasting dan Electronic Media* 55(3): 325-343.

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan **ISSN 1411 - 0393**
Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

PEMBEBASAN ETOS AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS KRITIS HABERMASIAN ATAS KOLONISASI *LIFEWORLD*

Ridho Muhammad Purnomosidi
Ridho.mp@gmail.com
Iwan Triyuwono
Ari Kamayanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

ABSTRACT

The aim of this study is to desing a construct of public accountability concept that is independent of lifeworld colonization brought by the concept of New Public Management. This study emphasize its analysis on process-oriented accountability and one that liberates public communication. This study will shed a light on process responsibility, one that is not limited to information presentation but more than that, as a moral responsibility of government executive. In this study, I approach the problem through the eyes of Habermas's critical perspective. Using Habermas's approach, I want to understand the colonization of accountability lifeworld in society. In relation to budget accountability issues, public disc 7ussion space would be the main issue. The findings of this study is that accountability, judging from the quality of service delivery, has eroded its meaning. That is, the service providers have not been able to give an adequate account for the service that they are doing, such as trying to produce a quality of service according to the wishes of the people. Therefore, the current accountability process still needs improvement, so that public officials providing service would have a sense of public responsibility when providing services to the public. Public accountability of service provided appears to disregard public discussion space that creates equality in determining what is needed and what is given to the public.

Key words: accounting, accountability, public sector, budgeting, habermas.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menghasilkan konstruksi konsep akuntabilitas publik yang bebas dari kolonisasi *lifeworld* yang dibawa oleh konsep *New Public Management*. Studi ini menekankan analisisnya pada bentuk akuntabilitas yang berorientasi proses dan yang membebaskan komunikasi publik. Studi ini akan membuka wacana pertanggungjawaban atas proses yang tidak sebatas penyajian informasi akan tetapi lebih dari itu, sebagai sebuah pertanggungjawaban moral para pelaksana pemerintahan. Dalam penelitian ini, saya mendekati masalah yang ada melalui kacamata perspektif kritis Habermas. Melalui pendekatan Habermas, saya ingin memahami kolonisasi *lifeworld* akuntabilitas yang terjadi dalam masyarakat. Berkaitan dengan masalah akuntabilitas anggaran, ruang diskusi publik merupakan hal utama yang menjadi pokok permasalahan. Temuan studi ini ialah bahwa akuntabilitas, dilihat dari kualitas pelaksanaan pelayanan, telah terkikis maknanya. Artinya, pihak pemberi layanan belum dapat mempertanggungjawabkan pelayanan yang dilakukannya dengan baik, seperti berusaha menghasilkan kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karenanya, proses pertanggungjawaban yang dimiliki masih butuh pembenahan, agar aparatur pemberi layanan dapat memiliki tanggung jawab publik ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik atas pelayanan nampak mengabaikan ruang dikusi publik yang membuat kesetaraan dalam menentukan apa yang dibutuhkan dan apa yang diberikan pada masyarakat.

Kata kunci: akuntansi, akuntabilitas, sektor publik, anggaran, habermas.

PENDAHULUAN

Beberapa dekade lalu, akuntabilitas tidak banyak diperbincangkan atau bahkan tidak mendapat perhatian, namun saat ini menjadi isu hangat yang banyak dibahas baik oleh praktisi maupun akademisi, terutama ketika berbicara tentang sektor publik (Day dan Klein, 1987; Broadbent dan Laughlin, 2003; Goddard, 2005; Sinclair, 1995). Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik saat ini ialah adanya transformasi dalam akuntabilitas publik yang bergerak di bawah pemikiran *new public management* (NPM). Dalam pemikiran ini, model pemerintahan tradisional dirasa tidak efisien dalam mengelola pemerintahan, sehingga model manajemen di sektor privat diangkat ke sektor publik untuk mengatasi masalah tersebut (Funnel, 2003; Hood, 1991; Parker dan Gould, 1999).

Namun demikian, perubahan ini dipandang tidak sesuai dalam sektor publik karena mengusung *spirit* dari sektor privat yang lebih bersifat *profit-oriented* (Doig dan Wilson, 1998; Hebson *et al*., 2003). Lebih lanjut, hal ini diperparah oleh sifat dasar NPM yang berbasis rasionalitas instrumental (efektivitas dan efisiensi) untuk melakukan justifikasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai *stakeholder* (Miller dan Dunn, 2006). Hal inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengkolonisasi ruang diskusi publik sehingga kepentingan masyarakat menjadi termarjinalisasi. Pada akhirnya, kondisi ini mendemistifikasi akuntabilitas, yaitu menghilangkan kesakralan akuntabilitas sebagai manifestasi amanah rakyat kepada pemerintahnya.

Untuk membebaskan kolonisasi ini maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan dalam akuntabilitas publik, terutama dalam akuntabilitas anggaran, karena fungsinya sebagai alat akuntabilitas utama dari pemerintah (Shah dan Chen, 2007). Dengan mengamati baik *spirit* yang mendasari akuntabilitas publik dalam hal ini etos akuntabilitas publik (Horton, 2008), maupun praktik akuntabilitas itu sendiri, maka akan dapat ditemukan gambaran yang holistik atas proses akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya, dari pemahaman tersebut dapat dilakukan pembebasan akuntabilitas publik atas kolonisasi rasionalitas instrumental.

Dalam hal ini, akuntabilitas publik merupakan konsep yang sampai sekarang masih diperdebatkan definisinya, namun semua pihak sependapat bahwa ia merupakan komponen penting dalam pemerintahan. Akuntabilitas digambarkan sebagai suatu hubungan yang mencakup pemberian dan permintaan tanggung jawab atas suatu tindakan tertentu (Roberts dan Scapens, 1985). Secara sederhana, akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat memberikan informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk mendapat informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Laughlin (1990) mengatakan bahwa tidak terdapat satu sistem akuntabilitas yang paling tepat bagi semua kondisi akuntabilitas yang ada, sistem akuntabilitas perlu disesuaikan dengan kondisi di mana ia akan diterapkan. NPM dengan konsepnya yang berbasis rasionalitas instrumental telah mengolonisasi ruang diskusi publik dan menghambat berlangsungnya proses akuntabilitas. Masyarakat pun seperti sudah lelah untuk memperjuangkan hak-haknya sehingga semakin menguatkan *status quo* pemerintah. Oleh karenanya, untuk membebaskan akuntabilitas di Indonesia perlu adanya komunikasi yang tidak terdistorsi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses akuntabilitas. Untuk dapat mencapai hal tersebut, perlu dipahami *spirit* etos akuntabilitas publik maupun praktik akuntabilitas yang terjadi dalam hubungan masyarakat dan pemerintah agar dapat dipahami bagaimana bentuk kolonisasi NPM atas akuntabilitas publik.

Studi ini bertujuan menghasilkan konstruksi konsep akuntabilitas publik yang bebas dari kolonisasi *lifeworld* yang dibawa oleh konsep *New Public Management*. Studi ini menekankan analisis pada bentuk akuntabilitas yang berorientasi proses dan yang membebaskan komunikasi publik. Studi ini akan membuka wacana pertanggungjawaban atas proses yang tidak sebatas penyajian informasi, tetapi lebih dari itu, sebagai sebuah pertanggungjawaban moral para pelaksana pemerintahan.

TINJAUAN TEORETIS

Akuntabilitas Anggaran Dan Komunikasi Antara Pelaku Anggaran

Sistem penganggaran publik dibentuk untuk menjalankan beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut termasuk pengaturan prioritas anggaran sesuai dengan amanat pemerintah; perencanaan pengeluaran dalam rangka mengejar visi jangka panjang untuk pembangunan; pelaksanaan kontrol keuangan atas *input* untuk memastikan disiplin fiskal; manajemen operasi untuk menjamin efisiensi operasi pemerintah; dan sebagai alat untuk akuntabilitas kinerja pemerintah kepada masyarakat (Shah dan Chen, 2007).

Dalam anggaran berbasis kinerja, legislatif tidak hanya menjadi pemberi amanat reformasi, namun ia juga merupakan salah satu pelaksana kunci. Ia memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan informasi kinerja dan untuk menerapkan sanksi. Dengan demikian, disposisi terhadap pelaksanaan anggaran perlu dibahas oleh legislatif dan eksekutif. Disposisi mengacu pada sejauh mana organisasi mendukung pelaksanaan reformasi dan melakukan upaya untuk memastikan keberhasilan reformasi.

NPM melahirkan berbagai model sistem anggaran yang didasarkan pada pencapaian kinerja diantaranya, *zero-based budgeting* serta *planing programming budgeting system*, model-model anggaran seperti ini umumnya lebih dikenal dengan sebutan *performance-based budgeting* atau anggaran berbasis kinerja. Pada dasarnya berbagai model anggaran ini bertujuan untuk menghubungkan antara penggunaan dana dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan anggaran berbasis kinerja ialah maksimalisasi *value for money*. Hal ini dilakukan dengan melakukan efisiensi atas alokasi dan efisiensi atas teknis atau manajerial. Kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (Mardiasmo, 2002).

Penting untuk menekankan bahwa akuntabilitas manajerial harus didasarkan pada *output* bukan *outcome*, karena *outcome* berada di luar kendali langsung manajer, sulit untuk didefinisikan dan diukur, dan sangat sulit untuk digunakan sebagai dasar penetapan biaya. Argumen utama dalam penggunaan akuntabilitas berbasis *output* adalah: (1) tidak memungkinkan untuk menghubungkan *outcome* langsung dengan tindakan manajerial, dan keputusan tingkat kontrol langsung seorang manajer atas *output* umumnya lebih besar daripada *outcome*, (2) *outcome* sangat sulit untuk diidentifikasi, dan tentu saja sulit untuk diukur. Skala waktu untuk mengukur hasil biasanya mencakup beberapa waktu setelah program diimplementasikan, umumnya, tidak selaras dengan siklus anggaran yang sama, dan (3) menghitung biaya untuk mencapai *outcome* lebih sulit daripada biaya untuk mencapai *output* (Kristensen *et al*, 2002).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, masalah yang ada didekati melalui perspektif kritis Habermas. Melalui pendekatan Habermas, penelitian ini mencoba memahami kolonisasi *lifeworld* akuntabilitas yang terjadi dalam masyarakat. Berkaitan dengan masalah akuntabilitas anggaran, ruang diskusi publik merupakan hal utama yang menjadi pokok permasalahan (Miller dan Dunn, 2006). Oleh karena itu, dengan menggunakan teori tindakan komunikasi Habermas, penelitian ini ber-

upaya untuk melakukan pembebasan proses komunikasi tersebut. Pemahaman atas interaksi '*lifeworld*', sistem teknis, dan mekanisme *steering* sosial penting untuk mencapai tujuan pembebasan komunikasi sehingga masyarakat dapat meraih kehidupan yang lebih baik (Barone *et al*., 2013). Sebagaimana yang disampaikan oleh Neuman (2003), bahwa pendekatan kritis bertujuan untuk memperjuangkan ide peneliti agar membawa perubahan yang substansial pada masyarakat.

Menurut pendekatan penelitian kritis, kegiatan penelitian seharusnya tidak berhenti pada tahap-tahap konvensional seperti deksripsi, eksplanasi, penerapan, atau peramalan. Kegiatan penelitian seharusnya melangkah pada tahap lebih jauh lagi, yaitu sampai pada tahap penyadaran dan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan pemecahan masalah atau pemberdayaan (*empowerment*) yang berpijak pada kesadaran kritis partisipan penelitian. Penelitian kritis bertujuan untuk membebaskan (*to emancipate*) dan mengubah (*to transform*) (Burrell dan Morgan, 1979; Chua, 1986). Paradigma ini memahami hakikat manusia sebagai sesuatu yang dinamis dan mandiri, dan seharusnya bebas dari adanya unsur eksploitasi dan tekanan dari pihak tertentu. Tujuan penelitian dari paradigma kritis adalah mengungkap hubungan nyata (*real relation*) yang ada di bawah permukaan, mengungkap mitos dan ilusi, menghapus kepercayaan yang salah, serta berusaha untuk membebaskan masyarakat dari belenggu situasional yang ada.

Dalam metode tersebut, Habermas membedakan tindakan rasional bertujuan ke dalam tindakan instrumental dan tindakan strategis. Dalam hal ini pengejaran kepentingan dilakukan secara rasional dan terkalkulasi. Tindakan instrumental melibatkan seorang aktor tunggal untuk memperhitungkan secara rasional alat-alat terbaik untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan, tindakan strategis berkaitan dengan proses dua atau lebih individu yang saling mengoordinasikan tindakan rasional bertujuan dalam pengejaran suatu tujuan. Tujuan tindakan instrumental maupun strategis ialah penguasaan intrumental. Mendasarkan akuntabilitas pemerintah pada ukuran efektivitas dan efisiensi kinerja merupakan contoh dari tindakan rasional bertujuan.

Sejalan dengan pandangan Habermas, maka penelitian ini pun berupaya untuk mengangkat aspek tindakan komunikatif. Ketika berbicara tentang akuntabilitas dan proses pertanggungjawaban kinerja pemerintah, tindakan komunikatif menjadi bagian integral dalam proses rasionalisasi. Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan komponen penting dalam pencapaian tujuan akuntabilitas sebagai alat pengendalian terutama dalam hal kinerja.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, karena Kabupaten Gowa memiliki keunikan tersendiri. Daerah yang merupakan penyanggga kota Makassar ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun 2013. Sayangnya di tahun yang sama daerah ini memiliki beberapa kasus korupsi yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas keuangan mereka tidak seiring dengan akuntabilitas proses kebijakan.

Hal lain yang membuat situs Pemerintah Kabupaten Gowa menjadi menarik untuk diteliti adalah kasus Fadli, di mana karena kritikan atas sistem akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten Gowa di bawah kepemimpinan Bupati Ichsan Yasin Limpo, Fadli Rahim yang merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Gowa, kini dipenjara di Rumah Tahanan Gunungsari Makassar, menunggu sidang pengadilan di Gowa. Persoalan ini dipicu akibat kritikannya melalui media sosial Line. Kritikan yang disampaikan Fadli melalui *chatroom group Line* dimaknai berbeda oleh Pak Bupati, seperti yang disampaikan oleh Kabag

Humas Pemerintah Daerah Kab. Gowa, Arifuddin Saeni. Kicauan Fadli dilihat sebagai sebuah "pencemaran nama baik" dan sebagai Aparatur Sipil Negara tindakannya dituding melanggar peraturan disiplin pegawai dan tidak loyal terhadap atasan. Karena dianggap tidak dapat membuktikan tuduhannya, Fadli diadili setelah diproses di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Gowa dan diperiksa oleh polisi dan jaksa sejak Mei 2014 lalu (Mangenre, 2014)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah eksekutif yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Mereka merupakan pihak agen yang terkait dalam pelaksanaan proses akuntabilitas publik. Pihak eksekutif disini meliputi Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran Kepala Bidang terkait, Kepala BAPPEDA, dan Kepala Bagian Keuangan Pemda Gowa. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara purposif berdasarkan jabatan mereka, karena mereka diharapkan memiliki wawasan yang baik dalam hal akuntabilitas publik. Selain itu informan penting lainnya ialah masyarakat sebagai pihak prinsipal yang merasakan kinerja dari para eksekutif dan seharusnya melakukan fungsi kontrol. Mewakili pihak masyarakat dipilih dua orang yaitu ketua LSO yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan Pemda Gowa serta pengamat akuntabilitas pemerintah yang juga merupakan dosen akuntansi sektor publik di Universitas Hasanuddin Makassar. Pemilihan informan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman atas kondisi masyarakat dalam proses akuntabilitas publik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Marjinalisasi Ruang Diskusi Publik

Aspek penting dalam pelayanan publik adalah akuntabilitas atas etos pelayanan publik (Horton, 2008). Nilai intrinsik yang termasuk di dalamnya ialah komitmen, integritas, imparsialitas, dan perilaku *citizenship* organisasional (Foster dan Wilding, 2000; Lawton, 1998; Needham, 2006). Reformasi dan perubahan kontekstual atas sektor publik di bawah kedok *New Public Management* (NPM) telah mengubah pola pelayanan publik (Ferlie *et al*., 1996; Lane, 2000; Lynn, 2006), serta mendorong adopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta (Maesschalck, 2004; Maesschalck *et al*., 2008; Pollitt dan Bouckaert, 2000).

Nilai-nilai baru yang dibawa oleh NPM sebagian berasal dari pengakuan adanya kekuatan pasar dan kekuasaan pelanggan, yang mana hal tersebut menurut berbagai peneliti, bertentangan dengan komitmen terhadap kepentingan publik (Doig dan Wilson, 1998; Hebson *et al*., 2003). Nilai-nilai yang termasuk di dalamnya ialah profitabilitas, *risk taking*, responsif, inovasi dan bisnis (Aldridge dan Stoker, 2002; Van der Wal *et al*., 2008).

Literatur menunjukkan bahwa secara umum reformasi ini telah mengubah peran pemerintah (Bach *et al*., 2007), mempengaruhi norma-norma yang dianut oleh pemerintah (Marsden, 2004), dan secara signifikan, dan negatif, mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik dan etos pelayanan publik (Rhodes, 1994). Pengaruh yang banyak dikutip dalam literatur ialah melemahnya nilai-nilai profesional (Pollitt dan Bouckaert, 2000; Powell *et al*., 1999); penurunan semangat, motivasi, kepercayaan, komitmen, dan kepuasan kerja (Foster dan Wilding, 2000; Friedson, 1994); dan peningkatan stres yang disebabkan oleh intensifikasi kerja (Audit Commission, 2002; Exworthy dan Halford, 1999; Randle dan Brady, 1997). Pengalaman ini dapat digeneralisasi di seluruh sektor publik secara internasional karena mereka yang berprofesi pada berbagai sektor, misalnya, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, dan pekerjaan sosial telah mengalami reformasi serupa (Ackroyd *et al*., 1989; Frederickson dan Ghere, 2005; Henkel, 1991; O'Faircheallaigh *et al*., 1999).

Terdapat bukti bahwa reformasi *New Public Management* memiliki dampak terhadap etos umumnya melalui penciptaan budaya audit (Power, 1997) dan secara khusus berkaitan dengan kerjasama pemerintah

dengan swasta (Hebson *et al*., 2003) dan *contracting out* (Painter, 2000). Konsep NPM membatasi diskursus publik pada topik yang tidak kritis dan mengabaikan topik penting seperti pembuatan kebijakan (Stone, 2002). Justifikasi efisiensi ekonomi digunakan untuk melakukan intervensi seperti privatisasi serta *outsourcing*, dan mengesampingkan partisipasi publik dengan alasan akan menghambat produktifitas. Klaim tersebut menyebabkan minat baru dalam akuntabilitas dan etos pelayanan publik (Clarke *et al*., 2000; Needham, 2006; Seddon, 1996) dan upaya untuk mempertajam fokusnya dalam menanggapi reformasi tersebut (Aldridge dan Stoker, 2002; Brereton dan Temple, 1999; Needham, 2006).

Hal yang memprihatinkan berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas dan etos pelayanan publik karena Habermas (2001) mengidealkan suatu kondisi di mana masyarakat memiliki akses yang luas untuk mendiskusikan akuntabilitas publik, guna mendapatkan posisi yang setara dengan pemerintah. Ia mendorong *lifeworld* yang steril dari kolonisasi. Ia membayangkan masyarakat komunikatif sebagai tempat perbedaan kepentingan dibicarakan lewat cara-cara yang elegan, serta tidak menutupi ruang gerak masing-masing pihak. Itu semua bisa berlangsung di ruang publik yang terbuka dan steril dari tekanan ideologi yang hanya meniupkan angin surga.

Akuntabilitas dan Etos Pelayanan Publik: Sebuah Realitas yang Mengabaikan Ruang Diskusi Terbuka

Terdapat berbagai tradisi akuntansi yang berbeda yang mencerminkan konvensi konstitusional, nilai-nilai politik, dan rezim hukum yang berbeda. Konsep etos pelayanan publik mulai muncul di Inggris, menyusul laporan dari Northcote dan Trevelyan (1854) mengenai pegawai pemerintahan. Banyak peneliti yang telah mengeksplorasi etos tersebut dari perspektif sejarah (O'Toole, 1990; Plant, 2003; Thomas, 1989) dan menemukan akarnya dalam konsep tugas publik yang diartikulasikan dari pemikiran Plato dan Aristoteles, dan pemikiran terbaru para idealis Inggris, terutama T.H. Green (O'Toole, 1990). Fokus dari tulisan mereka adalah pegawai senior pemerintahan di Inggris dan perkembangan etos akuntabilitas pelayanan publik sejak reformasi pelayanan publik pada abad ke-19 hingga saat ini. Kekhawatiran terhadap cita-cita etis, termasuk pelayanan kepada masyarakat, menjadi ciri utama perkembangan ini (Thomas, 1989). Pada awalnya, etos akuntabilitas ini diadopsi oleh kelompok elit pegawai pemerintahan, tetapi kemudian ia mulai merambah ke berbagai pekerja sektor publik (Audit Commission, 2002).

Seiring berjalannya waktu, upaya untuk mendefinisikan etos tersebut mengalami masalah. Lebih lanjut, selain studi yang dilakukan oleh Pratchett dan Wingfield (1996) dan Hebson *et al*. (2003), bukti empiris adanya etos ini sangat langka dan karakternya sangat sulit dijelaskan. Kerangka yang diidentifikasi oleh Pratchett dan Wingfield (1994) diuraikan dengan memasukkan akuntabilitas, perilaku birokratif (ditunjukkan melalui kejujuran, integritas, imparsialitas, dan objektivitas), kepentingan publik, motivasi dan loyalitas.

Individu yang bekerja dalam bidang pelayanan publik, dikatakan terikat oleh dan termotivasi oleh etos pelayanan publik (Lawton, 1998; Vandenabeele *et al*., 2006). Konsep ini ditandai oleh seperangkat nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan ketulusan, serta seperangkat proses yang melibatkan, misalnya, perekrutan dan promosi berdasarkan prestasi. Hal ini mengasumsikan bahwa mereka yang menjalankan etos ini akan peduli untuk memperjuangkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi (House of Commons Public Administration Select Committee, 2002). Dalam hal ini, Idris, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gowa mengungkapkan:

> Di satu sisi mesin administrasi menawarkan begitu banyak kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keinginannya, di sisi lain keputusan

> administrasi dan pelaksanaannya tidak selalu mampu melayaninya atau memahaminya, oleh karena itu, …mendahulukan prioritas RENSTRA ....

Dalam hal ini, akuntabilitas pemerintah Kabupaten Gowa mendukung keberadaan dan pentingnya etos pelayanan publik, etos ini menggambarkan keadaan yang ada, memberikan panduan tindakan, dan menginspirasi mereka yang bekerja di organisasi pelayanan publik. Namun, dapat kita amati pengaruh dari rasionalitas instrumental dalam formulasi etos pelayanan publik tersebut. Terlihat bahwa ukuran efisiensi dan efektivitas pencapaian *outcome* menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa klaim etos pelayanan publik sebagai suatu hal yang selalu baik, dapat dikatakan masih diperdebatkan. Etos akuntabilitas pemerintah Kabupaten Gowa saat ini dapat dikatakan telah mendorong perilaku kekanak-kanakan, loyalitas sesat, birokratis, membangun kerajaan, atau mendahulukan kepentingan pusat dengan mengorbankan kepentingan masyarakat (Lawton, 1998). Dalam hal ini Syarifuddin, seorang pemerhati sektor publik menyatakan:

> ...setiap manusia memiliki spirit (roh) keberhasilan, yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan. Roh inilah yang menjelma menjadi perilaku yang khas seperti kerja keras, disiplin, teliti, tekun, integritas, rasional, bertanggung jawab dan sebagainya. Lalu perilaku yang khas ini berproses menjadi kerja yang positif, kreatif dan produktif. Akuntabilitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Gowa seharusnya merupakan jelmaan dari prinsip ini, sehingga pemda senantiasa mendahulukan masyarakat di atas kepentingannya.

Dalam kaitannya antara anggaran dan etos kerja, Syarifuddin menjelaskan:

> ...etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu komunitas menganut paradigma kerja, mempercayai, dan berkomitmen pada paradigma kerja tersebut, semua itu akan melahirkan sikap dan perilaku kerja mereka yang khas. Dalam hal ini permasalahan umum dalam etos kerja adalah pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja pelayanan kepada *stakeholder*-nya untuk menciptakan akuntabilitas kinerja yang mencerminkan etos kerja yang dimiliki. Hal ini mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain akuntabilitas anggaran yang menggambarkan seberapa jauh efektivitas kerja pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Hal di atas sejalan dengan pandangan Anoraga (2009), bahwa etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau manusia terhadap kerja. Bila individu-individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur dan sakral bagi eksistensi manusia, maka etos kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya, sikap dan pandangan terhadap kerja sebagai sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, akan mengakibatkan etos kerja dengan sendirinya menjadi rendah. Hal yang sama diungkapkan Sinamo (2005) yang memandang bahwa etos kerja merupakan fondasi dari sukses yang sejati dan otentik. Pandangan ini dipengaruhi oleh kajiannya terhadap studi-studi sosiologi sejak zaman Max Weber di awal abad ke-20 dan penulisan-penulisan manajemen dua puluh tahun belakangan ini yang semuanya bermuara pada satu kesimpulan utama bahwa keberhasilan di berbagai wilayah kehidupan ditentukan oleh perilaku manusia, terutama perilaku kerja. Sebagian orang menyebut perilaku kerja ini sebagai motivasi, kebiasaan (*habit*) dan budaya kerja. Sinamo (2005) lebih memilih menggunakan istilah etos karena menemukan bahwa kata etos mengandung pengertian tidak saja sebagai perilaku khas dari sebuah organisasi

atau komunitas, tetapi juga mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar.

Melalui berbagai diskursus di atas baik secara etimologis maupun praktis dapat disimpulkan bahwa etos kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai kerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan, sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Oleh karenanya, pemerintah seharusnya akuntabel atas etos kerja yang dimiliki termasuk anggaran yang dibelanjakan untuk menjalankan etos tersebut. Dengan kata lain, etos ini dalam praktiknya belum tentu etis meskipun ia disepakati sebagai sesuatu yang etis secara organisasional. Hal inilah yang dikomentari Arman selaku pemerhati pemerintah:

> Pelayanan publik yang berkualitas mempunyai arti yang penting apabila pemberian pelayanan yang dilakukan secara sederhana, mudah dan dilakukan secara wajar dan profesional. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Gowa harus mengubah posisi dan peran dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaborasi dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis.

Ia selanjutnya menambahkan bahwa:

> Akuntabilitas dari sudut pandang pemerintah pada dasarnya sudah dianggap etis oleh mereka karena mereka telah memenuhi aturan akuntabilitas yang ada. Namun demikian, akuntabilitas pemerintah Kabupaten Gowa tersebut masih perlu dipertanyakan karena apakah hal itu telah sesuai dengan keinginan publik? … atau telah sesuai dengan informasi yang diharapkan masyarakat … nah di sini tampaknya pemerintah tidak pernah mau tahu hal tersebut sepanjang aturan dan regulasi akuntabilitas telah mereka kerjakan.

Dalam hal ini, tampak bahwa etos yang dirasakan oleh individu dalam suatu organisasi bergantung pada siapa pemimpinnya dan siapa saja anggotanya (O'Toole, 1993) dan akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh mereka sendiri (Chapman, 2000). Ia akan berkembang dari waktu ke waktu, dan karakter historisnya terdokumentasi dengan baik (Chapman, 1993; Horton, 2008; O'Toole, 1990; Plant, 2003). Keberlangsungan etos akuntabilitas seperti ungkapan Arman di atas akan berlanjut terus pada generasi pejabat publik yang akan datang, dan ia terinternalisasi menjadi nilai intrinsik yang memotivasi kerja pegawai pemerintahan. Oleh karenanya, perlu adanya kontrol masyarakat untuk merubah paradigma pegawai pemerintahan Kabupaten Gowa atas etos akuntabilitas yang berkembang saat ini. Syarifuddin, informan saya mengemukakan:

> Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja, akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dalam melakukan kontrol. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut.

Ketiadaan kendali kekuatan hegemonik dalam diskursus sangat penting untuk mencapai keadaan komunikasi yang ideal, menurut pandangan Habermas (2001) bahwa pembebasan diskursus dari struktur aksi

dan interaksi yang bersifat koersif diperlukan agar dapat tercipta keadaan komunikasi yang ideal, hal ini tampaknya hanya dapat terjadi dalam keadaan tindakan komunikatif murni. Menurut Habermas (2001) semua *stakeholder* harus transparan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain mengenai apa yang sebenarnya mereka lakukan, jika perlu, mereka menerjemahkan ekspresi non-verbal mereka ke dalam bentuk ungkapan linguistik. Berkaitan dengan etos akuntabilitas, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa dalam praktiknya, dialog antar *stakeholder* masih jauh dari keadaan komunikasi yang ideal (Unerman dan Bennett, 2004).

Sebagai pemikir sosial, Habermas dikaitkan dengan konsep *public sphere*. Menurut Habermas (2001), *public sphere* dikonseptualisasikan sebagai suatu realitas kehidupan sosial di mana terjadi suatu proses pertukaran informasi dan berbagai pandangan berkenaan dengan pokok persoalan yang tengah menjadi perhatian umum sehingga dalam proses tersebut terciptalah konsensus bersama. Dengan dihasilkannya konsensus bersama maka pada gilirannya akan membentuk kebijakan negara yang ideal dan pada akhirnya akan membentuk tatanan masyarakat yang ideal secara keseluruhan. *Public sphere* mensyaratkan keaktifan dari warga masyarakat untuk memanfaatkan hak-haknya dan terlibat ikut berpikir di dalam suatu wacana yang sedang hangat pada suatu waktu tertentu, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan politik. Seiring perkembangan masyarakat yang semakin pesat, proses terbentuknya wacana menuju opini publik dapat dilakukan melalui media massa.

Gagasan Habermas di atas memang bisa dikatakan merupakan sebuah cita-cita ideal dalam konteks historis pada masa itu yang kalau kita bandingkan dengan konteks zaman sekarang tentu prosesnya tidak sesederhana itu. Pemikiran Habermas tersebut dapat kita pahami dalam dua perspektif. Pertama, Habermas mencoba menggambarkan munculnya ruang publik di kalangan calon kaum borjuis dalam spirit kapitalisme liberal di abad 18. Kategori *public sphere* semacam ini dapat ditemui dalam realitas sejarah masyarakat Inggris, Perancis dan Jerman. Pada masa sebelum itu, memang bisa dikatakan tidak ada ruang sosial yang layak disebut "*public*" sebagai lawan dari "*private*". Dengan berkembangnya konsep negara kebangsaan, lembaga perwakilan, perekonomian, dan tidak ketinggalan lahirnya media cetak menyebabkan awal berkembangnya kemunculan *public sphere* di masyarakat tertentu di Eropa Barat. *Public sphere* ini memunculkan kelompok-kelompok sosial tertentu atas dasar pendidikan, kelas kepemilikan (biasanya pada kalangan pria) dan berproses melalui berbagai media seperti jurnal, pamflet, dan surat kabar termasuk di dalamnya lingkungan tertentu seperti bar, *coffee house* dan berbagai *club*. Pertukaran informasi aktual yang berlangsung terus menerus dalam sebuah diskusi, dan seringkali dihangatkan dengan perdebatan merupakan gejala baru yang menurut Habermas amatlah berarti.

Kedua, konsep *public sphere* memasuki warna baru dengan mulai memudarnya kelompok borjuis dalam konteks masyarakat industri yang semakin maju, dan munculnya demokrasi massa. Dengan adanya demokrasi massa, publik yang semula diwakili oleh kalangan elit terpelajar yang terbatas, mulai dimasuki oleh masyarakat yang kebanyakan tidak begitu berpendidikan. Sementara negara, dalam kepentingannya untuk mengendalikan pertentangan kapital menjadi makin terintervensi. Menurut Habermas (2001), batas antara wilayah publik dan privat, baik dalam pengertian ekonomi, politik maupun budaya makin tipis. Organisasi besar dan kelompok kepentingan menjadi partner politik kunci bagi negara, dalam menghasilkan bentuk politik feodal baru yang makin menggantikan peran-peran yang semula dijalankan oleh masyarakat. Berkembangnya karakteristik kepemilikan media massa, khususnya ketika kekuatan komersial mengubah fungsi komunikasi publik menjadi *public relation* dan makin menguatnya periklanan dan

hiburan, maka fungsi kritis media massa makin terkikis. Publik lalu terkotak-kotak sedemikian rupa, sehingga kehilangan daya ikatnya. Berkaitan dengan hal ini Habermas (2001) mengemukakan:

> *If all participants in dialogue have the same opportunity to employ communicatives, that is, to initiate communication and continue it through speaking and responding of asking questions and giving answers, then equally distributing opportunities for employing constatives … that is, equally distributing the opportunities to put forth interpretations, assertions, explanations, and justifications and to establish or refute their claims to validity – can be a way of creating a basis on which no prejudice or unexamined belief will remain exempt from thematization and critique in the long run.*

Kisah memudarnya *public sphere* tampak jelas dalam penelitian ini, sehingga perlu dipertanyakan kembali konsep *public sphere* dalam konteks etos akuntabilitas publik. Dalam hal ini konsep *public sphere* menjadi sesuatu yang berharga guna memahami proses sosial pemerintah Kabupaten Gowa di mana media massa menjadi salah satu kekuatan dalam konstelasi kekuatan-kekuatan yang menentukan dalam masyarakat.

Untuk menyediakan *public sphere* dalam pengertian etos akuntabilitas, berarti pemerintah harus menyediakan sebuah ruang berupa wacana, lembaga-lembaga, suatu ruang topografik, di mana orang dalam perannya sebagai warga memiliki akses masuk di dalam sebuah dialog kemasyarakatan yang sedang mempersoalkan sesuatu demi kepentingan umum. Dengan kata lain, akses menuju dunia politik dalam pengertian yang luas perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Gowa, sehingga ia tidak lagi terkolonisasi oleh rasionalitas instrumental yang sepertinya telah menguasai sistem-lifeworld akuntabilitas pemerintah Kabupaten Gowa saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Syarifuddin mengungkapkan:

> ...ruang yang demikian ini, dengan kondisi komunikasi tertentu yang mewarnainya, menjadi sesuatu hal yang penting dalam demokrasi. Fungsi *public sphere* adalah memenuhi persyaratan komunikasi tertentu sebagai variabel terbentuknya demokrasi.

Dalam hal ini, Peters (1993) berkomentar bahwa dasar pemahaman Habermas tentang demokrasi dan *public sphere* tidaklah murni dikendalikan oleh tradisi liberal *Anglo-American* dengan ide dasarnya tentang "*market – place of ideas*". Dalam hal ini Habermas (1984) menjelaskan:

> *The result may be a joint understanding that the participants are closer to each other than they may seem, or differences may be identified, equally important when deciding on further action. The clarification can give rise to a superior reflection and weighing of values and norms. This can in turn reveal new possibilities and may lead to a wish for new priorities. For a positive, dynamic process to occur the participants must have an open attitude and seek to understand the other and be willing to change their own point of view when new insight is obtained.*

Berkaitan dengan pandangan Habermas di atas, dengan menempatkan akuntabilitas etos pelayanan publik sebagai "*a way of life*" (Lawton, 1998) berarti menyadari bahwa ia merupakan subjek dari perubahan dan merupakan konstruksi yang dinamis. Penelitian ini menunjukkan bahwa etos akuntabilitas pemerintah Kabupaten Gowa mulai terkikis, karena masyarakat tidak menjadi jantung etos tersebut, serta akuntabilitas lebih fokus terhadap akuntabilitas *outcome* daripada proses. Seharusnya, berdasarkan proses komunikatif di atas, etos akuntabilitas menjadi jiwa dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, Needham (2006) menempatkan masyarakat sebagai pusat pemerintahan. Sementara, Aldridge dan Stoker (2002) menyebutnya sebagai etos pelayanan publik baru. Berkaitan dengan hal ini Arman sebagai salah satu ketua LSM pemerhati pemerintah mengungkapkan:

> Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini

> dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, dan tidak transparan, kurang informatif, dan kurang akomodatif, sehingga tidak menjamin kepastian, serta masih banyak praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN (*Korupsi, Kolusi, Nepotisme*). Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik. (*dicetak miring merupakan penegasan saya*).

Hal ini berarti bahwa akuntabilitas etos kerja, seharusnya berfokus pada kinerja, praktik kerja yang bertanggung jawab, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Semua langkah ini ketika dijalankan bersama-sama akan membantu untuk menciptakan budaya baru dalam pelayanan publik berdasarkan sikap "*can do*" dan "*will do*", sikap yang lebih mampu mengelola risiko secara tepat dan mengakhiri budaya saling menyalahkan. Kita membutuhkan budaya akuntabilitas dan etos pelayanan publik baru yang lebih berfokus pada proses. Dalam hal ini, dimensi normatif akuntabilitas etos pelayanan publik pemerintah Kabupaten Gowa harus didasarkan pada tersedianya ruang diskusi publik yang luas, dengan kondisi komunikasi tertentu yang mewarnainya, untuk mendorong munculnya demokrasi yang sesungguhnya tanpa hegemoni tertentu. *Public sphere* demikian diperlukan untuk memenuhi persyaratan komunikasi tertentu sebagai media terbentuknya demokrasi.

Akuntabilitas Dan Etos Pelayanan Publik: Kolonisasi *Lifeworld*

Akuntabilitas merupakan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Ia merupakan produk dari interaksi sosial manusia dalam kehidupan organisasi dan masyarakat, sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk interaksi tersebut sebagai bagian dari kinerja organisasi. Faktor-faktor tersebut seperti kewenangan diskresi, orientasi terhadap perubahan, budaya paternalisme, etika pelayanan, sistem insentif, semangat kerja sama (Dwiyanto, 2006), sistem kultur atau budaya yang sudah tertanam selama puluhan tahun. Bahkan, akarnya mungkin dapat ditelusuri pada sistem pemerintahan kolonial Belanda (Kumorotomo, 2005), sistem insentifnya, sistem pertanggungjawabannya, dan struktur kekuasaannya (Osborne dan Plastrik, 2000), informasi yang relevan dan reliabel (Sulistiyani dan Rosidah, 2003), monitoring dan insentif (LAN dan BPKP, 2000), sedangkan Crosby dan Bryson (2005) mengemukakan faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan adalah faktor yang bersifat internal dan eksternal. Oleh karena itu, motivasi pelayanan publik terdapat di dalam diri individu yang terlepas dari konteksnya. Dalam hal ini Arman mengatakan:

> ...dengan semakin besarnya tugas yang diemban oleh aparatur pemerintah Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya semakin meningkatkan akuntabilitas publik pemerintahan untuk bisa menghadirkan pelayanan yang memuaskan, tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat. Oleh karenanya, tuntutan memiliki aparatur yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi sangatlah besar ... sehingga pekerjaan yang dihasilkan bisa berkualitas dan akuntabel. Karena bila tidak, maka pelayanan yang diberikan dan merupakan kebutuhan setiap masyarakat untuk hidup dilingkungannya tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Sebab, buruknya kinerja pelayanan publik antara lain juga dikarenakan oleh belum terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh

> setiap unit pelayanan yang terdapat di Kabupaten Gowa. Karena kualitas kinerja dalam pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, peran dalam organisasi dan identitas diri merupakan hal yang penting, sebagaimana yang disampaikan Perry dan Vandenabeele (2008), sehingga pejabat publik melihat peran mereka sendiri secara berbeda. Memang, taksonomi identitas telah dikembangkan yang mencirikan berbagai jenis pejabat publik (Brewer *et al*., 2000; Le Grand, 2003). Karenanya tampak bahwa akuntabilitas pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Gowa tidak jelas dalam membedakan hubungan antara akuntabilitas dan opini tentang politisi, peran pemerintah dan pegawai pemerintah, motivasi pribadi dengan kepentingan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Idris Kepala Dinas Pendidikan

> Bagi saya akuntabilitas itu adalah gambaran mengenai apa yang sudah kita capai berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Kita tidak perlu mengambil atau membuat sebuah model baru dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. LAKIP misalnya adalah ketentuan pemerintah mengenai bagaimana kita harus akuntabel ... ya itu sudah cukup. Terlepas apakah hal tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat atau tidak.

Hal ini berbeda secara mendasar dengan jiwa etos pelayanan publik, di mana etos pelayanan publik, berkaitan dengan karakter dari suatu organisasi dan membawa ideologi aspiratif dan normatif yang dimaksudkan untuk mengikat dan memotivasi mereka yang menjadi bagian organisasi tersebut. Dalam hal ini, Habermas ingin agar suatu pandangan tidak hanya sekedar menjelaskan permasalahan dengan sedemikian rupa. Menurut Habermas (2001), seorang politisi seharusnya tidak hanya merenung di ruang perpustakaan lalu memberi saran penyelesaian masalah lewat diskusi. Hal terpenting yang luput dari cara seperti itu, menurut dia, adalah sisi praksis kehidupan. Sayangnya, bagi Habermas, ilmu pengetahuan beserta teori-teorinya sudah terlanjur berada di menara gading dan ketika dilibatkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, manusia malah terkurung oleh belitan rasionalitas yang menjadi landasan teori-teori tersebut. Mereka dibius oleh sebuah daya yang menempatkan tujuan di atas segala-galanya dan dibuatnya percaya bahwa yang mesti diusahakan adalah sarana dan cara mencapai yang seampuh-ampuhnya. Daya itu bernama rasionalitas instrumental, ibu kandung dari teknologi yang sifatnya ideologis.

Memprihatinkan memang, dan itulah sebabnya Habermas mengidealkan suatu kondisi di mana manusia tak saling *sikut* dan *gencet* demi kepentingan dan tujuan instrumental masing-masing. Dia membayangkan masyarakat komunikatif tempat perbedaan kepentingan dibicarakan lewat cara-cara yang elegan dan tidak menutup ruang gerak masing-masing pihak. Itu semua bisa berlangsung di ruang publik yang terbuka dan steril dari tekanan ideologi yang hanya meniupkan angin surga. Agar kondisi itu terwujud di pemerintah Kabupaten Gowa, Habermas (2001) menyampaikan bahwa perlu adanya sebuah teori yang merangkul sisi praksis. Dia tidak mau teori mengandung ideologi yang memukau manusia, dan yang paling penting, teori tersebut mesti mengkritisi dirinya terlebih dahulu sebelum mengarahkan pisau analisisnya kepada objek.

Para penerjemah karya Habermas menekankan kegunaan dan efektifitas dari penyajian sebuah kontrafaktual, idealisasi yang diperlukan oleh model komunikasi ini mungkin saja gagal. Namun, model ideal tersebut memungkinkan adanya sebuah pemahaman yang sistematis dari berbagai macam kegagalan yang mungkin terjadi dan memberikan norma atau standar untuk mengkritiknya (Fultner, 2001: 21). Dalam 'dunia nyata' bukan hanya aspek dari keadaan komunikasi yang ideal gagal tercapai, tetapi juga pihak tertentu dapat secara

strategis merancang dan mempertahankan 'pseudo-konsensus', sebuah simulakrum komunikasi yang ideal, yang kemungkinan hanya untuk mencapai kepentingan mereka sendiri (Fultner, 2001: 22). Saran ini beresonansi dengan interaksi antar *stakeholder* yang tampaknya merupakan simulakrum akuntabilitas sejati (Archel *et al*., 2011). Dapat diperkirakan bahwa upaya untuk memvalidasi secara empiris keberadaan keadaan komunikasi yang ideal akan gagal, terdapat sebuah pengakuan yang jelas bahwa keadaan empiris, bahkan dalam konteks komunikatif terstruktur, akan berbeda secara signifikan dari keadaan komunikasi yang ideal (Fultner, 2001). Memang, kerangka pemikiran Habermas telah dikritik karena terlalu ideal, melibatkan kesulitan konseptual (Cooke, 2003). Habermas (2001) sendiri mengakui dan memprediksi adanya kritik atas kerangka pemikirannya,

> *We know that institutionalized actions as a rule do not correspond to this model of pure communicative action, although we cannot help but always act counterfactually as thought this model were realized. On this inevitable fiction rests the humanity of social intercourse among people who are still human, that is, who have not yet become completely alienated from themselves and their self-objectifications.*

Sebagai seorang teoritisi yang jelas ingin mengubah praktik dan mengeksplorasi cara untuk mencapai perbaikan melalui teori, demikianlah Habermas berkomentar. Pertanyaan yang belum terjawab ialah apakah mungkin untuk merancang keadaan komunikasi yang ideal? Persoalannya adalah semua komunikasi mensyaratkan bahwa setidaknya dua pihak mencapai kesepakatan mengenai suatu hal, atau jika diperlukan, secara diskursif tiba pada suatu kesepakatan. Masalah lain untuk mencapai komunikasi ideal adalah diperlukannya saling pengertian, berarti menciptakan suatu konsensus rasional. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa sebuah konsensus sejati dapat dibedakan dengan konsensus yang palsu melalui pengamatan atas kesepakatan yang dibentuk secara kontrafaktual (Habermas, 2001).

Menurut Unerman (2007), kerangka pemikiran Habermas bertumpu pada berbagai asumsi termasuk imperatif kategoris Kantian yang dapat diringkas sebagai berikut,

> *… actions which are considered acceptable to someone with power, wealth and privilege would only be considered morally acceptable if that person would consider these actions to be equally morally acceptable if they lost their power and wealth, and were looking at (and experiencing) the outcomes of these actions from the position of the least privileged members of society.*

Jika proses berpikir tersebut diterapkan dalam konteks pemerintah Kabupaten Gowa dan kelompok *stakeholder* yang beragam, maka para pengambil keputusan (eksekutif) harus mengadopsi praktik-praktik yang etis, di mana secara empatis mempertimbangkan apakah keputusan mereka akan sama apabila mereka diturunkan dari posisi kekuasaan. Dengan kata lain, keputusan mereka apakah tidak akan berubah misalnya, jika mereka menjadi *stakeholder* yang paling kecil.

Terlepas dari apakah hal tersebut benar terjadi dalam praktik, tidak menjadi masalah. Aspek dari kerangka teoritis ini dapat berguna, setidaknya untuk membuat teori mengenai alasan mengapa keputusan sosial yang tidak bertanggung jawab dapat terjadi; jelas bahwa eksekutif tidak berempati dengan para *stakeholder* mereka yang paling kecil. Lebih lanjut, keadaan komunikasi yang ideal dan ketergantungannya pada etika Kantian dapat digunakan sebagai pembanding dari apa yang dapat terjadi. Memang, konsep keadaan komunikasi yang ideal adalah utopis, menjadikan manifestasinya sangat sulit dalam proses keterlibatan organisasi dengan para *stakeholder*. Namun, kita dapat secara normatif membayangkan potensi keadaan komunikasi yang ideal berkembang dalam praktik.

Kontrol hegemonik atas *stakeholder* merupakan bukti terbaru yang menunjukkan bahwa pelibatan *stakeholder* tidak lain hanya merupakan sebuah simulakrum (Archel *et al*., 2011). Oleh karena itu, upaya

untuk membuat konsep keterlibatan *stakeholder* sebagaimana keadaan komunikasi Habermasian yang ideal memiliki rintangan yang berat untuk dilalui oleh akuntabilitas publik. Model Habermasian ini menyoroti dan menerangi kekurangan dari proses keterlibatan *stakeholder* dan dianggap sebagai alat yang ampuh untuk penelitian akuntansi kritis (Broadbent *et al*., 1991; Power dan Laughlin, 1996).

Terdapat aplikasi yang lebih luas dari berbagai karya Habermas, secara spesifik dalam konteks teori akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi, yang membantu menyediakan sarana untuk menilai di mana kita berada dalam hal keterlibatan *stakeholder* dan hubungannya dengan masyarakat dan untuk membangun jalan ke depan untuk melaksanakan perbaikan baik dalam teknologi keterlibatan *stakeholder* (proses) dan dalam hal rekonsiliasi keinginan masyarakat dan dorongan akuntabilitas *stakeholder* oleh organisasi publik melalui praktik organisasi. Teori kritis Habermas berusaha untuk menyediakan sarana untuk memahami hubungan antara dunia sosial dan teknologi sosial. Secara khusus, Habermas berbicara tentang keterkaitan antara '*lifeworld*', sistem teknis, dan mekanisme *steering* (Barone *et al*., 2013). Dia membawa konsep ini bersama-sama, "*… it is the social reality which gives these systems meaning and attempts to guide their behaviour through 'steering mechanisms*" (Laughlin, 1987). Berkaitan dengan hal ini, Syarifuddin menjelaskan:

> ...diskusi mengenai akuntabilitas dan etos pelayanan publik mengarahkan kita untuk mendefinisikannya sebagai '*a way of life*' yang mencakup seperangkat nilai-nilai yang dipegang oleh individu, bersama dengan proses organisasi dan prosedur yang membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai tersebut. Nilai tersebut terwujud dalam tujuan organisasi yang diarahkan pada kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, etos pelayanan publik merupakan nilai-nilai individu, seperti kejujuran dan altruisme, aturan dan proses organisasi yang menciptakan akuntabilitas dan imparsialitas, dan tujuan untuk meningkatkan kebaikan bersama. Dengan demikian, hal ini menunjukkan sistem kepercayaan yang dapat menjelaskan mengapa individu termotivasi olehnya, bagaimana mereka memberikan pelayanan publik sesuai dengan nilai-nilai tersebut, dan dengan cara apa mereka akan mencapainya.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Habermas memberikan pandangan yang berguna bagi akuntansi melalui metodologi implisitnya yang memungkinkan tidak hanya pemahaman tentang sisi sosial dan teknis, tetapi juga mengenai cara di mana perubahan dan perkembangan dapat berjalan (Laughlin, 1987).

Argumen dari Habermas (1987) ialah bahwa masyarakat modern dapat secara teoritis didefinisikan sebagai campuran dari berbagai konsep *lifeworld*, lembaga dan mekanisme *steering*, dan sistem (Broadbent *et al*., 1991). Sistem teknis dapat dilihat sebagai ekspresi dalam bentuk organisasi fungsional, dapat didefinisikan, dan nyata (Broadbent *et al*., 1991). Seiring dengan berkembangnya masyarakat, Habermas menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi (tindakan komunikatif) dan diskursif juga berkembang, di mana masyarakat dan organisasi (dan sistem mereka) menjadi lebih mampu melakukan diskusi (Broadbent *et al*., 1991). Dengan kata lain, masyarakat (*lifeworld*), lembaga sosial dan mekanisme *steering* dan sistem sosial seharusnya berkembang melalui evolusi menggunakan proses diskursif yang ditetapkan (yaitu keadaan komunikasi yang ideal).

Evolusi yang didorong oleh keadaan komunikasi yang ideal ini seharusnya mengarah pada perubahan dalam *lifeworld* sosial, skema interpretatif (*lifeworld* mikro) dan selanjutnya menimbulkan perubahan pada lembaga dan sistem *steering* (di tingkat masyarakat), serta pada desain pola dasar dan sub-sistem (di tingkat *steering* dan organisasi). Dalam konteks model konseptual preskriptif ini, keadaan komunikasi yang ideal bermetamorfosis dari utopis yang

ideal menjadi mekanisme perubahan yang kuat dan sarana untuk mencapai persesuaian antara nilai sosial, lembaga sosial, mekanisme dan organisasi *steering* (termasuk mekanisme akuntabilitas mereka).

Sementara itu, ketika kemampuan diskursif dan komunikatif semakin berkembang, terdapat kemungkinan bahwa diferensiasi akan semakin meningkat antara *lifeworld*, sistem teknis dan mekanisme *steering*, yang berakibat mengarahkan organisasi. Sementara itu, *steering* dalam ruang organisasi dapat berkembang hingga menjadi di luar kendali (Broadbent *et al*., 1991) dan dapat menjadi terpisah dari *lifeworld* dan konteks sosial, serta sistem ideal yang ada. Kondisi ini menggambarkan suatu keadaan terciptanya kolonisasi yaitu konteks di mana organisasi bertindak untuk mendominasi dan mengkolonisasi *lifeworld* melalui penciptaan sistem kolonisasi. Keadaan seperti ini mencerminkan hasil yang berlawanan dari penyesuaian hubungan yang seharusnya terjadi melalui proses komunikatif diskursif.

Berdasarkan kerangka pemikiran berbasis Habermasian ini, kita dapat mengembangkan sebuah rasionalitas keterlibatan *stakeholder* di pemerintah Kabupaten Gowa, dengan menggabungkan gagasan keterlibatan *stakeholder* sebagai keadaan komunikasi ideal yang potensial dan mengkonseptualisasikan sistem *steering* dan *lifeworld*. Meskipun akuntansi tidak pernah secara khusus disebutkan oleh Habermas (Laughlin, 1987), namun teorinya memberikan pandangan yang berguna dalam pemahaman akuntansi dan hubungannya dengan masyarakat, serta sebagai sarana penting dalam mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan akuntansi. Keterlibatan *stakeholder* dalam pandangan Habermasian, dapat dilihat sebagai bentuk akuntabilitas dan komunikasi langsung antara organisasi dengan kelompok *stakeholder* mereka. Dalam konteks teori Habermasian, keterlibatan *stakeholder* dapat dijelaskan pada tingkat sistem. Dengan kata lain, keterlibatan *stakeholder* dapat diartikan sebagai mekanisme akuntabilitas organisasi dari sistem yang diarahkan melalui mekanisme *steering* sosial, yang kemudian diinterpretasikan secara organisasional.

Saat ini akuntabilitas pemerintah Kabupaten Gowa masih jauh dari situasi lingkungan ideal berkaitan dengan akuntabilitas etos pelayanan publik, karena banyaknya panduan *mandatory* dari pemerintah pusat, sehingga sulit untuk menciptakan akuntabilitas sukarela yang melibatkan *stakeholder*. Dalam konteks keterlibatan *stakeholder*, seharusnya tersedia *lifeworld* yang mengarahkan semua elemen-elemen *stakeholder* untuk terlibat. *Lifeworld* ini seharusnya merupakan seperangkat pengaturan diskursif yang dapat memberikan ruang bagi suara dari partisipan tertentu (misalnya masyarakat kecil). *Lifeworld* ini, selanjutnya, akan menjadi *lifeworld* kontraktual yang timbul dari komunikasi yang ideal. *Lifeworld* ideal tersebut kemudian dapat membuat seperangkat sistem baru yaitu mekanisme *steering* yang mengarahkan keterlibatan *stakeholder*.

Tidak seperti akuntabilitas privat, akuntabilitas pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Gowa bersifat *mandatory* dan kaku, serta masih kental nuansa rasionalitas instrumental. Seperti yang diungkapkan Karim Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah:

> Kami membuat pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang di atur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bagi kami aturan itu sudah cukup jelas, dan karenanya tidak diperlukan bentuk akuntabilitas tambahan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan ungkapan di atas, akuntabilitas dilaksanakan hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan regulasi saja dan mereka (aparat pemerintahan) memandang bahwa hal tersebut sudah cukup untuk sebuah akuntabilitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pemerintah Kabupaten Gowa tidak dijalankan secara sukarela, meskipun berdasarkan diskursus di atas, organisasi publik didorong untuk mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* dalam

hal ini masyarakat luas, namun keterlibatan *stakeholder* secara khusus tetap saja tidak ditekankan. Lebih lanjut, upaya untuk menanamkan akuntabilitas *stakeholder* dalam aturan di pemerintah Kabupaten Gowa tampak tidak berkembang sebagaimana konsep ruang publik yang diusung Habermas. Seperti yang dikemukakan Syarifuddin:

> Bagi saya, *profesional accountability demands that professionals in the public service should balance the code of their professions with the larger context of protecting the public interest*. Contoh Di Rumah Sakit Wahidin Makassar pada sekitar bulan Maret tahun 2015, para dokter mogok melawan pemerintah dengan tidak memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat … karena institusi telah mengatur skala honorarium praktek para dokter. Menurut saya, hal ini bertentangan dengan kepentingan umum dan bisa dikatakan tidak akuntabel … atau contoh lain pada RS Haji sekitar bulan April 2015, para pelayan medis mogok melayani pasien karena aspirasi mereka tidak ditampung oleh kepala rumah sakit … dan mereka meminta direktur diturunkan...

Sehubungan dengan kondisi di atas, tampak bahwa jika proses keterlibatan *stakeholder* di pemerintah Kabupaten Gowa tidak dipertimbangkan akan menyebabkan reaksi keras dari publik yang sadar akuntabilitas. Kondisi di atas merupakan suatu gambaran *snapshot* dalam ruang mikro (yaitu rumah sakit) yang menyadarkan kita bahwa masyarakat (dalam hal ini para medis) menginginkan adanya akuntabilitas proses ketika pimpinan menghasilkan sebuah kebijakan. Absennya sebuah akuntabilitas mempengaruhi ruang makro yaitu pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pasien, yang dapat berdampak fatal bagi pelayanan publik secara keseluruhan.

Selanjutnya, bagian ini akan mengekspos elemen yang sebenarnya dari konteks sosial (*lifeworld*) dan proses yang memandu sistem (*steering mechanism*) sehingga menimbulkan aspek *tangible* yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam kasus pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan publik, setidaknya untuk kelompok *stakeholder* tertentu, dapat dilihat sebagai situasi krisis dan teori Habermasian sangat tepat digunakan pada masa krisis (Habermas, 1976). Lebih lanjut, terdapat tuntutan kepada pemerintah untuk menghasilkan laporan kinerja dan menyampaikan akuntabilitas kepada *stakeholder* yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memang, tekanan sosial pada pemerintah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa *lifeworld* sosial menuntut adanya tambahan pelaporan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Tampaknya dengan mengacu pada ide-ide Habermasian, saat ini *steering* masih lemah ketika terkait dengan keterlibatan *stakeholder*.

Oleh karenanya, *peer pressure*, yaitu tekanan mimetik pada pemerintah untuk meniru praktik terbaik berkaitan dengan keterlibatan *stakeholder*, menjadi sesuatu yang penting sebab pedoman wajib pemerintah pusat mengenai praktik pelaporan telah mengkolonisasi praktik akuntabilitas itu sendiri. Jadi, dalam hal ini diperlukan suatu usaha agar pemerintah lepas dari "kerangkeng besi" aturan yang ada sesuai pandangan Webber.

Lifeworld mengenai keterlibatan *stakeholder* bersifat kompleks, namun terdapat kemungkinan untuk membuat beberapa saran mengenai pandangan masyarakat terhadap keterlibatan *stakeholder* dalam kasus yang diteliti. Analisis atas kasus akuntabilitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan pengamatan atas artikel, media dan objek penelitian menunjukkan bahwa terdapat ekspektasi masyarakat di mana mereka seharusnya terlibat sebagai *stakeholder* utama.

Perhatian utama Habermas ialah terdapat dominasi teknis atas *lifeworld* sosial dan hal ini dapat berlaku dalam akuntansi sebagai bidang teknis keahlian dan kebijakan yang sedang berkembang (Laughlin, 1987). Dalam kasus akuntabilitas pelayanan publik tampak bahwa kelangkaan mekanis-

me *steering* yang berkaitan secara khusus dengan keterlibatan *stakeholder* telah membuka ruang yang kemudian dikolonisasi oleh diskursus hegemoni pemerintah.

Dalam istilah Habermasian, pemerintah Kabupaten Gowa telah menciptakan interpretasi mereka sendiri atas mekanisme *steering* berdasarkan keuntungan finansial dan kesejahteraan mereka semata, sehingga mereka mengkolonisasi setiap diskursus dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, terjadi diferensiasi dalam akuntabilitas dan etos pelayanan publik baik dari sistem keterlibatan *stakeholder* yang tidak berkembang dan tidak memadai, maupun dari konteks *lifeworld* sosial di mana mereka beroperasi.

Studi ini mencoba menawarkan solusi untuk mendorong keterbukaan komunikasi di pemerintah Kabupaten Gowa dengan mengedepankan akuntabilitas proses daripada akuntabilitas *outcome*. Studi ini mengemukakan gagasan bahwa dampak jangka pendek terkait proses ini mencerminkan sejauh mana akuntabilitas anggaran dapat menjadi sarana baik untuk mencapai tujuan akhir itu sendiri, dengan membuka ruang yang sebelumnya tertutup kepada masyarakat umum. Dalam hal ini, akuntabilitas *outcome* atas belanja publik tampak tidak mampu menjelaskan perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan. Demikian pula, inisiatif akuntabilitas *outcome* tidak dapat mengukur siapa yang bertanggung jawab atas pelayanan dan hasil pembangunan. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat dalam *outcome* sebuah program.

SIMPULAN

Akuntabilitas yang dilihat dari kualitas pelaksanaan pelayanan telah terkikis maknanya. Artinya, pihak pemberi layanan belum dapat mempertanggungjawabkan pelayanan yang dilakukannya dengan cukup baik, seperti berusaha menghasilkan kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karenanya, proses pertanggungjawaban yang dimiliki masih butuh pembenahan, agar aparatur pemberi layanan dapat memiliki tanggung jawab publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik atas pelayanan nampak mengabaikan ruang diskusi publik yang membuat kesetaraan dalam menentukan apa yang dibutuhkan dan apa yang diberikan pada masyarakat.

Lifeworld keterlibatan *stakeholder* bersifat kompleks, namun terdapat kemungkinan untuk membuat beberapa terobosan untuk melibatkan *stakeholder*. Analisis atas kasus akuntabilitas pelayanan publik menunjukkan bahwa terdapat ekspektasi masyarakat di mana mereka seharusnya terlibat sebagai *stakeholder* utama.

Hal yang dominan menjelaskan akuntabilitas pelayanan publik adalah etos pelayanan. Situasi yang tercipta menunjukkan bahwa masih sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari aparatur pelaksana pelayanan publik untuk bisa mempertanggung jawabkan pekerjaan yang telah dibebankan kepada mereka. Dengan tingkat kesadaran yang baik, aparatur akan berusaha melaksanakan pekerjaan pelayanan publik yang dibebankan dengan sesungguhnya. Namun sebaliknya, apabila tingkat kesadaran yang dimiliki rendah maka aparatur akan melaksanakan tugas pelayanan dengan sesukanya saja. Selain itu, rasa sadar yang tinggi akan mengingatkan aparatur pada tugas dan kewajibannya yang dapat melahirkan akuntabilitas pelayanan kepada publik. Kisah memudarnya *public sphere* merupakan konsep yang berharga guna memahami proses sosial di mana komunikasi terbuka atas akuntabilitas menjadi salah satu kekuatan dalam konstelasi kekuatan yang menentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ackroyd, S., J. Hughes, dan K. Soothill. 1989. Public Sector Services and Their Management. *Journal of Management Studies* 26 (6): 603–19.

Aldridge, R. dan G. Stoker. 2002. *Public Value Management: Advancing Public Service Ethos*. UK: New Local Government Network. London.

Anoraga, P. 2009. *Psikologi Kerja*. Rineka Cipta. Jakarta.

Archel, P., J. Husillos, dan C. Spence. 2011. The Institutionalisation of Unaccountability: Loading the Dice of Corporate Social Responsibility Discourse. *Accounting, Organizations and Society* 36: 327–343.

Audit Commission. 2002. *Recruitment and Retention*. Public Sector National Report. Audit Commission. UK. London.

Bach, S., I. Kessler, dan P. Heron. 2007. The Consequences of Assistant Roles in the Public Services: Degradation or Empowerment? *Human Relations* 60(9): 1267–92

Barone E., N. Ranamagar, dan J. F. Solomon. 2013. A Habermasian Model of Stakeholder (Non) Engagement and Corporate (Ir) Responsibility Reporting. *Accounting Forum* 37(3): 163-181.

Brereton, M. dan M. Temple. 1999. The New Public Service Ethos: An Ethical Environment for Governance. *Public Administration* 77(3): 455–74.

Brewer, G. A., S. C. Selden, dan R. L. Facer. 2000. Individual Conceptions of Public Service Motivation. *Public Administration Review* 60(3): 254–65.

Broadbent, J. dan R. Laughlin. 2003. Control and Legitimation in Government Accountability Processes: The Private Finance Initiative in the UK. *Critical Perspectives on Accounting* 14: 23-48.

_____, _____, dan S. Read. 1991. Recent Financial and Administrative Changes in the NHS: A Critical Theory Analysis. *Critical Perspectives on Accounting* 2: 1–29.

Burrell, G. dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis*. Heinemann Educational Books Ltd. London.

Chapman, R. A. 1993. *Ethics in public service*. Edinburgh, UK: Univ. Press. Edinburgh.

_____. 2000. *Ethics in Public Service for the New Millennium*. Aldershot, UK: Ashgate Publishing.

Chua, W. F. 1986. Radical Development in Accounting Thought. *The Accounting Review* 61(4): 601-632

Clarke, J., S. Gewirtz, dan E. McLaughlin. 2000. *New Managerialism, New Welfare?* UK: Open Univ. Press. Buckingham.

Cooke, M. 2003. The Weaknesses of Strong Intersubjectivism: Habermas's Conception of Justice. *European Journal of Political Theory* 2: 281-305

Crosby, B. dan J. Bryson. 2005. A Leadership Framework for Cross-Sector Collaboration. *Public Management Review* 7(2): 177-201.

Day, P. dan R. Klein. 1987. *Accountabilities: Five Public Services*. Tavistock. London.

Doig, A. dan J. Wilson. 1998. What Price New Public Management? *Political Quarterly* 69(3): 267–80.

Dwiyanto, A. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Exworthy, M. dan S. Halford. 1999. *Professionals and the New Managerialism*., UK: Open Univ. Press. Buckingham.

Ferlie, E., A. Pettigrew, L. Ashburner, dan L. Fitzgerald. 1996. *The New Public Management in Action*. UK: Oxford Univ. Press. Oxford.

Foster, P. dan P. Wilding. 2000. Whither Welfare Professionalism? *Social Policy and Administration* 34(2): 143–59.

Frederickson, G. H. dan R. K. Ghere. 2005. *Ethics in Public Management*. New York: M.E. Sharpe.

Friedson, E. 1994. *Professionalism Reborn*., UK: Polity Press. Cambridge.

Fultner, B. 2001. Translator's introduction. dalam J. Habermas. *On The Pragmatics of Social Interaction: Preliminary Studies in the Theory of Communicative Action*. Ed., UK: Polity Press in association with Blackwell Publishing, Ltd. Cambridge.

Funnell, W. 2003. Enduring Fundamentals: Constitutional Accountability and Auditors-General in the Reluctant State. *Critical Perspectives on Accounting* 14: 107-132.

Goddard, A. 2005. Accounting and NPM in UK Local Government - Contributions toward Governance and Accountability. *Financial Accountability and Management* 21(2): 191-214.

Habermas, J. 1976. *Legitimation crisis*. Trans. T. McCarthy., UK: Heinemann. London.

_____. 1984. *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and Rationalisation of Society*. Trans. T. McCarthy. UK: Heinemann. London.

_____. 1987. *The Theory of Communicative Action, Vol. 2: The Critique of Functional Reason*. Trans. T. McCarthy. UK: Heinemann. London.

_____. 2001. *On the pragmatics of social interaction: Preliminary studies in the theory of communicative action*. Trans. B. Fultner., UK: Polity Press in association with Blackwell Publishing, Ltd. Cambridge.

Hebson, G., D. Grimshaw, dan M. Marchington. 2003. Ppps and the Changing Public Sector Ethos: Case Study Evidence from the Health and Local Authority Sectors. *Work, Employment and Society* 17(3): 481–501.

Henkel, M. 1991. The New Evaluative State. *Public Administration* 69: 121–36.

Hood, C. 1991. A Public Management for All Seasons? *Public Administration* 69(1): 3-19.

Horton, S. 2008. History and Persistence of an Ideal. dalam J. L. Perry dan A. Hondeghem. *Motivation in Public Management: The Call of Public Service*. Ed., UK: Oxford Univ. Press. Oxford.

House of Commons Public Administration Select Committee, 2002

Kristensen J. K., W. S. Groszyk, dan B. Bühler. 2002. Outcome focused Management and Budgeting. *OECD Journal on Budgeting* 1(4): 7-34.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta

LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*.: Lembaga Administrasi Negara. Jakarta

Lane, J. 2000. *New Public Management*. London, UK: Routledge.

Laughlin, R. C. 1987. Accounting Systems in Organisational Context: A Case for Critical Theory. *Accounting, Organizations and Society* 12(5): 479–502.

_____. 1990. A Model of Financial Accountability and the Church of England. *Financial Accountability & Management* 6(2).

Lawton, A. 1998. *Ethical Management for the Public Services*. UK: Open Univ. Press. Buckingham.

Le Grand, J. 2003. *Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns and Queens*. UK: Oxford Univ. Press. Oxford.

Lynn, L E., Jr. 2006. *Public Management: Old and New*. Routledge. New York.

Maesschalck, J. 2004. The Impact of New Public Management Reforms On Public Servants' Ethics: Towards A Theory. *Public Administration* 82(2) 465–89.

_____., Z. Van der Wal, dan L. Huberts. 2008. Public Service Motivation and Ethical Conduct. dalam J. L. Perry dan A. Hondeghem. *Motivation in Public Management: The Call of Public Services*. Ed. UK: Oxford Univ. Press. Oxford.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Marsden, D. 2004. The Role of Performance Related Pay in Renegotiating of the "Effort Bargain": The Case of the British Public Service. *Industrial Labor Relations Review* 57(3): 350–70.

Miller, D. Y. dan W. N. Dunn. 2006. *A Critical Theory of New Public Management*. University of Pittsburgh.

Needham, C. 2006. Customer Care and Public Service Ethos. *Public Administration* 84(4): 845–60.

Neuman, W.L. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Mass: Allyn and Bacon. Boston.

Northcote, Sir S. dan Sir C. Trevelyan. 1854. *Report on the Organisation of the Permanent Civil Service*. UK: Her Majesty's Stationery Office. London.

O'Faircheallaigh, C, J. Wanna, and P. Weller. 1999. *Public Sector Management in Australia: New Challenges, New Directions*.: Macmillan Education. South Yarra, Australia.

O'Toole, B. 1990. T.H. Green and the Ethics of Senior Officials in the British Central Government. *Public Administration* 68: 337–52.

____. 1993. The Loss of Purity: The Corruption of Public Service in Britain. *Public Policy and Administration* 8: 1–6.

Osborne, D. dan P. Plastrik. 2000. *Memangkas Birokrasi*.: PPM. Jakarta.

Painter, M. 2000. Contracting, the Enterprise Culture and Public Sector Ethics. dalam R. A. Chapman. *Ethics in Public Service for the New Millennium*. Ed., UK: Ashgate Publishing. Aldershot.

Parker, L. dan G. Gould. 1999. Changing Public Sector Accountability: Critiquing New Directions. *Accounting Forum* 23(2) 109-135.

Perry, J. L. dan W. Vandenabeele. 2008. Behavioral Dynamics: Institutions, Identities, and Selfregulation. dalam J. L. Perry dan A. Hondeghem. *Motivation in Public Management: The Call of Public Services*. Ed., UK: Oxford Univ. Press. Oxford.

Peters, J. D. 1993. Distrust of Representation: Habermas on the Public Sphere. *Media, Culture and Society* 15(4).

Plant, R. 2003. A Public Service Ethic and Political Accountability. *Parliamentary Affairs* 56: 560–79.

Pollitt, C. dan G. Bouckaert. 2000. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*., UK: Oxford Univ. Press. Oxford.

Powell, M. J., D. M. Brock, dan B. Hinings. 1999. The Changing Professional Organization. dalam D. M. Brock, B. Hinings, and M. J. Powell. *Restructuring the Professional: Accounting Health Care and Law*. Ed., UK: Routledge. London.

Power, M. 1997. *The Audit Society - Rituals of Verification*., UK: Oxford Univ. Press. Oxford.

____, dan R. Laughlin. 1996. Habermas, Law and Accounting. *Accounting, Organizations and Society* 21(5): 441–465.

Pratchett, L. dan M. Wingfield. 1994. *The Public Service Ethos in Local Government: A Research Report*., UK: Commission for Local Democracy with Institute of Chartered Secretaries and Administrators. London.

_____. dan _____. 1996. Petty Bureaucracy and Woolly-Minded Liberalism? The Changing Ethos of Local Government Officers. *Public Administration* 74: 639–56.

Randle, K. dan N. Brady. 1997. Managerialism and Professionalism in the 'Cinderella Service'. *Journal of Vocational Education and Training*. 49(1): 121–39.

Rhodes, R. 1994. The Hollowing Out Of the State: The Changing Nature of the Public Service in Britain. *The Political Quarterly* 65(2): 138–51.

Roberts, J. dan R. Scapens. 1985. Accounting Systems and Systems of Accountability - Understanding Accounting Practices in their Organisational Context. *Accounting, Organisations and Society* 10(4): 443-456.

Schiavo-Campo, S. dan Tomasi, D. 1999. *Managing Government Expenditure*. Asia Development Bank. Manila.

Seddon, T. 1996. Pay, *Professionalism and Politics: Changing Teachers? Changing Education?*, Australia: Australian Council for Educational Research. Melbourne.

Shah, A. dan C. Shen. 2007. A Primer on Performance Budgeting. dalam A. Shah. *Budgeting and Budgetary Institutions*. Ed. Chapter 5: 137-178., DC: World Bank. Washington.

Sinamo, J. 2005. *Delapan Etos Kerja Profesional*.: Grafika Mardi Yuana. Bogor

Sinclair, A. 1995. The Chameleon of Accountability. *Accounting Organizations and Society* 20: 219–37.

Stone, D. 2002. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. W.W. Norton. New York.

Sulistiyani, A. T. dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.: Graha Ilmu. Yogyakarta.

Thomas, R. 1989. *The British Philosophy of Administration: A Comparison of British and American Ideas 1900–1939*., UK: Centre for Business and Public Sector Ethics. Cambridge.

Unerman, J. 2007. Organisational Motives for Stakeholder Engagement and Dialogue. dalam J. Unerman, J. Bebbington, dan B. O'Dwyer. *Sustainability Accounting and Accountability*. Ed. UK: Routledge.

_____, dan M. Bennett. 2004. Increased Stakeholder Dialogue and the Internet: Towards Greater Corporate Accountability or Reinforcing Capitalist Hegemony? *Accounting, Organisations and Society* 29: 685–707.

Van der Wal, Z., G. de Graaf, dan K. Lasthuizen. 2008. What's Valued Most? Similarities and Differences between the Organizational Values of the Public and Private Sector. *Public Administration* 86(2): 465–82.

Vandenabeele, W., S. Scheepers, dan A. Hondeghem. 2006. Public Service Motivation in an International Comparative Perspective: The UK and Germany. *Public Policy and Administration* 21(1): 13–31.

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan **ISSN 1411-0393**
Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI PERTUMBUHAN, PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Muhamad Umar Mai
umar.mai@polban.ac.id
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the influence of corporate governance mechanisms to the value of the firm through growth, profitability and dividend policy. The population of this study are all of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2000-2012. The sampling method used in this study was purposive sampling, with the criteria that the company distributed cash dividends and have an independent member of the board of trustees. This study proves that the growth of the company affecting the profitability and the firmsvalue, despite the fact that the company reduced its dividend payments. Sobel's test result shows that firm's growth effect to firm value mediating by profitability significantly, represented by return on equity. Corporate governance mechanisms plays an important role in preventing unproductively growth of companies that have reached the stage of maturity. The intensification of the firms value, also influenced by its ability to increase the profitability and dividend payments. Institutional ownership and board size as a proxy for corporate governance mechanism plays an important part to encourage companies to improve their return on equity, while the independent board persuade companies to increase the dividend payments. In this study the board size variable has shown a very important role on the increase of profitability, dividend payments, and therealizations of the value of the company.

Key words: Corporate governance mechanism, growth, return on equity, dividend payout ratio, and value of the firm.

ABSRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap nilai perusahaan melalui pertumbuhan, profitabilitas dan kebijakan dividen. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode tahun 2000-2012. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa perusahaan tersebut membagikan dividen tunai dan memiliki anggota komisaris independen. Penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, walaupun pada saat itu perusahaan mengurangi pembayaran dividennya. Hasil Sobel *test* menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan terhadap nilai perusahaan secara siginifikan dimediasi profitabilitas yang diproksi *return on equity*. Mekanisme *corporate governance* berperan dalam mencegah pertumbuhan yang tidak produktif dari perusahaan-perusahaan yang telah mencapai tahap *maturity*. Peningkatan nilai perusahaan selain dipengaruhi pertumbuhan, juga dipengaruhi oleh kemampuannya dalam meningkatkan profitabilitas dan pembayaran dividen. Variabel *institutional ownership* dan *board size* sebagai proksi mekanisme *corporate governance* berperan mendorong perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Sedangkan *board independent* mendorong perusahaan untuk meningkatkan pembayaran dividen. *Board Size* pada penelitian ini telah menunjukkan peranannya yang sangat penting. Variabel *board size* sangat berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas, pembayaran dividen, dan capaian nilai perusahaan.

Kata kunci: Mekanisme corporate governance, pertumbuhan, return on equity, dividend payout ratio, dan nilai perusahaan.

PENDAHULUAN

Secara normatif tujuan pengelolaan keuangan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang tercermin dari harga sahamnya di pasar modal (Salvatore, 2005; Fachrudin, 2011). Meningkatnya nilai perusahaan adalah sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi, maka akan diikuti dengan tingginya tingkat kemakmuran para pemegang saham (Bringham dan Gapensi, 2006). Manajemen keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil manajer perusahaan, antara lain keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan, dengan demikian keputusan-keputusan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya (Qureshi, 2006).

Kajian empiris tentang hubungan antara implementasi fungsi-fungsi manajemen keuangan dan capaian nilai perusahaan, sampai saat ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Memon *et al.* (2012) dan Kouser *et al*. (2012) membuktikan bahwa keputusan tambahan investasi (*growth*) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, penelitian Priadharma (2011) dan Setiani (2013) menemukan bukti bahwa keputusan tambahan investasi atau pertumbuhan perusahaan berpengaruh negati terhadap nilai perusahaan. Sanjaya (2009) membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan (*growth*) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*, sedangkan hasil penelitian Puspita (2009) membuktikan bahwa *growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*. Penelitian Marpaung dan Hadianto (2009) dan Sulistiyowati *et al*. (2010) tidak menemukan cukup bukti adanya pengaruh pertumbuhan terhadap kebijakan dividen.

Kebijakan dividen merupakan topik yang banyak diperdebatkan dalam literatur keuangan dan masih menempati tempat terkemuka (Alzomaia dan Al-Khadhiri, 2013). Berbagai hasil penelitian telah banyak menyumbangkan pemikiran teoretis dan menyediakan bukti empiris berkenaan dengan faktor penentu dari kebijakan dividen. Namun demikian, isu tentang kebijakan dividen, bagaimanapun, belum terpecahkan (Naceur *et al*., 2007). Uwuigbe *et al*. (2012) mengungkapkan bahwa kebijakan dividen adalah suatu hal yang paling sulit untuk dijelaskan dan merupakan tantangan bagi para ahli ekonomi dan keuangan. Beberapa penelitian kembali dilakukan, namun tetap hanya menghasilkan teori umum dividen, menyisakan banyak hal yang tidak terjelaskan, dan praktek dividen di perusahaan bervariasi dari waktu ke waktu, diantara perusahaan, serta perbedaan ini melintasi antar perbatasan negara (Arshad *et al*., 2013).

Berkaitan dengan implementasi fungsi-fungsi pengelolaan keuangan perusahaan, *agency theory* menjelaskan bahwa manajer sebagai agen dari pemilik perusahaan cenderung berperilaku oportunistik. Jensen (1986) dalam Murhadi (2008) berargumen bahwa manajer pada perusahaan publik memiliki insentif untuk melakukan ekspansi perusahaan melebihi ukuran optimal, dan cenderung ekspansi itu dilakukan pada proyek-proyek yang memiliki *net present value* negatif. Kondisi *overinvestment* ini dilakukan dengan menggunakan dana internal yang dihasilkan oleh perusahaan dalam bentuk *free cash flow* (Pradana dan Sanjaya, 2014). Secara alami, ketika perusahaan telah mencapai tahapan *maturity*, maka akan semakin banyak *free cash flow* yang dimiliki dan kesempatan untuk tumbuh relatif kecil, kondisi ini akan mendorong meningkatnya masalah *free cash flow* (Michaely dan Robert, 2006).

Jiraporn dan Ning (2006) mengungkapkan bahwa para manajer cenderung menahan *free cash flow* yang diperoleh perusahaan dan enggan untuk membayar dividen. Selanjutnya, Jiraporn dan Ning (2006) menjelaskan bahwa para manajer cenderung mengkonsumsi lebih banyak penghasilan tambahan, membangun perusahaan seperti sebuah kerajaan, dan meng-

investasikan *free cash flow* dalam proyek-proyek yang hanya meningkatkan gengsi pribadi mereka, tanpa memberikan manfaat bagi para pemegang saham atau tidak meningkatkan nilai perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa *agency problem* dapat diatasi dengan melakukan beberapa mekanisme kontrol (Bathala, *et al*., 1994; dalam Darmono dan Bachtiar 2015), dua diantaranya adalah: (1) Meningkatkan moni toring melalui *institutional ownership*, (2). Meningkatkan *dividend payout ratio*, sehingga mengakibatkan tidak tersedia cukup banyak *free cash flow* di perusahaan, dengan demikian manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai tambahan investasinya.

Rancangan tentang mekanisme pengawasan korporasi yang efektif agar manajer bertindak untuk kepentingan terbaik bagi pemegang saham telah menjadi perhatian utama pada wilayah kajian *corporate governance* dan keuangan (Allen dan Gale, 2001). Berlanjutnya penelitian pada teori keagenan adalah usaha untuk merancang suatu kerangka kerja yang tepat guna mengontrol itu (Bonazzi dan Islam, 2007). *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG, 2007) mendefinisikan *corporate governance* adalah proses, struktur, dan mekanisme yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Mengacu pada hasil kajian teoretis dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme *corporate governance* berperan mengendalikan manajer perusahaan dalam mengambil keputusan investasi, penggunaan laba, dan kebijakan dividen sebagai upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan?

Berdasarkan pada uraian di atas, dipahami bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai melalui implementasi mekanisme *corporate governance* yang akan mengendalikan fungsi-fungsi manajemen keuangan yang dijalankan oleh manajer perusahaan. Keputusan investasi yang menguntungkan dapat meningkatkan capaian profitabilitas, dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, mekanisme *corporate governance* dapat mengendalikan inflementasi fungsi investasi dan kebijakan dividen secara optimal yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat dibangun suatu rerangka konseptual yang ditunjukkan pada Gambar 1.

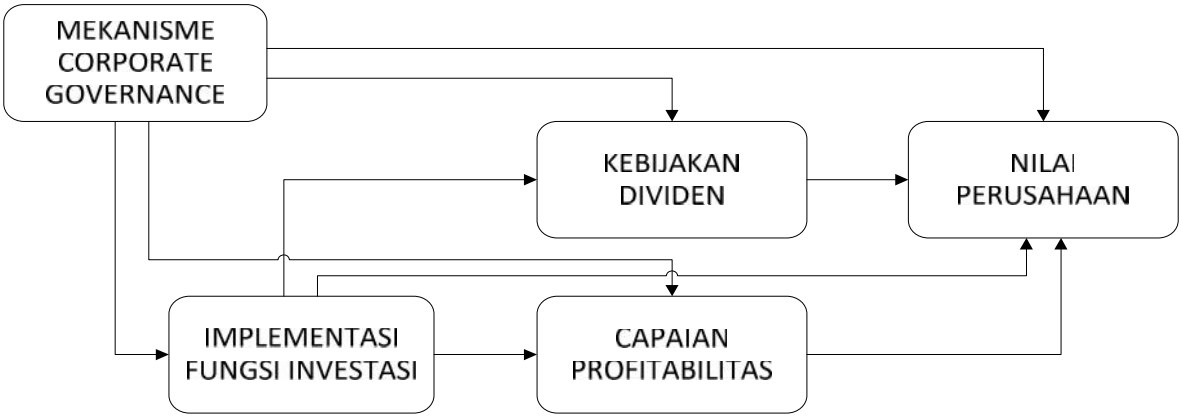

Sumber: Hasil kajian teoretis yang dikembangkan

Gambar 1
Rerangka Konseptual

Selanjutnya, agar rerangka konseptual tersebut dapat diuji secara empiris, maka konsep-konsep variabel yang ada pada model diperlukan beberapa proksi variabel yang bersifat operasional. Mekanisme *corporate governance* diproksi dengan tiga variabel yaitu *institutional ownership* (INOWN); *board independent* (BINDT); dan *board size* (BSIZE). Implementasi fungsi investasi diprosi variabel *growth* (GRWH). Profitabilitas diproksi variabel *return on equity* (ROE). Kebijakan dividen diproksi variabel *dividend payout ratio* (DPR). Nilai perusahaan diproksi dengan variabel *Tobin's Q* (TBNSQ).

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Pengaruh *institutional ownership*, *board independent* dan *board size* terhadap *growth* (2) Pengaruh *institutional ownership*, *board size* dan *growth* terhadap *return on equity*, (3) Pengaruh *board independent* dan *growth* terhadap *dividend payout ratio*, 4) Pengaruh *board size*, *growth*, *return on equity* dan *dividend payout ratio* terhadap *Tobin's Q*.

TINJAUAN TEORETIS

Corporate Governance Mechanism

OECD (2004) mengembangkan prinsip–prinsip *corporate governance* yang dikenal sebagai *The OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* meliputi: (1) *Transparency*, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, (2) *Accountability*, kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perusahaan, (3) *Responsibility*, kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku, (4) *Independency*, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, (5) *Fairness*, perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, 2007) mendefinisikan *corporate governance* adalah proses, struktur, dan mekanisme yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Al-Baidhani (2014) mengungkapkan bahwa *corporate governance* telah menjadi topik yang paling banyak dibahas dalam dunia bisnis modern saat ini. Kegagalan perusahaan yang spektakuler, seperti yang dialami World Com, Polly Peck International, dan Baring Bank, telah menjadi isu sentral. Pemerintah dan pihak-pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya untuk merancang dan menerapkan suatu aturan yang ketat guna memastikan kelancaran organisasi perusahaan, dan mencegah kegagalan tersebut.

Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Growth*

Agency theory menjelaskan bahwa manajer pada perusahaan publik memiliki insentif untuk melakukan ekspansi perusahaan melebihi ukuran optimal, dan ekspansi itu cenderung dilakukan pada proyek investasi dengan *net present value* negatif. Investor institusional adalah investor *sophisticated* sehingga dapat menjalankan fungsi monitoring secara lebih efektif dalam mencegah tindakan manipulasi manajer (Cornett *et al*., 2009; Shah *et al*., 2009). Investor institusional sebagai bagian dari mekanisme *corporate governance* diyakini akan mampu mendorong manajer untuk menanamkan dana perusahaan hanya pada proyek-proyek investasi yang menguntungkan. Berdasarkan telaah pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_1a : *Institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *growth*.

Pengaruh *Boards Independent* terhadap *Growth*

Sejalan dengan Al-Baidhani (2014, ke-

putusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui keputusan Direksi PT BEJ No. Kep-339,/ BEJ/07-2001 butir C tentang *boards governance*. Keputusan tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai *good corporate governance*, perusahaan harus memiliki jumlah anggota dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan. Keputusan ini masih berlaku sampai sekarang. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2012) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan bebas dari hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. *Board independent* sebagai bagian dari mekanisme *corporate governance* diyakini mampu mengendalikan manajer dalam menjalankan ekspansi perusahaan secara tepat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_{1b} : *Boards independent* berpengaruh positif terhadap *growth*.

Pengaruh *Board Size* terhadap *Growth*

Bennedsen *et al*. (2008) menjelaskan bahwa besarnya ukuran dewan komisaris (*board size*) sangat berhubungan dengan berbagai karakteristik suatu perusahaan, seperti ukuran perusahaan (*total asset*), umur perusahaan, dan afiliasi industri. Oleh karena itu, semakin besar *board size* menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan dan semakin panjang umur perusahaan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang besar telah mencapai tahapan *maturity*. *Firm life cycle* menjelaskan bahwa: perusahaan pada tahapan *maturity* ditandai dengan pertumbuhan yang rendah dan perusahaan menjadi *cash cow*; perusahaan pada tahapan *decline* ditandai dengan penurunan pertumbuhan, *financing cost* yang tinggi dan kompetisi yang intensif (Muhardi, 2008).

Penelitian DeAngelo *et al*. (2006) memberikan dukungan kuat terhadap penjelasan *firm life cycle* dengan membuktikan bahwa dividen cenderung dibayar oleh perusahaan yang berada pada tahapan *maturity* dimana kesempatan untuk berkembangan sudah rendah dan tingkat keuntungan yang diperoleh sudah tinggi. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan, dan yakin manajer tidak akan menginvestasikan dananya pada proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Beiner *et al*. (2003), Garg (2007) dan Nguyen dan Faff (2007) menegaskan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting.

Berdasarkan kajiaan teoretis dan hasil penelitian sebelumnya, dipahami bahwa perusahaan yang memiliki *board size* yang besar adalah perusahaan yang memiliki total aset (*firm size*) yang besar dan cenderung telah mencapai tahapan *maturity* dalam daur kehidupannya. Oleh karena itu, semakin besar *board size* maka semakin kecil pertumbuhan perusahaan tersebut. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_{1c} : *Boards size* berpengaruh negative terhadap *growth*.

Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Return on Equity*

Semakin besar kepemilikan saham institusional maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga menyebabkan rendahnya risiko kebangkrutan dari suatu perusahaan (Bhattacharya dan Graham, 2007). Kepemilikan saham institusional berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Secara teoretis semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kontrol terhadap perusahaan, profitabilitas dan kinerja perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar

bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan (Darwis, 2009).

Studi Lee (2008) di Korea Selatan membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan secara umum meningkat sebagaimana meningkatnya kepemilikan yang terkonsentrasi, tetapi pengaruh dari kepemilikan luar negeri dan kepemilikan institusional adalah tidak signifikan. Lee (2008) juga menemukan bahwa terdapat suatu hubungan berbentuk cembung (*hump-shaped*) antara konsentrasi kepemilikan dan kinerja perusahaan, yang mana puncak kinerja berada pada tingkat pertengahan (*intermediate levels*) dari konsentrasi kepemilikan. Namun demikian, hasil penelitian Darwis (2009) dan Abbasi, *et al.* (2012) menemukan bukti kuat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_2a : *Institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *return on equity*.

Pengaruh *Board Size* terhadap *Return on Equity*

Penelitian tentang pengaruh ukuran dewan komisaris (*board size*) terhadap profitabilitas perusahaan masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Gill dan Obradovich (2012) dan Velnampy (2013) membuktikan bahwa *board size* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi yang lebih baik, koordinasi yang lebih efektif, dan tindakan yang lebih cepat dalam mengatasi masalah. Namun demikian, penelitian Reddy *et al*. (2010) dan Bayrakdaroglu *et al*. (2012) menemukan bukti bahwa besar kecilnya jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Romano *et al*. (2012) mengungkapkan bahwa jumlah anggota dewan baik dewan direksi maupun dewan komisaris yang optimal adalah tergantung pada kondisi dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya Bennedsen *et al*. (2008) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berkaitan dengan berbagai karakteristik yang ada pada suatu perusahaan, diantaranya adalah ukuran dan umur perusahaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perusahaan dengan *board size* besar adalah perusahaan yang telah mencapai tahapan *maturity* dimana kesempatan untuk berkembangan rendah dan tingkat keuntungan yang diperoleh tinggi. Sejalan dengan penjelasan tersebut penelitian Jackling dan Johl (2009) membuktikan bahwa *board size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan hasil kajiaan teoretis, dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki *board size* besar adalah perusahaan-perusahaan yang telah mencapai tahapan *maturity*. DeAngelo *et al*. (2006) membuktikan bahwa perusahaan yang berada pada tahapan *maturity* memiliki kesempatan untuk berkembang rendah dan tingkat keuntungan yang diperoleh tinggi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2b} : *Boards size* berpengaruh positif terhadap *return on equity*.

Pengaruh *Growth* terhadap *Return on Equity*

Firm life cycle theory menjelaskan bahwa perusahaan pada tahap *growth* memiliki aset yang lebih banyak, pertumbuhan yang pesat, *earnings* dan arus kas dari operasional mulai tumbuh (Aharony *et al*., 2003). Selanjutnya, *earnings* tinggi yang diperoleh itu lebih banyak digunakan untuk ekspansi daripada untuk membayar dividen (Arif dan Akbar, 2013).

Penelitian Sriwardany (2006) membuktikan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, Haruman (2007) menjelaskan bahwa investasi yang tinggi merupakan *signal* pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. *Signal* tersebut ditangkap dan dianggap investor sebagai *good news* yang akan mempengaruhi persepsi investor ter-

hadap kinerja keuangan atau profitabilitas perusahaan, dan pada gilirannya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Sejalan dengan Haruman (2007) dan Kusumajaya (2011) yang membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_2c : *Growth* berpengaruh positif terhadap *return on equity*

Pengaruh *Board Independent*terhadap *Dividend Payout Ratio*

Brunarski *et al*. (2004) membuktikan bahwa perusahaan yang meningkatkan dividen reguler secara signifikan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi anggota independen yang besar dalam dewan komisarisnya. Temuan Brunarski *et al*. (2004) mendukung gagasan bahwa perusahaan yang memiliki *agency costs* besar, lebih memungkinkan untuk membayar dividen khusus. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki *agency costs* rendah lebih memungkinkan untuk meningkatkan dividen regularnya.

Kowalewski *et al*. (2007) berpendapat bahwa *dividend payouts* ditentukan oleh kekuatan *corporate governance*. Jiraporn dan Ning (2006) menemukan bukti yang konsisten dengan *substitution hypothesis*, dan berpendapat bahwa perusahaan dengan hak-hak pemegang saham yang lemah membutuhkan suatu reputasi, dan bukan mengeksploitasi pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan tersebut berpotensi untuk membayar dividen daripada yang dilakukan perusahaan dengan hak-hak pemegang saham yang kuat, dengan kata lain, dividen merupakan substitusi untuk hak-hak pemegang saham. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_3a : *Boards independent* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*.

Pengaruh *Growth* terhadap *Dividend Payout Ratio*

DeAngelo *et al*. (2006) menjelaskan bahwa perusahaan pada tahapan *growth* mempunyai kesempatan investasi yang tinggi, sehingga cenderung mempertahankan laba daripada membayarkannya dalam bentuk dividen. Bulan dan Yan (2009) membuktikan bahwa perusahaan yang tumbuh memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap pendanaan eksternal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pada tahap *maturity*. Daljono (2013) membuktikan di BEI bahwa *growth* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan dananya untuk investasi dan membayar *dividend* dengan jumlah yang relatif kecil (Arif dan Akbar, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perusahaan pada tahapan *growth* tentunya memerlukan banyak dana untuk membiayai tambahan investasinya. *Pecking order theory* sebagaimana dikutip Jahanzeb (2014) menjelaskan bahwa alternatif pertama sumber dana yang dapat dihimpun perusahaan untuk membiayai investasinya adalah dari *retained earnings*. Perusahaa masih memungkinkan untuk tetap mempertahankan pembayaran dividennya, namun tentunya akan terjadi pengurangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_{3b} : *Growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*.

Pengaruh *Board Size* terhadap *Tobin's Q*

Penelitian tentang pengaruh *boards size* terhadap *firm value* masih menunjukkan hasil yang beragam. Garg (2007) membuktikan bahwa (1) terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dan kinerja perusahaan, (2) ukuran dewan komisaris yang lebih kecil adalah lebih efisien, dan batas ukuran dewan ideal yang disarankan adalah 6 orang, (3) kinerja yang buruk sejalan dengan kenaikkan ukuran dewan. Nguyen dan Faff (2007) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil, lebih efektif dalam mewakili kepentingan pemegang saham, dan berhubungan dengan nilai *Tobin's Q* yang lebih tinggi.

Samad *et al*. (2008) membuktikan bahwa ukuran dan independensi anggota dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Namun demikian, Tang (2007) di *Tokyo Stock Exchange* menemukan bukti bahwa pengurangan *boards size* adalah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Belkhir (2009) membuktikan bahwa kenaikkan jumlah anggota dewan pada perusahaan-perusahaan perbankan tidak menurunkan capaian kinerjanya. Selanjutnya, penelitian Belkhir (2009) menemukan bukti yang cukup kuat adanya hubungan positif antara *board size* dan *performance*, yang diukur dengan *Tobin's Q* dan *return on assets*.

Besarnya ukuran dewan komisaris adalah identik dengan besarnya ukuran perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki asset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahapan *maturity*. Perusahaan pada tahapan tersebut memiliki keunggulan dalam stabilitas keuangan, prospek pembagian *dividend* yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya (Thanatawee, 2011; Fatemi dan Bildik, 2012; El Essa *et al*., 2012). Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_4a : *Boards size* berpengaruh positif terhadap *Tobin's Q*.

Pengaruh *Growth* terhadap *Tobin's Q*

Ekpetasi para investor terhadap perusahaan yang sedang dalam pertumbuhan adalah relatif tinggi, karena perusahaan pada tahapan pertumbuhan tersebut apabila mampu memanfaatkan peluang yang ada, maka akan masuk pada tahapan matang. Investor berharap perusahaan dengan tahapan pertumbuhan akan mampu menciptakan peluang pendapatan berupa *capital gain*, sedangkan bila perusahaan masuk pada tahapan matang maka ekspektasi para investor adalah berupa pembagian dividen dalam jumlah yang relatif besar (Linn dan Park, 2005). Studi Azhagaiah (2008) membuktikan bahwa kekayaan pemegang saham sangat dipengaruhi oleh ekspansi perusahaan, pertumbuhan penjualan, peningkatan profit margin, dan peningkatan pembayaran dividen.

Signaling theory menjelaskan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Sejalan dengan itu, jenis pengeluaran modal (tambahan investasi) memiliki pengaruh besar terhadap nilai perusahaan karena informasi tersebut membawa indikasi tentang pertumbuhan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang (Hasnawati, 2005). Peluang-peluang investasi sangat mempengaruhi nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham (Wahyudi dan Pawestri, 2005). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_{4b} : *Growth* berpengaruh positif terhadap*Tobin's Q*.

Pengaruh *Return on Equity* terhadap *Tobin's Q*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang diperuntukkan bagi investor dalam jangka panjang. *Return on equity* mempunyai arti yang sangat penting bagi pemegang saham, karena investor memperhitungkan keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono, 2010). Profitabilitas yang tinggi berkaitan dengan prospek perusahaan yang bagus, sehingga memicu investor untuk meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan tersebut. Permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan meningkat (Bhattacharya, 2009). Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan *return on equity* yang tinggi akan meningkatkan harga saham (Kusumawati *et al*., 2005). Sehingga, terjadi hubungan positif antara profitabilitas dan harga saham, dan peningkatan harga

saham akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Studi empiris tentang pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang belum sepakat. Penelitian Mardiyati *et al*., (2010) menemukan bukti bahwa *return on equity* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Gusaptono (2010) dan Arafat *et al*. (2012) dalam Widyanti (2014) yang penelitianya menemukan bukti bahwa *return on equity* justru tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut mengatakan bahwa profitabilitas tidak selalu menjadi penentu terciptanya nilai perusahaan, dan sangat dimungkinkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan antara *return on equity* dan nilai perusahaan. Sejalan dengan Mardiyati *et al*. (2010), hasil penelitian Kesuma (2009) dan Ayuningtias (2013) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_4c : *Return on equity* berpengaruh positif terhadap *Tobin's Q*.

Pengaruh *Dividend Payout Ratio* terhadap *Tobin's Q*

Kebijakan dividen tunai sangat berkaitan dengan pembentukan struktur modal, karena dividen merupakan bentuk pendistribusian laba dari perusahaan kepada pemegang saham (Basil, 2012). Bagi investor, dividen merupakan komponen *return* disamping *capital gain*. Bagi perusahaan, dividen adalah keputusan yang dapat mensejahterakan pemegang saham, dan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, *retained earnings* merupakan dana internal yang terbesar dan penting bagi pertumbuhan perusahaan. Survei Brav *et al*., (2005) menyimpulkan: 1) kebijakan dividen bersifat konservatif, perusahaan menolak untuk menurunkan pembayaran dividen, dan 2) para eksekutif tetap percaya bahwa kebijakan dividen memiliki kandungan informasi yang berguna bagi investor. Perusahaan yang memiliki laba bersih yang besar dan stabil, mampu mendapatkan arus kas yang lebih besar, oleh karena itu perusahaan dapat membayar dividen yang lebih tinggi (Mehta, 2012).

Brav *et al.* (2005) menjelaskan bahwa kebijakan dividen merupakan kebijakan yang mahal, karena perusahaan harus menyediakan dana yang besar. Hanya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah yang mampu untuk membagikan dividen. Banyak perusahaan mengkomunikasikan perusahaannya memiliki prospek yang cerah dan tidak menghadapi masalah keuangan. Namun, perusahaan yang kurang prospektif dan menghadapi masalah keuangan, sudah tentu akan kesulitan untuk membayar dividen. Hal ini akan berdampak pada perusahaan yang membagikan dividen, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan *signal* kepada pasar bahwa perusahaan memiliki prospek yang cerah dan mampu mempertahankan suatu tingkat pembayarn dividen yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.

Penelitian Li dan Zhao (2008), Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) dan Mardiyati *et al*. (2012) membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Cahyaningdyah dan Ressany (2012), Sukrini (2012), Mardiyati (2012), Jusriani dan Rahardjo (2013), Afsal dan Rohman (2012) dan Ayuningtyas dan Kurnia (2013) membuktikan bahwa *dividend payout ratio* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, preferensi terhadap dividen lebih kuat pada *emerging markets* dengan perlindungan yang lemah terhadap investor. Uwuigbe *et al*. (2012) di Bursa Efek Nigeria membuktikan ada hubungan positif antara *dividend payout ratio* dan nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI yang masuk kelompok *emerging markets*. Penelitian McKinsey dan Co (2002) dalam Pakaryaningsih (2006) menyatakan bahwa

Indonesia adalah negara yang paling buruk dalam penerapan *corporate governance*. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_{4d} : D*ividen payout ratio* berpengaruh positif terhadap *Tobin's Q*.

Berdasarkan pada kerangka konseptual yang dikemukakan pada Gambar 1 dan seluruh hipotesis yang telah dirumuskan, selanjutnya dapat dirancang suatu model penelitian empiris yang ditunjukkan pada Gambar 2.

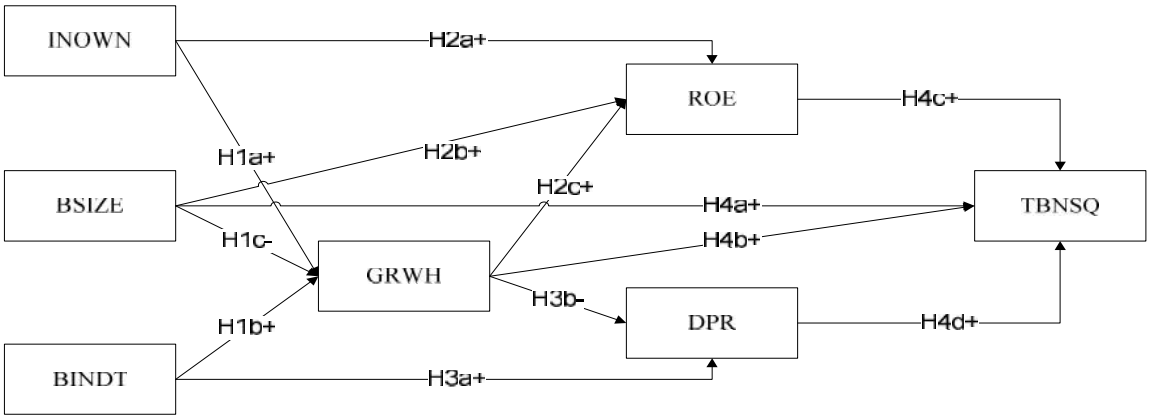

Sumber: Rerangka konseptual dan rumusan hipotesis

Gambar 2
Model Penelitian Empiris

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menurut tingkat eksplanasinya termasuk dalam penelitian kausalitas, karena dilakukan untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausalitas antar satu atau beberapa variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya (Sugiono, 2006). Masalah penelitian ini dirumuskan dalam model simultan, suatu model yang dibentuk melalui lebih dari satu variabel dependen yang dijelaskan oleh satu atau beberapa variabel independen. Sebuah variabel dependen pada saat yang sama akan berperan sebagai variabel independen bagi hubungan berjenjang lainnya (Ferdinand, 2011).

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode pengamatan antara tahun 2000-2012. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa perusahaan harus: (1) memiliki laporan keuangan lengkap selama periode yang diamati, (2) membagikan dividen tunai, (3) memiliki anggota independen dalam dewan komisarisnya.

Hasil pengumpulan data diperoleh sebanyak 565 pasang data perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Dalam upaya untuk memperoleh normalitas data secara *multivariate* maka sebanyak 275 pasang data perusahaan dihilangkan, sehingga jumlah data yang dianalisis adalah 290 pasang data perusahaan. Selanjutnya, untuk mendapatkan *goodness of fit* dari model penelitian empiris yang dianalisis, maka beberapa hubungan antara variabel proksi dihilangkan, yaitu: hubungan antara INOWN dan TBNSQ; hubungan antara BINDT dan TBNSQ; dan hubungan antara ROE dan DPR.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *path analysis* dengan bantuan alat analisis data paket program Amos. Penelitian ini mengacu pada *pooled regression model*, yaitu salah

satu model yang disarankan Gujarati (2009) dalam menangani *data panel*. Dengan demikian, model regresi ini mengasumsikan *intercept* dan koefisien regresi adalah konstans, baik untuk seluruh sampel perusahaan maupun untuk seluruh periode yang dianalisis.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

***Institutional Ownership* (INOWN)**

Institutional ownership sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) dan diprediksi berpengaruh terhadap variabel yang menjadi proksi pertumbuhan, kinerja keuangan, kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional diukur menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh saham yang beredar, sebagaimana telah digunakan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: Shen *et al*. (2006); Fernandez dan Anson (2006); Cornertt *et al*. (2006); Bhattacharya dan Graham (2007); Li dan Zhao (2008); Lee (2008); Darwis (2009) dan Abbasi, *et al.* (2012). Nilai variabel *Institutional Ownership* (INOWN), dihitung menggunakan rumus :

$$INOWN = \frac{\text{Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Seluruh Saham yang Beredar}}$$

***Boards Independent* (BDINDT)**

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2004) menjelaskan, komisaris independen adalah anggota dewan komi saris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Selain itu, terbebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris dari luar perusahaan atas seluruh ukuran anggota dewan komisaris, sebagaimana digunakan oleh beberapa penelitiian sebelumnya seperti; Prasanna (2006); Tang (2007), Garg (2007); Pathan *et al*. (2007); Javed dan Iqbal (2007). Nilai variabel *boards independent* (BDINDT) dihitung menggunakan rumus:

$$BDINDT = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

***Boards Size* (BSIZE)**

Beiner *et al.,* (2003) menyatakan, ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris berupa indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan, sebagaimana telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: Garg (2007), Nguyen dan Faff (2007), Bennedsen *et al*. (2008), Gill dan Obradovich (2012), dan Velnampy (2013).

Pertumbuhan (*Growth*)

Pertumbuhan perusahaan (*growth*) adalah perubahan berupa penurunan atau peningkatan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan aset dihitung sebagai persentase perubahan aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sebagaimana telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: Priadharma (2011), Kouser *et al*. (2012) dan Setiani (2013). Nilai variabel *growth* (GRWH) dihitung menggunakan rumus:

$$GRWH = \frac{\text{Total Aktiva (t)} - \text{Total Aktiva (t} - 1)}{\text{Total Aktiva (t} - 1)} X\ 100\%$$

***Return On Equity* (ROE)**

Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal internal perusahaan. Proksi dari profitabilitas untuk penelitian ini adalah *return on equity*, sebagaimana telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: Zhou dan Ruland (2006), Amidu (2007), Denis dan Osobov (2007); Al-Malkawi (2007), Vieira (2007), Samad *et al*. (2008), Bhattacharya (2009), Widyanti

(2014). Nilai variabel *return on equity* (ROE), dihitung menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{Earnings\ After\ Tax}{TotalEquity}$$

***Dividend Payout Ratio* (DPR)**

Kebijakan dividen merupakan kebijakan dalam memutuskan laba yang diperoleh perusahaan, apakah dibagikan kepada *shareholders* sebagai *dividend cash* atau diinvestasikan kembali sebagai *retained earnings* (Gitman dan Zutter, 2012). Kebija kan dividen optimal dicapai apabila kebijakan tersebut menciptakan kesinambungan antara *dividend* saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang yang memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston, 2010). Penelitian ini menggunakan proksi *dividend payout ratio* supaya lebih dapat menggambarkan perilaku manajerial, dengan melihat besarnya laba bersih yang dibagikan kepada *shareholders* sebagai deviden dan berapa yang disimpan di perusahaan.

Beberapa peneliti seperti; Jun *et al.* (2006), Cahyaningdyah dan Ressany (2012), Sukrini (2012), Mardiyati (2012), Jusriani dan Rahardjo (2013), dan Ayuningtyas dan Kurnia (2013) yang dalam penelitiannya menggunakan *dividend payout ratio* sebagai proksi kebijakan dividen. Nilai variabel *dividend payout ratio* (DPR), dihitung menggunakan rumus:

$$DPR = \frac{Dividend\ Per\ Share}{Earnigs\ Per\ Share}$$

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham di pasar modal. Banyak alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan proksi dari nilai perusahaan, diantaranya adalah *Tobin's Q*. Nilai variabel *Tobin's Q* ditentukan sebagai rasio nilai pasar aktiva atas nilai buku dari aktiva tersebut, sebagaimana telah digunakan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: Imam dan Malik (2007), Kowalewski *et al.* (2007), Fahlenbrach dan Stulz (2007), Javed dan Iqbal (2007), Dharmapala dan Khanna (2008). Nilai variabel *Tobin's Q Ratio* (TBNSQ), dihitung menggunakan rumus:

$$TBNSQ = (MVE + DEBT)/TA$$

dimana:

MVE = *Market Value ofEquity*
TA = *Total Asset*
DEBT = (CL- CA) + Invtories+*Non CurrentLiabilities*

Pengujian Goodness of Fit

Berdasarkan hasil *path analysis* dengan menggunakan paket Program Amos 2.2 diperoleh nilai *assessment of normality* sebesar 2,186. Hal ini menunjukkan bahwa data untuk seluruh variabel yang dianalisis pada model penelitian empiris telah memenuhi kriteria normalitas secara *multivariate*. Selanjutnya, ringkasan hasil pengujian *goodness of fit* untuk model penelitian empiris yang dianalisis, disajikan pada tabel 1.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa model penelitian empiris yang dibangun sangat layak digunakan untuk menguji seluruh hipotesis. Kondisi ini ditunjukkan dengan dipenuhinya hampir seluruh ketentuan *goodness of fit* dengan kriteria sangat layak. Gambar 3 menyajikan hasil *fath analysis* untuk model penelitian empiris yang dianalisis.

Tabel 2 menyajikan besarnya koefisien regresi, arah regresi, dan signifikansi pengaruh antar variabel yang dianalisis pada model penelitian empiris.

Tabel 1
Ringkasan Hasil Evaluasi Goodness of Fit

Goodness of fit Index	*Cut-off Value*	**Hasil Model**	**Keterangan**
Absolute Measures			
χ^2- Chi-Square	Diharapkan lebih kecil	8,736	Sangat layak, karena nilai χ^2 pada α 0,05 dan df. 6 = 12.592.
Probability	≥ 0,05	0,189	Sangat layak
CMIN/DF	≤ 2,00	1,456	Sangat layak
RMSEA	≤ 0,08	0,040	Sangat layak
GFI	≥ 0,90	0,992	Sangat layak
Incremental Fit Measures			
AGFI	≥ 0,90	0,961	Sangat layak
TLI	≥ 0,95	0,946	Cukup layak
CFI	≥ 0,95	0,960	Sangat layak
NFI	≥ 0,90	0,917	Sangat layak

Sumber: ***Output*** **program Amos pada** ***notes for model*** **dan** ***model fit***

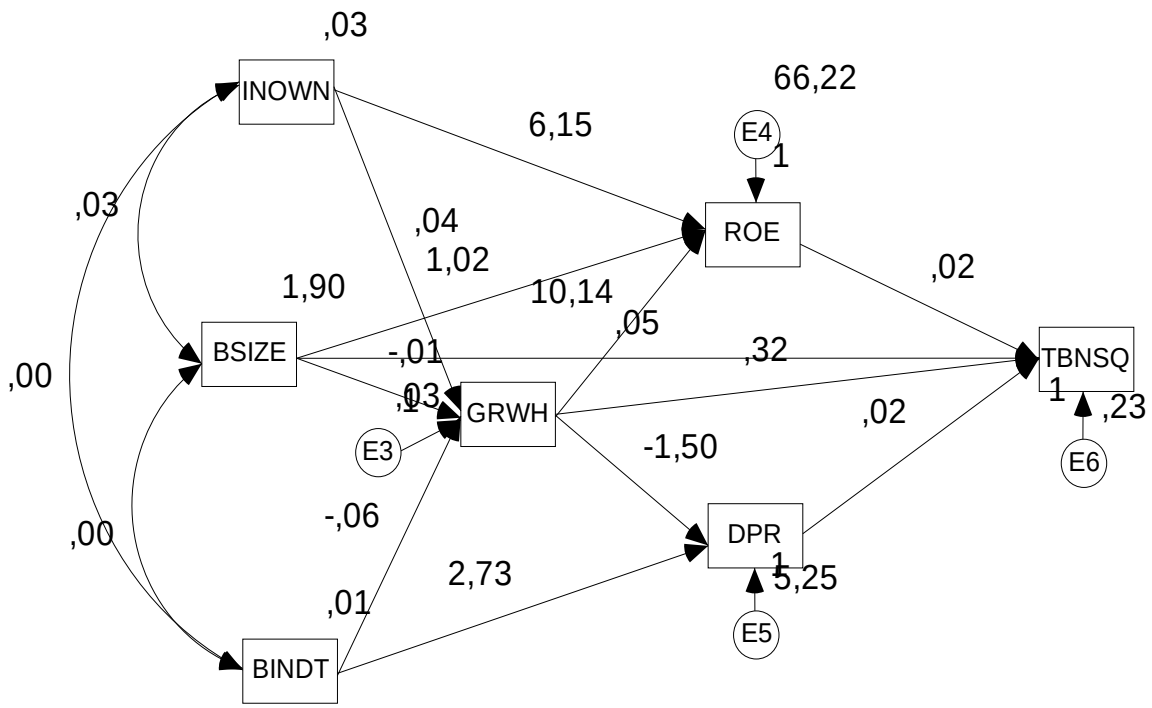

Sumber: Output iterasi pertama program Amos

Gambar 3
Hasil Fath Analysis

Tabel 2
Hubungan Kausalitas Antar Variabel

Variabel Dependen	Arah Regresi	Variabel Independen	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
GRWH	<---	BINDT	-0,058	0,118	-0,494	0,621	par_1
GRWH	<---	BSIZE	-0,015	0,007	-2,148	0,032	par_5
GRWH	<---	INOWN	0,042	0,057	0,737	0,461	par_6
ROE	<---	INOWN	6,150	2,898	2,122	0,034	par_7
ROE	<---	GRWH	10,138	3,023	3,354	0,000	par_8
ROE	<---	BSIZE	1,024	0,353	2,903	0,004	par_12
DPR	<---	BINDT	2,731	1,686	1,619	0,100	par_14
DPR	<---	GRWH	-1,500	0,845	-1,776	0,076	par_15
TBNSQ	<---	BSIZE	0,045	0,021	2,158	0,031	par_9
TBNSQ	<---	GRWH	0,320	0,182	1,757	0,079	par_10
TBNSQ	<---	ROE	0,021	0,003	6,159	0,000	par_11
TBNSQ	<---	DPR	0,025	0,012	2,036	0,042	par_13

Sumber: ***Output*** **program Amos pada** ***estimates***

Berdasarkan hasil *path analysis* pada gambar 3 dan *regression weights* pada tabel 2, selanjutnya dapat disusun empat persamaan struktural, sebagai berikut:

GRWH = 0,042 INOWN - 0,058 BINDT - 0,015 BSIZE + ε_1 ..... (1)
p (0,461) (0,621) (0,032)

ROE = 6,150 INOWN + 1,024 BSIZE + 10,138 GRWH + ε_2 ..... (2)
p (0,034) (0,004) (0,000)

DPR = 2,731 BINDT - 1,500 $GRWH_{it}$ + ε_3..... (3)
p (0,100) (0,076)

TBNSQ = 0,045 BSIZE + 0,320 GRWH + 0,021 ROE + 0,025 DPR+ ε_4..... (4)
p (0,031) (0,079) (0,000) (0,042)

Identifikasi dan Pengujian Variabel Mediasi

Berdasarkan model penelitian empiris pada gambar 2, teriidentifikasi potensi adanya beberapa variabel mediasi/intervening, yaitu: a) mediasi GRWH pada pengaruh INWN terhadap ROE; b) mediasi GRWH pada pengaruh BSIZE terhadap ROE; c) mediasi GRWH pada pengaruh BSIZE terhadap TBNSQ; d) mediasi GRWH pada pengaruh BINDT terhadap DPR; e) mediasi ROE pada pengaruh BSIZE terhadap TBNSQ; f) mediasi ROE pada pengaruh GRWH terhadap TBNSQ; dan g) mediasi DPR pada pengaruh GRWH terhadap TBNSQ. Selanjutnya mengacu Gambar 3 hasil *path analysis* dan Tabel 2 hubungan kausalitas antar variabel, diketahui pengaruh INWN terhadap GRWH dan pengaruh BINDT terhadap GRWH tidak signifikan. Sehingga, dapat dipastikan bahwa GRWH tidak memediasi baik untuk pengaruh INWN terhadap ROE, maupun untuk pengaruh BINDT terhadap DPR.

Pengujian signifikansi variabel mediasi dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagaimana dikemukakan Ghozali (2009). Langkah pertama adalah: Kesatu, mediasi GRWH pada pengaruh BSIZE terhadap ROE. Koefisien pengaruh langsung BSIZE terhadap ROE adalah 1,024, koefisien pengaruh BSIZE terhadap ROE melalui GRWH adalah -0,015 x 10,138 = -0,153. Koefisien pengaruh langsung BSIZE

terhadap ROE lebih besar dibandingkan melalui GRWH. Jadi GRWH tidak memediasi. Kedua, mediasi GRWH pada pengaruh BSIZE terhadap TBNSQ. Koefisien pengaruh langsung BSIZE terhadap TBNSQ adalah 0,045, koefisien pengaruh BSIZE terhadap TBNSQ melalui GRWH adalah -0,015 x 0,320 = -0,005. Koefisien pengaruh langsung BSIZE terhadap TBNSQ lebih besar dibandingkan melalui GRWH. Jadi GRWH tidak memediasi. Ketiga, mediasi ROE pada pengaruh BSIZE terhadap TBNSQ. Koefisien pengaruh langsung BSIZE terhadap TBNSQ adalah 0,045, koefisien pengaruh BSIZE terhadap TBNSQ melalui ROE adalah 1,024 x 0,021 = 0,022. Koefisien pengaruh langsung BSIZE terhadap TBNSQ lebih besar dibandingkan melalui ROE. Jadi ROE tidak memediasi. Keempat, mediasi ROE pada pengaruh GRWH terhadap TBNSQ. Koefisien pengaruh langsung GRWH terhadap TBNSQ adalah 0,320, koefisien pengaruh GRWH terhadap TBNSQ melalui ROE adalah 10,138 x 0,021 = 0,213. Koefisien pengaruh langsung GRWH terhadap TBNSQ lebih kecil dibandingkan melalui ROE. Jadi ROE memediasi. Kelima, mediasi DPR pada pengaruh GRWH terhadap TBNSQ. Koefisien pengaruh langsung GRWH terhadap TBNSQ adalah 0,320, koefisien pengaruh GRWH terhadap TBNSQ melalui DPR adalah -1,500 x 0,025 = -0,038. Koefisien pengaruh langsung GRWH terhadap TBNSQ lebih besar dibandingkan melalui DPR. Jadi DPR tidak memediasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ROE memediasi pengaruh GRWH terhadap TBNSQ. Selanjutnya untuk menguji signifikansi mediasi variabel ROE tersebut maka dilakukan Sobel *test*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a). Menghitung *standard error* koefisien *indirect effect* (S_{p2p3}), menggunakan rumus,

$$S_{p2p3} = \sqrt{p3^2 Sp_2^{\ 2} + p2^2 Sp_3^{\ 2} + Sp_2^{\ 2} Sp_3^{\ 2}}$$

Dimana:

S_{p2p3} = *Standard error* koefisien *indirect effect*

p2 = 10,138 (*unstandardized coefisients* pengaruh GRWH terhadap ROE).

p3 = 0,021 (*unstandardized coefisients* pengaruh ROE terhadap TBNSQ).

S_{p2} = 3,023 (*standard error unstandardized* pengaruh GRWH terhadap ROE).

S_{p3} = 0,003 (*standard errorunstandardized* pengaruh ROE terhadap TBNSQ).

Sehingga:

$$S_{p2p3} = \sqrt{(0{,}021)^2(3{,}023)^2 + (10{,}138)^2(0{,}003)^2 + (3{,}023)^2(0{,}003)^2}$$

$$S_{p2p3} = \sqrt{0{,}004 + 0{,}0009 + 0{,}000082} = 0{,}0705$$

b). Menghitung nilai t statistik, menggunakan rumus:

$$t = \frac{p2\ \ p3}{Sp2p3} = \frac{(10{,}138)(0{,}021)}{0{,}0705} = \frac{0{,}0867}{0{,}04015} = 3{,}0198$$

c). Bandingkan antara nilai t tabel (pada α = 0,05) yaitu 1,960 dan nilai t hitung yaitu 3,0198. Berarti bahwa nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. Dengan demikian, pengaruh GRWH terhadap TBNSQ dimediasi secara signifikan oleh ROE.

Deskripsi Hasil Analisis

Hasil pengujian pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksi *institutional ownership*, *board independent*, dan *board size* terhadap pertumbuhan yang diproksi *growth*, ditunjukkan pada persamaan (1) Hasil analisis menunjukkan *board size* berpengaruh negatif-signifikan terhadap *growth*. Pengaruh *institutional ownership* dan *board independent* terhadap *growth* terbukti tidak signifikan. Jadi, hipotesis 1c yang menyatakan *board size* berpengaruh positif terhadap *growth*, diterima. Hasil pengujian pengaruh *institutional ownership*, *board size* dan *growth* terhadap *return on equity*, ditunjukkan pada persamaan, (2) Hasil analisis menunjukkan *institutional ownership*, *board size* dan *growth* berpengaruh positif-

signifikan terhadap *return on equity*. Jadi, hipotesis 2a, 2b dan 2c yang menyatakan *institutional ownership* dan *board size* dan *growth* berpengaruh positif terhadap *return on equity*, diterima.

Hasil pengujian pengaruh *board size* dan *growth* terhadap *dividend payou ratio*, dapat dilihat pada persamaan, (3) Hasil analisis menunjukkan *board size* dan *growth* berpengaruh positif-signifikan terhadap *dividend payou ratio*. Jadi: Hipotesis 3a yang menyatakan bahwa *board size* berpengaruh positif terhadap *dividend payou ratio*; dan Hipotesis 3b yang menyatakan bahwa *growth* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang diproksi *dividend payou ratio*, dapat diterima. Hasil pengujian pengaruh *board size*, *growth*, *return on equity*, dan *dividend payou ratio* terhadap *Tobin's Q*, dapat dilihat pada persamaan, (4) Hasil analisis menunjukkan bahwa *board size*, *growth*, *return on equity*, dan *dividend payou ratio* berpengaruh positif-signifikan terhadap *Tobin's Q*. Jadi, hipotesis 4a, 4b, 4c dan 4d yang menyatakan bahwa *board size*, *growth*, *return on equity*, dan *dividend payou ratio* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diproksi *Tobin's Q*, diterima.

Hasil pengujian terhadap potensi variabel mediasi/intervening menunjukkan bahwa variabel *return on equity* (ROE) memediasi pengaruh *growth* (GRWH) terhadap *Tobin's Q* (TBNSQ). Selanjutnya hasil Sobel *test* membuktikan bahwa mediasi ROE pada pengaruh GRWH terhadap TBNSQ adalah signifikan. Dengan demikian, pengaruh *growth* terhadap *Tobin's Q* lebih kuat melalui *return on equity* dibandingkan pengaruh secara langsung.

Hasil analisis membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diproksi *board independent* dan *board size* mampu mengendalikan manajer untuk tidak melakukan ekspansi perusahaan melebihi ukuran optimal (*over investment*). Teori keagenan menjelaskan apabila tidak dimonitor dan tidak dikendalikan manajer cenderung mempunyai insentif melakukan ekspansi perusahaan pada proyek-proyek investasi yang memiliki *net present value* negatif. Hasil analisis menunjukkan hanya variabel *board size* yang berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan besarnya ukuran dewan komisaris identik dengan besarnya ukuran perusahaan, yang berarti perusahaan telah mencapai tahapan *maturity*. Secara alami, ketika perusahaan telah mencapai tahapan *maturity*, maka akan semakin banyak *free cash flow* yang dimiliki dan kesempatan untuk tumbuh relatif kecil. Kondisi ini akan mendorong meningkatnya masalah *free cash flow* (Michaely dan Robert, 2006). Dengan demikian, *board size* sebagai proksi dari mekanisme *corporate governance* telah menunjukkan peranannya dalam mengendalikan kecenderungan dari manajer untuk berperilaku oportunistik.

Terbuktinya hipotesis yang menyatakan *institutional ownership* dan *board size* berpengaruh positif terhadap *return on equity*, menunjukkan kedua variabel proksi mekanisme *corporate governance* tersebut mampu mendorong perusahaan untuk melakukan investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan. Argumen ini diperkuat dengan terbuktinya hipotesis yang menyatakan *growth* berpengaruh positif-signifikan terhadap *return on equity*. *Return on equity* yang dicapai perusahaan menunjukkan pengaruh positif-signifikan terhadap nilai perusahaan diproksi *Tobin's Q*. Kedua temuan ini memberikan dukungan kuat terhadap pernyataan bahwa *corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian yang mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang pada gilirannya dapat mewujudkan *shareholders value*.

Terbuktinya hipotesis yang menyatakan *board independent* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*, menunjukkan variabel proksi mekanisme *corporate governance* ini mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian

sebelumnya yang membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang meningkatkan dividen reguler secara signifikan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi anggota independen yang besar dalam dewan komisarisnya. Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat pernyataan Jiraporn dan Ning (2006) serta Kowalewski *et al*. (2007) yang berpendapat bahwa *dividend payout* sangat ditentukan oleh kekuatan mekanisme *corporate governance*.

Temuan berikutnya adalah terbuktinya hipotesis yang menyatakan *growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*. Temuan ini sejalan dengan Bulan dan Yan (2009) yang membuktikan bahwa perusahaan pada tahapan *growth* dengan kesempatan investasi yang tinggi, cenderung untuk mempertahankan laba daripada membayar dividen. Selanjutnya, penelitian ini membuktikan bahwa *dividend payout ratio* berpengaruh positif-signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksi *Tobin's Q*. Temuan ini mendukung pendapat Brav *et al*. (2005) dan Dong *et al*. (2005) yang menyatakan bahwa peningkatan pembayaran dividen sangat diapresiasi oleh para investor, karena hal ini memberikan *signal* positif terhadap kondisi perusahaan saat ini dan prospeknya ke depan.

Temuan terakhir penelitian ini adalah terbuktinya hipotesis yang menyatakan *board size* dan *growth* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tebuktinya kedua hipotesis ini menunjukkan: 1). Perusahaan besar dengan *board size* yang besar adalah perusahaan yang telah mencapai tahapan *maturity*. Deangelo *et al*., (2006) menyatakan bahwa dividen cenderung dibayar perusahaan yang berada pada tahapan *maturity*, dimana kesempatan untuk berkembang rendah dan tingkat keuntungan yang diperoleh tinggi. Selanjutnya, *return on equity* dan *dividend payout ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tobin's Q*; dan 2). Perusahaan pada tahapan *growth* mengindikasikan kekayaan yang dimiliki telah banyak, mempunyai peluang pertumbuhan yang pesat, *earnings* dan arus kas hasil operasi mulai tumbuh. Jadi, hal ini memberikan *signal* positif terhadap kondisi perusahaan saat ini dan prospeknya ke depan, sehingga diapresiasi *investors*, meskipun perusahaan mengurangi pembayaran dividennya. Hasil Sobel *test* membuktikan bahwa pengaruh *growth* terhadap *Tobin's Q* secara signifikan dimediasi *return on equity*. Temuan ini menunjukkan bahwa para investor lebih mengapresiasi profitabilitas (diproksi *return on equity*) yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pertumbuhan menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan, walaupun perusahaan pada tahapan *growth* mengurangi pembayaran dividennya. Namun demikian, sesungguhnya nilai perusahaan meningkat lebih disebabkan tingkat *return on equity* yang dicapai perusahaan. *Growth* yang berdampak positif terhadap *return on equity* dan *Tobin's Q* tentunya suatu pertumbuhan dari hasil tambahan investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan. Dan, bukan hasil ekspansi perusahaan pada proyek-proyek investasi yang memiliki *net present value* negatif, sebagaimana yang disinyalir *agency theory* atas perilaku oportunistik manajerial. Mekanisme *corporate governance* telah menunjukkan peranan yang kuat untuk mencegah pertumbuhan yang tidak produktif dari perusahaan yang telah mencapai tahap *maturity* dalam daur kehidupannya.

Peningkatan nilai perusahaan, selain dipengaruhi variabel *return on equity* dan *growth* juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pembayaran dividen bagi para pemegang saham. Variabel *institutional ownership* dan *board size* sebagai proksi mekanisme *corporate governance* sangat berperan mendorong perusahaan untuk meningkatkan *return on equity*. Sedangkan *board independent* mendorong perusahaan untuk meningkat-

kan pembayaran dividen. Pada penelitian ini variabel *board size* yang identik dengan besarnya ukuran perusahaan telah menunjukkan peranannya yang sangat penting. Variabel *board size* sangat berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas, pembayaran dividen, dan capaian nilai perusahaan.

Saran

Bagi manajer, ekspansi perusahaan hendaknya dilakukan secara cermat dan harus dijalankan hanya pada proyek-proyek investasi yang memiliki *net present value* positif. Dengan demikian, ekspansi tersebut akan menghasilkan *return on equity* tinggi yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini menyarankan bahwa perusahaan hendaknya tetap menjaga dan meningkatkan *dividend payout ratio*, karena hal ini akan direspon positif para investor di pasar modal. Terakhir, temuan penelitian ini menyarankan bahwa perusahaan hendaknya membangun *good corporate governance*. Hal ini dikarenakan variabel yang menjadi proksi mekanisme *corporate governance* telah menunjukkan peranannya terhadap kenaikkan nilai perusahaan.

Bagi investor, pilihan terbaik untuk melakukan investasi hendaknya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang *profitable*, tumbuh, dan mampu meningkatkan pembayaran dividennya. Kehadiran *institutional ownership* dan *board independent* dalam dewan komisaris perusahaan hendaknya menjadi pertimbangan. Investasi pada perusahaan besar dan sehat yang ditunjukkan dengan besarnya *board size* hendaknya menjadi prioritas untuk dipilih. Bagi investor yang membutuhkan dividen tunai hendaknya memilih perusahaan yang telah mencapai tahap *maturity*, dan yang tidak atau belum membutuhkan dividen tunai hendaknya memilih perusahaan yang berada pada tahapan *growth*.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dilakukan hanya pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur, dengan alasan untuk menghindari perbedaan karakteristik industri. Oleh karena itu, agar penelitian mendatang memberikan kekuatan generalisasi yang lebih baik dan lebih luas, diharapkan melibatkan seluruh sektor industri. Sedangkan, untuk menghindari perbedaan karakteristik industri, disarankan untuk menggunakan *fixed effect model* dan *time* atau *random effect model*. Penelitian mendatang hendaknya dapat menyertakan variabel struktur modal dan variabel-variabel ekonomi makro. Namun, hal ini tentunya akan sulit untuk mencapai *goodness of fit* dari model penelitian, karena hubungan antar variabel yang dianalisis menjadi jauh lebih rumit.

Sebagaimana telah dikemukakan penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya adalah: (1) Penelitian ini dilakukan hanya pada sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia, (2) Mekanisme *corporate governance* yang digunakan bersifat internal (3) Variabel-variabel yang digunakan untuk menditeksi variasi nilai perusahaan, hanya menggunakan faktor fundamental perusahaan (4) Penelitian ini hanya menggunakan *pool regression model* untuk menangani data panel yang dikumpulkan dan dianalisis; dan (5) Periode pengamatan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Abbasi, M., E. Kalantari, dan H. Abbasi. 2012. Impact of Corporate Governance Mechanism on Firm Value: Evidence From The FoodIndustry in Iran. *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 2(5): 4712-4721.

Afsal, A., dan A. Rohman. 2012. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 1(2): 09-28.

Aharony, J., H. Falk, dan N. Yehuda. 2003. Corporate Life Cycle and the VAlue Relevance of Cash Flow versus Accrual Financial lnformation. *Working Paper*, Tel Aviv University.

Al-Baidhani, A. M. 2014. Review of the Corporate Governance Bundle. *Corporate Ownership and Control* 11(4): 236-241.

Allen, F., dan D. Gale. 2001. Diversity of Opinion and Financing of New Technologies. *Journal of Financial Intermediation* 8(4): 68-89.

Al-Najjar, B. 2012. The inter-relationship between capital structure and dividend policy: empirical evidence from Jordanian data. *International Review of Applied Economics* 25(2): 209–224.

Alzomaia. F. T., A. Al-Khadhir. 2013. Determination of Dividend Policy: The Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Business and Social Science* 4(1): 181-192.

Amidu, M. 2007. How Does Dividend Policy Affect Performance of The Firm on Ghana Stock Exchange. *Investment Management and Financial Innovations* 4(2): 103-137.

Arie, A. dan A. Rohman. 2012. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Diponegoro* 1(2): 1-9.

Arif, A., dan Akbar, F. 2013. Determinants of Dividend Policy: A Sectoral Analysis from Pakistan. *Journal Business and Behavioral Sciences* 3(9): 16- 33.

Arshad, Z., A. Yasir, A. Maryam, dan M. Usman. 2013. Ownership structure and dividend policy. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business* 5(3): 27-43.

Ayuningtias, D. 2013. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan: Kebijakan Dividend dan Kesempatan Investasi Sebagai Variabel Antara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 1(1): 37-57.

Azhagaiah, R. 2008. The Impact of Dividend Policy on Shareholders' Wealth. *International Research Journal of Finance and Economics* 20(3): 1450-2887.

Bayrakdaroglu, A., Ersoy, E., and Citak, L. 2012. Is There a Relationship between Corporate Governance and Value-Based Financial Performance Measures? A Study of Turkey as an Emerging Market. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies* 41(2): 224–239.

Beiner. S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann. 2003. Is Board zise An Independent Corporate Governance Mechanism? *http://www.wwz.unibaz.ch /publications/2003/06.03.* Diakses tanggal 11 April 2014.

Belkhir, M. 2009. Board of Director's Size and Performance in the Banking Industry. *International Journal of Managerial Finance* 5(2): 201-221.

Bennedsen, M., H. Kongsted dan K. Nielson. 2008. The casual effect of board size in the performance of small and medium-sized firms. *Journal of Banking and Finance* 32(4): 1098-1109.

Bernadi, K. J. 2007. Analisis Pengaruh Cash flow dan Kebijakan Pecking Order Terhadap Leverage dan Investasi serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Sektor Manufaktur). *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang.

Bhattacharya, S. 2009. Imperfect Information, Devident Policy, and the Bird in the Hand Fallacy. *The Bell Journal of Economics* 10(1): 259-270.

Bonazzi, L., dan S. N. Islam. 2007. Agency Theory and Corporate Governance: A study of effectiveness of Board through their monitoring of the CEO. *Journal in Modeling in Management* 2(7): 7-23.

Brav, A., J. R. Graham, C. R. Harvey, dan R. Michaely. 2005. Payout Policy in the 21st Century. *Journal of Financial Economics* 77(3): 483-527.

Brigham, E. dan J. Housto. 2010. *Essentials of Financial Management. 2nd ed.* Nelson Education, Ltd.

Brigham, E. F. dan L. C. Gapenski. 2006. *Intermediate Financial Management*. 7th edition. SeaHarbor Drive: The Dryden Press.

Brunarski, K., Y. Harman, dan J. Kehr. 2004. Agency Costs and the Dividend Decision. *Corporate Ownership and Control* 1(3): 44-60.

Bulan, L. T dan Z. Yan. 2009. *The Pecking Order Theory and the Firm's Life Cycle*. Forthcoming, Banking and Finance Letters. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1347430 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1347430. Diakses tanggal 10 Apri 2015.

Cahyaningdyah, D. dan Y. D. Ressanny. 2012. Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Dinamika Manajemen Universits Negeri Semarang* 3(1): 20-28.

Chen, C.R., W. Guo, dan V. Mande. 2006. Corporate Value, Manajerial Stock-holdings and Invesment of Japanese Firms. *Journal of International Financial Management and Accounting* 17(1): 29-51.

Cornett, M. M., McNutt J. J. dan Tehranian H. 2009. Corporate Governance and Earnings Management at Large U.S. Banks Holding Companies. *Journal of Corporate Finance* 15(1): 412-430.

Daljono. H. B. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Divi-den pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010. *Jurnal Akuntansi* 2(1): 1-13.

Darmono, P. C., dan Y. Bachtiar. 2015. Perspektif Keputusan Investasi Dan Kebijakan Dividen Terhadap Biaya Keagenan, Struktur Modal Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Socioscientia* 7(1): 123-130.

Darwis. 2009. Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 13(3): 418-430.

DeAngelo, H., dan L. DeAngelo. 2006. The Irrelevance of the Mm Dividend Irrelevance Theorem. *Journal of Financial Economics* 79(1): 293-315.

Denis, D. J., dan E. Osobov. 2007. Why Do Firm's Pay Dividends? International Evidence on The Determinants of Dividend Policy. Electronic copy availableat: *http://ssrn.com/abstract=887643*. Diakses 7 Maret 2015.

Dharmapala, D. dan V. Khanna. 2008. Corporate Governance, Enforcement, And Firm Value: Evidence From India. *Working Paper Series*, No. 08-005, Univercity of MichiganLaw and Economics, 3rd Annual Conference on Empirical Legal Studies Papers.

Dong, M., C. Robinson dan C. Veld. 2005. Why Individual Investors want Dividends. *Journal of Corporate Finance* 12(2): 121-158.

Dowd, K. 2008. Moral Hazard and Financial Crisis. *Cato Journal* 29(1): Encylopedia of Business, 2nd ed, Agency Theory.

El Essa, M. S., M. M. Hameedat, J. A. Altaraireh, dan M.A. Nofal. 2012. A Worthy Factors Affercting Dividends Policy Decisions An Empirical Study On Indutrial Corporation Listed In Amman Stock Exchange. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 4(5): 614-622.

Fachrudin, K. A. 2011. Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency Cost terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 13(1): 37-46.

Fahlenbrach, R. dan R. M. Stulz. 2007. Managerial Ownership Dynamics and Firm Value. *Journal of Financial Economics* (JFE), Forthcoming http://ssrn.com/abstract=992919. Diakses tanggal 7 Maret 2015.

Fatemi, A. dan R. Bildik. 2013. Yes, Dividends are Disappearing: World-wide Evidence. *Journal of Banking dan Finance* 36(3): 662–677.

Ferdinand, A. 2011. *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen.* Seri Pustaka Kunci No. 06 Program Magister Manajemen Universitas Dipo-negoro.

Fernandez, C. and S. G. Anson. 2006. Does Ownership Structure Affect Firm Per-formance? Evidence From A Conti-nental-Type Governance System.

Corporate Ownership of Control 3(2): 27-45.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2008. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. (Online) http://www.fcgi.or.id/books/indo_gov/flash/ diakses tanggal 12 April 2015.

Garg, A. K. 2007. Influence of Board Size and Independence on Firm Performance: A Study of Indian Companies. *Vikalpa: The Journal for Decision Makers* 32(2): 39-60.

Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat. Penerbit Universitas Diponegoro.

Gill, A. dan O. John. 2012. The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms. *International Research Journal of Finance and Economics* 91(2): 46-56.

Gitman, L. J., dan C. J. Zutter. 2012, *Principles of Managerial Finance*. 13th ed. Pearson Education, Inc. Boston.

Gujarati, I, dan N. Damodar. 2009. *Basic Econometrics*. Fifth Edition, Mc Graw-Hill, Inc.

Gusaptono, R. H. 2010. Faktor-Faktor yang Mendorong Penciptaan Nilai Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Buletin Ekonomi* 8(2): 70-170.

Haruman, T. 2007. Pengaruh Keputusan Keuangan dan Kepemilikan Instutisional Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEJ). *The First PPM National Conference on Management Reseach.* Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Universitas Widyatama Bandung.

Hasnawati, S. 2005. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Publik Di Bursa Efek Jakarta. D*isertasi*. Universitas Padjadjaran (UNPAD). Bandung.

IICG. 2007. *The Indonesian Institute for Corporate Governance*. http://iicg.org/index.php. Diakses tanggal 6 Februari 2015.

Imam, M. O. dan M. Malik. 2007. Firm Performance and Corporate Governance Through Ownership Structure: Evidence from Bangladesh Stock Market. *International Review of Business Research Papers* 3(4): 88-110.

Hermuningsih, S. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Sruktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 23(2): 128-148.

Jackling, B. dan S. Johl, S. 2009. Board Structure and Firm Performance: Evidence from India's Top Companies. *Corporate Governance: An International Review 17*(4): 492-509.

Jahanzeb, A., S. U. Rehman, N. H. Bajuri, M. Karami, dan A. Ahmadimousaabad. 2014. Trade-Off Theory, Pecking Order Theory and Market Timing Theory: A Comprehensive Review of Capital Structure Theories. *International Journal of Management and Commerce Innovations* 1(1): 11-18.

Javed, A. Y., dan R. Iqbal. 2007. Relationship between Corporate Governance Indicators and Firm Value: A Case Study of Karachi Stock Exchange. *MPRA Paper*. No. 2225, http://mpra. ub.unimuenchen.de/2225. Diakses tanggal 2 Maret 2015.

Jiraporn, P. dan Y. Ning. 2006. Dividend policy, shareholder rights, and corporate governance. *Journal of Applied Finance*. Fall/Winter, 24-36.

Jun, A., D. R. Gallagher dan G. H. Partington. 2006. An Examination of Institusional Dividend Clienteles: Evidence from Australian Institutional Portfolio Holdings. *JEL. Classification*: G35. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract = 972413. Diakses tanggal 7 Februari 2010.

Jusriani, I. K. dan S. N. Rahardjo. 2013. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Diponegoro* 2(2): 1-10.

Kowalewski, O., I. Stetsyuk, dan O. Talavera. 2007. Corporate Governance and Dividend Policy in Poland. *Electronic copy available at:* http://ssrn.com/abstract=986111. Diakses tanggal 3 Februari 2012.

Kesuma, A. 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal serta Pengaruhnya terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate yang *Go Public* di BEI. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 11(1): 38-45.

KNKG. 2012. *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.

Kouser, R., T. Bano, M. Azeem, dan H. Masood. 2012. Inter realitionship between Profitabilityy, Growth, and Size: A Case of Non-Financial Companies from Pakistan. *Journal Commer. Soc. Sci* 6(2): 405-419.

Kusumajaya, D. K. O. 2011. Pengaruh Struktur Modal and Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.

Kusumawati, D. Novi dan B. Riyanto. 2005. Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.

Lee, S. 2008. Ownership Structure and Financial Performance: Evidence from Panel Data of South Korea. *Working Paper*, No: 2008-17. University of Utah.

Li, K. dan X. Zhao. 2008. Asymmetric Information and Dividend Policy. *Journal of Financial Management*. Winter: 673-694.

Linn, S. C., dan D. Park. 2005. Outside Director Compensation Policy and the Investment Opportunity Set. *Journal of Corporate Finance* 11(2): 680-715.

Mardiyati, U., G. N. Ahmad dan R. Putri. 2012. Pengaruh Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Priode 2005-2010. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 3(1): 1-17.

Marpaung, E. I., dan B. Hadianto. 2009. Pengaruh Profitabilitas dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen: Studi Empirik Pada Emiten Pembentuk Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 1(1): 70-84.

Mehta, A. 2012. An Emperical Analysis of Determinants of Dividend Policy-Evidence from the UAE Companies. *Global Review of Accounting and Finance* 3(1):18-31.

Memon, F., N. A. Bhutto, dan G. Abbas. 2012. Capital Structure and Firm Performance: A Case of Textile Sector of Pakistan. *Asian Journal of Business and Management Science* 1(9): 09-15.

Michaely, R., dan M. R. Roberts. 2006. Free Cash Flow, Signaling, and smoothing: Lesson from Dividend Policy of Public and Private Firms, *Working Paper*, Cornell University.

Murhadi, W. R. 2008. Studi Kebijakan Dividen: Anteseden dan Dampaknya terhadap Harga Saham. *Journal Manajemen dan Kewirausahaan* 10(1): 1-17.

Naceur, S. B., M. Goaied, dan A. Belanes. 2007. On The Determinants and Dynamics of Dividend Policy. *International Review of Finance* 6(2): 1-23.

Nguyen, H., dan R.Faff. 2006. Impact of Board Size and Board Diversity on Firm Value: Australian Evidence, *Corporate Ownership and Control* 4(2): 24–32.

Organization For Economic Corporation and Development (OECD). 2004. *Corporate Governance: A Survey of OECD Countries*. OECD Publication Service, Frace.

Pakaryaningsih, E., dan Y. S. Wibowo. 2006. Pengaruh Board System dan Board

Composition terhadap Kinerja Perusahaan: Tinjauan terhadap Konsep Agency Theory dan Stewardship Theory dalam Corporate Governance. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 1(1): 19-27.

Pathan, S., M. Skully, dan J. Wickramanayake. 2007. Board Size, Independence and Performance: An Analysis of Thai Banks. *Asia-Pacific Financial Markets* 14(3): 211-227.

Pradana, S. W. L. dan I P. S. Sanjaya. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, dan Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Universitas Mataram. Lombok.

Prasanna, P. K. 2006. Corporate Governance - Independent Directors and Financial Performance: An Empirical Analysis. *Working Paper*, Indian Institute of Capital Markets 9th Capital Markets Conference Paper. Diakses tanggal 10 April 2015.

Priadharma, I G. B. 2011. Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Thesis*. Universitas Udayana. Denpasar Bali

Puspita, F. 2009. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Dividend Payout Ratio. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Qureshi, M. A. 2006. System dynamics modelling of firm value. *Journal of Modelling in Management* 2(1): 24-39.

Reddy, K., S. Locke, dan Scrimgeour, F. 2010. The efficacy of principle-based corporate governance practices and firm financial performance: An empirical investigation. *International Journal of Managerial Finance* 6(3): 190-219.

Romano, G., P. Ferretti, dan A. Rigolini. 2012. Corporate Governance and Performance in Italian Banking Groups. *Paper to be presented at the International conference*. Corporate governance & regulation: outlining new horizons for theory and practice. Pisa, Italy: pp. 1-35.

Sambharakreshna, Y. 2010. Pengaruh size of firm, growth dan profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen bisnis dan sektor public* 6(2): 197-216.

Sam'ani. 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Tesis*. Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang.

Sanjaya, I P. B. 2009. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Kajian Akuntansi* 4(1): 15-24.

Sartono. R. A. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4.* BPFE-Yogyakarta: DI Yogyakarta.

Setiani, R. 2013. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Alumni Fakultas Ekonomi UNP* 2(1): 1-17.

Shah, S. Z. A., S. A. Butt, dan A. Hasan. 2009. Board Composition and Earning Managementan Empirical Evidence From Pakistani Listed Companies. *European Journal of Scientific Research* 26(4): 624-638.

Shen, M. J., C. C. Hsu, dan M. C. C. 2006. A Study of Ownership Structures and Firm Values Under Corporate Governance - The Case of Listed and OTC Companies in Taiwan's Finance Industry. *The Journal of American Academy of Business* 8(1): 184-191.

Sofyaningsih, S. dan P. Hardiningsih. 2011. Struktur Kepemilikan, Kebijakan Deviden, Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3(1): 68-87.

Sriwardany. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Struktur Modal dan Dampaknya terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Tbk. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU).Medan.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis,* Edisi Kesembilan. Penerbit ALFABETA. Bandung.

Sujoko dan U. Subiantoro. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern dan Faktor Ekstern terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 9(1): 41-48.

Sukirni, D. 2012. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Analisis Akuntansi* 2(1): 1-12.

Sulistiyowati, I., R. Anggraini, dan T. H. Utaminingtyas. 2010. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Growth Terhadap Kebijakan Dividen dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Purwokerto.

Tang, L. 2007. A Simultaneous Approach to Analyzing the Relation Between Board Structure, Corporate Governance Mechanisms and Performance of Japanese Firms (1989-2001). *Thesis*. University of Saskatchewan Saskatoon. Canada.

Thanatawee, Y. 2011. Life-Cycle Theory and Free Cash Flow Hyphotesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand. *International Journal of Financial Research* 2(2): 52-60.

Uwuigbe, U., O. Olowe, and A. Godswill. 2012. An Assessment of the Determinants of Share Price in Nigeria: A Study of Selected Listed Firms. *Acta Universitatis Danubius* 8(6): 78-88.

Velnampy, T. 2013. Corporate Governance and Firm Performance: A Study of Sri Lankan Manufacturing Companies. *Journal of Economics and Sustainable Development* 4(3): 228-235.

Wahyudi, U. dan P. H. Pawestri. 2005. Implikasi Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.

Wardjono. 2010. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi *Price to Book Value* dan Implikasinya pada *Return* Saham. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* 2(1): 83-96.

Widyanti, R. A. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Dividend Payot Ratio, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur. *Jurnal Ilmu Manajemen* 2(3): 1048-1057.